



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

L K P J

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN**

**GUBERNUR
PAPUA
TAHUN 2023**



BAPPERIDA PROVINSI PAPUA

**Kantor Gubernur Papua
Jl. Soa Siu Dok II Kota Jayapura
Tahun 2024**



Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE, MM
Pj. GUBERNUR PAPUA



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenaanannya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Papua tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat disusun. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Ayat (2) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Papua merupakan amanat dari Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan kepada wakil rakyat selama satu tahun anggaran yaitu Tahun 2023. Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penyusunan LKPJ ini dibuat secara sederhana, namun komprehensif dan bersifat melaporkan evaluasi kinerja Kepala Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran untuk masing-masing sektor pembangunan, dengan analisis perbandingan antara rencana dan realisasi program pembangunan, selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja masing- masing sektor yang dilengkapi dan didukung dengan data dan perkembangan yang dicapai.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan yang terhormat, di samping sebagai tugas dan kewajiban menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, juga mencerminkan tekad, semangat dan wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah, yaitu Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah kepada seluruh masyarakat Provinsi Papua melalui DPRP atas pelaksanaan pembangunan di Daerah ini. Kami menyadari



seungguhnya bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Papua masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Untuk itu, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang konstruktif dari DPRP sebagai masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kerjasama yang baik dari semua pihak termasuk Jajaran Pemerintah serta masyarakat Provinsi Papua yang telah memberikan dukungannya dalam rangka ikut menyukseskan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Provinsi Papua. Semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan sebagai tolak ukur dalam memantapkan strategi kebijaksanaan Pembangunan Daerah pada masa yang akan datang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua.

Jayapura, Mei 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE, MM



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
LAMPIRAN 1	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	5
1.4. Data Umum Daerah	24
1.4.1. Aspek Geografi dan Demografi	24
1.4.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil	38
1.5. Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	41
1.5.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	41
1. Pendapatan	42
2. Belanja	47
3. Surplus/Defisit	48
4. Pembiayaan Neto	48
5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	50
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2023	52
2.1. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan	54
2.2. Gambaran Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah	60
2.3. Prioritas dan Sasaran Perubahan RKPd Tahun 2023	67
2.4. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah	73



BAB III	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	75
3.1.	Capaian Indikator Makro Provinsi Ppaua Tahun 2023	75
3.2.	Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	82
	I. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	118
	II. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan	156
	III. Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	189
	IV. Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	206
	V. Penyelenggaraan Unsur Pengawas.....	230
	VI. Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum	233
3.3.	Capaian Kinerja Keluaran	237
3.4.	Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dan Target Kinerja	237
3.5.	Kebijakan Strategi yang ditetapkan	238
BAB IV	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	250
A.	Bidang Pertanian.....	251
B.	Bidang Kelautan dan Perikanan.....	308
BAB V	PENUTUP	314



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kondisi Wilayah Administratif Provinsi Papua Tahun 2022	29
Tabel 1.2. Luas wilayah Berdasarkan Ketinggian di Provinsi Papua	30
Tabel 1.3. Kelerengan Provinsi Papua	32
Tabel 1.4. Curah Hujan di Provinsi Papua	35
Tabel 1.5. Jumlah Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2016-2022.....	38
Tabel 1.6. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Provinsi Papua Tahun 2022.....	38
Tabel 1.7. Jumlah Penduduk Orang Asli Papua (OAP) Tahun 2022	39
Tabel 1.8. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Papua	39
Tabel 1.9. Kepadatan Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2022	40
Tabel 1.10. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin Provinsi Papua Tahun 2023.....	41
Tabel 1.11. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2023	42
Tabel 1.12. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, Desember 2023 Tahun 2023.....	43
Tabel 1.13. Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023	45



Tabel 1.14. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023	46
Tabel 1.15. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023	47
Tabel 1.16 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023	47
Tabel 1.17 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023	48
Tabel 1.18 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023	49
Tabel 1.19 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023	49
Tabel 1.20 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah-LRA Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023	50
Tabel 1.21 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023	51
Tabel 1.22 Surplus/ (Defisit) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	51
Tabel 1.23 Pembiayaan Neto Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dan 2022	52
Tabel 1.24 Anggaran dan Realisasi Penerimaan dan Pembiayaan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Tahun Anggaran 2022.....	52
Tabel 1.25 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Tahun Anggaran 2022.....	53



Tabel 1.26 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Tahun Anggaran 2022	54
Tabel 2.1 Target dan Realisasi Indikator Makro Triwulan II Tahun 2022	58
Tabel 2.2 Realisasi Anggaran Organisasi Perangkat daerah Triwulan II Tahun 2023	60
Tabel 2.3 Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023	68
Tabel 2.4 Sandingan Isu-isu Strategis Nasional, RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 dan RKPD 2023	72
Tabel 3.1 Indikator Makro Provinsi Papua Tahun 2023	79
Tabel 3.2 Presentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Terhadap Jumlah Penduduk di Provinsi Papua	82
Tabel 3.3 Daerah Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan di Provinsi Papua	83
Tabel 3.4 Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Papua Pada Triwulan I s/d Triwulan III Tahun 2023	84
Tabel 3.5 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha dan Harga Konstan Provinsi Papua pada Triwulan I s/d Triwulan III Tahun 2023	73
Tabel 3.6 Rekap Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan APBD Provinsi Papua Belanja Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023	88
Tabel 4.1 Realisasi Keuangan dan Fisik Pelaksanaan Program dan Kegiatan dari 6 (enam) Satuan Kerja	316



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Grand Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023	15
Gambar 1.2 Focus Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023.	20
Gambar 1.3. Peta Batas Administrasi Provinsi Papua	28
Gambar 1.4. Peta Topografi Provinsi Papua.....	31
Gambar 1.5. Persentase Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua (persen), 2020	42
Gambar 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Triwulan I Tahun 2023	66
Gambar 2.2. Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2018-2023	71
Gambar 3.1. Pembangunan manusia menurut kabupaten/kota di provinsi papua 2010-2022....	81



DAFTAR LAMPIRAN

**TABEL MATRIKS CAPAIAN/ REALISASI PROGRAM/KEGIATAN/
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2023**



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkenaan dengan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Sebagaimana diatur pada Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, bahwa ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud berkenaan dengan capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan; kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; serta tindak lanjut Rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya. Adapun hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan berupa capaian tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari tingkat pemerintahan di atasnya serta capaian tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya.

Sebagai bagian dari siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, penyusunan LKPJ merujuk pada kebijakan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang telah ditetapkan. Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 melalui Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 yang pada saat ini pelaksanaannya telah memasuki tahun keempat sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 Tahun 2022 tentang



Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 dan telah diubah melalui Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2023. Selain itu, penyusunan LKPJ didasarkan pula pada kebijakan yang tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Kebijakan- kebijakan yang dipedomani sebagaimana dimaksud, pada hakikatnya merupakan hasil kesepakatan bersama antara Gubernur Papua dan DPRD Provinsi Papua.

LKPJ akan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk selanjutnya dilakukan pembahasan oleh DPRD dan diterbitkan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rekomendasi DPRD tersebut, ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah sebagai bahan perencanaan dan penganggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya serta dalam penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta kebijakan strategis lainnya.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini dimaknai sebagai akumulasi target-target dan capaian kinerja yang langsung mengarah pada pencapaian sasaran program serta misi Pemerintah Daerah Provinsi Papua yang secara jelas telah tergambarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2019-2023.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Gubernur Papua Akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956 Tentang Otonomi Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Irian Barat;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas



- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19)/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560;



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau;
20. Peraturan Gubernur Papua Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2022 Nomor 55);
21. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023;
22. Peraturan Gubernur Papua Nomor 51 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2023.

1.3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

1.3.1. Visi

Dalam mencermati tantangan pembangunan masa depan, maka Visi Provinsi Papua tahun 2019-2023, adalah **"PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN"** Penjelasan Visi Pembangunan Jangka Menengah diatas sebagai berikut :

1.3.1.1. PAPUA BANGKIT

Papua Bangkit berarti terwujudnya Masyarakat Papua yang berkemauan dan bertekad tinggi sebagai kesadaran kontemplatif kolektif untuk melepaskan diri dari label ketertinggalan dan kemiskinan untuk mencapai derajat kualitas hidup yang setinggi-tingginya, sehingga mampu berdiri tegak dengan harkat dan martabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menghilangkan identitas diri dan kekhususan ke-Papua-an. Kebangkitan ini terjadi di level individu, keluarga, komunitas, maupun regional. Identitas diri orang Papua diakui dan dihormati dalam berbagai level dan bidang pembangunan. Dimana "Orang Papua" mampu mengaktualisasikan diri dan mengambil peran di berbagai



sektor pembangunan. Papua Bangkit dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) semakin baik.

1.3.1.2. PAPUA MANDIRI

Papua Mandiri berarti terwujudnya masyarakat Papua mampu mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan kemajuan ekonomi. Dengan didukung generasi baru Papua yang memiliki jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) serta ekonomi kampung tumbuh dan berkembang. Perwujudan Papua Mandiri dilakukan dengan mendorong tumbuhnya berbagai sektor unggulan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sektor kehutanan dan pariwisata harus dikembangkan sehingga memberi nilai tambah dalam pembangunan dan memastikan tersedianya lapangan kerja, serta didukung pengembangan Industri pengolahan yang berbasis keunggulan potensi daerah. Papua Mandiri dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Papua di berbagai sektor unggulan yang semakin membaik.

1.3.1.3. PAPUA SEJAHTERA

Secara sederhana, sejahtera dipahami sebagai tidak kekurangan sesuatu apapun, perasaan aman Sentosa, Makmur dan selamat atau terlepas dari segala macam gangguan. Dengan pendekatan yang lain, sejahtera dapat dikaitkan dengan meningkatnya kualitas hidup yang setinggi-tingginya yang tercermin dari kenyamanan masyarakat Papua dalam menjalankan kehidupan dan menikmati hasil pembangunan. Dalam hal ini, kesejahteraan tidak hanya merupakan konsep lahiriah, tapi juga menjangkau segi batiniah. Kesejahteraan juga bermakna kemampuan sumber daya alam Papua yang kaya dapat memberikan manfaat secara ekonomi, social dan lingkungan. Dalam konteks makro, pembangunan daerah juga dimaknai sebagai upaya mencapai kesejahteraan social. Kesejahteraan social merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan social material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Papua untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan social yang sebaik- baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia.



1.3.1.4. PAPUA BERKEADILAN

Papua Berkeadilan berarti masyarakat Papua tanpa terkecuali dapat memenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, ekonomi dan budaya terutama pangan, ndang dan papan secara merata, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada Pemerintah sehingga menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan aju serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya. Sikap mental dan perilaku adil, menjunjung tinggi kesetaraan dan kebersamaan, didukung moral dan budaya gotong royong, saling menghormati dan menunjung tinggi nilai luhur kemanusiaan, mempertahankan eksistensi dan jati diri orang asli Papua sebagai kebanggaan sudah terbentuk dan tertanam di dalam setiap individu orang asli Papua. Pembangunan yang adil dan merata merupakan partisipasi aktif adat dan agama serta seluruh komponen masyarakat, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat khususnya Orang Asli Papua.

1.3.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah dijelaskan diatas akan ditempuh melalui 5 (lima) Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1.3.2.1. Memantapkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Memantapkan kualitas dan daya saing SDM Papua dilakukan untuk mendukung dan mewujudkan kebangkitan dan kemandirian. Orang Papua yang mandiri memiliki kemauan, kreatif dan inovatif sebagai pelaku pembangunan bagi kemajuan daerah untuk mencapai kualitas hidup manusia serta memungkinkan setiap orang dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kualitas manusia yang bermutu tinggi ditandai dengan meningkatnya IPM yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi lokal Papua dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Program pembangunan dalam peningkatan kualitas dan daya saing SDM tahun 2013-2018 telah meletakkan pondasi dalam memantapkan kualitas dan daya Saing SDM. Hal ini diketahui berdasarkan hasil yang telah dicapai seperti peningkatan angka partisipasi pendidikan, peningkatan angka melek huruf, penurunan angka kematian ibu, pengiriman siswa-siwa berprestasi Asli Papua melanjutkan sekolah di dalam dan luar negeri serta tercapainya target peningkatan IPM tahun 2018. Pondasi peningkatan kualitas dan



daya saing SDM juga dapat dilihat dari kebijakan dan program-program yang sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan pembangunan tahun 2019-2023 mendatang tetap konsisten melanjutkan berbagai program peningkatan kualitas dan daya saing SDM Papua yang sudah berjalan dengan memberikan penekanan lebih lanjut dalam membuat kebijakan yang lebih efektif dan terarah dalam bentuk pengarusutamaan anggaran, kebijakan serta pengawasan dan pengendalian program terutama pada program beasiswa di dalam dan luar negeri untuk anak Asli Papua. Misi memantapkan kualitas dan daya saing SDM Papua akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan periode 2019-2023, yang berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengembangan IPTEK. SDM yang berdaya saing juga akan tercapai jika SDM Papua terjamin dalam pasokan pangannya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dalam hal ini, kemandirian pangan dan gizi merupakan prioritas dalam pembangunan Papua.

1.3.2.2. Memantapkan Rasa Aman, Tenram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI

Terjaminnya ketentraman dan ketertiban yang menciptakan rasa aman bagi masyarakat, merupakan jaminan bagi terlaksananya pembangunan. Pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya telah dapat dirasakan rasa aman, tenram dan damai, walaupun masih ada peristiwa-peristiwa yang mengganggu rasa aman dan tenram masyarakat. Oleh karena itu pembangunan akan diarahkan untuk memperkuat kerukunan hidup umat beragama. Sejauh ini telah terdapat peningkatan rasa saling menghargai, rasa percaya dan harmonisasi antar kelompok sehingga tercipta kehidupan toleransi dan tenggang rasa di masyarakat. Di samping itu, dengan keberagaman etnik yang ada di masyarakat, pembangunan budaya diarahkan untuk menghargai nilai budaya masing-masing etnik sebagai suatu nilai keunggulan Provinsi Papua dengan menanamkan prinsip kasih menembus perbedaan. Pemantapan system kerukunan hidup juga harus disertai dengan penerapan dan penegakan hukum dan HAM yang dilaksanakan secara tegas dan profesional.

Masyarakat yang demokratis merupakan landasan penting untuk tercapainya masyarakat yang mandiri. Upaya mewujudkan masyarakat yang demokratis dilakukan dengan menguatkan kelembagaan sosial dan politik; memperkuat peran masyarakat; melaksanakan tata pemerintahan yang terdesentralisasi pada tingkat distrik dan kampung; meningkatkan partisipasi dan transparansi; serta mendorong peningkatan peran media massa dan pers dalam pembangunan.



1.3.2.3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan tata kelola pemerintahan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatnya daya saing suatu daerah. Wujud dari penguatan tata Kelola adalah meningkatnya transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas serta meningkatnya pelayanan kepada publik. Sejauh ini, disiplin ASN telah meningkat secara signifikan dan Pemerintah Provinsi Papua telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK atas Laporan Keuangan Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya keras dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan tahun 2013-2018 telah berada dalam arah yang benar. Meskipun demikian, capaian selama periode sebelumnya masih perlu ditingkatkan dan dimantapkan. Harus ada upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tatakelola pemerintahan ini. Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga kelangsungan pembangunan berkelanjutan. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi pada periode 2013-2018 dilakukan melalui peningkatan disiplin ASN; pengelolaan keuangan daerah; penerapan e-Government Provinsi Papua dalam perencanaan, penganggaran, pendapatan, dan investasi daerah; serta penerapan sistem tunjangan kinerja daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, upaya yang telah dilakukan akan dimantapkan dan diperkuat, yang didukung perubahan *mind-set*, *culture-set* dan pengembangan budaya kerja secara lebih cepat dan terarah. Dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*) dan bebas KKN harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, dan akan dipimpin langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Reformasi birokrasi ini juga akan memperkuat hubungan kelembagaan yang harmonis antara Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota dan kampung, untuk memastikan implementasi Otonomi Khusus Papua dengan baik, termasuk melalui pembiayaan bersama dan transfer anggaran yang mendukung pemerataan dan keadilan.

1.3.2.4. Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah berbasis Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan

Periode pembangunan 2013-2018 telah berhasil membangun struktur perekonomian yang kokoh dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua berbasis ekonomi lokal. Keberhasilan



tersebut dapat dilihat dari terwujudnya iklim investasi yang kondusif, tercapainya stabilitas makro ekonomi, terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari, dan meningkatnya perekonomian masyarakat khususnya di kampung-kampung.

Penguatan dan percepatan perekonomian Provinsi Papua pada periode 2019-2023 akan tetap memperkuat ekonomi daerah berbasis karakteristik dan potensi setiap wilayah, dengan menitikberatkan pada hubungan antar wilayah/kampung yang didorong keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar wilayah/daerah yang kokoh dan berkesinambungan. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam meningkatkan produktivitas sumber daya ekonomi secara berkelanjutan, meningkatkan mutu produk dan menciptakan nilai tambah.

Penguatan dan percepatan perekonomian daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam, harus tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada orang asli Papua untuk memperoleh akses legal melalui skema-skema perhutanan sosial dan hutan adat. Pemberdayaan orang asli Papua diprioritaskan untuk: menjamin akses bagi masyarakat memperoleh sumber daya ekonomi; memperkuat kemampuan dan kelembagaan masyarakat kampung untuk mengelola sistem produksi, konsumsi dan infrastruktur secara mandiri; dan Pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan.

Pengembangan wilayah tetap dilakukan berbasis kultural yaitu wilayah Mamta dan Saereri yang akan difokuskan pada pembangunan berbasis kampung dengan prinsip kesetaraan pemenuhan kebutuhan hidup dan pencapaian kualitas hidup di seluruh wilayah Papua, sehingga mewujudkan pelayanan pemerintahan yang lebih mampu mendorong percepatan kemandirian masyarakat asli Papua. Untuk mendukung perekonomian dan pengembangan wilayah secara merata, akan didukung oleh peningkatan dan percepatan konektivitas antar wilayah dan Pemenuhan sarana dan prasarana dasar di wilayah distrik dan kampung diarahkan pembangunan jaringan transportasi antar kampung, pengembangan tenaga listrik terbarukan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi bagi masyarakat asli Papua. Peningkatan dan percepatan konektivitas antar wilayah dan Pemenuhan sarana dan prasarana dasar akan diprioritaskan pada periode 2019-2023.

1.3.2.5. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu

Pembangunan yang merata dan berkeadilan akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan periode 2019-2023 karena pelaksanaan pembangunan di masa lalu belum



mampu mewujudkan pemerataan dan keadilan yang menjadi harapan seluruh masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena proses pembangunan yang tidak adil sedemikian intensif pada masa lalu sehingga tidak cukup diperbaiki dalam satu periode pelaksanaan pembangunan.

Perwujudan pembangunan yang merata dan berkeadilan akan diwujudkan di berbagai bidang. Di bidang ekonomi, pemerataan dan keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk perbaikan distribusi pendapatan, perbaikan pemerataan pendapatan antar daerah, perbaikan kesenjangan antara kampung, terjadinya proses afirmasi bagi orang asli Papua. Dalam bidang sosial, pemerataan dan keadilan berupa perbaikan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebebasan berpolitik, serta pemerataan antara laki-laki dan perempuan. Upaya pemerataan dan keadilan dalam periode 2019-2023 dilakukan dengan berbagai kebijakan. Untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, bantuan untuk program pendidikan melalui beasiswa, kesehatan melalui Kartu Papua Sehat dan Gerbangmas pada periode 2013-2018 adalah bukti nyata dari upaya tersebut.

Pada lima tahun ke depan, penguatan pemerataan dan keadilan akan dilakukan untuk setiap kebijakan dan kegiatan. Langkah ini diharapkan dalam jangka pendek akan memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga tersebut (memperbaiki distribusi pendapatan) dan dalam jangka panjang akan dihasilkan generasi baru yang lebih baik tingkat pendidikan dan kesehatannya. Pemerintah Daerah akan memperkuat pengawasan dan pengendalian dari semua program agar benar-benar menyoal orang Asli Papua khususnya yang berada di kampung-kampung. Selanjutnya pengurangan kemiskinan akan diprioritaskan bantuan langsung (*cash transfer*) kepada seluruh penduduk anak usia 4 tahun ke bawah dan usia 60 tahun keatas melalui Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA PAPUA) dan perlindungan sosial melalui bantuan langsung dan program pembedayaan KAT dan bantuan sosial PMKS. Untuk memperkuat perekonomian di level wilayah akan menerapkan trilogi pengembangan ekonomi Papua, yaitu: 1) perubahan pola pikir masyarakat; 2) pengwilayahan komoditas unggulan daerah; serta 3) penerapan prinsip tanam, petik, olah dan jual.

1.3.3. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan Sasaran merupakan dasar dalam Menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sebagai sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun tujuan dan saasaran dapat dijabarkan dari setiap Misi.



Tujuan dari Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, dengan Sasaran :

1. Meningkatnya aksesibilitas, mutu dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan
2. Meningkatkan budaya baca pada masyarakat
3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
5. Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan
6. Terwujudnya internalisasi nilai adat dan budaya asli Tanah Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat

Tujuan dari Misi Kedua : Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang berbasis kohesivitas sosial dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat Papua, dengan Sasaran :

1. Meningkatnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum
2. Meningkatnya keharmonisan dan kohesivitas masyarakat
3. Meningkatnya penegakan HAM
4. Meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi

Tujuan dari Misi Ketiga : Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan sasaran:

1. Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua
2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah
4. Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah

Tujuan pertama dari Misi Keempat : Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan, dengan sasaran :

1. Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
2. Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim



4. Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan
5. Membangun struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal dan berkelanjutan
6. Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan
7. Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
8. Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah

Tujuan Kedua dari Misi Keempat : Mewujudkan Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar Dan Pasar, dengan sasaran:

1. Peningkatan akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah
2. Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten
3. Meningkatnya ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah
4. Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman
5. Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan
6. Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah

Tujuan dari Misi Kelima : Meningkatkan pemerataan pembangunan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung
2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP
3. Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan
4. Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS
5. Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
6. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dan upaya perlindungan anak

1.3.4. Strategi Dan Arah Kebijakan Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023

Dalam rangka mewujudkan visi **Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan** maka pelaksanaan pembangunan akan dilakukan secara simultan dengan tahapan-tahapan yang jelas dan sistematis, memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan wilayah, memperhatikan dan menghormati nilai-nilai serta hak-hak adat masyarakat asli Papua. Sumberdaya alam Tanah Papua yang berlimpah harus dapat



dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Sumberdaya yang dapat diperbaharui dikelola dengan memperhatikan kelangsungan fungsi-fungsi ekologis sehingga tetap lestari dan produktif, sedangkan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui akan dimanfaatkan dengan memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang.

Sehubungan dengan itu maka untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan dalam rangka memantapkan kualitas dan daya saing SDM dengan masyarakat yang terjamin rasa aman, tentram dan damai disertai dengan kehidupan yang demokratis melalui tata kelola pemerintahan yang baik serta didukung oleh sarana dan prasarana fisik kewilayahan yang mampu membuka akses ekonomi dan menerobos keterisolasian sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat asli Papua maka akan diterapkan Strategi dan Arah Pembangunan sebagai berikut:

1.3.4.1. Strategi Pembangunan Daerah

Grand Strategi pembangunan daerah Provinsi Papua periode tahun 2019-2023 didasarkan pada suatu rangkaian intervensi kebijakan (strategi) yang mengarah pada pencapaian kondisi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Berkeadilan dengan didukung oleh 5 misi pembangunan, 3 orientasi pembangunan, 4 pendekatan pembangunan, 5 prinsip dasar pembangunan dan 3 nilai dasar pembangunan.

Gambar 1.1. Grand Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023





1.3.4.2. Prinsip dan Nilai Dasar Pembangunan

Untuk pelaksanaan RPJMD Papua 2019-2023, terdapat 6 (enam) prinsip dasar pembangunan yang menjadi pegangan bagi pelaksanaan pembangunan, yaitu:

1. **Perlindungan (*protection*):** sesuai amanat UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, bahwa kebijakan pembangunan Provinsi Papua diarahkan pada perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua.
2. **Keberpihakan (*affirmative*):** afirmatif bagi Orang Asli Papua adalah kebijakan diskriminasi positif yang diambil dengan tujuan agar Orang Asli Papua memperoleh kesempatan mendapatkan layanan yang lebih dengan alasan perbedaan kondisi awal sehingga dapat memperoleh peluang yang setara untuk bersaing dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama.
3. **Pemberdayaan (*empowerment*):** bahwa arah kebijakan pembangunan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Orang Asli Papua dalam segala bidang pembangunan.
4. **Keberlanjutan (*sustainability*):** Pasal 63 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua mengamanatkan bahwa pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
5. **Keterpaduan (*integrated*):** RPJMD Provinsi Papua tahun 2019-2023 harus mampu memperkuat sinergi antar bidang, antar ruang dan waktu. Setiap SKPD pelaksana pembangunan di setiap bidang harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai sinergi tersebut melalui proses komunikasi, konsultasi, koordinasi serta pengendalian, monitoring, dan evaluasi dengan pemangku kepentingan terkait di pusat dan daerah dan mengedepankan keberhasilan bersama dalam pencapaian sasaran pembangunan.
6. **Tata Pemerintahan yang Baik (*good governance*):** pelaksanaan pembangunan wajib mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun nilai-nilai dasar pembangunan lima tahun kedepan adalah:
 1. **Kecukupan (*sustenance*):** pembangunan diarahkan agar masyarakat merasa tercukupi semua kebutuhan dasar (*basic need*) seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.



2. **Jati diri (*self esteem*)**: pembangunan membentuk motivasi seluruh masyarakat untuk berkeinginan untuk maju atau *need achivement*, menghargai diri sendiri dan memiliki rasa percaya diri yg tinggi.
3. **Kebebasan (*freedom*)**: pembangunan dilaksanakan dengan mendorong nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap HAM sehingga masyarakat bebas dalam bersikap dan berperilaku, rasa takut, perbudakan, kebodohan, kemiskinan, dan stigmasasi.

1.3.4.2.1. Orientasi Pembangunan

Orientasi pembangunan adalah pandangan yang menjiwai seluruh arah kebijakan pembangunan selama lima tahun, yaitu:

1.3.4.2.1.1. Orientasi Pembangunan Berpusat pada Manusia

Pelaksanaan pembangunan sebesar-besarnya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya Orang Asli Papua. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, menggunakan pendekatan yang sesuai dengan budaya dan adat masyarakat lokal, serta dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan menghormati hak-hak adat masyarakat setempat. Pembangunan yang berpusat pada manusia menjadi prioritas utama pembangunan dalam lima tahun kedepan dan akan difokuskan pada pendidikan yang bermutu dan terjangkau; pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan mudah; kemandirian perekonomian masyarakat; serta ketahanan pangan bagi seluruh wilayah di Provinsi Papua. Pembangunan manusia merupakan indikator utama mengukur akselerasi perkembangan pembangunan periode 2019-2023.

1.3.4.2.1.2. Orientasi Pertumbuhan dan Potensi Unggulan

Pertumbuhan ekonomi secara berkualitas dan merata diperlukan, sehingga dampak pertumbuhan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat khususnya Orang Asli Papua. Kebijakan pembangunan ekonomi secara esensial tidak semata-mata mengejar pertumbuhan, melainkan dampak dari pertumbuhan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Prinsip pembangunan ekonomi dilakukan melalui: perubahan pola pikir, pengwilayahan komoditas, serta tanam, petik, olah dan jual. **Perubahan pola pikir** dimaksudkan bahwa masyarakat khususnya Orang Asli Papua akan ditingkatkan kemampuan dan keterampilan dalam



mengelola sumber daya lokal yang ada di sekitarnya sehingga dapat bernilai ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. **Pengwilayahan komoditas** diartikan bahwa prioritas pengembangan perekonomian daerah didasarkan pada komoditas unggulan setiap wilayah atau daerah. **Tanam, petik, olah dan jual** dimaksudkan bahwa menyiapkan system pemasaran yang terintegrasi dari saat panen, pasca panen dan pemasaran atau penjualan. Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan tahun 2019-2023 merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur perkembangan pembangunan yang terjadi, dan merupakan suatu indikator antara (bukan hasil akhir yang akan dicapai).

1.3.4.2.1.3. Orientasi Pemerataan, Keadilan dan Pembangunan Kewilayahan

Penyediaan Infrastruktur wilayah diarahkan pada menghilangkan ketimpangan antar wilayah dengan menerapkan prinsip keadilan pembangunan antar wilayah. Pengembangan wilayah dan penyediaan infrastruktur ditujukan untuk pelayanan kemandirian kampung, dan berdasarkan pada Rencana Tata Ruang. Selanjutnya pembangunan kewilayahan ini akan difokuskan pada beberapa wilayah prioritas berdasarkan 2 (lima) wilayah 1) Saereri dan 2) Mamta. Dalam bidang ekonomi, pemerataan dan keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk perbaikan distribusi pendapatan, perbaikan pemerataan pendapatan antar daerah, perbaikan kesenjangan antara kampung, terjadinya proses afirmasi bagi orang asli Papua. Dalam bidang sosial, pemerataan dan keadilan berupa perbaikan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebebasan berpolitik, serta pemerataan antara laki-laki dan perempuan.

1.3.4.2.1.4. Pendekatan Pembangunan

Pendekatan pembangunan daerah merupakan suatu rangkaian bauran kebijakan yang mengefektifkan potensi-potensi yang dimiliki daerah di berbagai sektor sehingga akan memberi pengaruh terhadap percepatan pencapaian visi pembangunan daerah. 4 (empat) pendekatan pembangunan yang akan diintensifkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2019-2023 adalah;

1. Inovasi artinya pelaksanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada proses dan hasil pengembangan pemanfaatan/ mobilisasi pengetahuan keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sehingga akan menambah nilai bagi penciptaan kepuasan bagi masyarakat Papua secara umum;
2. Kolaborasi artinya pembangunan daerah harus melibatkan partisipasi yang luas dari



seluruh potensi yang dimiliki daerah, baik dari perspektif kelompok adat, agama, pemerintah, swasta, universitas dan mitra pembangunan lainnya. Pada akhirnya kolaborasi akan memperkuat *sense of belonging* dari semua pihak dan memberi nilai bagi keberlanjutan pembangunan daerah;

3. Afirmasi artinya pembangunan daerah harus memiliki keberpihakan terhadap potensi-potensi pembangunan daerah yang memerlukan perhatian lebih yang ini juga sejalan dengan prinsip pelaksanaan otonomi khusus Papua;
4. Desentralisasi artinya pembangunan daerah mengelola kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing komponen pemerintahan sehingga mendorong terjadinya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

1.3.4.2.2. Strategi Pencapaian Sasaran

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholders* pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan.

1.3.5. Arah Kebijakan Pemerintah Daerah

Arah Kebijakan pembangunan Provinsi Papua tahun 2019-2023 terdiri dari Arah Kebijakan Umum Pembangunan yang mencakup bidang-bidang pembangunan dan Arah Pembangunan Kewilayahan. Tahapan pelaksanaan pembangunan akan menjelaskan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan fokus prioritas dan waktu pelaksanaan, sedangkan Arah pembangunan kewilayahan akan menjelaskan arah dan strategi pembangunan kewilayahan berbasis 2 (lima) wilayah yaitu Saereri dan Mamta.

1.3.5.1. Arah Kebijakan Umum Pembangunan

Arah kebijakan Provinsi Papua merupakan fokus pembangunan setiap tahun selama lima tahun. Pentahapan ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan fokus dalam setiap tahun selama lima tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Gambar 1.2. Focus Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023



Fokus pembangunan setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun, akan menjadi pedoman dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan di Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan tema akan disesuaikan dengan kondisi dan isu strategis daerah serta tema pembangunan Nasional. Berdasarkan fokus pembangunan tiap tahunnya disusunlah arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

1.3.5.1.1. Arah Pembangunan Kewilayahan

Kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota pada dasarnya merupakan keputusan dan intervensi pemerintah, baik secara nasional maupun regional untuk mendorong proses pembangunan daerah secara keseluruhan. Analisis ini sangat penting artinya dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan pada wilayah yang masih terbelakang. Semua ini diperlukan untuk dapat meningkatkan proses pembangunan daerah sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. **2 (Dua) KPE (Kawasan Pengembangan Ekonomi) berbasis wilayah adat** yang dimaksud adalah :

- a. **Wilayah adat Saireri** yang terdiri atas kabupaten-kabupaten yang terletak di wilayah



Kepulauan Teluk Cenderawasih yaitu Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen;

- b. **Wilayah adat Mamta** yang terbagi atas kabupaten yang berada disepanjang sungai mamberamo hingga lautan pasifik yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom dan Mamberamo Raya;

1. Arah Pengembangan Wilayah Adat Mamta/Tabi

Berikut pemetaan program strategis berdasarkan pengembangan kewilayahan Provinsi Papua dalam kerangka percepatan pembangunan Papua:

1. Wilayah Adat Mamta

- a. Program/lokasi dalam **Inpres/RPJMN sesuai dengan arahan kewilayahan RPJMD;**
1. Pembangunan dan Optimalisasi BLK VTC berbasis komoditas lokal di Kabupaten Jayapura
 2. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Depapre (Kabupaten Jayapura)
 3. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Sarmi (Kabupaten Sarmi)
 4. Penyediaan dan pengelolaan air baku di Kawasan Perkotaan Jayapura
 5. Peningkatan kapasitas pengelolaan dan pembangunan terminal barang dan penumbang di PLBN Skouw
- b. Program/lokasi diusulkan Pemda/ada dalam RPJMD, **namun tidak ada dalam rencana nasional (inpres/ RPJMN);**
1. Pembangunan/revitalisasi SMK di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi
 2. Penguatan dan Peningkatan RSUD di Kabupaten Jayapura Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Sarmi
 3. Pembangunan pelabuhan peti kemas Depapre di Jayapura
 4. Pembangunan terminal type B di Kab./kota Jayapura, Sarmi, Keerom
 5. Pembangunan dermaga-dermaga di Danau Sentani
 6. Pembangunan Bandara Kustra di Kabupaten Mamberamo Raya
 7. Pembangunan Pelabuhan Wakde di Kabupaten Sarmi



8. Pembangunan pembangkit listrik hydropower di Kabupaten Membramo Raya
- c. Program/lokasi ada dalam rencana nasional (inpres/RPJM) **namun tidak ada dalam arahan kewilayahan RPJMD**
 1. Asrama Mahasiswa Nusantara di Kota Jayapura
 2. Papua Youth Creative Hub di Jayapura
 3. Pengembangan Pusat Kajian kebudayaan bertaraf internasional di Universitas Cendrawasih di Kota Jayapura
 4. Pembangunan Institut Teknologi Kesehatan di Kota Jayapura
 5. Pembangunan Jalan Trans Merauke-Sorong
 6. Pengembangan Jalan Perbatasan Papua di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura
 7. Penyediaan moda kapal ternak di Kota Jayapura
 8. Pengembangan Bandara Hub Primer (Bandara Sentani) di Jayapura
 9. Penyediaan dan pengelolaan air baku di Wilayah Strategis KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) di Jayapura
 10. Pengembangan terminal Skouw
 11. Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) di Kota Jayapura
 12. Revitalisasi Danau Sentani di Kabupaten Jayapura
 13. Pembangunan istana kepresidenan di Kabupaten Jayapura

2. Arah Pengembangan Wilayah Adat Saereri

- a. Program/lokasi dalam **Inpres/RPJM sesuai dengan arahan kewilayahan RPJMD;**
 1. Pembangunan dan Optimalisasi BLK VTC berbasis komoditas lokal di Biak Numfor
 2. Pembangunan Pelabuhan penyebrangan Waren di Waropen



- b. Program/lokasi diusulkan Pemda/ada dalam RPJMD, **namun tidak ada dalam rencana nasional (inpres/ RPJMN);**
1. Pembangunan / Revitalisasi SMK di Biak Numfor
 2. Penguatan dan Peningkatan RSUD di Biak Numfor
 3. Pengembangan Rumah Sakit Pratama di Supiori
 4. Pembangunan Pelabuhan Waren di Waropen
 5. Pembangunan Pelabuhan Miosbepondi di Supiori
 6. Pembangunan Bandara Botawa di Waropen
 7. Peningkatan Bandara Kamanap di Kep. Yapen
 8. Pembangunan Pelabuhan Ampimoi di Kep. Yapen
 9. Penyediaan dan pengelolaan air baku di Kawasan Perkotaan Biak Numfor
- c. Program/lokasi ada dalam rencana nasional (inpres/RPJMN) **namun tidak ada dalam arahan kewilayahan RPJMD;**
1. Pembangunan Politeknik di Biak Numfor
 2. Pembangunan dan pengembangan Universitas Negeri Kamasa di Biak Numfor
 3. Pembangunan Jalan Trans Pulau Biak di Biak Numfor
 4. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Samudera di Biak Numfor
 5. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Seuir di Kepulauan Yapen
 6. Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Bandara Frans Kaisepo di Biak Numfor
 7. Penyediaan dan pengelolaan air baku di Kawasan Strategis DPP Baru di Biak-Teluk Cendrawasih (Biak Numfor)

1.3.6. Pengelolaan Dana Otsus Tahun 2023

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ditandatangani Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Juli 2022, merupakan upaya pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta



kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua, untuk itu perlu dilakukan upaya untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran, serta untuk melakukan penguatan penataan daerah provinsi di wilayah Papua sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua.

Dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua, perlu dilakukan upaya untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran, serta untuk melakukan penguatan penataan daerah provinsi di wilayah Papua sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua.

Dengan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar Provinsi Papua dengan provinsi-provinsi lain dalam wadah NKRI, serta akan memberikan peluang bagi orang asli Papua untuk berkisah di wilayahnya sebagai pelaku sekaligus sasaran pembangunan.

Rumusan materi muatan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tersebut dibangun dengan konstruksi yang bersumber dari dua elemen, yaitu:

- (1) UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
- (2) kristalisasi penggalan aspirasi masyarakat di Provinsi Papua yang menjadi karakter kekhususan dan kebutuhan prioritas bagi masyarakat Papua.

Kebijakan otsus menurut UU Nomor 21 Tahun 2001 mengamanatkan tiga pilar penting sebagai penyelenggara pemerintahan di Provinsi Papua dan Papua Barat, yaitu:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP);
2. Pemerintah daerah (Gubernur beserta perangkat daerah); dan
3. Majelis Rakyat Papua (MRP).

Dua (2) Formulasi Kebijakan Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2022 pasal 34 ayat (3) huruf e dan f, yaitu :

Pertama, Dana Otsus Block Grant (setara 1% dari DAU Nasional) digunakan untuk :

- (1) Pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelaksanaan pelayanan publik;
- (2) Peningkatan kesejahteraan orang asli Papua (OAP), penguatan kelembagaan adat;
- (3) Hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan.

Kedua, *Dana Otsus Specific Grant* (setara 1,25% dari DAU Nasional) digunakan untuk:

- (1) Belanja pendidikan paling sedikit 30 %;
- (2) Belanja kesehatan paling sedikit 20 % ; dan
- (3) Belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat

Selanjutnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2022 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, serta Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua.

1.4. Data Umum Daerah

1.4.1. Aspek Geografi dan Demografi

1.4.1.1. Luas dan Batas Wilayah

Secara astronomis, Wilayah provinsi Papua berada pada Posisi geografis di antara 1° 8' 20.8752" LU - 4° 6' 58.626" LS dan 134° 5' 58.8444" - 141° 0' 37.5912" Bujur Timur. Batasan wilayah dengan luas kurang lebih 13.158.285,38 hektar meliputi:

- a. wilayah darat; dan
- b. wilayah laut.

Wilayah Darat seluas kurang lebih 8.268.837,32 (delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh koma tiga dua) hektar, yang meliputi 8 kabupaten dan 1 kota, yaitu:

1. Kota Jayapura;
2. Kabupaten Jayapura;
3. Kabupaten Keerom;
4. Kabupaten Kepulauan Yapen;
5. Kabupaten Mamberamo Raya;
6. Kabupaten Sarmi;



7. Kabupaten Supiori;
8. Kabupaten Biak Numfor; dan
9. Kabupaten Waropen.

Wilayah Provinsi Papua tidak hanya mencakup wilayah daratan namun juga memiliki wilayah laut dan pulau-pulau kecil yang ada dalam batas wilayahnya. Dari 9 (sembilan) kabupaten/kota tersebut terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:

1. Kota Jayapura;
2. Kabupaten Jayapura;
3. Kabupaten Biak Numfor;
4. Kabupaten Kepulauan Yapen;
5. Kabupaten Sarmi;
6. Kabupaten Waropen;
7. Kabupaten Supiori; dan
8. Kabupaten Mamberamo Raya.

Wilayah Laut sejauh 12 mil dari garis pantai darat ke arah laut sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi Papua dengan luas kurang lebih 4.889.447,97 (empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan empat ratus empat puluh tujuh koma Sembilan tujuh) hektar.

Umumnya sebaran pulau-pulau tersebar di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Jayapura. Pada kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar di Provinsi Papua terdapat adalah 4 (empat) pulau yaitu Pulau Fanildo, Pulau Brass, Pulau Bepondi, Pulau Liki di Kabupaten Sarmi (BIG, 2018).

Wilayah adat di Provinsi Papua mencakup 2 (dua) wilayah adat di ruang darat maupun laut yaitu Wilayah adat Mamta/TABI dan wilayah adat Saireri yang secara budaya memiliki otoritas penuh dalam kepemilikan dan penguasaan wilayah adat yang tersebar di:

- a. Wilayah **Mamta/TABI** meliputi:
 1. Kota Jayapura,



2. Kabupaten Jayapura,
 3. Kabupaten Keerom,
 4. Kabupaten Sarmi, dan
 5. Kabupaten Mamberamo Raya
- b. Wilayah **Saireri** meliputi:
1. Kabupaten Biak Numfor,
 2. Kabupaten Supiori,
 3. Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
 4. Kabupaten Waropen.

Batas Wilayah Provinsi Papua meliputi:

- a. Sebelah Utara : Samudra Pasifik;
- b. Sebelah Selatan : Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah;
- c. Sebelah Barat : Provinsi Papua Barat; dan
- d. Sebelah Timur : Negara Papua New Guinea.

Luas wilayah Provinsi Papua kurang lebih 13.158.285,28 (tiga belas juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima koma dua delapan) hektar. Luas wilayah darat terbesar yang terdapat di Provinsi Papua ialah Kabupaten Mamberamo Raya dengan luas wilayah 2.804.347,07 Ha atau sebesar 21,31% dari luas wilayah Provinsi Papua. Sedangkan wilayah darat terkecil yaitu Kabupaten Supiori seluas 66.069,33 Ha atau 0,50% dari luas wilayah Provinsi Papua.

Gambar 1.3 Peta Batas Administrasi Provinsi Papua



Sumber: Revisi RTRWP Papua Tahun 2022

Tabel 1.1. Pembagian Wilayah Administratif Provinsi Papua

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Distrik	Kelurahan	Kampung
1	Kab. Jayapura	Sentani	19	5	139
2	Kab. Kepulauan Yapen	Serui	16	5	160
3	Kab. Biak Numfor	Biak	19	14	254
4	Kab. Sarmi	Sarmi	10	2	92
5	Kab. Keerom	Waris	11	0	91
6	Kab. Waropen	Botawa	11	0	100
7	Kab. Supiori	Sorendiweri	5	0	38
8	Kab. Mamberamo Raya	Biurmeso	8	0	60
9	Kota Jayapura	Jayapura	5	25	14
Total			104	51	948



Sumber: *Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*

1.4.1.2. Topografi

Kondisi topografi dipengaruhi oleh faktor morfologi, ketinggian, dan kelerengan. Sebagian besar morfologi wilayah Provinsi Papua berupa dataran (39,20%) dan pegunungan (60,79%). Dataran terdapat di bagian pesisir selatan yang merupakan bagian yang paling luas, dan pesisir utara. Pegunungan terdapat di bagian tengah wilayah Provinsi Papua. Bagian morfologi dataran dengan ketinggian lebih dari 100 m menjadi bagian terluas di wilayah Provinsi Papua, yaitu 5.027.142,57 ha (53,3%), serta ketinggian lebih dari 1000 m dari permukaan laut menjadi bagian tersempit, yaitu 3.241.694.74 ha (39,20%).

Sedangkan kelerengan yang mendominasi wilayah Provinsi Papua adalah lereng landai (0-8)% menempati 45,9% dan lereng sangat terjal (>40%) menempati 43,3%. Wilayah di Provinsi Papua memiliki ketinggian dengan elevasi 0-100 mdpl, 100-3000 mdpl dan >3000 mdpl. Ketinggian wilayah yang memiliki elevasi 0-100 mdpl seluas 3.241.694.74 ha, elevasi 100-3000 mdpl adalah seluas 5.025.909 ha dan elevasi >3000 mdpl adalah seluas 1.233,57 ha. Ketinggian wilayah 0-100 mdpl terluas berada di Kabupaten Mamberamo Raya seluas 1.360.180,62 ha, ketinggian wilayah 100-3000 mdpl terluas berada di Kabupaten Mamberamo Raya seluas 1.444.166,45 ha dan ketinggian wilayah >3000 mdpl terluas berada di Kabupaten Keerom seluas 1.233,57 ha.

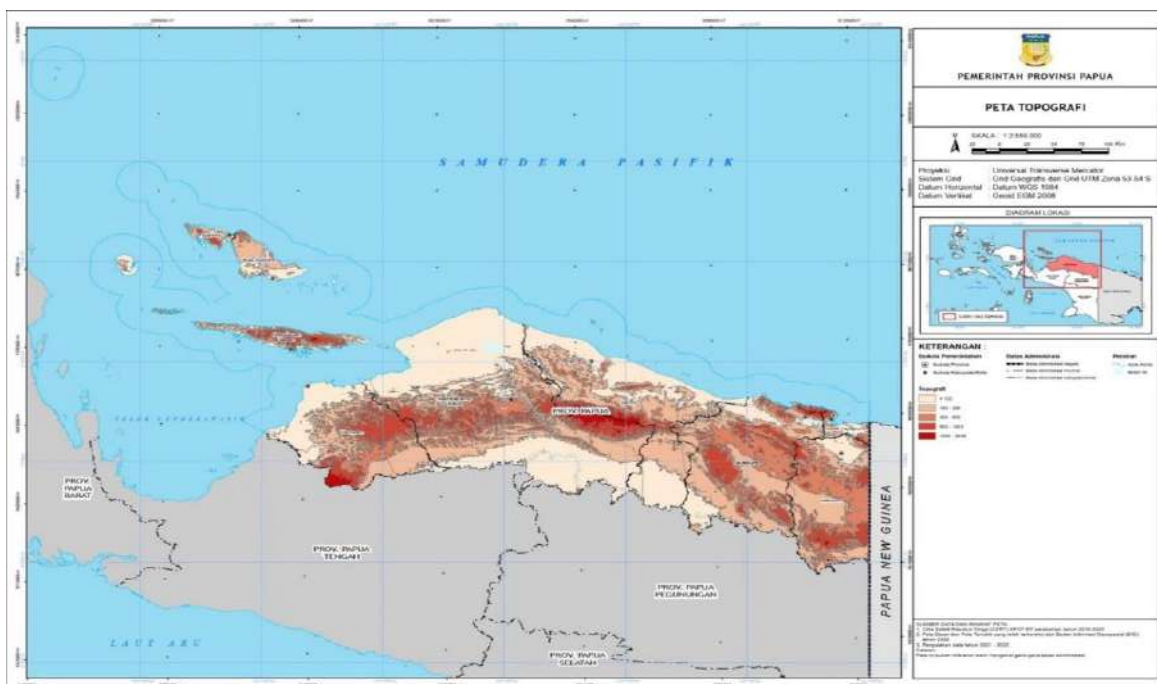
Tabel 1.2 Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian di Provinsi Papua

ELEVASI (MDPL)	KABUPATEN/KOTA	AREA (ha)
0-100	Mamberamo Raya	1,360,180.62
	Sarmi	626,262.05
	Waropen	746,554.32
	Jayapura	185,319.99
	Biak Numfor	116,564.00
	Keerom	75,299.98
	Kepulauan Yapen	69,214.21
	Supiori	25,702.05
	Kota Jayapura	36,597.52
0-100 Total		3.241.694.74
100-3000	Jayapura	1,222,941.63

ELEVASI (MDPL)	KABUPATEN/KOTA	AREA (ha)
	Mamberamo Raya	1,444,166.45
	Keerom	876,097.99
	Sarmi	780,639.91
	Waropen	331,658.57
	Kepulauan Yapen	173,628.00
	Biak Numfor	109,437.70
	Kota Jayapura	46,971.47
Elevasi (mdpl)	Kabupaten	Area (ha)
	Supiori	40,367.28
100-3000 Total >3000		5.025.909
>3000 Total	Keerom	1,233.57
Grand Total		8.268.837.32

Sumber: Revisi RTRWP Papua Tahun 2022

Gambar 1.4. Peta Topografi Provinsi Papua



Sumber: Revisi RTRWP Papua Tahun 2022

Wilayah Provinsi Papua memiliki klasifikasi kemiringan lereng yaitu 0-8%, 8-15%, 15-25%, 25-45% dan >45%. Kelerengan wilayah di Provinsi Papua dengan kemiringan lereng 0-8% seluas 3.849.082,03 ha, kemiringan lereng 8-15% seluas 1.034.503,65 ha, kemiringan



lereng 15-25% seluas 1.531.173,89 ha, kemiringan lereng 25-45% seluas 1.013.710,94 ha dan kemiringan lereng >45% seluas 134.759,41 ha. Kabupaten dengan kemiringan lereng 0-8% terluas berada di Kabupaten Mamberamo Raya seluas 1.517.691,61 ha, kemiringan lereng 8-15% terluas berada di Kabupaten Jayapura seluas 360.181,45 ha, kemiringan lereng 15-25% terluas berada di Kabupaten Mamberamo Raya seluas 484.150,73 ha, kemiringan lereng 25-45% terluas berada di Kabupaten Mamberamo Raya seluas 310.648,06 ha dan kemiringan lereng >45% terluas berada di Kabupaten Sarmi seluas 57.217,56 ha.

Tabel 1.3. Kelerengan Provinsi Papua

NO	KEMIRINGAN LERENG	KABUPATEN/KOTA	AREA (ha)
1	0-8 %	Mamberamo Raya	1,517,691.61
		Sarmi	786,828.96
		Jayapura	550,385.44
		Keerom	433,272.53
		Waropen	516,193.64
		Biak Numfor	186,892.61
		Kepulauan Yapen	38,772.07
		Supiori	19,971.85
		Kota Jayapura	56,722.06
		Total 0 – 8 %	
2	8-15%	Jayapura	295,881.08
		Mamberamo Raya	478,660.73
		Sarmi	191,828.18
		Keerom	179,566.75
		Waropen	257,370.93
		Kepulauan Yapen	26,625.90
		Biak Numfor	18,831.22
		Supiori	13,209.59
		Kota Jayapura	13,741.82
Total 8-15 %			1,475,716.20
3	15-25%	Mamberamo Raya	484,150.73
		Jayapura	350,131.45



NO	KEMIRINGAN LERENG	KABUPATEN/KOTA	AREA (ha)
		Sarmi	215,357.06
		Keerom	194,529.88
		Waropen	200,660.97
		Kepulauan Yapen	60,503.87
		Supiori	19,902.39
		Biak Numfor	12,683.64
		Kota Jayapura	17,129.85
Total 15-25%			1,555,049.84
4	25-45%	Mamberamo Raya	310,648.06
		Jayapura	188,532.54
		Sarmi	155,670.20
		Keerom	129,997.55
		Waropen	101,890.17
		Kepulauan Yapen	96,899.04
		Supiori	11,410.49
		Biak Numfor	6,625.39
		Kota Jayapura	12,037.50
Total 25-45%			1,013,710.94
5	>45%	Sarmi	47,217.56
		Jayapura	16,331.11
		Kepulauan Yapen	19,911.49
		Keerom	15,264.83
		Mamberamo Raya	13,195.94
		Waropen	2,097.18
		Supiori	1,575.01
		Biak Numfor	968.84
		Kota Jayapura	1,067.61
>45% Total			117,629.57
Grand Total			8,268,837.32

Sumber: Revisi RTRWP Papua Tahun 2022

1.4.1.3. Hidrologi

Provinsi Papua memiliki 64 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan total panjang sungai



35.924,737 km dan total luas daerah tangkapan 572.753, 823 km² (lihat Tabel 1.2). Banyaknya jumlah DAS menunjukkan bahwa Provinsi Papua memiliki kekayaan Sumber Daya Air yang berlimpah. Sungai-sungai besar yang terbentang dan danau yang tersebar di Papua dapat menjadi sumber energi listrik terbarukan sebagai modal dasar pembangunan ekonomi produktif, pendapatan asli daerah, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Adapun berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A Tahun 2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai menetapkan pembagian wilayah sungai di Provinsi Papua sebagai berikut :

WS Mamberamo-Tami-Apauvar (kewenangan BWS Papua), terdiri atas beberapa DAS:DAS Mamberamo, DAS Gesa, DAS Bigabu, DAS Sobger, DAS Tariku, DAS Nawa, DAS Taritatu, DAS Van Dalen, DAS Tami, DAS Sermo, DAS Grimer dan DAS Sentani.

WS Einlanden-Digoel-Bikuma (kewenangan BWS Papua Merauke), terdiri atas beberapa daerah aliran sungai:DAS Einlanden, DAS Digoel, DAS Maro, DAS Kumber, DAS Bulaka, DAS Bian, DAS Dolak, DAS Digoel dan DAS Cemara.

Wilayah sungai Omba (lintas Provinsi Papua-Provinsi Papua Barat, kewenangan Papua Barat), terdiri atas WS Omba mencakup beberapa DAS:DAS Omba, DAS Lengguru, DAS Madefa, DAS Bedidi dan DAS Bomberai.

Wilayah sungai lintas kabupaten/kota terdiri atas WS WapogaMimika (kewenangan Dinas PU Provinsi), yang mencakup beberapa DAS:DAS Wapoga, DAS Aikimuga, DAS Otokwa, DAS Minarjerwi, DAS Kamura, DAS Mimika, DAS Yawe, DAS Parongga, DAS Aidoma, DAS Wanggar, DAS Siriwo, DAS Rombak, DAS Nadubuai, DAS Yapen, DAS Biak, DAS Supiori dan DAS Kemabu.

Instansi yang terlibat dalam pengelolaan DAS cukup banyak, misalkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Bakosurtanal, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan banyaknya pihak yang terlibat, baik itu secara administrasi, perencanaan dan teknis dilapangan, maka diperlukan adanya koordinasi intensif berbagai pihak terkait baik lintas sektoral maupun lintas daerah. Selain memberi peluang yang besar untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, banyaknya sungai dan rawa juga merupakan tantangan dalam pembangunan infrastruktur di Papua. Pada wilayah yang dikelilingi rawa atau banyak rawa membuat pembangunan jalan di daerah-daerah tersebut membutuhkan konstruksi yang lebih kokoh dibanding biasanya, yang



dipastikan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Seringkali ditemukan pada pembangunan jalan di Papua, dalam satu lajur tidak sampai ratusan kilo ada perubahan formasi dari tanah keras ke tanah lunak, gambut dan rawa. Kondisi ini yang menyebabkan perkiraan biaya pembangunan jalan di wilayah Papua selalu bisa *over estimated*. Banyaknya sungai juga menjadi permasalahan tersendiri, karena pembangunan jalan harus dihubungkan juga dengan banyaknya jembatan yang dibangun di atas sungai, yang akhirnya membutuhkan biaya yang lebih besar.

1.4.1.4. Klimatologi

Pengukuran iklim di Provinsi Papua oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Papua dilakukan di 9 kabupaten/kota. Pada tahun 2019, secara rata-rata suhu di seluruh stasiun pengamatan berkisar antara 27.70-34.80 oC

Tabel 1.4. Curah Hujan di Provinsi Papua

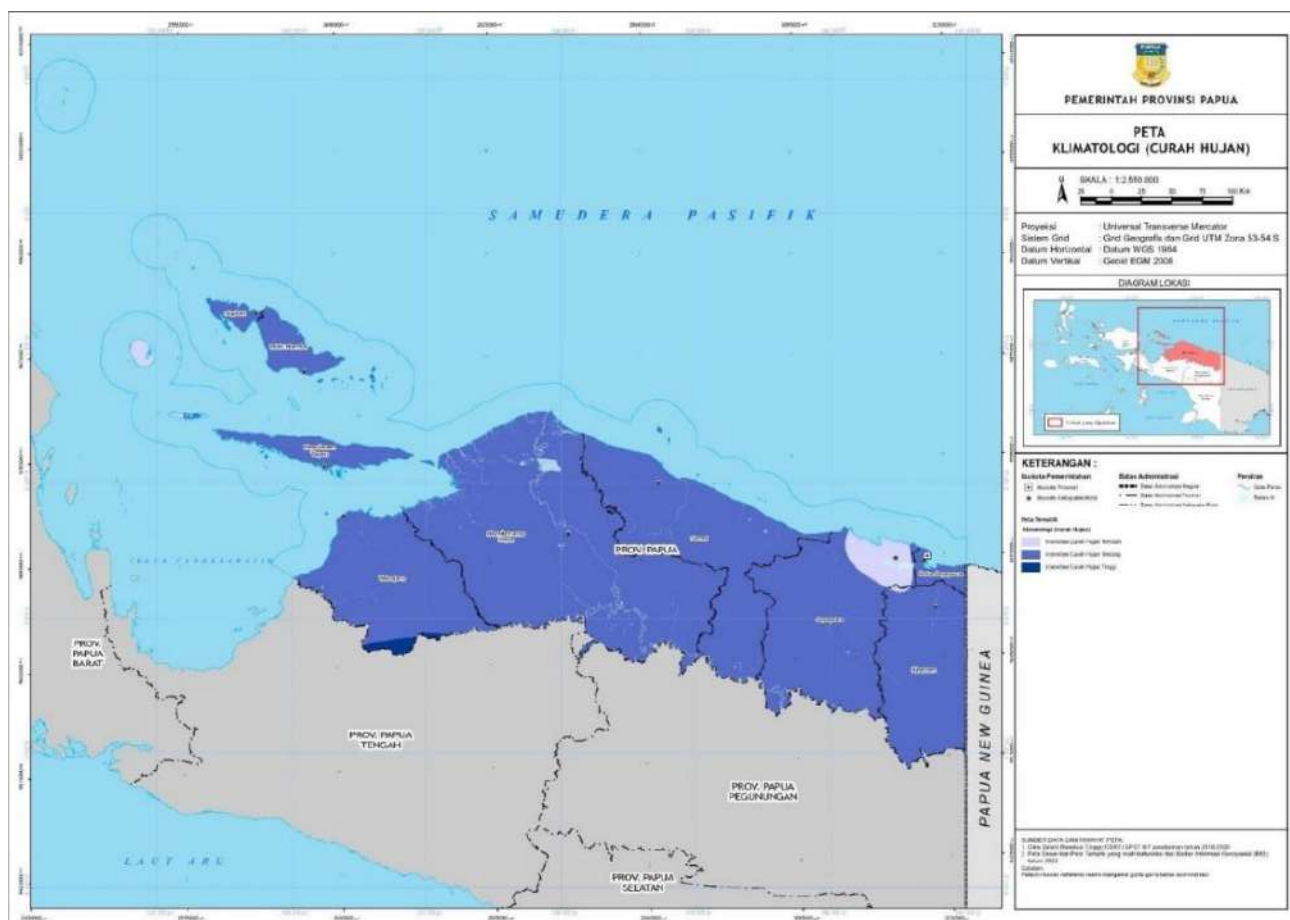
Curah Hujan Rata-Rata		Kabupaten	Area (Ha)
(MM/HARI)	(KLASIFIKASI)		
13.6 - 20.7	Rendah	Kabupaten Mamberamo Raya	2.061.000,76
		Kabupaten Jayapura	231.827,70
		Kabupaten Waropen	598.620,64
		Kabupaten Biak Numfor	142.571,76
		Kabupaten Sarmi	80.590,06
		Kabupaten Kepulauan Yapen	70.456,50
13.6 - 20.7 Total			3.185.067,42
20.7 - 27.7	Sedang	Kabupaten Sarmi	1.326.311,90
		Kabupaten Jayapura	1.155.495,19
		Kabupaten Mamberamo Raya	743.346,31
		Kabupaten Waropen	479.592,25
		Kabupaten Keerom	188.503,46
		Kabupaten Kepulauan Yapen	172.385,71
		Kabupaten Biak Numfor	83.429,94
		Kabupaten Supiori	66.069,33
		Kota Jayapura	29.999,49



Curah Hujan Rata-Rata		Kabupaten	Area (Ha)
(MM/HARI)	(KLASIFIKASI)		
20.7 - 27.7 Total			4.245.133,58
27.7 - 34.8	Tinggi	Kabupaten Keerom	764.128,08
		Kota Jayapura	53.569,50
		Kabupaten Jayapura	20.938,73
27.7 - 34.8 Total			838.636,31
Grand Total			8.268.837,31

Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Papua

Gambar. 1. Peta Klimatologi Provinsi Papua



Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Papua

1.4.1.5. Demografi

Pada tahun 2022 Jumlah Penduduk Laki-laki di Provinsi Papua lebih tinggi yaitu 542,14



ribu jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan yang hanya sebesar 491,34 ribu jiwa, dengan Sex Ratio 110,34%. Jumlah penduduk terendah di Provinsi Papua adalah Kabupaten Supiori sebanyak 23,48 Ribu jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling tertingginya adalah Kota Jayapura sebanyak 408,99 ribu jiwa berdasarkan tabel II.16 dibawah. Hal tersebut dikarenakan Kota Jayapura merupakan Ibukota Provinsi Papua dengan Fasilitas Pendidikan, Kesehatan yang cukup memadai dan juga merupakan pusat pemerintahan dari Provinsi Papua.

Tabel 1.5. Jumlah Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2016-2022

No.	Kabupaten /Kota	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 (Jiwa)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2022	2022
1	Jayapura	123.780	125.975	128.587	131.802	166.171	168.476	169,97
2	Kep. Yapen	93.114	95.007	97.412	101.204	112.676	114.210	115,47
3	Biak Numfor	141.801	144.697	148.404	152.401	134.650	135.231	137,67
4	Sarmi	37.511	38.210	39.406	40.515	41.515	41.849	42,28
5	Keerom	54.130	55.018	55.799	57.100	61.623	62.157	62,82
6	Waropen	28.803	29.480	30.612	31.514	33.943	34.414	34,83
7	Supiori	18.486	19.104	20.018	20.710	22.547	22.860	23,48
8	Mam. Raya	21.821	22.313	23.307	24.086	36.483	36.989	37,88
9	Kota Jayapura	288.786	293.690	297.775	300.192	398.478	404.004	408,99
Provinsi Papua		808.232	823.494	841.320	859.524	1.008.086	1.020.190	1.033,39

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022

Tabel 1.6. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Provinsi Papua Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020 (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jayapura	86.742	79.429	166.171
2	Kepulauan Yapen	58.496	54.180	112.676
3	Biak Numfor	69.060	65.590	134.650
4	Sarmi	22.116	19.399	41.515
5	Keerom	32.530	29.093	61.623



No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020 (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
6	Waropen	18.002	15.941	33.943
7	Supiori	11.729	10.818	22.547
8	Mamberamo Raya	19.148	17.335	36.483
9	Kota Jayapura	212.438	186.040	398.478
Provinsi Papua		530.261	477.825	1.008.086

Sumber : BPS Provinsi Papua , 2022

Pada Tahun 2022 Total Orang Asli Papua di Provinsi Papua sebanyak 738.208 Jiwa, dengan jumlah penduduk Orang Asli Papua terbanyak ada pada Kota Jayapura sebanyak 217.767 Jiwa dan terendah ada pada Kabupaten Supiori sebanyak 23,591 Jiwa.

Tabel 1.7. Jumlah Penduduk Orang Asli Papua (OAP) Tahun 2022

No	Kab/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Kota Jayapura	118.037	99.730	217.767
2	Jayapura	75.916	68.839	144.755
3	Biak Numfor	62.029	58.865	120.894
4	Kepulauan Yapen	49.490	47.014	96.504
5	Keerom	19.728	16.442	36.170
6	Mamberamo Raya	18.416	16.911	35.327
7	Sarmi	17.474	15.397	32.871
8	Waropen	15.916	14.413	30.329
9	Supiori	12.238	11.353	23.591
Provinsi Papua		389.244	348.964	738.208

Sumber : Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2022

Laju Pertumbuhan penduduk Provinsi Papua periode 2010-2020 sebesar 3,32 persen per tahun dan perbandingan pertumbuhan pada tahun 2020-2022 sebesar 1,54 persen. Dengan demikian laju pertumbuhan penduduk Papua periode ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang sebesar 1,25 persen.



Tabel 1.8. Laju pertumbuhan Penduduk Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)			
		Jumlah Penduduk (2020)	Jumlah Penduduk (2022)	LPP 2010-2020	LPP 2020-2022
1	Jayapura	166.171	169.97	3,9	2,16
2	Kepulauan Yapen	112.676	115.47	3,01	2,91
3	Biak Numfor	134.650	137.67	0,58	2,66
4	Sarmi	41.515	42.28	2,25	2,15
5	Keerom	61.623	62.82	2,34	2,30
6	Waropen	33.943	34.83	3,15	3,11
7	Supiori	22.547	23.48	3,45	4,82
8	Mamberamo Raya	36.483	37.88	6,87	4,41
9	Kota Jayapura	398.478	408.99	4,35	3,07
Provinsi Papua		1.008.086	1.020.190	3,32	2,52

Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023, (Data diolah)

Kepadatan penduduk di Provinsi Papua sebesar 8,30 jiwa/km². Wilayah Kabupaten/kota yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Kota Jayapura 436,99 jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kabupaten Waropen yaitu sebesar 1,09 jiwa/km². Adapun rincian kepadatan penduduk per kabupaten/kota di Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.9. Kepadatan Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2022

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (ribu jiwa) 2022	Luas Wilayah Kabupaten/ Kota	Luas Terbangun (Permukiman perkotaan dan Permukiman Kampung)	Kepadatan Penduduk (Jiwa Per Ha)	
					Menurut Luas Wilayah Kab/ Kota	Menurut Luas Terbangun
1	Jayapura	166,171	11,157	2,157.15	0	79
2	Kepulauan Yapen	112,676	2,050	1,471.22	1	79
3	Biak Numfor	134,650	2,602	497.36	1	277
4	Sarmi	41,515	17,742	7,995.25	0	5
5	Keerom	61,623	8,390	5,841.14	0	11
6	Waropen	33,943	10,977	4,637.76	0	8



No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (ribu jiwa) 2022	Luas Wilayah Kabupaten/ Kota	Luas Terbangun (Permukiman perkotaan dan Permukiman Kampung)	Kepadatan Penduduk (Jiwa Per Ha)	
					Menurut Luas Wilayah Kab/ Kota	Menurut Luas Terbangun
7	Supiori	22,547	678	1,018.13	0	23
8	Mamberamo Raya	36,483	23,814	2,021.96	0	19
9	Kota Jayapura	398,478	936	733.69	4	550
Total		841,915	67,189	24,216.51	6	972

Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023, (Data diolah)

1.4.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pada tahun 2023, Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura mencatat ada sebanyak 89.472 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Papua. Secara lebih lanjut, jumlah PNS ini didominasi oleh laki-laki sebanyak 52.085 orang atau 58,21 persen. Berdasarkan struktur organisasi menunjukkan sebanyak 14,19 persen PNS merupakan aparatur di Kantor Pemerintahan Provinsi Papua sedangkan sisanya tersebar di 29 kantor pemerintahan tingkat kabupaten/kota.

Tabel 1.10. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2023

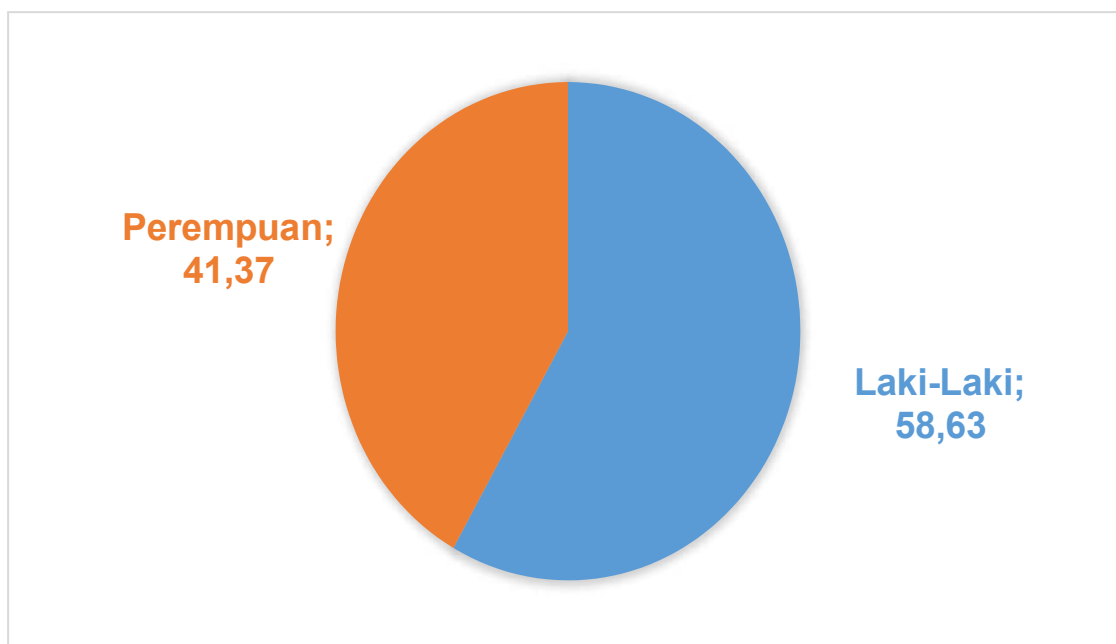
Tingkat Pendidikan	2023		Jumlah
	Laki Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
SD (Sekolah Dasar)	109	9	118
SMP (Sekolah Menengah Pertama)	205	31	236
SMA (Sekolah Menengah Atas)	4 402	1 962	6 364
Diploma I/Akta I	208	75	283
Diploma II/Akta II	118	37	155
Diploma III/Akta III	1 217	1 192	2 409



Tingkat Pendidikan	2023		Jumlah
	Laki Laki	Perempuan	
Diploma IV/Akta IV	440	256	696
S1/Sarjana	6 809	6 178	12 987
S2/Pasca Sarjana	2 013	1 263	3 276
S3/Doktor/Ph.D	122	38	160
Jumlah/Total	15 643	11 041	26 684

Sumber : Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura

Gambar 1.5. Persentase Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua (persen), 2023



Sumber : Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura



Tabel 1.11. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2023

Jabatan	2022			2023		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama	36	7	43	42	7	49
Administrator	195	57	252	229	58	287
Pengawas	417	243	660	447	262	709
Esalon V	3	3	3	3
Jabatan Fungsional Dosen	1 825	2 270	4 095	1 827	2 277	4 104
Jabatan Fungsional Guru
Jabatan Fungsional Medis	201	701	902	195	728	923
Jabatan Fungsional Teknis	178	102	280	174	103	277
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	4 005	2 974	6 979	3 909	2 879	6 788
Jumlah/Total	6 857	6 357	13 214	6 823	6 317	13 140

Sumber : Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura (Data diolah)

Tabel 1.12. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, Desember 2023

Tingkat Pendidikan	2023		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. I/A(Juru Muda)	6		6



Tingkat Pendidikan	2023		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
2. I/B(Juru Muda Tingkat I)	27	2	29
3. I/C(Juru)	44	3	47
4. I/D(Juru Tingkat I)	80	11	91
Golongan I	157	16	173
5. II/A(Pengatur Muda)	601	207	808
6. II/B(Pengatur Muda Tingkat I)	759	327	1 086
7. II/C(Pengatur)	1 413	616	2 029
8. II/D(Pengatur Tingkat I)	1 314	684	1 998
Golongan II	4 087	1 834	5 921
9. III/A(Penata Muda)	2 368	1 769	4 137
10. III/B(Penata Muda Tingkat I)	2 479	1 942	4 421
11. III/C(Penata)	1 919	1 695	3 614
12. III/D(Penata Tingkat I)	2 494	2 103	4 597
Golongan III	9 260	7 509	16 769
13. IV/A (Pembina)	1 212	1 069	2 281
14. IV/B (Pembina Tingkat I)	756	579	1 335
15. IV/C (Pembina Utama Mada)	95	24	119
16. IV/D (Pembina Utama Madya)	43	8	51
17.IV/E (Pembina Utama)	33	2	35
Golongan IV	2 139	1 682	3 821
Jumlah/Total	15 643	11 041	26 684

Sumber : Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura (Data diolah)

1.5. Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.5.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Papua, yang menggambarkan



perbandingan antara Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan presentase Kontribusi dan presentase capaiannya.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. PENDAPATAN DAERAH **Rp3.643.143.738.502,00**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Realisasi Pendapatan-LRA Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.733.670.617.987 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah-LRA, Pendapatan Transfer-LRA, dan Lain-lain pendapatan yang Sah-LRA dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.13
Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.177.838.112.117,00	770.916.168.972,09	65%
PENDAPATAN TRANSFER	2.465.305.626.385,00	2.444.887.208.362,00	99%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	517.867.240.653,00	

Sumber : BPKAD Provinsi Papua

Tabel 1.9. menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan-LRA TA 2023 mencapai nilai sebesar Rp3.733.670.617.987 atau mencapai 102% dari Anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.643.143.738.502

Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1. Pendapatan Asli Daerah-LRA **Rp1.177.838.112.117,00**

Pendapatan Asli Daerah-LRA, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah-LRA Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 bersumber dari: pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah lainnya yang sah dirinci sebagai berikut:



Tabel 1.14
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
Pajak Daerah	478.830.000.000,00	518.641.672.099,00	108%
Retribusi Daerah	16.484.000.000,00	17.180.906.474,00	104%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	494.518.763.000,00	45.177.723.145,00	9%
Lain-lain PAD yang Sah	188.005.349.117,00	189.915.867.254,09	101%

Tabel 1.10. menggambarkan bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Provinsi Papua pada TA 2023 sebesar Rp2.226.754.654.927,36 atau mencapai 108,53 % dari Anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar 2.152.707.624.061,00.

Keadaan ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah telah melebihi dari target Pendapatan Asli Daerah Anggaran Tahun 2023, dengan rincian kontribusinya sebagai berikut :

- 1) Realisasi pendapatan pajak daerah-LRA lebih sebesar Rp1.235.493.977.265,00 atau menyumbang kontribusi sebesar 55,48% ;
- 2) Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp17.713.806.139,00 menyumbang kontribusi sebesar 0,80%;
- 3) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan realisasi sebesar Rp766.991.557.636,00 menyumbang kontribusi sebesar 100,03%, dan;
- 4) lain-lain PAD yang sah realisasinya sebesar Rp206.555.313.887,36 menyumbang kontribusi sebesar 66,89%.

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LRA Rp1.235.493.977.265,00

Pajak Daerah Provinsi Papua merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Papua, sedangkan pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA TA 2023 dirinci sebagai berikut:



Tabel 1.15
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	124.682.000.000,00	136.100.156.000,00	109%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	73.591.000.000,00	68.867.332.000,00	94%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	118.390.000.000,00	138.233.071.480,00	117%
Pajak Air Permukaan	773.000.000,00	1.042.671.310,00	135%
Pajak Rokok	161.394.000.000,00	174.398.441.309,00	108%

Tabel 1.11. menunjukkan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp1.235.493.977.265,00 atau mencapai 115,50% dari yang ditargetkan dalam APBD TA 2023 sebesar Rp1.069.726.272.973,00.

Kontribusi terbesar disumbang oleh Pajak Rokok sebesar 27,27%, sedangkan kontribusi terkecil disumbang oleh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 12,21%. Namun capaian terbesar didapatkan oleh Pajak Rokok sebesar 134,78%, sedangkan capaian terkecil oleh Pajak Air Permukaan sebesar 105.92%.

1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Rp16.484.000.000,00

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Papua, sedangkan pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA TA 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.16
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
Retribusi Jasa Umum	13.518.000.000,00	13.098.027.074,00	97
Retribusi Jasa Usaha	2.956.000.000,00	3.496.419.400,00	118
Retribusi Perizinan Tertentu	10.000.000,00	586.460.000,00	5865

Tabel ini menunjukkan bahwa Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 terealisasi sebesar Rp17.713.806.139,00 atau mencapai 239,05% dari anggarannya sebesar Rp7.410.091.220,00. Keadaan ini menggambarkan pencapaian target Retribusi Daerah yang luar biasa pada Tahun Anggaran 2023.



Sumbangsih terbesar dihasilkan oleh Retribusi Jasa Umum yang menyumbang 67,27%, diikuti Retribusi Jasa Usaha sebesar 21,78% dan Retribusi Perijinan Terpadu sebesar 20,95%.

1.1.2. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan-LRA

Rp494.518.763.000,00

Realisasi Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirincikan sebagai berikut :

- 🏛️ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebesar Rp0;
- 🏛️ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp45.177.723.145,00.

Jumlah ini menunjukkan capaian sebesar 9% dari Anggaran yang ditetapkan pada TA. 2023.

1.1.3. Lain-lain PAD yang sah-LRA

Rp206.555.313.887,36

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Tabel 1.17
Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	250.000.000,00	239.894.237,00	96%
Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	637.440,00	
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	96.799.000,00	
Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	35.188.288.288,00	
Jasa Giro	5.625.393.000,00	17.263.662.139,14	307%
Pendapatan Bunga	0,00	60.000,00	
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	22.936.585.774,10	
Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain	350.000.000,00	2.352.625.242,00	672%
Pendapatan Denda Pajak Daerah	6.000.000.000,00	8.198.038.600,00	137%
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	145.000,00	
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	112.600.000,00	
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	401.071.804,00	
Pendapatan BLUD	175.779.956.117,00	96.453.740.255,85	55%
Remunerasi	0,00	3.053.891.074,00	

Tabel 1.17. menunjukkan bahwa capaian realisasi Lain-lain PAD yang sah TA 2023 sebesar



Rp206.555.313.887,36 atau 66,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp308.803.312.881,00.

Kontribusi terbesar pada Lain-lain PAD yang sah adalah Pendapatan BLUD sebesar 53,23%.

1.2. **Pendapatan Transfer-LRA Rp8.556.115.847.128,00**

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang oleh Pemerintah Provinsi Papua dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Pendapatan transfer Pemerintah Pusat, yang terdiri dari dana perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan dibentuk untuk mendukung pendanaan program otonomi daerah.

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.18
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.465.305.626.385,00	2.444.887.208.362,00	99%

Tabel 1.18. Menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.444.887.208.362,00 atau 99% dari yang dianggarkan pada APBD sebesar Rp2.444.887.208.362,00

Rincian Alokasi dan realisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.19
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
Dana Perimbangan	1.414.106.968.385,00	1.393.688.550.362,00	99%
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	1.051.198.658.000,00	1.051.198.658.000,00	100%



Tabel 1.19. menunjukkan bahwa realisasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur memiliki angka capaian 100%, sedangkan realisasi Dana Perimbangan memiliki angka capaian 99%.

1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA Rp517.867.240.653,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp517.867.240.653,00. Nilai ini secara keseluruhan didapatkan dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, dengan rincian sebagai berikut :

1.3.1 Pendapatan Hibah-LRA Rp486.710.723.915,00

Pendapatan hibah adalah pendapatan berupa uang atau barang/jasa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN/BUMD, maupun Lembaga/Badan/Organisasi lainnya.

Realisasi Pendapatan Hibah-LRA TA 2023 memiliki nilai capaian sebesar 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.20
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah-LRA Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0,00	485.021.909.391,00	
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	1.688.814.524,00	

1.3.2 Pendapatan Lainnya – LRA Rp31.156.516.738,00

Lain - lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Realisasi Pendapatan Daerah Lainnya-LRA TA 2023 merupakan Pendapatan atas Pengembalian yang terealisasi sebesar Rp31.156.516.738,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.

2. BELANJA Rp5.884.616.768.664,00

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar. Anggaran dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp5.884.616.768.664,00 dan Rp 5.031.849.735.510,84 dirinci sebagai berikut:



Tabel 1.21
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua TA 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
BELANJA OPERASI	4.580.998.993.122,00	3.936.448.977.955,35	86%
BELANJA MODAL	574.018.429.744,00	493.844.957.419,80	86%
BELANJA TIDAK TERDUGA	278.028.534.465,00	163.855.515.062,69	59%
BELANJA TRANSFER	451.570.811.333,00	437.700.285.073,00	97%

2. SURPLUS/DEFISIT (Rp412.409.470.142,26)

Surplus/(Defisit) timbul sehubungan dengan selisih antara pendapatan dan belanja. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Surplus/(Defisit) Tahun Anggaran 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.22
Surplus/(Defisit) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
PENDAPATAN DAERAH	3.643.143.738.502,00	3.733.478.963.509,09	102,48	11.040.109.011.239,36
BELANJA DAERAH	5.884.616.768.664,00	5.031.850.867.222,63	85,51	11.454.657.535.165,83
SURPLUS / DEFISIT	(2.241.473.030.162,00)	(1.298.371.903.713,54)	0	(414.548.523.926,47)

Berdasarkan realisasi Pendapatan-LRA selama TA 2023 sebesar Rp3.733.478.963.509,09 dan realisasi Belanja sebesar Rp5.031.850.867.222,63, maka Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 mengalami **DEFISIT** anggaran sebesar **Rp1.298.371.903.713,54**

3. PEMBIAYAAN NETO Rp2.209.478.903.261,04

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, penggunaan SiLPA, Pencairan Dana Cadangan dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah Provinsi Papua.

Pembiayaan Neto pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dirinci sebagai berikut:



Tabel 1.23
Pembiayaan Neto Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.272.073.030.162,00	2.292.859.062.280,57	100,91	2.229.401.510.206,04
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.600.000.000,00	25.600.000.000,00	83,66	20.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	2.241.473.030.162,00	2.267.259.062.280,57	101,15	2.209.401.510.206,04
	0,00	968.887.158.567,03	0	1.794.852.986.279,57

Pembiayaan Netto pada TA 2022 sebesar Rp2.209.401.510.206,04 mengalami kenaikan sebesar Rp2.241.473.030.162,00 atau (101,15%) menjadi sebesar Rp2.267.259.062.280,57 pada TA 2023.

4.1. Penerimaan Pembiayaan Rp2.272.073.030.162,00

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penggunaan SiLPA, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan TA 2023 sebesar Rp2.272.073.030.162,00 berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) TA 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.24
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Provinsi Papua
TA 2023 dan Realisasi TA 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.772.073.030.162,00	1.792.859.062.280,57	101,17	1.929.248.255.479,04
Pencairan Dana Cadangan	500.000.000.000,00	500.000.000.000,00	100,00	300.153.254.727,00

4.1.1. Penggunaan SiLPA Rp1.772.073.030.162,00

Penggunaan SiLPA TA 2023 sebesar Rp1.772.073.030.162,00 merupakan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp1.929.248.255.479,04.

4.1.2 Pencairan Dana Cadangan Rp500.000.000.000,00

Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan



untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 melakukan pencairan dana Cadangan sebesar Rp500.000.000.000,00 atau 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000.000,00.

4.2. Pengeluaran Pembiayaan Rp30.600.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada TA 2023 sebesar Rp30.600.000.000,00 dan TA 2022 terealisasi sebesar Rp20.000.000.000,00,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.25
Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Tahun Anggaran 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
Penyertaan Modal Daerah	30.600.000.000,00	25.600.000.000,00	83,66	20.000.000.000,00

4.2.1. Pembentukan Dana Cadangan Rp. 0,00

Pemerintah Provinsi Papua, pada Tahun Anggaran 2023 melakukan pembentukan dana cadangan sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00.

4.2.2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp30.600.000.000,00

Pembayaran Penyertaan Modal Daerah dari Pemerintah Provinsi Papua pada Pembayaran Penyertaan Modal Daerah dari Pemerintah Provinsi Papua pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA Tahun 2023.

4.2.3 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp0,00

Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 tidak terdapat Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri atau nihil

5. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN Rp969.092.669.150,82

Dalam penyusunan APBD, SILPA/SIKPA akan selalu **NIHIL** karena jumlah surplus atau defisit harus ditetapkan rencana pemanfaatannya atau penutupannya. SILPA merupakan selisih antara penerimaan



anggaran dikurangi dengan pengeluaran anggaran. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.26
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Provinsi Papua
TA 2023 dan Realisasi TA 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023
SURPLUS / DEFISIT	(414.548.523.926,47)	(1.298.179.117.523,75)
PEMBIAYAAN NETTO	2.209.401.510.206,04	2.267.271.786.674,57
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.794.852.986.279,57	969.092.669.150,82

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan sampai dengan tutup TA 2023 sebesar Rp969.092.669.150,82 merupakan akumulasi SiLPA sampai dengan 31 Desember 2023. Sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan sampai dengan tutup Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.794.852.986.280,57 merupakan akumulasi SILPA sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.



BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN 2023



BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2023

Pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023 merupakan implementasi RPJMD Provinsi Papua Tahun 2018-2023 tahap kelima dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pembangunan daerah tahun 2023 diarahkan pada **"Memastikan terwujudnya Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera sebagai dasar pembangunan Papua yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan tetap terdapat dalam mempertahankan alam dan budaya sebagai aset bagi kehidupan seluruh masyarakat Papua."** dengan prioritas 1). Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM; 2). Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan; 3.) percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas; 4). Peningkatan keamanan dan ketertiban; dan 5). Peningkatan tata kelola pemerintahan. Arah kebijakan dan prioritas daerah Provinsi Papua tahun 2023 tersebut telah dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), juga sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.

Selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara perencanaan pembangunan daerah. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 343 yaitu bahwa,



- 1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- 2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan Ketua DPRD.
- 3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
- 4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.
- 5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- 6) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan: a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; b. Target sasaran pembangunan Daerah; c. Prioritas pembangunan Daerah; d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- 7) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
- 8) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.



- 9) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 10) Perubahan RKPD disusun dengan tahapan:
Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
 - a. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
 - b. Penetapan.
- 11) Penyusunan rancangan perubahan RKPD dimulai paling lambat pada awal bulan Juni. Rancangan perubahan RKPD disusun berpedoman pada:
 - a. Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
 - b. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

2.1. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

Setiap sasaran pembangunan didukung oleh program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan dan target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil RKPD disusun per prioritas pembangunan dan sasaran sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2023 bertujuan untuk:

1. Menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah,
2. Konsistensi antara dokumen perencanaan,
3. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang ditetapkan,
4. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan,
5. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RPJMD dan RKPD,
6. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya.



2.1.1. Capaian Realisasi Indikator Makro sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Indikator makro merupakan indikator kinerja utama Gubernur yang menjadi alat ukur ketercapaian visi dan misi pada akhir periode RPJMD. Keberhasilan visi dan misi tersebut diukur dari pencapaian kinerja Perangkat Daerah terhadap target indikator sasaran pembangunan daerah. Capaian indikator makro pembangunan Papua sampai dengan Triwulan II-2023 menggambarkan kinerja aspek pembangunan manusia yang diwakili oleh indikator Indeks Pembangunan Manusia dan aspek Pembangunan Ekonomi yang diwakili oleh indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, dan tingkat kemiskinan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 2.1 Target dan Realisasi Indikator Makro Triwulan II Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Sasaaran	Satuan	Target 2023 (RPJMD)	Target 2023 (RKPD)	Realisasi 2023 Triwulan I	Kinerja Capaian 2023 (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	65,47	61,65	67,67	109,77
2.	Tingkat Kemiskinan	%	20	25,00	25,29	98,85
3.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5 - 6,5	5,3 - 5,9	(2,39)	(45)
4.	PDRB Perkapita (TT)	Juta Rp	50	48,23	45,60	94,55
5.	Rasio Gini	%	0,3845	0,390	0,3887	100,33
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,00	3,18	3,49	91,11
7.	Intensitas Emisi GRK	ton CO2 per juta rupiah	0,282	0,311	n/a	n/a

Sumber : P-RKPD 2023 dan Data Indikator Penting Provinsi Papua BPS Juli 2023



2.1.2. Capaian Realisasi Organisasi Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Indikator makro merupakan indikator kinerja utama Gubernur yang menjadi alat ukur ketercapaian visi dan misi pada akhir periode RPJMD. Keberhasilan visi dan misi tersebut diukur dari pencapaian kinerja Perangkat Daerah terhadap target indikator sasaran pembangunan daerah. Capaian indikator makro pembangunan Papua sampai dengan Triwulan II-2023 menggambarkan kinerja aspek pembangunan manusia yang diwakili oleh indikator Indeks Pembangunan Manusia dan aspek Pembangunan Ekonomi yang diwakili oleh indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, dan tingkat kemiskinan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Realisasi Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU	TARGET & REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II*)					
			REALISASI ANGGARAN (Rp)			REALISASI KINERJA (k)		
			Bobot (%)	Realisasi	%	Target	Realisasi	Kinerja Capaian (%)
1	Dinas Pendidikan, Perpustakaan Dan Arsip Daerah	159.224.519.662	4.61	68.177.560.796	42,82	100	1,74	
2	Dinas Kesehatan	85.280.593.464	2.47	15.654.947.920	18,36	100	15,52	
3	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura	208.739.526.329	6.05	42.063.085.354	20,15	100	0,00	
4	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura (Blud)	78.000.000.000	2.26	0.00	0.00	100	0,00	
5	Rumah Sakit Jiwa	24.972.109.119	0.72	9.788.869.760	39,2	100	39,37	
6	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura	80.917.799.540	2.34	29.298.579.486	36,21	100	36,30	
7	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura (Blud)	75.000.000.000	2.17	0.00	0.00	100	0,00	
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	673.623.183.560	19.51	25.712.716.102	3,82	100	3,90	
9	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Bencana Daerah	22.504.298.150	0.65	9.716.813.515	43,18	100	40,33	

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023



NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU	TARGET & REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II*)					
			REALISASI ANGGARAN (Rp)			REALISASI KINERJA (k)		
			Bobot (%)	Realisasi	%	Target	Realisasi	Kinerja Capaian (%)
10	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	33.233.420.190	0.96	11.826.123.167	35,58	100	24,95	
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Da Tenaga Kerja	38.256.463.074	1.11	13.406.640.184	35,04	100	34,96	
12	Dinas Pertanian Dan Pangan	61.902.153.325	1.79	22.979.079.206	37,12	100	30,3	
13	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	74.957.241.420	2.17	33.066.640.228	44,11	100	44,15	
14	Cabang Dinas Kehutanan Jayapura	600.000.000	0.02	0.00	0,00	100	0,00	
15	Cabang Dinas Kehutanan Sarmi	600.000.000	0.02	0.00	0,00	100	0,00	
16	Cabang Dinas Kehutanan Keerom	848.514.925	0.02	0.00	0,00	100	0,00	
17	Cabang Dinas Kehutanan Mamberamo Raya	600.000.000	0.02	0.00	0,00	100	0,00	
18	KPHP UNIT XVII Waropen	600.000.000	0.02	0.00	0,00	100	0,00	
19	KPHP UNIT XXI Lintas Sarmi Mamberamo Raya	600.000.000	0.02	0.00	0,00	100	0,00	
20	KPHP UNIT XXIII Sarmi	500.000.000	0.01	0.00	0,00	100	0,00	
21	KPHP UNIT XIX Kepulauan Yapen	799.995.000	0.02	0.00	0,00	100	0,00	
22	KPHL UNIT XX Biak	899.999.989	0.03	0.00	0,00	100	0,00	
23	KPHP UNIT XXVIII Kota Jayapura	400.000.000	0.01	0.00	0,00	100	0,00	
24	KPHP UNIT XXIX Keerom	1.099.999.793	0.03	0.00	0,00	100	0,00	
25	UPTD Kebun Raya Koya Koso	850.000.000	0.02	0.00	0,00	100	0,00	
26	BPTH Papua	850.000.000	0.02	0.00	0,00	100	0,00	
27	UPTD Taman Burung Dan Taman Angrek	850.000.000	0.02	0.00	0,00	100	0,00	
28	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Papua	241.718.350	0.01	0.00	0,00	100	0,00	
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Orang Asli Papua	29.505.402.600	0.85	4.498.660.925	15,25	100	18,93	
30	Dinas Perhubungan	37.894.097.010	1.1	7.717.967.565	20,37	100		

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023



NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU	TARGET & REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II*)					
			REALISASI ANGGARAN (Rp)			REALISASI KINERJA (k)		
			Bobot (%)	Realisasi	%	Target	Realisasi	Kinerja Capaian (%)
31	Dinas Komunikasi Dan Informatika	17.791.251.300	0.52	6.394.395.788	35,94	100	50	
32	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.001.208.622	0.55	5.242.916.810	27,59	100	-	
33	Dinas Olah Raga Dan Pemuda	15.686.708.196	0.45	9.475.820.425	60,41	100	-	
34	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	40.469.705.900	1.17	8.066.817.444	19,93	100	0,01	
35	Dinas Kelautan Dan Perikanan	34.120.636.897	0.99	659.948.453	1,93	100	-	
36	Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral	39.901.832.925	1.16	9.679.311.866	24,26	100	32,35	
37	Sekretariat Daerah	120.302.293.722	3.48	28.584.607.863	23,76	100	27,66	
38	Biro Umum Dan Protokol	34.147.901.900	0.99	18.848.296.348	55,2	100	17,24	
39	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	21.603.106.650	0.63	6.080.314.459	28,15	100	34,7	
40	Biro Tata Pemerintahan Dan Otonomi Khusus	22.633.098.622	0.66	8.527.752.536	37,68	100	37,69	
41	Biro Hukum	27.448.726.913	0.79	5.194.016.784	18,92	100	-	
42	Biro Organisasi	20.737.042.150	0.6	1.965.803.311	9,48	100	-	
43	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	282.053.782.528	8.17	106.316.944.099	37,69	100	52,14	
44	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	42.890.474.701	1.24	24.416.698.064	56,93	100	-	
45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	48.563.285.285	1.41	19.399.497.699	39,95	100	1,87	
46	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah	717.214.212.215	20.77	305.115.504.444	42,54	100	-	
47	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	67.687.683.100	1.96	23.574.813.291	34,83	100	34,52	
48	Badan Kepegawaian Daerah	40.917.497.280	1.18	9.369.158.500	22,9	100	0,44	
49	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	50.303.535.730	1.46	11.598.539.267	23,06	100	-	
50	Badan Pengelola Perbatasan Dan Kerja Sama	15.955.005.120	0.46	4.611.119.371	28,9	100	15,86	
51	Badan Penghubung Daerah	15.491.025.329	0.45	4.654.616.757	30,05	100	-	
52	Inspektorat	40.600.447.813	1.18	11.260.163.882	27,73	100	20,22	
53	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	23.074.954.180	0.67	3.640.888.604	15,78	100	0,12	



NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU	TARGET & REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II*)					
			REALISASI ANGGARAN (Rp)			REALISASI KINERJA (k)		
			Bobot (%)	Realisasi	%	Target	Realisasi	Kinerja Capaian (%)
JUMLAH TOTAL		3.452.946.452.578	100	933.448.799.641	27,03	100	8,44	

2.1.3. Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Adapun permasalahan pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan kedua (2) Tahun 2023, diklasifikasi sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan pada konsistensi dokumen-dokumen perencanaan masih rendah,
2. Capaian realisasi indikator-indikator dan target serta realisasi menurut prioritas masih rendah,
3. Capaian kinerja dan kinerja capaian anggaran serta fisik SKPD/OPD, tidak seimbang (balance)
4. Rata-rata Realisi fisik dan keuangan Program/Kegiatan Tahun 2022 di atas 80% kategori tinggi, namun belum optimal. Beberapa masalah yang menyebabkan daya serap terutama realisasi fisik kurang, dikarenakan :
 - a. Jadwal lelang yang terlambat
 - b. Terjadi keadaan luar biasa (force di mayore), beberapa diantaranya seperti permasalahan tanah, dll.
 - c. Adanya Pandemi Covid-19
 - d. Keterlambatan pencairan, (proses keuangan), SKPD/OPD kurang intensif mengisi Tabel F5 di TP2K sebagai soft pengendali Program/Kegiatan di Bappeda Provinsi Papua, sehingga tidak bisa menampilkan data kinerja program/kegiatan secara benar/utuh.
5. Capaian kinerja sasaran RPJMD Masih banyaknya data-data yang tidak bisa didiskripsikan karena tidak dilaksanakannya Pengendalian dan evaluasi RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 secara kontinyu.



2.2. Gambaran Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Tahun 2023 merupakan tahun ke empat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2018-2023. Guna mengukur kemajuan pembangunan digunakan beberapa indikator makro, yaitu pertumbuhan ekonomi, gini rasio, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua 2019-2023, kebijakan ekonomi daerah diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan investasi melalui pengembangan ekonomi lokal yang unggul berbasis kewilayahan, berkeadilan dan berkelanjutan. Sebagaimana yang termuat dalam Misi ke-4 RPJMD Provinsi Papua 2019-2023 yaitu Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural Secara Berkelanjutan.

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Papua 2019-2023, pembangunan ekonomi Provinsi Papua tahun 2023 akan diarahkan pada 3 (tiga) orientasi pembangunan yaitu : (1) Orientasi Pembangunan Manusia; (2) Orientasi Pertumbuhan dan Potensi Unggulan; dan (3) Orientasi Pemerataan, Keadilan dan Kewilayahan. Ketiganya ini menjadi rujukan rumusan grand strategy pembangunan ekonomi 2023 yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Strategi pembangunan ekonomi berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (fullfilmen of basic needs).
2. Strategi ini bertujuan pada perbaikan kualitas hidup, peningkatan produksi dan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja baru, upah layak sehingga tercapai tingkat hidup minimal untuk seluruh masyarakat.
3. Strategi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang bertumpu pada masyarakat (people centered development).

Menurut Asian Development Bank, pertumbuhan inklusif ialah pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan yang akan menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi, serta memastikan akses yang lebih luas kepada semua lapisan masyarakat. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Oleh



karena itu pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif.

4. Strategi pembangunan ekonomi kewilayahan kontekstual (contextual regional economic development).

Makna kontekstual ini dapat diartikan sebagai makna yang muncul berdasarkan konteksnya. Papua adalah salah satu daerah di Indonesia yang sangat unik, karena terdiri atas ratusan suku bangsa dan bahasa, dengan zona ekologi kewilayahannya yang berbeda satu sama lainnya. Sehingga membangun Papua tidak dapat dilakukan secara simetris atau disamaratakan untuk semua wilayah. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi kewilayahan di Papua yang kontekstual merupakan pembangunan yang memperhatikan : (1) Zona Ekologi yang meliputi ekologi dan sistem mata pencaharian, etika kerja, dan lingkungan lokal; (2) Kearifan Lokal yang mencakup sistem penguasaan tanah, agama dan sistem kepercayaan; dan (3) Sosio Budaya yang meliputi struktur sosial, nilai-nilai budaya dan sistem politik.

Kinerja perekonomian tergambar pada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua pada triwulan I-2023 dibandingkan dengan triwulan I-2022 mengalami kontraksi sedalam -2,39 persen (y-on-y), namun jika dilihat tanpa pertambangan dan penggalian ekonomi Papua mengalami pertumbuhan 4,67 persen. Hal ini menunjukkan sebagian besar pertumbuhan ekonomi Papua masih didominasi oleh Sektor Pertambangan dan Penggalian. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi sedalam -11,64 persen disebabkan karena menurunnya produksi emas dan tembaga dikarenakan proses produksi yang terhambat yang disebabkan oleh curah hujan dan tanah longsor. Selain Sektor Pertambangan dan Penggalian, lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan yaitu lapangan usaha Industri Pengolahan sedalam -0,29 persen yang disebabkan produksi Industri kayu dan beberapa industri lainnya mengalami penurunan. Tiga sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada triwulan I-2023 yaitu Sektor Transportasi Pergudangan; Sektor Pengadaan Listrik dan Gas dan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi.

Pertumbuhan ekonomi Papua triwulan I-2023 (y-on-y) yang mengalami kontraksi -2,39 persen merupakan andil dari seluruh lapangan usaha, terutama lapangan usaha yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Papua yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang memberikan kontribusi sebesar 36,24 persen; Konstruksi yang memberikan kontribusi sebesar 14,72 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 10,70 persen; Perdagangan Besar dan Eceran,



Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi sebesar 9,61 persen dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib memberikan kontribusi sebesar 8,34 persen.

Gambar 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Triwulan I Tahun 2023



Sumber : Papua Dalam Angka – BPS Papua tahun 2023

2.2.1. Penyesuaian Kerangka Ekonomi

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Papua 2019-2023, pembangunan ekonomi Provinsi Papua tahun 2022 akan diarahkan pada 3 (tiga) orientasi pembangunan yaitu : (1) Orientasi Pembangunan Manusia; (2) Orientasi Pertumbuhan dan Potensi Unggulan; dan (3) Orientasi Pemerataan, Keadilan dan Kewilayahan. Ketiganya ini menjadi rujukan rumusan *grand strategy* pembangunan ekonomi 2022 yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Strategi pembangunan ekonomi berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (fullfilmen of basic needs).Strategi ini bertujuan pada perbaikan kualitas hidup, peningkatan produksi dan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja baru, upah layak sehingga tercapai tingkat hidup minimal untuk seluruh masyarakat.
2. Strategi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang bertumpu pada masyarakat (people centered development).

Menurut Asian Development Bank, pertumbuhan inklusif ialah pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan yang akan menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi, serta memastikan akses yang lebih luas kepada semua lapisan masyarakat. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi



upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif.

3. Strategi pembangunan ekonomi kewilayahan kontekstual (contextual regional economic development).

Makna kontekstual ini dapat diartikan sebagai makna yang muncul berdasarkan konteksnya. Papua adalah salah satu daerah di Indonesia yang sangat unik, karena terdiri atas ratusan suku bangsa dan bahasa, dengan zona ekologi kewilayahannya yang berbeda satu sama lainnya. Sehingga membangun Papua tidak dapat dilakukan secara simetris atau disamaratakan untuk semua wilayah. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi kewilayahan di Papua yang kontekstual merupakan pembangunan yang memperhatikan : (1) Zona Ekologi yang meliputi ekologi dan sistem mata pencaharian, etika kerja, dan lingkungan lokal; (2) Kearifan Lokal yang mencakup sistem penguasaan tanah, agama dan sistem kepercayaan; dan (3) Sosio Budaya yang meliputi struktur sosial, nilai-nilai budaya dan sistem politik.

2.2.2. Penyesuaian Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam Rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Otonomi daerah yang telah digulirkan melalui undang-undang Pemerintahan daerah sebenarnya memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada Pemerintah daerah, untuk melakukan peran yang lebih aktif Dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan Aktifitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penetapan Arah kebijakan Keuangan Daerah pada Rencana Kerja Tahun 2023 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Papua ditetapkan untuk alokasi Pendidikan 30% ; Kesehatan 35%; dan Ekonomi 35%. Penetapan ini dilakukan semata-mata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, dengan program kegiatan pemerataan tingkat pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, dan peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat.

Secara rinci perubahan APBD Tahun 2023 ditampilkan dalam Tabel 2.3 berikut :



Tabel 2.3 Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023

1	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	587,427,517,800.00	1,177,838,112,117.00	590,410,594,317.00	100.51
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	366,773,361,800.00	478,830,000,000.00	112,056,638,200.00	30.55
1.1.2	Retribusi Daerah	14,510,000,000.00	16,484,000,000.00	1,974,000,000.00	13.60
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	41,518,763,000.00	494,518,763,000.00	453,000,000,000.00	1091.07
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	164,625,393,000.00	188,005,349,117.00	23,379,956,117.00	14.20
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2,339,071,337,000.00	2,465,305,626,385.00	126,234,289,385.00	5.40
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2,339,071,337,000.00	2,465,305,626,385.00	126,234,289,385.00	5.40
1.2.1.1	Dana Perimbangan				
	a. Dana Transfer Umum	1,067,412,098,000.00	1,193,646,387,385.00	126,234,289,385.00	11.83
	- DBH	243,175,790,000.00	369,410,079,385.00	126,234,289,385.00	51.91
	- DAU	824,236,308,000.00	824,236,308,000.00	0.00	0.00
	b. Dana Transfer Khusus	220,460,581,000.00	220,460,581,000.00	0.00	0.00
	- DAK Fisik	195,899,501,000.00	195,899,501,000.00	0.00	0.00
	- DAK Non Fisik	24,561,080,000.00	24,561,080,000.00	0.00	0.00
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	470,837,581,000.00	470,837,581,000.00	0.00	0.00
1.2.1.4	Dana Tambahan Infrastruktur	580,361,077,000.00	580,361,077,000.00	0.00	0.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Pendapatan	2,926,498,854,800.00	3,643,143,738,502.00	716,644,883,702.00	24.49

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	2,415,353,019,764.00	4,435,596,802,412.00	2,020,243,782,648.00	83.64
5.1.1	Belanja Pegawai	849,073,619,230.00	1,219,536,347,425.00	370,462,728,195.00	43.63
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,455,606,710,183.00	2,331,853,616,606.00	876,246,906,423.00	60.20
5.1.4	Belanja Subsidi	0.00	301,740,000.00	301,740,000.00	100.00
5.1.5	Belanja Hibah	93,750,778,950.00	860,553,904,936.00	766,803,125,986.00	817.92
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	16,921,911,401.00	23,351,193,445.00	6,429,282,044.00	37.99
5.2	BELANJA MODAL	519,816,636,316.00	696,549,154,919.00	176,732,518,603.00	34.00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3,500,000,000.00	13,000,000,000.00	9,500,000,000.00	271.43
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117,578,465,813.00	138,282,282,056.00	20,703,816,243.00	17.61
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102,481,562,452.00	123,067,009,137.00	20,585,446,685.00	20.09
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	294,575,408,051.00	379,163,513,726.00	84,588,105,675.00	28.72
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	681,200,000.00	6,536,350,000.00	5,855,150,000.00	859.53
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1,000,000,000.00	36,500,000,000.00	35,500,000,000.00	3550.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	403,000,000,000.00	300,900,000,000.00	-102,100,000,000.00	-25.33
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	403,000,000,000.00	300,900,000,000.00	-102,100,000,000.00	-25.33
5.4	BELANJA TRANSFER	154,584,348,720.00	451,570,811,333.00	296,986,462,613.00	192.12
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	154,584,348,720.00	439,570,811,333.00	284,986,462,613.00	184.36
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0.00	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	100.00
	Jumlah Belanja	3,492,754,004,800.00	5,884,616,768,664.00	2,391,862,763,864.00	68.48
	Total Surplus/ (Defisit)	-566,255,150,000.00	-	-	295.84
			2,241,473,030,162.00	1,675,217,880,162.00	
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAN				
6.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	191,255,150,000.00	1,772,073,030,162.00	1,580,817,880,162.00	826.55



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	400,000,000,000.00	500,000,000,000.00	100,000,000,000.00	25.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	591,255,150,000.00	2,272,073,030,162.00	1,680,817,880,162.00	284.28
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.1	Penyertaan Modal Daerah	25,000,000,000.00	30,600,000,000.00	5,600,000,000.00	22.40
6.2.2	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25,000,000,000.00	30,600,000,000.00	5,600,000,000.00	22.40
	Pembiayaan Netto	566,255,150,000.00	2,241,473,030,162.00	1,675,217,880,162.00	295.84
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL APBD	3,517,754,004,800.00	5,915,216,768,664.00	2,397,462,763,864.00	68.15

2.2.3. Kebijakan Belanja Daerah Yang Bersumber Pada Dana OTSUS

Terkait dengan pengelolaan Dana Otonomi Khusus, disebutkan dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, pada Pasal 5 bahwa Sumber Penerimaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua adalah : (a) dana dalam rangka Otonomi Khusus setara 2% (dua perseratus) dana alokasi umum nasional, dan (b) dana tambahan infrastruktur. Belanja yang bersumber dari dana Otonomi Khusus menurut Perdasus Nomor 13 Tahun 2016 di atas akan dikelola dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, melalui pembagian 20% untuk pemerintah provinsi, dan 80% untuk pemerintah kabupaten/kota, setelah dari total penerimaan dana Otonomi Khusus dikeluarkan untuk pembiayaan program strategis lintas kabupaten/kota. Sebagaimana yang telah diarahkan dalam Pasal 7 ayat 2 bahwa pembagian penerimaan dana otonomi khusus antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi di atur dengan terlebih dahulu dikurangi kebutuhan dana untuk program strategis lintas Kabupaten/Kota.



2.3. Prioritas Dan Sasaran Perubahan RKPD Tahun 2023

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa dalam hal penyusunan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah perlu adanya keselarasan baik antara dokumen perencanaan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini mulai dari dokumen Jangka Panjang (RPJPD), Jangka Menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD). Oleh karenanya dalam penyusunan RKPD selalumengacu dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah daerah.

2.3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

RKPD tahun 2023 merupakan tahapan keempat dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 dalam rangka mewujudkan Visi “Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang Berkeadilan”. Untuk Pembangunan tahun 2023 ini difokuskan pada upaya Memperkuat agenda Papua berkeadilan dengan menurunnya kesenjangan antar daerah dan antar individu, meningkatnya ketahanan masyarakat, jaminan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mempertahankan asset alam Papua, sebagaimana fokus pembangunan dalam RPJMD Tahun 2019-2023 di bawah ini.

Gambar 2.2. Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2018-2023



Rumusan terhadap tema pembangunan RKPD tahun 2023 adalah: “Memperkuat Pemulihan Ekonomi Masyarakat, Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi



yang Berkeadilan serta Berkelanjutan”. Dengan unsur utama dalam tema tersebut adalah : (1) Peningkatan akses kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; (2) Penguatan stabilitas keamanan dan demokrasi; (3) Mengoptimalkan nilai tambah komoditas luar sector tambang; (4) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Kapasitas OAP dalam memanfaatkan peluang ekonomi (5) Pemantapan infrastruktur dasar dan konektifitas teknologi dan informatika antar wilayah dan (6). Meminimalkan tingkat kerentanan bencana dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Selain fokus pembangunan yang menjadi arah kebijakan pembangunan di tahun 2023, penyusunan tema pembangunan pada tahun ini juga merujuk kepada isu-isu strategis nasional, isu strategis RPJMD Provinsi Papua 2019-2023 dan isu strategis RKPD Provinsi Papua Tahun 2023, yang dapat dijabarkan kesandingannya sebagai berikut.

Tabel 2.4 Sandingan Isu-Isu Strategis Nasional, RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 dan RKPD 2023

Isu Strategis Kewilayahan Dalam Rancangan RPJMN 2023-2024	Isu Strategis RPJMD Provinsi Papua 2019-2023	Isu Strategis RKPD Provinsi Papua 2023
1. Pemenuhan pelayanan dasar	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi), baik dari Status Golongan Pendapatan, Gender maupun Antar Wilayah	1. Rendahnya akses kualitas dan kuantitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
	2. Pemantapan Rasa Aman dan Suasana Demokrasi yang Kondusif sebagai Landasan Utama Pembangunan	2. Stabilitas keamanan dalam mendukung Demokrasi masih rendah
	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Publik	3. Rendahnya Tata Kelola Pemerintahandan Kapasitas OAP Dalam memanfaatkan Peluang Ekonom



Isu Strategis Kewilayahan Dalam Rancangan RPJMN 2023-2024	Isu Strategis RPJMD Provinsi Papua 2019-2023	Isu Strategis RKPD Provinsi Papua 2023
2. Peningkatan daya saing daerah 3. Penguatan pusat pertumbuhan wilayah	4. Pertumbuhan Ekonomi yang Meratadan Berkelanjutan berbasis Komoditas dan Karakteristik Lokal didukung oleh Pembangunan Infrastruktur yang Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	4. Belum optimalnya Nilai tambah Komoditas Unggulan di Luar Sektor Tambang
4. Penurunan ketimpangan antarwilayah 5. Pemanfaatan Ruang dan Urbanisasi	5. Pengurangan Kesenjangan, Peningkatan Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten serta Peningkatan Kualitas Ekosistem dan Jasa Lingkungan	1. Terbatasnya Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Teknologi Informasi dan Komunikasi antar wilayah 6. Tingginya kerentanan Bencana dan Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

2.3.2. Prioritas Pembangunan Dalam RKPD Perubahan Tahun 2023

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan berbagai rumusan kebijakan pembangunan baik di tingkat nasional maupun provinsi, yakni:

1. Isu-isu strategis nasional dan daerah yang menjadi permasalahan pembangunan, serta akar permasalahan dari pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah;
2. Komitmen-komitmen nasional, seperti program pembangunan yang berkeadilan (penanggulangan kemiskinan dan Sustainable Development Goals/SDG's) sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2010 dan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004;



3. Tema dan prioritas pembangunan nasional tahun 2023; Sasaran pembangunan yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019- 2023;
4. Arah pembangunan tahap ke-III RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005- 2025;
5. Pokok-pokok pikiran DPRP Provinsi Papua terhadap penyusunan RKPD 2023;
6. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2022, dan target Tahun 2023 yang menunjukkan berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh pemerintah provinsi yang bersifat mendesak dan harus segera diatasi pada tahun 2023.

Dari parameter-parameter tersebut diatas maka Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Provinsi Papua yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan akses kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan SDM
2. Penguatan Stabilitas Keamanan dan Demokrasi
3. Mengoptimalkan nilai tambah komoditas unggulan di luar sektor tambang
4. Penguatan Tata kelola pemerintahan dan kapasitas OAP dalam memanfaatkan peluang ekonomi
5. Pemantapan infrastruktur dasar dan konektivitas teknologi dan informatika antar wilayah
6. Meminimalkan tingkat kerentanan bencana dan peningkatan kualitas lingkungan hidup

2.3.3. Sasaran Perubahan RKPD Perubahan Tahun 2023

Adapun sasaran dari perubahan RKPD Provinsi Papua tahun 2023 diarahkan pada:

1. Bidang kesehatan dan Rumah Sakit, melalui :
 - pemastian pelaksanaan social distancing, phisical disttanching
 - Sosialisasi dan mamastikan pelaksanaan protokol kesehatan dalam berbagai jenjang aktifitas masyarakat
 - penguatan system kesehatan di daerah terpencil, Tertinggal, Terluar, Terdepan Dan Tertentu
 - pembudayaan hidup bersih dan higienis,



- Pengadaan fasilitas dan prasarana penunjang penanggulangan COVID-19
 - Jaminan dan perlindungan terhadap para tenaga medis dan pendukung lainnya
2. Bidang Pendidikan, berupa :
- fasilitasi upaya perubahan sistem pembelajaran dari system manual ke system digital,
 - penyediaan Infrastruktur pembelajaran virtual, Jaminan dan perlindungan kesejahteraan tenaga pendidik terhadap wabah COVID-19
 - Memastikan keberlangsungan proses belajar mengajar di wilayah tertinggal, terluar, terdepan dan tertentu
3. Bidang Tenaga kerja dan Kependudukan, melalui :
- memastikan perlindungan terhadap para pekerja yang berdampak COVID-19,
 - meningkatkan daya siang dan produktifitas para pekerja agar siap diserap kembali dalam dunia kerja.
 - Optimalisasi penyediaan data kependudukan sesuai tingkat kepentingan
4. Bidang UKM Perindustrian dan Perdagangan, melalui :
- memperluas inovasi ragam lapangan pekerjaan ditingkat lokal,
 - memperluas akses dan memastikan pelaku usaha mendapatkan manfaat dari program pemerintah pusat terkait penanggulangan COVID-19, serta
 - mendorong inovasi dan kolaborasi untuk pemberdayaan ekonomi local.
5. Bidang sosial, memastikan keberlangsungan kehidupan sosial kemasyarakatan berlangsung terus menerus, melalui :
- memastikan Jaring Pengaman Sosial terlaksana secara transparan, tepat sasaran dan akuntabel
 - melakukan upaya pemberdayaan dan perlindungan terhadap kaum difabel, para tuna, anak-anak dan golongan lansia terhadap wabah COVID-19
 - melakukan perlindungan terhadap masyarakat komunitas adat terpencil
6. Bidang Infrastruktur dan perhubungan mendorong infrastruktur yang



dilakukan melalui:

- Mengutamakan kegiatan yang dilakukan dengan padat karya, untuk mengatasi pengangguran,
 - Mendukung infrastruktur kelancaran lalulintas logistik,
 - Penyediaan infrastruktur perhubungan digital.
7. Bidang SKPD rumpun pertanian, berupaya :
- menjaga stabilitas ketersediaan pangan,
 - Mengoptimalkan pembudidayaan pangan lokal skala jangka pendek,
 - Memperkuat kerjasama dalam rangka peningkatan produktifitas pertanian, peternakan dan perkebunan
 - Menuguskan Jaminan dan perlindungan sosial terhadap petani, pekebun dan peternak
8. Bidang pariwisata, Penanaman Modal dan PTSP dilakukan untuk menggairahkan kembali kepariwisataan dan investasi, melalui :
- Pemulihan iklim usaha investasi dan sektor kepariwisataan melalui fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan event-event kepariwisataan dan investasi,
 - Jaminan dan perlindungan sosial terhadap pelaku-pelaku usaha kepariwisataan dan investor
 - Memfasilitasi dan memberikan dukungan kebijakan terhadap pelaku usaha perhotelan dan jasa wisata lainnya serta para investor,
 - Optimalisasi fungsi pelayanan satu pintu.
9. Bidang Pemberdayaan masyarakat dan OAP, melalui :
- Menjamin ketahanan masyarakat terutama Orang Asli Papua dalam masa pandemik COVID-19
 - Fasilitasi aktifitas pendampingan ke masyarakat dalam rangka implementasi berbagai kegiatan pemberdayaan.
10. Bidang informasi dan komunikasi dalam rangka memasuki era industri 4.0, maka upaya



yang dilakukan:

- Fasilitasi upaya dan penyediaan perangkat digital mendukung usaha-usaha primer ke akses digital
- Sosialisasi dan fasilitasi kebijakan dan regulasi di bidang digitalisasi

11. Bidang perangkat daerah pendukung dan penunjang, melalui :

- Optimalisasi pendapatan daerah melalui eksitensifikasi, intensifikasi dan difersifikasi sumber-sumber pendapatan
- Optimalisasi dan pelaksanaan anggaran secara transparan, efisien dan efektif
- Optimalisasi fungsi pengawasan agar kebijakan dan regulasi yang diimplementasikan tepat target dan sasaran
- Pengembangan litbang dalam rangka mengatasi pandemik COVID-19. Keseluruhan item tersebut hendaknya menjadi sasaran dalam RKPD

Perubahan Provinsi Papua tahun 2023 dan dipedomani pula oleh SKPD Provinsi maupun Kab/Kota. Implementasi dari sasaran-sasaran pokok tersebut diharapkan mendukung pula kebijakan pemerintah dalam rangka menyongsong kebijakan *new normal* yang tengah diwacanakan dan akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

2.4. Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah, adalah bagian yang tidak terpisahkan yang penyusunannya memperhatikan batasan urusan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan perubahan paradigma penganggaran "money follow function kepada money follow program", maka perlu dilakukan penjabaran secara operasional tentang program prioritas. Hal penting yang menjadi penekanan dalam perubahan paradigma tersebut, bahwa program prioritas wajib mendapat penguatan penganggaran, sehingga penganggaran untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 merupakan rumusan penganggaran yang memiliki korelasi terhadap pembangunan daerah yang dimana penganggaran lebih fokus dan terarah kepada target capaian pembangunan daerah. Adapun penentuan program prioritas disusun berdasarkan : (1). Merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2021 sesuai dengan pentahapan tema RPJPD Provinsi Papua 2005-2025, (2). Merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Prioritas dan



Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 serta indikatornya. (3). Merupakan prioritas program ditingkat Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD Tahun 2023, dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1). Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan. (2). Menentukan keluaran/output setiap kegiatan. (3). Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program. (4). Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya. Menghitung alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki.



BAB III

**HASIL PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**



BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI PAPUA TAHUN 2023

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian Kinerja yang menggambarkan Keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah pusat, Pihak swasta dan Pihak terkait lainnya dalam pembangunan Nasional.

Penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai parameter keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Laju pertumbuhan Penduduk, Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini dan Pendapatan Per Kapita. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (*Impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya. Capaian Indikator Makro Provinsi Papua pada Tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Indikator Makro Provinsi Papua Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	61,39	62,25	1,401
2.	Angka Kemiskinan	153,11	149,56	-2,319
3.	Angka pengangguran	0	32,057	0
4.	Pertumbuhan Ekonomi	8,97	4,2	-53,177
5.	Pendapatan Per-Kapita	39,69	0	-100
6.	Ketimpangan Pendapatan/ Rasio Gini	381	0,388	-99,898

Sumber : BPS Provinsi Papua 2023 (diolah)



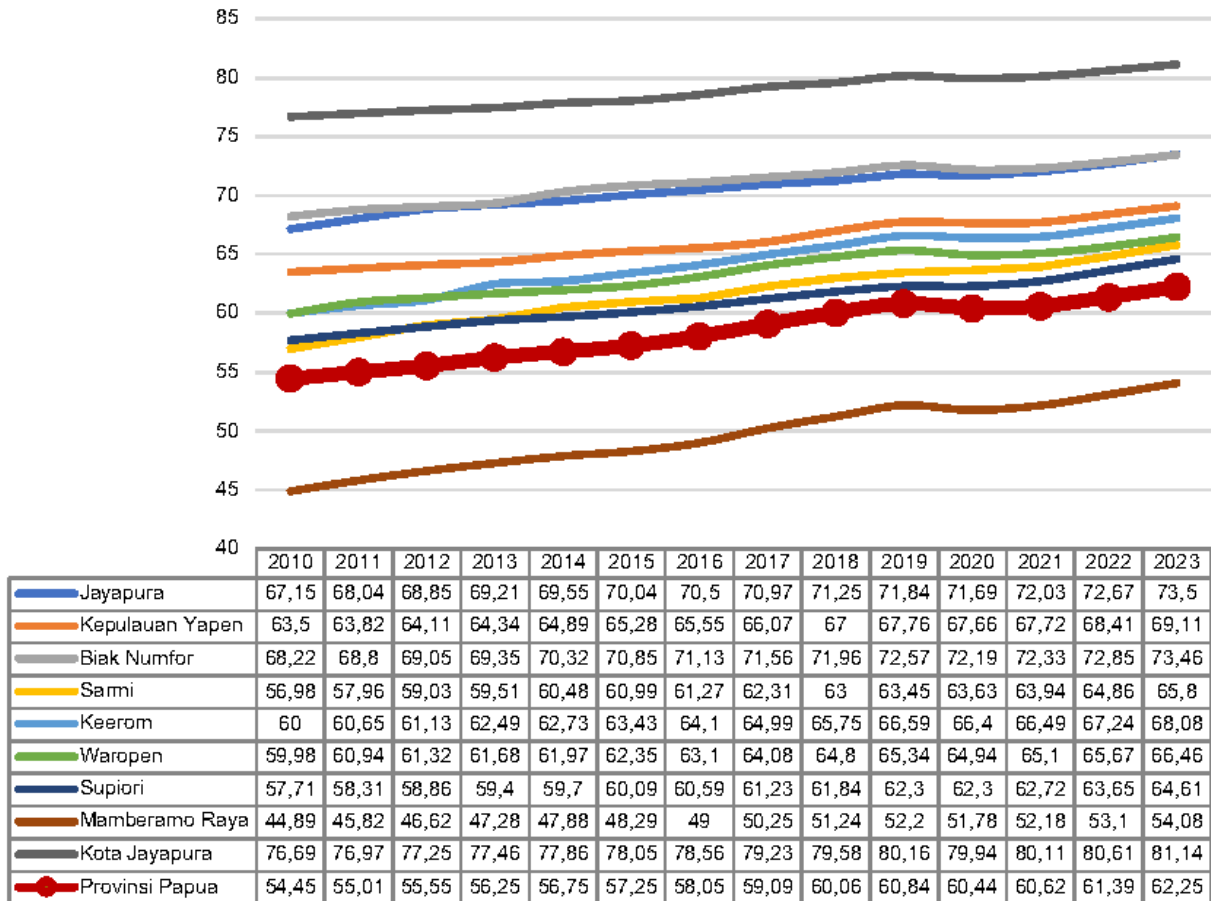
Dalam rangka pemenuhan Indikator Kinerja Makro diatas maka Pemerintah Provinsi Papua di Tahun 2022 menerapkan beberapa program dan Kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai Visi dan Misi Gubernur Papua serta RPJMD pemerintah Provinsi Papua Tahun 2018-2023. Indeks pembangunan Manusia di Provinsi Papua di tahun 2023 yaitu 62,25 dengan demikian di tahun tersebut Nilai IPM mengalami perubahan/peningkatan sebesar 1,4% dibanding tahun sebelumnya tahun 2022 yaitu 61,25. Tingkat Kemiskinan pada Tahun 2023 yaitu 149,56% dibanding tahun 2022 tingkat kemiskinan 153,11, nilai tersebut menunjukan bahwa angka kemiskinan di wilayah Provinsi Papua mengalami sedikit peningkatan sebesar - 2,319%. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua tahun 2023 sebesar 4,2%, dan pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua sebesar 8,97%. Provinsi Papua papua belum menjadi Provinsi yang memiliki Peranan yang besar terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2022 nilai PDRB provinsi papua sebesar 39,69. Peranan Papua terhadap PDRB nasional adalah 1,18 persen. Namun peranan Papua yang terbesar diwilayah Indonesia Timur. Ketimpangan pendapatan di Provinsi Papua dengan menggunakan Rasio Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (Pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna. Angka ketimpangan Provinsi papua di tahun 2023 sebesar 0,388 dibanding tahun 2022 yaitu 381.

3.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indikator untuk mengukur capaian pembangunan manusia. IPM dihitung berdasarkan 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan layak. Provinsi Papua menjadi provinsi dengan kecepatan pertumbuhan IPM tertinggi se- Indonesia pada kurun waktu 2010-2022. Hal tersebut membuat Provinsi Papua kini berstatus"sedang" dari status sebelumnya "rendah". Kota Jayapura menjadi kota di Provinsi Papua yang memiliki IPM tertinggi pada tahun 2010-2022, sementara Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan IPM terendah di Provinsi Papua sekaligus berada di bawah garis provinsi. IPM di Provinsi Papua menurut kabupaten/kota dari tahun 2010-2022 ditunjukkan pada gambar berikut ini:



Gambar 3.1
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2010-2022



Sumber : BPS Provinsi Papua (Data Diolah)

3.1.2. Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan data statistik Provinsi Papua selama lima tahun terakhir, secara keseluruhan 9 kabupaten/kota di Papua memiliki capaian angka kemiskinan yang semakin membaik.

Sampai dengan tahun 2022, terdapat beberapa daerah dengan tingkat kemiskinan diatas 20% diantaranya adalah Kabupaten Supiori (37,70%), Mamberamo Raya (0,73%), Waropen (30,22%), Kepulauan Yapen (26,15%), dan Biak Numfor (24,48%). Sedangkan daerah lainnya memiliki tingkat kemiskinan dibawah rata-rata Provinsi Papua, seperti Kota Jayapura (11,12%), Kabupaten Jayapura (11,94%), Sarmi (13,76%), dan Keerom (15,77%). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.2
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota terhadap Jumlah Penduduk di Provinsi Papua

Kabupaten Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Jayapura	13,44	13,13	12,44	12,13	11,94
Kep. Yapen	27,17	27,13	26,3	26,09	26,15
Biak Numfor	25,72	25,5	24,57	24,45	24,48
Sarmi	14,51	14,41	13,87	13,84	13,76
Keerom	16,9	16,83	16,32	16	15,77
Waropen	30,53	30,95	29,54	29,85	30,22
Supiori	39,22	38,79	36,91	37,91	37,7
Mamb. Raya	30,1	29,13	28,38	28,78	30,73
Kota Jayapura	11,37	11,49	11,16	11,39	11,12

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) kabupaten di Provinsi Papua yang termasuk dalam daftar Daerah Tertinggal, yaitu Kab. Keerom dan Kab. Mamberamo Raya di wilayah adat Mamta serta Kabupaten Waropen dan Kabupaten Supiori di wilayah adat Saireri. Apabila merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, terdapat 5 (lima) penyebab ketertinggalan yaitu perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah/daerah tertentu.

Dalam hal ini, penyebab utama ketertinggalan untuk setiap kabupaten ditampilkan dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi telah menetapkan 54 kampung di Provinsi Papua sebagai kampung yang diprioritaskan dalam sasaran pembangunan kampung dan pembangunan daerah tertinggal serta daerah transmigrasi yang terdiri dari 8 (delapan) kampung dengan status Berkembang dan 46 kampung dengan status tertinggal.



Tabel 3.3
Daerah Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan di Provinsi Papua

No	Kabupaten/ Kota	Penyebab Utama Ketertinggalan (Menurut Urutan)				
		1	2	3	4	5
1	Keerom	Aksesibilitas	Ekonomi	Keuangan	SDM	
	Mamberamo Raya	Aksesibilitas	Ekonomi	SDM		
2	Waropen	Aksesibilitas	Ekonomi	SDM	Karakteristik	Keuangan
	Supiori	Ekonomi	Aksesibilitas	Keuangan	Karakteristik	SDM

Sumber: Strategis Daerah, Tahun 2022

3.1.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Salah satu pendekatan yang digunakan BPS untuk menghitung PDRB adalah Pendekatan Pengeluaran. Perhitungan PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran/penggunaan dikelompokkan dalam 6 komponen yaitu : (1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, mencakup semua pengeluaran untuk konsumsi barang, dan jasa dikurangi dengan penjualan neto barang bekas dan sisa yang dilakukan rumah tangga selama setahun; (2) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan dan belanja barang, baik pemerintah pusat dan daerah, tidak termasuk penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Data yang dipakai adalah realisasi APBD; (3) Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, mencakup pembuatan dan pembelian barang- barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal bekas atau baru dari luar negeri. Metode yang dipakai adalah pendekatan arus barang; (4) Perubahan Inventori. Perubahan stok dihitung dari PDRB hasil penjumlahan nilai tambah bruto sektoral dikurangi komponen permintaan akhir lainnya; (5) Ekspor Barang dan Jasa. Ekspor barang dinilai menurut harga free on board (fob); dan (6) Impor Barang dan Jasa. Impor barang dinilai menurut *cost insurance freight (cif)*. PDRB menurut Pendekatan Pengeluaran ini pada dasarnya merupakan persamaan makroekonomi pengeluaran agregat Keynes yaitu :

$$Y = C + I + G + X - M$$



dimana C (Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga), I (Pembentukan Modal Tetap Bruto), G (Pengeluaran Konsumsi Pemerintah), X (Ekspor Barang dan Jasa), dan M (Impor Barang). Dengan adanya kesamaan ini, maka perhitungan pertumbuhan ekonomi regional suatu daerah lazimnya menggunakan pertumbuhan PDRB yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Papua (PDRB Menurut Pengeluaran), yang selanjutnya dapat didisagregasi juga menurut sektoral (PDRB Menurut Lapangan Usaha).

Publikasi resmi yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Papua, menunjukkan ekonomi Papua triwulan III-2023 dibanding triwulan III-2022 tumbuh sebesar 8,28 persen (y-o-y). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 8,39 persen, Komponen Pengeluaran dan Konsumsi Lembaga Non Profit melayani Rumah Tangga (PK- LNPRT) sebesar 5,80 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,96 persen. Komponen Ekspor Luar Negeri mengalami kontraksi yaitu sebesar -1,71 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa Luar Negeri yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran turun sebesar -18,88 persen.

Tabel 3.4

Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Papua Pada Triwulan 1 s/d Triwulan 3 Tahun 2023

Komponen Pengeluaran	2023			
	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.53	4.85	4.96	-
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.82	7.55	5.80	-
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.70	5.33	8.39	-
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.23	3.72	2.40	-
Perubahan Inventori	0.00	0.00	0.00	-
Ekspor Luar Negeri	-31.15	8.04	-1.71	-
Impor Luar Negeri	66.66	7.41	-18.88	-
Net Ekspor Antar Daerah	0.00	0.00	0.00	-
PDRB Papua	-2.39	3.81	8.28	-

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2023 (data diolah)



Berdasarkan lapangan usaha, menurut publikasi dari BPS Papua, dengan telah pulihnya perekonomian dibandingkan periode sebelumnya, menyebabkan terjadi peningkatan pada seluruh kategori lapangan usaha.

Tabel 3.5
Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha dan Harga Konstan Provinsi Papua Pada Triwulan 1 s/d Triwulan 3 Tahun 2023

Lapangan Usaha 2010	2023				Pert
	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.32	2.18	2,15	-	0,01
B. Pertambangan dan Pengalihan	-11.03	3.01	2,36	-	6,36
C. Industri Pengolahan	-0.29	-2.83	0,07	-	0,06
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7.96	5.45	4,47	-	0,00
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.48	2.1	0,92	-	0,00
F. Konstruksi	1.69	5.85	3,65	-	0,40
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.64	4.87	5,71	-	0,56
H. Transportasi dan Pergudangan	10.01	9.85	9,05	-	0,26
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.53	3.86	3,27	-	0,01
J. Informasi dan Komunikasi	2.18	4.92	2,98	-	0,07
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	7.7	16.85	13,43	-	0,22
L. Real Estate	3.27	3.27	4,19	-	0,16
M. Jasa Perusahaan	4.46	7.24	7,19	-	0,10
N. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.24	3.01	2,46	-	-0,05
O. Jasa Pendidikan	5.1	4.91	3,34	-	0,00
P. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.66	-0.37	2,97	-	0,04
R,S,T,U. Jasa lainnya	1.65	2.12	3,34	-	0,06
PDRB Papua Denga Tambang	-2.39	3.81	8,28	-	8,28
PDRB Papua Tanpa Tambang	1,01	3,32	3,98		

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2023 (data diolah)



Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor Jasa Keuangan dan asuransi rata-rata sebesar 12,28 persen per triwulan (y-on-y). Selain Transportasi dan Pergudangan, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tinggi lainnya yaitu sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,71 persen. Selanjutnya, bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Papua triwulan III-2023 (y-on-y) menurut catatan BPS Papua masih didominasi oleh Pertambangan dan Penggalan yang memberikan sumber pertumbuhan terbesar yaitu 6,36 persen. Selanjutnya sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,56 persen, dan sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,26 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi Papua jika dikalkulasi tanpa menyertakan sektor pertambangan dan penggalan, berdasarkan catatan BPS Papua dapat tumbuh sekitar 2,77 persen per triwulan (y-on-y) selama tahun 2023.

3.2. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Papua merupakan penjabaran dari setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi baik urusan konkuren pemerintahan maupun fungsi penunjang urusan pemerintahan. Urusan konkuren pemerintahan adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan konkuren pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua meliputi Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar maupun Non Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawas dan Unsur Pemerintahan Umum. Selain melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan.

Proses perencanaan dilakukan dengan cara yang lebih mengedepankan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan proses yang lebih partisipatif sehingga memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat. Dengan demikian diharapkan pula, hal ini akan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dimana pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada Pemerintah Provinsi Papua dalam bingkai NKRI dalam mengelola sumber-sumber ekonomi daerah yang



diarahkan untuk seluas-luasnya kesejahteraan masyarakat Papua khususnya orang asli Papua.

Penyelenggaraan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas 6 (enam) bidang urusan pemerintahan yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas 18 (delapan belas) bidang urusan pemerintahan yakni tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Pilihan terdiri atas 8 (delapan) bidang urusan pemerintahan yakni Kelautan dan perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan sumber daya mineral, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi. Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan terdiri atas 3 (Tiga) Unsur yakni Unsur Sekretariat Daerah, Unsur Sekretariat DPRD dan Unsur Sekretariat MRP. Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari 7 (tujuh) Unsur yaitu Unsur Perencanaan, Unsur Keuangan, Unsur Kepegawaian, Unsur Pendidikan, Unsur Penelitian dan Pengembangan, Unsur Penghubung dan Unsur Pengelolaan Perbatasan. Penyelenggaraan Unsur Pengawas terdiri dari 1 (satu) Unsur yaitu Unsur Inspektorat, sedangkan Unsur Pemerintahan Umum terdiri dari 1 (satu) Unsur yaitu Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik.



Tabel 3.6

**REKAP REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI PAPUA BELANJA PER SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	KODE	URAIAN	PAGU DANA (Rp.)	BOBOT (%)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK (%)	REAL. FISIK (%)
					(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1-01.2-23.2-24.01.1000	DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	190.112.311.998	3,23	176.973.016.867,8	93,09	78,61	82,66
2.	1-02.0-00.0-00.01.1000	DINAS KESEHATAN	107.289.932.304	1,82	93.067.056.953,6	86,74	81,37	43,97
3.	1-02.0-00.0-00.02.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA	268.698.905.129	4,57	252.255.017.980	93,88	99,74	99,69
4.	1-02.0-00.0-00.02.0001	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA (BLUD)	79.168.604.598	1,35	-	-	-	-
5.	1-02.0-00.0-00.03.0000	RUMAH SAKIT JIWA	40.819.471.619	0,69	39.588.313.432	96,98	64,83	64,83
6.	1-02.0-00.0-00.04.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA	126.573.025.795	2,15	114.604.799.808,31	90,54	99,84	99,3
7.	1-02.0-00.0-00.04.0001	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA (BLUD)	96.611.351.519	1,64	-	-	-	-
8.	1-03.1-04.0-00.01.1000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	858.296.980.760	14,59	710.445.999.182,44	82,77	87,07	87,07
9.	1-05.0-00.0-00.01.1000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	34.329.753.918	0,58	30.565.038.884	89,03	89,69	90,7
10.	1-06.2-08.2-12.01.1000	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	45.301.434.190	0,77	42.464.871.061	93,74	99,01	99,01
11.	2-07.2-17.3-30.01.1000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	52.652.055.105	0,89	47.513.240.667	90,24	18,53	58,95
12.	2-09.3-27.0-00.01.1000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	91.462.009.141	1,55	83.673.899.451	91,48	95,87	96,48



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023

NO	KODE	URAIAN	PAGU DANA (Rp.)	BOBOT (%)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK (%)	REAL. FISIK (%)
					(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13,	2-11.3-28.0-00.01.1000	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	106.000.446.527	1,8	100.096.732.116,02	94,43	96	96,02
14,	2-11.3-28.0-00.01.1001	CABANG DINAS KEHUTANAN JAYAPURA	600.000.000	0,01	593.452.206	98,91	100	100
15,	2-11.3-28.0-00.01.1002	CABANG DINAS KEHUTANAN SARMI	600.000.000	0,01	599.723.000	99,95	100	100
16,	2-11.3-28.0-00.01.1003	CABANG DINAS KEHUTANAN KEEROM	848.514.925	0,01	844.599.519	99,54	100	100
17,	2-11.3-28.0-00.01.1004	CABANG DINAS KEHUTANAN MAMBERAMO RAYA	600.000.000	0,01	595.797.500	99,3	100	100
18,	2-11.3-28.0-00.01.1022	KPHP UNIT XVII WAROPEN	700.000.000	0,01	698.895.000	99,84	100	100
19,	2-11.3-28.0-00.01.1023	KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA	700.000.000	0,01	691.530.000	98,79	100	100
20,	2-11.3-28.0-00.01.1024	KPHP UNIT XXIII SARMI	500.000.000	0,01	487.200.000	97,44	100	100
21,	2-11.3-28.0-00.01.1025	KPHP UNIT XIX KEPULAUAN YAPEN	899.986.000	0,02	897.395.800	99,71	99,85	100
22,	2-11.3-28.0-00.01.1026	KPHIL UNIT XX BIAK	999.997.989	0,02	975.392.476	97,54	100	100
23,	2-11.3-28.0-00.01.1027	KPHP UNIT XXVIII KOTA JAYAPURA	499.925.000	0,01	498.203.100	99,66	100	100
24,	2-11.3-28.0-00.01.1028	KPHP UNIT XXIX KEEROM	1.099.999.793	0,02	1.089.047.763,62	99	99,05	100
25,	2-11.3-28.0-00.01.1034	UPTD KEBUN RAYA KOYA KOSO	850.000.000	0,01	849.845.000	99,98	100	100
26,	2-11.3-28.0-00.01.1035	BPTH PAPUA	1.049.999.600	0,02	1.022.979.847	97,43	100	100
27,	2-11.3-28.0-00.01.1036	UPTD TAMAN BURUNG DAN TAMAN ANGGREK	10.850.000.000	0,18	6.344.356.774,69	58,47	97,7	97,7
28,	2-11.3-28.0-00.01.1037	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA	491.662.750	0,01	491.581.410	99,98	100	100
29,	2-13.0-00.0-00.01.1000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ORANG ASLI PAPUA	36.003.277.261	0,61	34.496.598.319	95,82	98,28	98,6
30,	2-15.0-00.0-00.01.1000	DINAS PERHUBUNGAN	52.123.816.995	0,89	40.028.012.953	76,79	88,97	94,29



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023

NO	KODE	URAIAN	PAGU DANA (Rp.)	BOBOT (%)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK (%)	REAL. FISIK (%)
					(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31,	2-16.2-21.0-00.01.1000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	23.848.485.300	0,41	22.642.059.321	94,94	60,77	60,77
32,	2-18.0-00.0-00.01.1000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	23.356.321.522	0,4	21.639.200.497	92,65	72,76	66,66
33,	2-19.0-00.0-00.01.1000	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA	47.373.353.596	0,8	44.629.576.505	94,21	92,85	92,87
34,	2-22.3-26.0-00.01.1000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	49.444.367.196	0,84	47.966.222.425,01	97,01	99,59	98,02
35,	3-25.0-00.0-00.01.1000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	42.843.070.797	0,73	40.468.130.477,89	94,46	81,84	96,13
36,	3-29.0-00.0-00.01.1000	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	50.338.979.825	0,86	47.093.601.428	93,55	90,14	91,64
37,	4-01.0-00.0-00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	421.302.288.692	7,16	341.362.627.515	81,03	82,36	82,36
38,	4-01.0-00.0-00.01.1000	BIRO UMUM DAN PROTOKOL	87.978.280.785	1,5	81.447.186.425,03	92,58	99,65	99,65
39,	4-01.0-00.0-00.01.2000	BIRO LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	32.605.495.650	0,55	31.854.209.521	97,7	94,9	98,93
40,	4-01.0-00.0-00.01.3000	BIRO TATA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS	30.207.898.610	0,51	28.543.408.029	94,49	97,18	97,11
41,	4-01.0-00.0-00.01.4000	BIRO HUKUM	36.428.020.786	0,62	28.523.749.330	78,3	1,48	63,78
42,	4-01.0-00.0-00.01.5000	BIRO ORGANISASI	28.285.805.429	0,48	23.441.353.058	82,87	99,85	99,85
43,	4-02.0-00.0-00.01.1000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA	482.553.782.528	8,2	465.159.421.363	96,4	72,07	72,08
44,	4-02.0-00.0-00.02.1000	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA	54.818.851.560	0,93	53.025.964.052	96,73	7,48	96,61
45,	5-01.5-05.1-03.01.1000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100.401.790.539	1,71	81.031.929.007,66	80,71	82,56	92,93
46,	5-02.0-00.0-00.01.1000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	1.799.387.734.152	30,58	1.541.786.573.413	85,68	95,08	96,39
47,	5-02.0-00.0-00.02.1000	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	99.525.196.305	1,69	84.603.547.137,88	85,01	100	96,12
48,	5-03.0-00.0-00.01.1000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	50.714.241.980	0,86	45.993.857.308	90,69	61,46	33,47

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023



NO	KODE	URAIAN	PAGU DANA (Rp.)	BOBOT (%)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK (%)	REAL. FISIK (%)
					(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49,	5-04.0-00.0-00.01.1000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	67.014.411.130	1,14	62.915.115.385,2	93,88	74,71	74,61
50,	5-06.0-00.0-00.01.0000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJA SAMA	24.880.301.139	0,42	23.735.966.996	95,4	89,99	96,27
51,	5-07.0-00.0-00.01.0000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	18.379.902.529	0,31	17.468.414.404	95,04	78,69	52,61
52,	6-01.0-00.0-00.01.1000	INSPEKTORAT	66.841.931.213	1,14	59.170.294.465	88,52	99,77	92,18
53,	8-01.0-00.0-00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	39.352.794.485	0,67	32.419.498.331	82,38	100	88,01
		JUMLAH	5.884.616.768.664	100	5.009.374.503.466,15	85,13	84,64	85,87

Sumber : TP2K, BAPPEDA Provinsi Papua



Adapun capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. URUSAN PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Arsip Daerah

Dinas Pendidikan dan perpustakaan memiliki 3 urusan yaitu urusan Pendidikan, Kearsipan dan Perpustakaan, melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp190.112.311.998,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp176.973.016.868,00** atau **93,09 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, terdiri dari sub kegiatan :**
 - (1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, indikator kinerja terbangunnya pagar sekolah dan asrama sekolah khusus Papua Go global 2 unit dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (2) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, indikator kinerja Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik dengan target 100 Peserta Didik) tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen
 - (3) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, indikator kinerja Terlaksananya pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas sebanyak 14 Guru, tingkat capaian kinerja sebesar 98,65 persen
 - (4) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas, indikator kinerja Jumlah Sekolah Menengah Khusus yang terfasilitasi (Lembaga) sebanyak 13 lembaga, dengan tingkat capaian kinerja 97,44 persen
 - (5) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan, indikator kinerja erlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan, target kinerja 50 Guru/Orang dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,62 persen



- **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, indikator kinerja terbangunnya sarana dan prasarana dengan target 1 dokumen, dengan tingkat capaian kinerja 99,25 persen
 - (2) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik, indikator kinerja Terlaksananya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik sebanyak 50 peserta didik, dengan tingkat capaian kinerja 94,95persen
 - (3) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan, indikator kinerja Terlaksananya Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan, target 1 kurikulum dengan tingkat capaian kinerja 99,34 persen
 - (4) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, indikator kinerja Jumlah siswa yang mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik, target kinerja 10 Peserta Didik dengan realisasi kinerja 10 peserta dan tingkat capaian kinerja 99,27 persen
 - (5) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan indikator kinerja Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Khusus yang terfasilitasi target kinerja 10 Lembaga, dengan realisasi 10 lembaga dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,77 persen
 - (6) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan, indikator kinerja Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS, target kinerja sekolah, dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Indikator Kinerja Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun, target kinerja 11 unit dengan realisasi kinerja 11 unit atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja 96,73 persen
 - (2) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus, Indikator kinerja Terlaksananya Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus, target kinerja 1 kurikulum dengan realisasi kinerja 1 kurikulum atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja 99,9 persen



- (3) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus, Indikator kinerja Jumlah Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus, target kinerja 7 lembaga dengan realisasi kinerja 7 lembaga atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,85 persen
- (4) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan, Indikator kinerja Terlaksananya Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan, Target Kinerja 1 Dokumen dengan realisasi kinerja 1 dokumen atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen
- (5) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan, Indikator kinerja Terselenggaranya bimbingan teknis dan Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan, target kinerja 100 orang dengan realisasi kinerja 100 orang atau 100 persen dan Tingkat capaian kerja sebesar 99,1 persen

2) PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus,** terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus, Indikator kinerja Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus 1 Dokumen, dengan realisasi kinerja 1 dokumen atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja 98,95 persen

3) PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi,** terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Perhitungan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Indikator kinerja Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dokumen), target keluaran 45 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,56 persen



Permasalahan dan Solusi :

• Permasalahan

Tingkat capaian kinerja sub kegiatan terlihat cukup memuaskan namun ada beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi pada tahun yang akan datang , antara lain :

1. Jumlah tenaga pendidik PAUD dengan kuota kegiatan peningkatan mutu dan kualitas pendidik PAUD masih belum terpenuhi;
2. Belum semua penduduk usia 3-6 tahun terdata secara baik yang disebabkan oleh budaya, tingkat kesejahteraan dan medan/lokasi yang sangat sulit dijangkau;
3. Belum semua lembaga penyelenggara pendidikan PAUD memenuhi standar pelayanan pendidikan bermutu dan berkarakter.
4. Masih banyaknya anak-anak Papua yang belum terlayani pendidikan secara maksimal
5. Implementasi pembangunan pendidikan di Kabupaten/Kota seringkali berbenturan dengan kebijakan pemimpin setempat;
6. Peralihan kewenangan SMA-SMK yang kembali ke Kabupaten/Kota serta pemekaran Provinsi Papua menjadi 3 (tiga) provinsi baru.

• Solusi :

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Dengan memberi pelatihan peningkatan mutu serta bantuan pendidikan PAUD yang melibatkan peserta dari kabupaten/kota;
2. Pendataan secara rinci dilakukan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota, disertai dengan kerjasama dengan beberapa pihak seperti Badan Pusat Statistik Papua dan LSM yang berkompeten;
3. Sosialisasi dan penyelenggaraan kegiatan yang bersifat edukasi kepada
4. pemimpin lembaga dan tenaga pendidik sangat membantu dalam pengembangan lembaga penyelenggara pendidikan PAUD di kabupaten/kota.
5. Perlu adanya koordinasi secara kontinyu dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengenai daerah yang membutuhkan layanan pendidikan



disertai dengan sarana prasarana dan tenaga pendidik yang bermutu dan berkualitas. agar semua anak-anak Papua dapat menikmati layanan pendidikan;

6. Pendataan secara rinci dilakukan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota. disertai dengan kerjasama dengan beberapa pihak seperti Badan Pusat Statistik Papua dan LSM yang berkompeten;
7. Mensinkronkan data program dan kegiatan pendidikan antara Provinsi danKab./Kota;

2. URUSAN KESEHATAN

Dinas Kesehatan Provinsi Papua

Urusan kesehatan untuk OPD Dinas Kesehatan melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 107.289.932.304,00** dengan total penyerapan **Rp. 93.067.056.954** atau 86,74 persen. Alokasi dana tersebut untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya, indikator kinerja Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun, indikator target (unit), dengan realisasi kinerja unit dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,68 persen
 - (2) Pengembangan Rumah Sakit, indikator kinerja Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit), target indikator 5 unit, dengan realisasi kinerja 5 unit atau 100 persen dan tingkat capain kinerja sebesar 99,97 persen



- (3) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan, indikator kinerja Pengadaan bahan kimia untuk menunjang pemeriksaan (Tahun), indikator target 1 unit, dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,5 persen
 - (4) Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan, indikator kinerja Jumlah Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan (Unit), indikator target 10 unit dengan realisasi kinerja 10 unit atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja 99,27 persen
 - (5) Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, indikator kinerja Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (unit), indikator target 10 unit dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,91 persen
 - (6) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya, indikator kinerja Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen), indikator target 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja 98,85 persen
 - (7) Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya, indikator kinerja Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (paket), indikator target .. paket dengan realisasi kinerja 100 persen atau 99,94 persen
- **Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana, indikator



- kinerja Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (Orang), target kinerja 100 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,90 persen
- (2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen), target kinerja 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja 79,49 persen
 - (3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen), target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 70,99 persen
 - (4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,75
 - (5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,90 persen
 - (6) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 32,47 persen
 - (7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,86 persen



- (8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,92 persen
 - (9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,86 persen
 - (10) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,87 persen
 - (11) Pengelolaan Surveilans Kesehatan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (12) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,81 persen
 - (13) Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,81 persen
- **Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (dokumen)



target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 97 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,00 persen

- **Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit, indikator kinerja Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit) target kinerja 1 unit dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 85,32 persen
- (2) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan, indikator kinerja Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Unit) target kinerja 1 unit dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,59 persen

2) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, indikator kinerja Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang) target kinerja 30 orang dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,23 persen
- **Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, indikator kinerja Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan (Orang), target kinerja .. orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,76 persen



3) PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK),** terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK, indikator kinerja Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan (Sarana), target kinerja sarana dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,90 persen
- (2) Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik, indikator kinerja Jumlah Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,90 persen

4) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi,** terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,92 persen



- **Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 78,16 persen
- **Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,92 persen

Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura

Urusan kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 268.698.905.129,00** dengan total penyerapan **Rp. 252.255.017.980,00 atau 93,88 persen**. Alokasi dana tersebut untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya, indikator kinerja Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit), target output 1 unit dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 95,35 persen



- (2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit, indikator kinerja Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Paket) target output 4 paket dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,97 persen
- (3) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan, indikator kinerja Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit), target output 4 paket dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,51 persen
- (4) Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan, indikator kinerja Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Paket), target output 5 paket dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,82 persen
- (5) Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya), indikator kinerja Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan (Paket), target output 6 paket dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,72 persen
- (6) Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit, Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Paket) target output 3 paket dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen
- (7) Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan, indikator kinerja Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Paket), target output 8 paket dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 94,31 persen
- (8) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya, indikator kinerja Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta



Vasilitas Kesehatan Lainnya (Kegiatan), target output 4 kegiatan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen

- **Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :

(1) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

- **Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :

(1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, indikator Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Kegiatan), target output 2 kegiatan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen

(2) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan, indikator kinerja Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Kegiatan), target output 2 kegiatan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

B. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :



- (1) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, indikator kinerja Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang), target output 20 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen

Rumah Sakit Jiwa

Urusan kesehatan untuk Rumah Sakit Jiwa melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 40.819.471.619,00** dengan total penyerapan **Rp. 39.588.313.432,00** atau **96,98** persen. Alokasi dana tersebut untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit, indikator kinerja Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Paket), target keluaran target output paket dengan realisasi kinerja sebesar persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (2) Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya), indikator kinerja Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan (Paket), target output paket dengan realisasi kinerja sebesar persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,94 persen
- **Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, indikator kinerja jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, target



- output dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,93 persen
- (2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, target kinerja dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,82 persen
 - (3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), indikator kinerja jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,93 persen
 - (5) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat indikator kinerja jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (6) Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet, indikator kinerja Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan, target output unit, dengan target output sebesar persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen



- **Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**

- (1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, indikator kinerja jumlah rumah sakit yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar, target output unit, dengan realisasi kinerja sebesar persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

B. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, indikator kinerja umlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), target output orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja 100 persen

Rumah Sakit Umum Daerah Abepura

Urusan kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Abepura melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 126.573.025.795,00** dengan total penyerapan **Rp. 114.604.799.808.31 atau 90,54** persen. Alokasi dana tersebut untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit, indikator kinerja Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit, target output unit, dengan realisasi



- kinerja sebesar persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 91,4 persen
- (2) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan, indikator kinerja, indikator kinerja Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan, target output unit, dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,96 persen
 - (3) Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit, indikator kinerja jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan, target output unit, dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,99 persen
 - (4) Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya, indikator kinerja Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan, target output unit, dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,47 persen
- **Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, indikator kinerja umlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, target output dokumen, dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,47 persen

B. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, indikator kinerja umlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), target output



dokumen, dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,47 persen

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (yang bersumber dari dana Otsus dan DTI)

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, perumahan dan Kawasan permukiman mengurus 2 urusan yaitu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan perumahan dan Kawasan Permukiman, melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 858,296,980,760,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 710,445,999,182,44** atau **82,77 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

- **Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai, indikator kinerja Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun, target kinerja 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,18 persen
 - (2) Pembangunan Kanal Banjir, indikator kinerja panjang kanal banjir yang dibangun, target kinerja 0 km, dengan realisasi kinerja sebesar 0 km dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,7 persen

2) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (YANG BERSUMBER DARI DTI DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA)



- **Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota,** terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM, indikator kinerja Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (Dokumen), target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,14 persen
- (2) Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan, indikator kinerja Kapasitas Pembangunan SPAM Regional (Liter/Detik), target kinerja 0, dengan realisasi kinerja sebesar 0, dan tingkat capaian kinerja sebesar 75,69 persen
- (3) Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota, indikator kinerja jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara, target 0. Unit dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 75,42 persen

3) **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**

- **Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi,** terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi, indikator kinerja jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi, target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,71 persen

4) **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**

- **Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi,** terdiri dari sub kegiatan :



- (1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen), target kinerja 2 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 94,5 persen
- (2) Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan, indikator kinerja luas lahan yang tersedia untuk penyelenggaraan jalan, target kinerja 0. M', dengan realisasi kinerja sebesar 0 M' dan tingkat capaian kinerja 100 persen
- (3) Pembangunan Jalan, indikator kinerja Panjang Jalan yang Dibangun, target kinerja 0 km, dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 79,75 persen
- (4) Rekonstruksi Jalan, indikator kinerja Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan (KM), target kinerja 0 km, dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 82,61 persen
- (5) Rehabilitasi Jalan, indikator kinerja Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM), target kinerja 0 km, dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 90,92 persen
- (6) Pembangunan Jembatan, Panjang Jembatan yang Dibangun (M), target kinerja 0 M'' dengan realisasi kinerja sebesar persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 53,04 persen

5) **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**

- **Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi,** terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi, indikator kinerja Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan (Orang), target kinerja 0 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,20 persen



- (2) Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi, Jumlah Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,71 persen

6) **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**

- **Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, indikator kinerja Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, target 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,82 persen

7) **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**

- **Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman, indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman target 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 96,83 persen
- (2) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman, indikator kinerja Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Unit



Rumah), target kinerja 0 lokasi dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 83,99 persen

4. URUSAN KETENTERAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SERTA SOSIAL

Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Provinsi Papua

Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Provinsi Papua, melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 34,329,753,918,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 30,565,038,884,00** atau **89.03 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- **Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan, indikator kinerja Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan (Laporan), target kinerja 4 laporan dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (2) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, indikator kinerja Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan), target kinerja 2 laporan dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja 97,59 persen



- (3) Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Dokumen), target kinerja 3 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen
 - (4) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum, indikator kinerja Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Laporan), target kinerja 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,96 persen
- **Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan) target kinerja 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,62 persen
 - (2) Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan, target kinerja 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,83 persen

2) PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

- **Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana), indikator kinerja Jumlah Orang yang



Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota (Orang), target kinerja 40 orang, dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan titik capaian kinerja sebesar 99,99 persen

- **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, indikator kinerja Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana (Orang), target kinerja 60 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,95 persen
 - (2) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana, indikator kinerja Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang) target kinerja 50 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, indikator kinerja Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang) target kinerja 50 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,9 persen
- **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana, indikator kinerja Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) (Dokumen) target



- kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan) target kinerja 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen
 - (3) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, indikator kinerja Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (keluarga) target kinerja 60 keluarga dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (4) Penanganan Pasca Bencana Provinsi, indikator kinerja Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun (Dokumen) target kinerja 2 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,94 persen

3) PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

- **Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan) target kinerja 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen

5. URUSAN SOSIAL

Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua



Dinas Sosial Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi Papua mengurus 3 urusan yaitu urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 45,301,434,190,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 42,464,871,061,00** atau **93.74 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- **Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi Yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang), target kinerja 60 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- (2) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Keluarga yang meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Keluarga), target kinerja 30 keluarga dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- (3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Lembaga), target kinerja 10 lembaga dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

1) PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- **Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti** Terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Penyediaan Permakanan, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan



- Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang), target kinerja 18 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,93 persen
- (2) Penyediaan Sandang, indikator kinerja Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang) target kinerja 18 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,59 persen
 - (3) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses, indikator kinerja Jumlah orang yang terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang) target kinerja 18 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (4) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial, indikator kinerja Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental dan Spiritual kewenangan Provinsi (Orang), target kinerja 18 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (5) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari, indikator kinerja Jumlah Peserta Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari hari Kewenangan Provinsi (Orang), target kinerja 18 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (6) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar (Dokumen), target kinerja 18 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,24 persen
- **Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses, indikator kinerja Jumlah orang yang terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang), target kinerja 17 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen



- (2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di dalam Panti (Dokumen), target kinerja 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Penyediaan Permakanan, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang), target kinerja 38 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,42 persen
 - (2) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses, indikator kinerja Jumlah orang yang terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang) target kinerja 38 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,59 persen
 - (3) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial, indikator kinerja Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang), target kinerja 38 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (4) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial, indikator kinerja Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental dan Spiritual kewenangan Provinsi (Orang), target kinerja 38 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (5) Pemulasaraan, indikator kinerja Jumlah Pemulasaran Kewenangan Provinsi, target kinerja 3 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - **Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**, terdiri dari sub kegiatan :



- (1) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial, indikator kinerja Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental dan Spiritual kewenangan Provinsi (Orang) target kinerja 20 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,49 persen

1) PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

- **Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, indikator kinerja Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi (Keluarga) target kinerja 30 keluarga dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,6 persen
- (2) Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miski Lintas Kabupaten/ Kota (Keluarga), target kinerja 36 keluarga dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,8 persen

1) PROGRAM PENANGANAN BENCANA

- **Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**, teridri dari sub kegiatan :

- (1) Penyediaan Permakanan, indikator kinerja Jumlah Pengungsi yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi (Orang), target kinerja 256 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,6 persen
- (2) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, indikator kinerja Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan provinsi (Orang), target kinerja 33 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen



Permasalahan Dan Solusi

1. Permasalahan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada umumnya terdiri dari 26 Kategori/ Kelompok PMKS menurut Kementerian Sosial RI. Untuk Provinsi Papua terdapat 20 Kategori/ Kelompok. Sedangkan yang tertangani hanya 8 (delapan) Kategori/ kelompok PMKS saja, diantaranya adalah : Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Penyalahgunaan Napza, dan Korban Bencana Alam dan Sosial. Permasalahan yang dihadapi tidak terlepas dari data PMKS tersebut, hal ini diakibatkan oleh data PMKS yang sifatnya fleksibel/ tidak tetap dan berubah-ubah, dan juga kurang mendapat dukungan data yang valid dari Kabupaten/ Kota. Untuk itu dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tersebar dilokasi-lokasi terpencil dan sulit terjangkau oleh pelayanan yang ada;
- b. Kondisi geografis turut serta mendukung sulitnya pemberian pelayanan kepada PMKS seperti di wilayah pegunungan, lembah, pulau terluar serta perbatasan antar negara;
- c. Infrastruktur untuk menjangkau PMKS sebagaimana huruf a dan b diatas belum tersedia;
- d. Kebijakan pemerintah daerah masih sangat terbatas dan baru 2 (dua) Peraturan Daerah (Perda) yang secara langsung terkait dengan PMKS yaitu Peraturan Daerah Khusus Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyandang disabilitas dan Peraturan Daerah Khusus Tahun 2008 tentang Penanganan khusus terhadap suku-suku tertinggal yang mengacu pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2021. Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. (Bab XX Pasal 66 ayat (1) "Pemerintah Provinsi memberikan perhatian dan penanganan khusus bagi pengembangan suku-suku yang terisolasi/ terpencil dan terabaikan di Provinsi Papua".)

2. Solusi

Memperhatikan permasalahan yang ada, beberapa solusi yang bisa dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah tersebut antara lain :



- a. Kebijakan penganggaran pembangunan manusia secara khusus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum sepenuhnya berpihak atau *Pro Poor*, sehingga dengan kondisi geografis dan penyebaran PMKS setidaknya ditangani dengan pembiayaan yang signifikan baik untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan;
- b. Mengingat penduduk yang berada di daerah-daerah terpencil masih mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan, maka pemberdayaan berupa pemberian keterampilan bertani dengan menggunakan peralatan pertanian dan bercocok tanam yang baik;
- c. Pelayanan berbasis panti di Papua harus dikembangkan di beberapa Kabupaten atau Wilayah Adat, sehingga pelayanan seperti Lanjut Usia dan anak Terlantar bisa Tertangani secara Terpadu.

I. Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) URUSAN TENAGA KERJA

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi Papua

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi Papua mengurus 4 urusan yaitu urusan Tenaga Kerja, Perindustrian, dan perdagangan dan Transmigrasi, melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 52,652,055,105,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 47,513,240,667,00** atau **90.24 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

- **Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**, terdiri dari sub kegiatan :



- (1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi, indikator kinerja Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n (Orang), target kinerja 100 orang dengan realisasi sebesar 50 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,78 persen
- **Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (2) Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja, indikator kinerja Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi (LPK), target kinerja 4 LPK dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,76 persen.

2) PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

- **Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/ Kota**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja, indikator kinerja Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya (Orang), target kinerja 20 orang dengan realisasi sebesar 50 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,85 persen

3) PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

- **Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/ Kota**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial, indikator kinerja Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online (Perusahaan), target kinerja 10 perusahaan dengan realisasi sebesar 62,5 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (2) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, indikator kinerja Jumlah Data dan



Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek (Laporan), target kinerja 1 laporan dengan realisasi sebesar 50 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 84,5 persen

- **Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :

(1) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi, indikator kinerja Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara), target kinerja 20 perkara dengan realisasi sebesar 81,43 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

- **Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**, terdiri dari sub kegiatan :

(1) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), indikator kinerja Jumlah Penetapan UMP (Surat Keputusan), target kinerja 1 surat keputusan dengan realisasi sebesar 66,67 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

4) **PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

- **Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**, terdiri dari sub kegiatan :

(1) Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan, indikator kinerja Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) (Perusahaan), target kinerja 50 perusahaan dengan realisasi sebesar 33,33 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen



- (2) Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan, indikator kinerja Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 (Perusahaan), target kinerja 50 perusahaan dengan realisasi sebesar 50 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,94 persen

2) URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua

Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Pada tahun 2023, melaksanakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

- Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) (OPD), target kinerja 3 OPD dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi (Dokumen)), target kinerja 2 Dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen



- **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang tersedia (Dokumen) target kinerja 3 Dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

B. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

- Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi, target kinerja 5 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja 100 persen

- **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan

- (1) Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik (Orang), target kinerja 50 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja 100 persen
- (2) Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan



Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen), target kinerja 5 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja 100 persen

C. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

- **Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi,**

terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang tersedia (Dokumen), realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja 100 persen

D. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

- **Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi, terdiri dari sub kegiatan :**

- (1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi dan Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha (Organisasi) target kinerja 30 organisasi realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja 100 persen

- **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi,** terdiri dari sub kegiatan



- (1) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (Orang), target kinerja 35 orang realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja 100 persen

E. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

- **Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi (Dokumen), target kkinerja 5 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja 100 persen
- **Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (Layanan), target kinerja 7 layanan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,55 persen
- **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**, terdiri dari sub kegiatan



- (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi (Dokumen), target kinerja 5 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

3) PANGAN

Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua mengurus 2 urusan yaitu urusan Pertanian dan urusan Pangan, melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 91,462,009,141,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 83,673,899,451,00** atau **91.48 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

i. **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**

- **Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, indikator kinerja Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Laporan), target kinerja keluaran 2 laporan dengan realisasi keluaran sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,92 persen

ii. **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**

- **Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan



Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Sertifikat), target kinerja keluaran 30 sertifikat dengan realisasi keluaran sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,35 persen

4) URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua mengurus 2 urusan yaitu urusan Lingkungan Hidup dan urusan Kehutanan, melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 127,290,532,584,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 116,776,731,512.33** atau **94.43 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

- **Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi, indikator kinerja Jumlah Dokumen (Laporan), target kinerja keluaran 1 laporan, dengan realisasi keluaran sebesar 1 laporan atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,3 persen

- **Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang, Jumlah Dokumen (Laporan), target kinerja keluaran 1 laporan, dengan realisasi keluaran sebesar 1 laporan atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,55 persen

B. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

- **Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, indikator kinerja Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup



Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi keluaran sebesar 1 dokumen atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,16 persen

- (2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sector lingkungan hidup yang Dilaksanakan, target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi keluaran sebesar 80,04 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 80,04 persen

C. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

- **Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi keluaran sebesar 1 dokumen atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,91 persen

D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)



- **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, indikator kinerja Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD (Orang), target kinerja keluaran 5 orang dengan realisasi keluaran sebesar 5 orang atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 96,88 persen

E. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

- **Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari kegiatan :

- (1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan, indikator kinerja Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH (Lembaga), target kinerja keluaran 5 lembaga dengan realisasi keluaran sebesar 5 lembaga atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,88 persen
- (2) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi, indikator kinerja Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat (Orang), target kinerja keluaran 200 orang dengan realisasi keluaran sebesar 200 orang atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,68 persen

F. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

- **Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :



- (1) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, indikator kinerja Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (entitas), target kinerja keluaran 3 entitas dengan realisasi keluaran sebesar 3 entitas atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,01 persen

G. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

- **Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan, indikator keluaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan (Dokumen), target kinerja keluaran 2 dokumen dengan realisasi keluaran sebesar 2 dokumen atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 96,6 persen

H. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

- **Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan (Dokumen), target kinerja keluaran 2 dokumen dengan realisasi



keluaran sebesar 2 dokumen atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,33 persen

I. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI), bersumber dari Dana OTSUS dan DBH

- **Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi, dilaksanakan pada UPTD Kebun Raya Koya Koso**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (2) Pengelolaan Kebun Raya, indikator kinerja Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi (Ha) target kinerja keluaran 150 Ha dengan realisasi keluaran sebesar 150 Ha 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (3) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya, indikator kinerja Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Ha), target kinerja keluaran 600 Ha dengan realisasi keluaran sebesar 600 Ha 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen

J. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

- **Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**, dilaksanakan pada UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati, indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit), target output 1 unit dengan realisasi kinerja sebesar 30 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 58,47 persen

K. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Papua

- **Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi, indikator kinerja Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas



Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan (Dokumen), target output 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen

5) URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Pada tahun 2023, melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

- **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan), target kinerja keluaran 5 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

B. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

- **Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil, indikator kinerja Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun (Dokumen), target kinerja keluaran 5 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan),



target kinerja keluaran 5 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

C. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- **Keigatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Dokumen, target kinerja keluaran 5 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan (Laporan), target kinerja keluaran 5 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan, indikator kinerja Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Orang), target kinerja keluaran 4 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen



D. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

- **Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain indikator kinerja Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain (Dokumen), target kinerja keluaran 5 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

6) URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 36,003,277,261,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 34,496,598,319,00** atau **95.82 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

- **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,95 persen

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

- **Kegiatan Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang**



Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- (2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen), target kinerja keluaran 6 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA

- **Kegiatan Pengembangan Data/Informasi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,89 persen
- **Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kampung**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna, indikator kinerja Jumlah Pengembangan Teknologi Tepat Guna (Laporan), target kinerja



keluaran 5 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,62 persen

D. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ORANG ASLI PAPUA

- **Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah Adat Orang Asli Papua**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat, **Indikator kinerja** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat (Dokumen), **target kinerja keluaran** 6 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,95 persen
 - (2) Identifikasi Wirausaha Pemula dan Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat, indikator kinerja Jumlah Wirausaha Pemula di 5 (Lima) Wilayah Adat yang Diidentifikasi dan Mengikuti Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung (Dokumen), target kinerja keluaran 5 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,59 persen

7) URUSAN PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan melaksanakan urusan perhubungan, melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 52,123,816,995,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 40,028,012,953,00** atau **76.79 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

- **Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia (Unit), target kinerja



keluaran 140 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,43 persen

- **Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung), indikator kinerja Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,18 persen

B. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

- **Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional, indikator kinerja ketersediaan pelabuhan yang memadai (Unit), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 87 persen

C. PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN

- **Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara, indikator kinerja Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia (Unit), target kinerja keluaran 3 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 46,48 persen

8) URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika, melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 23,848,485,300,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp.**



22,642,059,321,00 atau **94.94 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

• **Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan

- (1) Pengelolaan Media Komunikasi Publik, indikator kinerja, target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- (2) Pelayanan Informasi Publik, indikator kinerja, target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

B. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

• **Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan

- (1) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, indikator kinerja, target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- (2) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, indikator kinerja, target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

9) URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Pada tahun 2023, melaksanakan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI



- **Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesiambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesiambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat (Dokumen), target kinerja keluaran 3 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 83,15 persen
 - (2) Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta Akuntabel, indikator kinerja Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel (Unit Usaha), target kinerja keluaran 6 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,07 persen

B. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

- **Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi, indikator kinerja Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi (Unit Usaha), target kinerja keluaran 50 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,87 persen



- (2) Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi, indikator kinerja Jumlah Koperasi yang dapat dinilai tingkat kesehatannya (unit usaha), target kinerja keluaran 50 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,84persen

C. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

- **Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi, indikator kinerja Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang), target kinerja keluaran 100 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 93,6 persen

D. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

- **Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha, indikator kinerja Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha), target kinerja keluaran 5 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 78,06 persen
 - (2) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya, indikator kinerja Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga), target kinerja



keluaran 150 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

E. PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

- **Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan,** terdiri dari sub kegiatan

- (1) Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan, indikator kinerja Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Unit Usaha), target kinerja keluaran 130 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 67,91 persen
- (2) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan, indikator kinerja Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang), target kinerja keluaran 518 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 83,12 persen

F. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

- **Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah,** terdiri dari sub kegiatan

- (1) Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi, indikator kinerja Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit), target kinerja keluaran 90 dokumen dengan



realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 70,01 persen

- (2) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM, indikator kinerja Jumlah Penyelesaian Perkara bagi pelaku UMKM (unit usaha), target kinerja keluaran 90 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen

10) URUSAN PENANAMAN MODAL

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua melaksanakan urusan penanaman modal, melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 23,356,321,522,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 21,639,200,497,00** atau **92.65 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

- **Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi,** terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, indikator kinerja Tersedianya dana yang dibutuhkan (Rp.515.183.500,-), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,89 persen
- **Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi,** terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi, indikator kinerja Tersedianya Peta Potensi Investasi di Provinsi Papua (Buku), target kinerja keluaran 0 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,65 persen

B. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL



- **Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Tersedianya Bahan/Materi Promosi yang Up to Date di Provinsi Papua berupa: Buku Peluang Investasi, Brosur PM, Profil Proyek Investasi, Peta Peluang Usaha, Peta Penyebaran Perudahaan PMA, PMDN dan Video Digital Promosi PM. (buku, lbr), target kinerja keluaran 2 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 96,71 persen
 - (2) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Terlaksananya Promosi Dalam dan Luar Negeri (event), target kinerja keluaran 5 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

C. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

- **Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, indikator kinerja Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik (), target kinerja keluaran 1000 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,86 persen
 - (2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, indikator kinerja Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah (), target kinerja keluaran 17 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,92 persen



D. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

- **Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, indikator kinerja Tersedianya data perusahaan PMA/PMDN (dokumen), target kinerja keluaran 0 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,13 persen
 - (2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, indikator kinerja, target kinerja keluaran 0 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 91,14 persen
 - (3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, indikator kinerja Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profile dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha (Kegiatan Usaha), target kinerja keluaran 0 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 94,01 persen

E. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

- **Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, indikator kinerja Tersedianya data perusahaan PMA/PMDN (dokumen), target kinerja keluaran 0 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,68 persen



11) URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi Papua melaksanakan urusan Kepemudaan dan Olahraga, melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 47,373,353,596,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 44,629,576,50,00** atau **94.21 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

- **Kegiatan Penyebaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi, indikator kinerja, target kinerja keluaran 0 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 0 persen
 - (2) Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera, indikator kinerja Terlaksananya Penyelenggaraan seleksi pasukan pengibar bendera (peserta), target kinerja keluaran 100 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 93,43 persen
 - (3) Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda indikator kinerja, target kinerja keluaran 0 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 0 persen
- **Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi (Dokumen), target kinerja keluaran 100 dokumen



dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,91 persen

B. PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

- **Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi, indikator kinerja Terselenggaranya event olahraga bagi para pelajar, target kinerja keluaran 100 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (2) Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event, indikator kinerja, target kinerja keluaran 0 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 0 persen
- **Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Seleksi Atlet Daerah, indikator kinerja, target kinerja keluaran 0 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 0 persen
 - (2) Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science), indikator kinerja, target kinerja keluaran 0 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 0 persen
 - (3) Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi, indikator kinerja Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Kegiatan), target kinerja keluaran 100 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 94,97 persen
 - (4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga, indikator kinerja, target kinerja keluaran 0 dokumen dengan



realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 0 persen

- **Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga,** terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Standardisasi Organisasi Keolahragaan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan (Dokumen), target kinerja keluaran 100 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,22 persen
 - (2) Pengembangan Organisasi Keolahragaan, indikator kinerja, target kinerja keluaran 0 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 0 persen
 - (3) Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait, indikator kinerja, target kinerja keluaran 0 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 0 persen
 - (4) Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi, indikator kinerja Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan (Organisasi), target kinerja keluaran 100 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

12) URUSAN PERSANDIAN

Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Pada tahun 2023, melaksanakan Urusan Persandian dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

- **Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi,** terdiri dari sub kegiatan



- (1) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi, indikator kinerja, target kinerja keluaran 0 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 0 persen

13) URUSAN KEBUDAYAAN

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua melaksanakan dua urusan yakni Kebudayaan dan Pariwisata, melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 49,444,367,196,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 47,966,222,425.01** atau **97.01 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

- **Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, indikator kinerja Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi kebudayaan (Orang), target kinerja keluaran 60 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen
 - (2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan, indikator kinerja Jumlah film Dokumenter (Paket), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 96,35 persen
- **Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya, indikator kinerja Jumlah Peserta yang mengikuti gita bahana



- (Orang), target kinerja keluaran 60 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,97 persen
- (2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional, indikator kinerja Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 96,15 persen
- (3) Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan, indikator kinerja Jumlah Orang/Lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan (Sertifikat), target kinerja keluaran 18 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
- (1) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat, indikator kinerja Jumlah Pembinaan Sumberdaya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang dibina (Cetak buku kamus Indonesia - Ansus) (Buah), target kinerja keluaran 300 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

B. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

- **Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**, terdiri dari sub kegiatan
- (1) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional, indikator kinerja Jumlah Sumber Daya Manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) Jumlah Sumber Daya Manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (Ditingkatkan



- Kompetensinya) Pelatihan Juri Seni) (Orang), target kinerja keluaran 60 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,78 persen
- (2) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional, indikator kinerja Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang di tingkatkan kapasitasnya (Kias Budaya Papua Ke 1) (Kegiatan), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,7 persen

C. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

- **Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
- (1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah, indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit), target kinerja keluaran 5 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,13 persen

D. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

- **Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
- (1) Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, indikator kinerja Jumlah Objek diduga cagar budaya yang di daftarkan (Objek), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,17 persen
- (2) Penetapan Cagar Budaya, indikator kinerja Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan (Objek), target kinerja keluaran 4 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,76 persen
- **Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan



- (1) Pengembangan Cagar Budaya, indikator kinerja Jumlah objek cagar budaya yang dikembangkan (Objek), target kinerja keluaran 2 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,97 persen
- (2) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya, indikator kinerja Jumlah tenaga pelestari cagar budaya yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang), target kinerja keluaran 38 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

E. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

- **Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu, indikator kinerja Jumlah Koleksi Museum yang dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu (Unit/Kegiatan), target kinerja keluaran 5 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 95,1 persen
 - (2) Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman, indikator kinerja Jumlah sumberdaya manusia permuseuman yang ditingkatkan mutu dan kapasitasnya (Orang), target kinerja keluaran 110 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,2 persen
 - (3) Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum, indikator kinerja Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum (Pameran Keliling di Kab. Biak Numfor (Kegiatan), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,47 persen



14) URUSAN PERPUSTAKAAN

Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Pada tahun 2023, melaksanakan Urusan Perpustakaan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

iii. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik, Indikator kinerja Jumlah Layanan Perpustakaan elektronik yang di kembangkan, target kinerja 2 perpustakaan, dengan realisasi kinerja 2 perpustakaan atau 100persen, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,97 persen
 - (2) Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi, Indikator kinerja Terasilitasi pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah, Provinsi, target kinerja 1 bangunan, dengan realisasi kinerja 1 bangunan 100persen, tingkat capaian kinerja sebesar 99,95persen
 - (3) Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi, target kinerja Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan, target kinerja 3 eksemplar, dengan realisasi kinerja 3 eksemplar atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,84persen
 - (4) Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan, Indikator kinerja Terasilitasi Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, target indikator kinerja 3 kegiatan dengan realisasi kinerja 2 kegiatan atau 100 persen, dan tingkat kinerja sebesar 100persen
 - (5) Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi, Indikator kinerja Terselenggaranya Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi, target kinerja 15 orang, dengan realisasi kinerja 15 orang atau 100 persen, dengan tingkat capaian kinerja 96,01persen
 - (6) Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi, Indikator kinerja Terselenggaranya Peningkatan Kapasitaa Tenaga Perpustakaan Tinggakat Daerah dan Provinsi, target kinerja 60 orang, dengan



- realisasi 60 orang atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,2persen
- (7) Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, indikator kinerja Terfasilitasi Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, target kinerja 3 kegiatan, dengan realisasi kinerja 3 kegiatan atau 100 persen, dan tingkat capaian kerja sebesar 100persen
 - (8) Pengembangan Perpustakaan Deposit, indikator kinerja Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan, target kinerja 1 perpustakaan dengan realisasi kinerja 1 perpustakaan atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98persen
 - (9) Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi, indikator kinerja Jumlah Data dan informasi Perpustakaan, target kinerja 3 dokumen, dengan realisasi kinerja 3 dokumen atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,97persen
- **Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat, indikator kinerja Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus, target kinerja 10 lokus, dengan realisasi 2 lokus atau 99,93 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,93persen
 - (2) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial, indikator kinerja Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan, target kinerja 2 perpustakaan, dengan realisasi kinerja 2 perpustakaan atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

B. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)



- **Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**, Terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara, indikator kinerja Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi, target kinerja keluaran 200 eksemplar dengan realisasi kinerja sebesar 200 eksemplar atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen

C. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**, Terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis, indikator kinerja Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi, indikator target 200 eksemplar, dengan realisasi kinerja 200 eksemplar atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen

D. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun, indikator kinerja Terciptanya arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan, indikator target 1.000 lembar, dengan ralisasi kinerja 1.000 atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

- **Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota**

- (1) Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi

- **Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**



- (1) Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip, indikator kinerja Terciptanya Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan, indikator target 1.000 eksemplar, dengan realisasi fisik kinerja 1.000 atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- (2) Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip, indikator kinerja Jumlah Tenaga Fungsional/Operator Aplikasi SRIKANDI, Indikator target 6 orang dengan realisasi fisik 6 orang atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

E. PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi**, dengan sub kegiatan :
 - (1) Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup, indikator kinerja tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan di tingkat Provinsi/Kabupaten , target kinerja 21 Unit dengan realisasi kinerja 21 unit atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,87 persen

F. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**, Terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dikemukakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, indikator target jumlah koleks budaya ednis Nusantara yang diselesksi dan dilakukan pengadaan oleh perpustakaan daerah tingkat provinsi, target keluaran 200 eksemplar dengan indikator kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen

15) URUSAN KEARSIPAN

Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Pada tahun 2023, melaksanakan Urusan Kearsipan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :



A. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**, Terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis, indikator kinerja Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi, indikator target 200 eksemplar, dengan realisasi kinerja 200 eksemplar atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen

B. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun, indikator kinerja Terciptanya arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan, indikator target 1.000 lembar, dengan ralisasi kinerja 1.000 atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja sebesar 100persen
- **Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota**
 - (1) Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi
- **Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**
 - (1) Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip, indikator kinerja Terciptanya Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan, indikator target 1.000 eksemplar, dengan realisasi fisik kinerja 1.000 atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja sebesar 100persen
 - (2) Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip, indikator kinerja Jumlah Tenaga Fongsional/Operator



Aplikasi SRIKANDI, Indikator target 6 orang dengan realisasi fisik 6 orang atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

C. PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi**, dengan sub kegiatan :

- (1) Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup, indikator kinerja tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan di tingkat Provinsi/Kabupaten , target kinerja 21 Unit dengan realisasi kinerja 21 unit atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,87 persen.

II. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan

1) URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua melaksanakan urusan kelautan dan perikanan, melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 42,843,070,797,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 40,468,130,477.89** atau **94.46 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

- **Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat, indikator kinerja Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha), target kinerja keluaran 40 Ha dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,79 persen
- (2) Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, indikator kinerja, indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat



Daerah (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 95,99 persen

• **Kegiatan Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen
- (2) Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, indikator kinerja Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok), target kinerja keluaran 2 kelompok dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- (3) Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, indikator kinerja Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang), target kinerja keluaran 20 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,83 persen
- (4) Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, indikator kinerja Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok), target kinerja keluaran 4 kelompok dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,8 persen



B. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

- **Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, indikator kinerja Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit), target kinerja keluaran 5 unit dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,76 persen
 - (2) Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, indikator kinerja Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit), target kinerja keluaran 2 unit dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan, Indikator kinerja Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Pelabuhan Perikanan) target kinerja keluaran 1 pelabuhan perikanan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,57 persen
 - (2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan, Indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit), target kinerja keluaran 1 unit dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,76 persen
 - (3) Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan, Indikator kinerja Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan), target kinerja keluaran 2 unit dengan realisasi kinerja sebesar 3 layanan dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen



C. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

- **Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**, Terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Indikator kinerja Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,99 persen
 - (2) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut, Indikator kinerja Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit), target kinerja keluaran 22 unit dengan realisasi kinerja sebesar 21 unit atau 95,45 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,63 persen
 - (3) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut, Indikator kinerja Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit) target kinerja keluaran 1 unit dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen
 - (4) Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Indikator kinerja Jumlah Pembudidaya (Orang), target kinerja keluaran 10 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**, Terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit), target kinerja keluaran 4 unit dengan realisasi



- kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- (2) Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit), target kinerja keluaran 1 unit dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

D. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

- **Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen
 - (2) Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,79 persen
 - (3) Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen



dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

- (4) Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), indikator kinerja Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif (Kelompok), target kinerja keluaran 5 Kelompok dengan realisasi kinerja sebesar 80 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 95,4 persen

E. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

- **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, indikator kinerja Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar, indikator kinerja Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko, target kinerja keluaran unit usaha dengan realisasi kinerja sebesar persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen



- (2) Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing, indikator kinerja Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing, indikator kinerja Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing, target kinerja keluaran unit usaha dengan realisasi kinerja sebesar persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,94 persen
- **Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, indikator kinerja Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi, target kinerja keluaran unit usaha dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

2) URUSAN PARIWISATA

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Pada tahun 2023, melaksanakan Urusan Pariwisata dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

- **Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :



- (1) Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi, indikator kinerja Tersedianya Lokasi Daya tarik unggulan Provinsi sesuai dengan tahapan pengembangan (Pembangunan Home Stay) (Unit), target kinerja keluaran 2 unit dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,24 persen
 - **Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pengembangan Destinasi Pariwisata, indikator kinerja Tersedianya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (Pembangunan Guest House di desa Rheapang Muaib) (Unit), target kinerja keluaran 2 unit dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,07 persen

B. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

- **Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri, indikator kinerja Terlaksananya Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Orang), target kinerja keluaran 50 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen

C. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- **Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif, indikator kinerja Jumlah Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif (Unit), target



kinerja keluaran 50 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,05 persen

D. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

- **Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan, indikator kinerja Jumlah Peserta yang mengikuti Kompetensi SDM Pariwisata dan EKonomi Kreatif tingkat lanjutan (Orang), target kinerja keluaran 48 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 88,38 persen
- (2) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata, indikator kinerja Jumlah Orang yang mengikuti fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata (Kelompok), target kinerja keluaran 25 Kelompok dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,16 persen

- **Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif, indikator kinerja Jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan, Bimbingan teknis, dan pendampingan Ekonomi Kreatif (Kelompok), target kinerja keluaran 9 Kelompok dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 1,62 persen

3) URUSAN PERTANIAN

Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua Pada tahun 2023, melaksanakan Urusan Pertanian dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN



- Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian, indikator kinerja Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian (Laporan), target kinerja keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,72 persen
 - (2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, indikator kinerja Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Dokumen) target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,51 persen
- **Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih, indikator kinerja Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat) target kinerja keluaran 10.000 sertifikat dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,33 persen
 - (2) Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura, indikator kinerja Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura (Laporan) target kinerja keluaran 3 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 95,35 persen
 - (3) Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan, indikator kinerja Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran (Dokumen) target kinerja keluaran 3 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 101,05 persen
 - (4) Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan, indikator kinerja Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (Laporan) target kinerja keluaran 7 laporan



dengan realisasi kinerja sebesar 261,111 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 95,15 persen

- **Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :

(1) Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Laporan) target kinerja keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 92,62 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 90,87 persen

- **Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :

Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, indikator kinerja Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi (Laporan) target kinerja keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 94,73 persen

B. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

- **Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian**, terdiri dari sub kegiatan :

(1) Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian, indikator kinerja Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen) target kinerja keluaran 3 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,8 persen

(2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya, indikator kinerja Jumlah Gedung



UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit) target kinerja keluaran 6 unit dengan realisasi kinerja sebesar 54,55 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 91,15 persen

C. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

- **Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :

(1) Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, indikator kinerja Jumlah wilayah yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular (Layanan) target kinerja keluaran 6 layanan dengan realisasi kinerja sebesar 92,81 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,04 persen

- **Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**, terdiri dari sub kegiatan :

(1) Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, indikator kinerja Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (sampel) target kinerja keluaran 200 sampel dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,96 persen

D. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

- **Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :

(1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, indikator kinerja Jumlah Luas



Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha) target kinerja keluaran 165 hektar dengan realisasi kinerja sebesar 109,71 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen

E. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

- **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian, indikator kinerja (Laporan) target kinerja keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 95,97 persen

F. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

- **Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN, indikator kinerja Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan (Orang) target kinerja keluaran 60 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 88,89 persen
 - (2) Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta, indikator kinerja Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang) target kinerja keluaran 90 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,62 persen
- **Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian, indikator kinerja Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen) target kinerja keluaran 375 dokumen



dengan realisasi kinerja sebesar 49,67 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,48 persen

- (2) Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani, indikator kinerja Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok) target kinerja keluaran 1 kelompok dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,06 persen

- **Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan,** terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani, indikator kinerja Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi (Unit) target kinerja keluaran 3 unit dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,86 persen

4) URUSAN KEHUTANAN

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Pada tahun 2023, melaksanakan Urusan Kehutanan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

- **Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK),** terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan, indikator kinerja jumlah dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan yang tersusun, target kinerja keluaran dokumen, tingkat realisasi kinerja sebesar 92,6 persen

- **Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung,** terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi, indikator kinerja Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi



- dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala (Dokumen) target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,91 persen
- (2) Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung, indikator kinerja Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala (Dokumen) target kinerja keluaran 2 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,39 persen
- **Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara, indikator kinerja Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha) target kinerja keluaran 10 hektar dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,9 persen
 - (2) Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara, indikator kinerja Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha) target kinerja keluaran 100 hektar dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,28 persen
 - **Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**, , terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan, indikator kinerja Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan (Ha) target kinerja keluaran 100 hektar dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - **Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu, indikator kinerja Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH (Unit Managemen) target kinerja keluaran 1 unit managemen dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 95,72 persen



- **Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m³/Tahun**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m³/Tahun, indikator kinerja Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi (Dokumen) target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 95,46 persen

B. PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

- **Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi, indikator kinerja Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola (Ha) target kinerja keluaran 10 hektar dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,16 persen

C. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN

- **Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan, indikator kinerja Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan (Kelompok) target kinerja keluaran 4 kelompok dengan realisasi kinerja sebesar 44,44 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 87,99 persen



CABANG DINAS KEHUTANAN JAYAPURA

D. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

- **Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara, indikator kinerja Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha) target kinerja keluaran 3 hektar dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 98,75 persen

E. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

- **Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Orang)) target kinerja keluaran 30 orang dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,23 persen

CABANG DINAS KEHUTANAN SARMI

F. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

- **Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara, indikator kinerja Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha) target kinerja keluaran 2 hektar dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 100 persen

G. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)



- **Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Orang) target kinerja keluaran 35 orang dengan realisasi kinerja sebesar 50 dan tingkat capaian kerja sebesar 99,86 persen

CABANG DINAS KEHUTANAN KEEROM

H. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

- **Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara, indikator kinerja Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha) target kinerja keluaran 1 hektar dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,14 persen
- **Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan, indikator kinerja Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen) target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,99 persen

I. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

- **Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam



Kegiatan Pengelolaan DAS (Orang) target kinerja keluaran 30 orang dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,72 persen

CABANG DINAS KEHUTANAN MAMBERAMO RAYA

J. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

- **Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara, indikator kinerja Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha) target kinerja keluaran 2 hektar dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 98,99 persen

K. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

- **Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Orang) target kinerja keluaran 20 orang dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,93 persen

KPHP UNIT XVII WAROPEN

L. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

- **Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara, indikator kinerja Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha) target kinerja keluaran 2 hektar dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,74 persen



M. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

- **Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Orang) target kinerja keluaran 10 orang dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,97 persen

KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA

N. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

- **Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH, indikator kinerja Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun (Unit) target kinerja keluaran 1 unit dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,89 persen
- **Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan, indikator kinerja Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen) target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 100 persen

O. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)



- **Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Orang) target kinerja keluaran 30 orang dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 97,24 persen

KPHP UNIT XXIII SARMI

P. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

- **Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara, indikator kinerja Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha) target kinerja keluaran 3 hektar dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 95,73 persen

Q. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

- **Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Orang) target kinerja keluaran 30 orang dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 100 persen.

KPHP Unit XIX KEPULAUAN YAPEN

R. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN



- **Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK),** terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Dokumen) target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,82 persen

S. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

- **Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi,** terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Orang) target kinerja keluaran 15 orang dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,5 persen

KPHP Unit XX BIAK

T. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

- **Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi,** terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH, indikator kinerja Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun (Unit) target kinerja keluaran 20 unit dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,71 persen
- **Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung,** terdiri dari sub kegiatan :



- (1) Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung, indikator kinerja Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala (Dokumen) target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 100 persen
- (2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung (Dokumen) target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 100 persen

U. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

- **Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Orang) target kinerja keluaran 30 orang dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 91,96 persen

KPHP Unit XXVIII KOTA JAYAPURA

V. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

- **Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan, indikator kinerja Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen) target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,85 persen



W. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

- **Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Orang) target kinerja keluaran 30 orang dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,36 persen

KPHP Unit XXIX KEEROM

X. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

- **Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara, indikator kinerja Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha) target kinerja keluaran 2 hektar dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 98,1 persen

Y. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

- **Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Orang) target kinerja keluaran 10 orang dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,52 persen

BTPPH JAYAPURA

Z. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN



- **Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Sertifikasi Sumber Benih, indikator kinerja Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan (Sertifikat) target kinerja keluaran 1 sertifikat dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,52 persen
 - (2) Sertifikasi Mutu Benih, indikator kinerja Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan (Sertifikat) target kinerja keluaran 10 sertifikat dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 95,27 persen
 - (3) Pembangunan Sumber Benih, indikator kinerja Luas Sumber Benih yang Dibangun (Ha) target kinerja keluaran 2 hektar dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 100 persen

5) URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Papua melaksanakan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, melalui APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 50,338,979,825** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 47,093,601,428** atau **93,55 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN

- **Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah, indikator kinerja Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Dokumen) target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 98,05 persen
 - (2) Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah, indikator kinerja Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang



Ditetapkan dalam Daerah Provinsi (Dokumen) target kinerja keluaran 3 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,45 persen

- (3) Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan) target kinerja keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah, indikator kinerja Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul (Dokumen) target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,83 persen
 - (2) Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan) target kinerja keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 97,33 persen
 - (3) Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan) target kinerja keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 100 persen

B. PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

- **Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah**



yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat (Laporan) target kinerja keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 100 persen
 - (2) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Laporan) target kinerja keluaran 2 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 96,99 persen
- **Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi,** terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, indikator kinerja Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi



(Laporan) target kinerja keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 100 persen

- **Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**, terdiri dari sub kegiatan :

(1) Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Laporan) target kinerja keluaran 2 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 97,8 persen

- **Kegiatan Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)**, terdiri dari sub kegiatan :

(1) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB), indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB) (Laporan) target kinerja keluaran 3 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,28

- **Kegiatan Penetapan Harga Patokan Batuan**, terdiri dari sub kegiatan :

(1) Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Batuan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah (Dokumen) target kinerja keluaran



3 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,3 persen

C. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN

- **Kegiatan Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun, terdiri dari sub kegiatan :**
 - (1) Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun (Laporan) target kinerja keluaran 2 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 0 persen
 - (2) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun, indikator kinerja Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun (Laporan) target kinerja keluaran 2 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 0 persen

D. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

- **Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi, terdiri dari sub kegiatan :**



- (1) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi, indikator kinerja Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (Laporan) target kinerja keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,58 persen
- **Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, indikator kinerja Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Dokumen) target kinerja keluaran 5 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,87 persen
 - (2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Laporan) target kinerja keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,65 persen
 - (3) Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan, indikator kinerja Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Unit) target kinerja keluaran 1,201 unit dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 96,29 persen



- (4) Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Laporan) target kinerja keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 100 persen

6) URUSAN PERDAGANGAN

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, Tahun Anggaran 2023 juga melaksanakan urusan perdagangan, dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

- **Kegiatan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi, indikator kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi (Laporan) target kinerja keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,99 persen

B. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING

- **Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**, terdiri dari sub kegiatan :



- (1) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (Laporan) target kinerja keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 98,8 persen
- (2) Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, indikator kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan) target kinerja keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 0 persen

C. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

- **Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor, indikator kinerja Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina (Pelaku Usaha) target kinerja keluaran 30 pelaku usaha dengan realisasi kinerja sebesar 6,67 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,62 persen

D. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

- **Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pengembangan Layanan Pengujian, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang (Dokumen) target kinerja keluaran 5



dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 250 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,89 persen

- (2) Pengembangan Layanan Kalibrasi, indikator kinerja Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan (Sertifikat) target kinerja keluaran 5 sertifikat dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,41 persen
- **Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi (Laporan) target kinerja keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,32 persen

7) URUSAN PERINDUSTRIAN

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, Tahun Anggaran 2023 juga melaksanakan urusan perindustrian, dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

- **Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
- **Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP, indikator kinerja Jumlah bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP (Unit) target kinerja keluaran 3 unit dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 98,37 persen



- (2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen) target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,96 persen
- (3) Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi (Dokumen) target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,82 persen

8) URUSAN TRANSMIGRASI

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, Tahun Anggaran 2023 juga melaksanakan urusan transmigrasi, dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

- Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Pelatihan Transmigrasi, indikator kinerja Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Orang), target kinerja keluaran 20 orang, dengan realisasi sebesar 50 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

III. Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) URUSAN SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah Provinsi Papua melaksanakan urusan pemerintahan, melalui APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar



Rp. 421,302,288,692,00 dengan total penyerapan sebesar **Rp. 341,362,627,515,00** atau **81.03 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, target indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan), tingkat capaian kinerja 88,08 persen
- Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan : (1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan indikator kinerja Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, tingkat capaian kinerja 82,46 persen; (2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, indikator kinerja Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan, realisasi dengan tingkat capaian 99,81 persen; (3) Fasilitasi Kunjungan Tamu, indikator kinerja jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu, dengan realisasi kinerja 1 paket dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,53 persen; (4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, indikator kinerja jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, realisasi laporan dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 61,5 persen
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas, indikator kinerja Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,56 persen
- Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah, indikator kinerja Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 89,55 persen



- Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan, sub kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan, indikator kinerja jumlah laporan pengelolaan dokumentasi pimpinan
- Fasilitasi Keprotokolan, terdiri dari sub kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara, dengan sub kegiatan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara

Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua

APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 87,978,280,785,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 81,447,186,425.03** atau **92.58 persen**, di gunakan untuk melaksanakan 1 Program dan didukung oleh program peunjang urusan

A. PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

- **Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**, indikator kinerja sub kegiatan adalah : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Bulan), target kinerja keluaran 6 bulan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98,95 persen

B. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, berisikan indikator sub kegiatan : (1) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Buku), dengan target kinerja 32 buku dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,9 persen; (2) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Buku), target kinerja 30 buku, dengan tingkat capaian sebesar 97,65 persen



- **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, indikator kinerja sub kegiatannya adalah : (1) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Tahun), target kinerja 1 tahun realisasi 12,50 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 86,47 persen; (2) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, tingkat capaian kinerja sebesar 99,5 persen; (3) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Buku), target kinerja 45 buku, dengan tingkat capaian sebesar 99,39 persen
- **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, indikator kinerja sub kegiatannya adalah : (1) Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Stel), target kinerja 330 stel dengan tingkat capaian 99,86 persen; (2) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, target kinerja 9 (Orang) dan tingkat capaian 87,31 persen
- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**, indikator kinerja sub kegiatan : (1) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket), tingkat capaian kinerja 98,9 persen; (2) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) tingkat capaian kinerja 99,72 persen; (3) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) tingkat capaian kinerja 98,79 persen; (4) Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) tingkat capaian kinerja 95,94 persen; (5) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) tingkat capaian kinerja 98,88 persen; (6) Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (orang) tingkat capaian kinerja 99,27 persen; (7) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Orang), dengan tingkat capaian kinerja kegiatan sebesar 97,84 persen



- **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, indikator kinerja sub kegiatan adalah : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
- **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, indikator kinerja sub kegiatan adalah : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Tahun), target 1 tahun dengan realisasi kinerja sebesar 88,62 persen
- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, indikator kinerja sub kegiatan adalah : (1) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit), target 148 unit, dengan tingkat capaian 18,71 persen; (2) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)
- **Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan**, indikator kinerja sub kegiatan adalah : jumlah laporan pengelolaan hubungan keprotokolan, dengan tingkat capaian kinerja 97,09 persen

Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua

APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 32,605,495,650,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 31,854,209,521,00** atau **97.7 persen** digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan

A. PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

- **Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**, indikator kinerja sub kegiatan adalah : (1) Jumlah laporan hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan), target 1 laporan, realisasi 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen; (2) Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan), target 1 laporan,



realisasi 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen; (3) Jumlah laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan), target 1 laporan, realisasi 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

- **Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**, indikator kinerja sub kegiatan adalah : (1) Jumlah laporan hasil Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan), target 1 laporan, realisasi 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,95 persen; (2) Jumlah laporan hasil Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan) target 1 laporan, realisasi 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,9 persen; (3) Jumlah laporan hasil Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan) target 1 laporan, realisasi 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**, indikator kinerja sub kegiatan adalah : (1) Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan), target 1 laporan, realisasi 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen; (2) Jumlah dokumen hasil Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen), target 1 dokumen, realisasi 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen; (3) Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan), target 1 laporan, realisasi 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

B. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, indikator kinerja sub kegiatan adalah : (1) Jumlah dokumen hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



- (Dokumen), tingkat capaian sebesar 99,99 persen (2) Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen), tingkat capaian sebesar 100 persen (3) Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) tingkat capaian sebesar 100 persen;
- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, indikator kinerja sub kegiatan adalah : (1) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan), tingkat capaian sebesar 92,91 persen; (2) Jumlah dokumen yang disusun (Dokumen),berencana tingkat capaian sebesar 100 persen (3) Jumlah dokumen laporan yang disusun (Dokumen), tingkat capaian sebesar 100 persen
 - **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**, indikator kinerja sub kegiatan adalah : (1) Jumlah dokumen hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dokumen), tingkat capaian sebesar 100 persen
 - **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, indikator kinerja sub kegiatan adalah : (1) Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yg mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang), target 20 orang, tingkat capaian sebesar 100 persen tingkat capaian sebesar 100 persen; (2) Jumlah Sosialisasi (Kegiatan), target 1 kegiatan, tingkat capaian sebesar 100 persen
 - **Kegiatan dministrasi Umum Perangkat Daerah**, kegiatan ini berisikan komponen instalasi listrik, pengadaan peralatan dan penyediaan barang cetakan, bahan buku bacaanan, alat tulis kantor, makan minum dan rapat koordidnasi dan konsultasi SKPD tingkat capaian sebesar 100 persen;
 - **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, indikator kinerja sub kegiatan adalah : (1) Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Paket), tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen



- **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, indikator kinerja sub kegiatan adalah : (1) Terlayaninya pelaksanaan surat menyurat (Bulan), target 12 bulan, realisasi 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen; (2) Tersediaannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan) target 12 bulan, realisasi 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen;; (3) Tersediaannya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bulan), target 12 bulan, realisasi 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen;
- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, indikator kinerja sub kegiatan adalah : (1) Tersediaannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Bulan), target 12 bulan, realisasi 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen; (2) Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit), target 26 unit, realisasi 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen;

Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua

Biro Tata pemerintahan dan Otonomi Khusus setda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 30,207,898,610** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 28,543,408,029** atau **94.49 persen**, untuk melaksanakan 3 (tiga) Program dan didukung oleh 1 (satu) penunjang penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

A. PROGRAM PENATAAN ORGANISASI

- **Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan, indikator kinerja jumlah dokumen hasil pengelolaan tata laksana pemerintaha, teralisasi sebesar 100 persen dengan tingkat capaian kienrja sebesar 99,99 persen



- (2) Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

B. PROGRAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

- **Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan,** terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- (2) Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98,42 persen
- (3) Fasilitasi Penataan Wilayah, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

- **Pelaksanaan Otonomi Daerah**

- (1) Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen
- (2) Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen
- (3) Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

C. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

- Pengelolaan dan Koordinasi Otonomi Khusus



- (1) Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus, indikator kinerja, target kinerja keluaran 100 persen, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- (2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus, indikator kinerja, target kinerja keluaran 100 persen, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,61 persen

Biro Hukum Setda Provinsi Papua

APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 36,428,020,786,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 28,523,749,330,00** atau **78.3 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM

- **Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, indikator kinerja jumlah produk hukum pengaturan yang disusun, dokumen realisasi kinerja 95,74 persen
 - (2) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan, indikator kinerja jumlah produk hukum penetapan yang disusun, realisasi kinerja 100 persen
 - (3) Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya, indikator kinerja Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya, indikator kinerja jumlah produk hukum yang di dokumentasi dan dikelola informasi hukumnya, realisasi kinerja 79,19 persen
 - (4) Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota, indikator kinerja jumlah produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi, realisasi kinerja 75,24 persen
- **Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum**, terdiri dari sub kegiatan :



- (1) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum, indikator kinerja jumlah masalah hukum yang diselesaikan, target kinerja keluaran kasus, realisasi persen dengan tingkat capaian kinerja 73,89 persen

Biro Organisasi Setda Provinsi Papua

APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 28,285,805,429** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 23,441,353,058** atau **82.87 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENATAAN ORGANISASI

- **Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi, indikator kinerja jumlah dokumen hasil pelaksanaan kelembagaan provinsi (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen, realisasi 100 persen dengan tingkat capaian kinerja 97,88 persen
 - (2) Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota, indikator kinerja jumlah dokumen hasil pelaksanaan kelembagaan kabupaten/Kota (dokumen), target kinerja keluaran 8 dokumen, realisasi 100 persen dengan tingkat capaian kinerja 100 persen
 - (3) Penataan Analisis Jabatan, indikator kinerja jumlah dokumen hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan (dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen, realisasi 100 persen dengan tingkat capaian kinerja 99,26 persen
- **Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, indikator kinerja jumlah dokumen hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, target kinerja dokumen, target kinerja keluaran 1 dokumen, realisasi 100 persen dengan tingkat capaian kinerja 94,17 persen



- (2) Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, indikator kinerja jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Akuntabilitas Kinerja, target kinerja keluaran 1 dokumen, realisasi 100 persen dengan tingkat capaian kinerja 98,67 persen
- (3) Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja, indikator kinerja jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan budaya kerja, target kinerja keluaran 1 laporan, realisasi 100 persen dengan tingkat capaian kinerja 99,11 persen
- (4) Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan, indikator kinerja jumlah dokumen hasil pengelolaan tata laksana pemerintahan, target kinerja keluaran 1 dokumen, realisasi 100 persen dengan tingkat capaian kinerja 98,55 persen
- (5) Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik, indikator kinerja jumlah dokumen hasil fasilitasi peningkatan pelayanan publik, target kinerja keluaran 1 dokumen, realisasi 100 persen dengan tingkat capaian kinerja 95,21 persen

2) URUSAN SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, melalui APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 482,553,782,528** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 465,159,421,363** atau **96.4 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

- **Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,97 persen



- (2) Pembahasan Rancangan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 79,45 persen
- (3) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - **Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pembahasan KUA dan PPAS, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen), target indikator keluaran 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen), target indikator keluaran 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (3) Pembahasan APBD, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen), target indikator keluaran 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (4) Pembahasan Perubahan APBD, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD (Dokumen), target indikator keluaran 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (5) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen), target indikator keluaran 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - **Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**, terdiri dari sub kegiatan :



- (1) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum, Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan), target indikator keluaran 12 laporan dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- (2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan), target indikator keluaran 12 laporan dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- (3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan), target indikator keluaran 13 laporan dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- (4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian, Indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan), target indikator keluaran 12 laporan dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- (5) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen), target indikator keluaran 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- (6) Pengawasan Penggunaan Anggaran, Indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen), target indikator keluaran 12 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen



- (7) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Indikator kinerja Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen), target indikator keluaran 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pendalaman Tugas DPRD, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen), target indikator keluaran 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 87,31 persen
 - (2) Publikasi dan Dokumentasi Dewan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi Dewan (Dokumen), target indikator keluaran 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen
 - (3) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, indikator kinerja Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang), target indikator keluaran 13 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (4) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, indikator kinerja Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang), target indikator keluaran 30 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (5) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen), target indikator keluaran 5 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - **Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Kunjungan Kerja dalam Daerah, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan), target indikator keluaran 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen



- (2) Pelaksanaan Reses, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen), target indikator keluaran 69 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,39 persen
 - **Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Penyusunan Kode Etik DPRD, indikator kinerja Jumlah Kode Etik Dan Tata Beracara DPRD (Dokumen), target indikator keluaran 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - **Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, Indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen), target indikator keluaran 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 88,35 persen
 - (2) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah, Indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen), target indikator keluaran 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (3) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, Indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen), target indikator keluaran 4 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus, Indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen), target indikator keluaran 14 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

B. PROGRAM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

- **Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**, terdiri dari sub kegiatan :



- (1) Dialog dan Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Dialog dan Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama (Dokumen), target indikator keluaran 69 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,43 persen
- (2) Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus, indikator kinerja Jumlah Dokumen Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus (Dokumen), target indikator keluaran 69 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- (3) Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua (Dokumen), target indikator keluaran 12 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

Sekretariat Majelis Rakyat Papua

Sekretariat Majelis Rakyat Papua, melalui APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 54,818,851,560** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 53,025,964,052** atau **96.73 persen** untuk membiayai.

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI, (1) kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; (3) Administrasi Umum Perangkat Daerah; (4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA

- **Kegiatan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban**, sub kegiatan Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota, indikator kinerja jumlah pimpinan dan anggota yang menerima hak keuangan, target kinerja keluaran orang, terealisasi sebesar 99,96 persen



IV. Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) URUSAN PERENCANAAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua melaksanakan urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan serta Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang melalui APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 100,401,790,539** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 81,031,929,007.66** atau **80.71 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

- **Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi, indikator kinerja Jumlah RANPERDA RTRWP Papua yang mendapatkan Persetujuan Substansi dan Evaluasi serta Luas Kawasan Hutan yang diusulkan untuk Perubahan Kawasan Hutan (Dokumen), target kinerja 2 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 83,58 persen

B. PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

- **Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, indikator kinerja Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen), target kinerja 2 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,44 persen
- (2) Pelaksanaan Konsultasi Publik, indikator kinerja Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara), target kinerja 1 Berita Acara dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,73 persen



- (3) Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, indikator kinerja Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara), target kinerja 35 Berita Acara dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,94 persen
- (4) Pelaksanaan Musrenbang Provinsi, indikator kinerja Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi (Berita Acara), target kinerja 9 Berita Acara dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,96 persen
- (5) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen), target kinerja 3 Dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,09 persen

- **Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen), target kinerja 1 Dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,48 persen
- (2) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah, Indikator kinerja Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang), target kinerja 23 Orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,84 persen
- (3) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, Indikator kinerja Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang



Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (Orang), target kinerja 23 Orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,94 persen

• **Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi, Indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan), target kinerja 4 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,83 persen
- (2) Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Indikator kinerja Jumlah Dokumen Laporan (Dokumen), target kinerja 2 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,47 persen
- (3) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Indikator kinerja Laporan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen), target kinerja 22 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 93,32 persen
- (4) Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, Indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi (Dokumen), target kinerja Keluaran 9 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,49 persen

C. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

• **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Indikator kinerja



- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen), target kinerja Keluaran 3 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- (2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,13 persen
 - (3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, Indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen
 - (4) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen), target kinerja Keluaran 3 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen
 - (5) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen



- (6) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,94 persen
- **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen), target kinerja Keluaran 3 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,73 persen
 - (2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Indikator kinerja, Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,95 persen
 - (3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Indikator kinerja, Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 89,25 persen
 - (4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan



- dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen
- (5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen), target kinerja Keluaran 3 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,92 persen
 - (6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, Indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,95 persen
 - (7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, Indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,27 persen
 - (8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA, Indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,97 persen
- **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang



- Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen), target kinerja Keluaran 3 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,96 persen
- (2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen
 - (3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,97 persen
 - (5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen), target kinerja Keluaran 3 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,56 persen
 - (6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah



- Bidang Kewilayahan (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,76 persen
- (7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,95 persen
- (8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan, Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,9 persen

2) URUSAN KEUANGAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua melaksanakan urusan Keuangan melalui APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 1,799,387,734,152** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 1,541,786,573,413** atau **85.68 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- **Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, indikator kinerja Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun ()target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,83 persen



- (2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, indikator kinerja Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen), target kinerja Keluaran 2 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,71 persen
- (3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD, indikator kinerja Jumlah Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,86 persen
- (4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, indikator kinerja Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen), target kinerja Keluaran 60 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,85 persen
- (5) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD, indikator kinerja Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen), target kinerja Keluaran 60 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,85 persen
- (6) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD, indikator kinerja Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen), target kinerja Keluaran 60 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,85 persen
- (7) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, indikator kinerja Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen), target kinerja Keluaran 60 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 84,03 persen
- (8) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, indikator kinerja Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD



- (Dokumen), target kinerja Keluaran 60 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 94,52 persen
- (9) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, indikator kinerja Jumlah Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 69,57 persen
- (10) Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi, indikator kinerja Jumlah Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi (Orang), target kinerja Keluaran orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 83,25 persen
- **Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota (Laporan), target kinerja Keluaran 9 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,79 persen
 - (2) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Laporan), target kinerja Keluaran 9 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99, 91 persen



- (3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Staistik Keuangan Pemerintahan Daerah (Dokumen), target kinerja Keluaran 9 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,65 persen
- **Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah,** terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 81,06 persen
 - (2) Penatausahaan Pembiayaan Daerah, indikator kinerja jumlah dokumen hasil penatausahaan pembiayaan daerah, target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (3) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,58 persen
 - (4) Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, indikator kinerja Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,89 persen



- (5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), indikator kinerja Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 91,2 persen
- (6) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait, indikator kinerja Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,45 persen
- (7) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan, indikator kinerja Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,28 persen
- (8) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, target kinerja Keluaran orang dengan realisasi kinerja sebesar persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,91 persen
- **Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**, terdiri dari sub kegiatan :



- (1) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban, indikator kinerja JUmlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,67 persen
- (2) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran, indikator kinerja JUmlah Laporan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan), target kinerja Keluaran 3 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 96,7 persen
- (3) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, indikator kinerja Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan), target kinerja Keluaran 3 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,68 persen
- (4) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi, indikator kinerja Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi (Dokumen), target kinerja Keluaran 5 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,53 persen
- (5) Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, indikator kinerja Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen), target kinerja



Keluaran 5 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,53 persen

- **Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 86,03 persen

- **Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi, indikator kinerja Jumlah Orang yang Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi (Orang), target kinerja Keluaran 1 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 93,62 persen

B. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- **Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Penyusunan Standar Harga, indikator kinerja Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 96,77 persen

- (2) Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah, indikator kinerja Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 95,13 persen



- (3) Pengamanan Barang Milik Daerah, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 96,87 persen
- (4) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,36 persen
- (5) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,04 persen

3) URUSAN PENDAPATAN

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua melalui APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 99,525,196,305** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 84,603,547,137.88** atau **85.01 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

- **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, indikator kinerja Jumlah laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan), target kinerja Keluaran 9 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 96,31 persen



- (2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, indikator kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan), target kinerja Keluaran 2 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,28 persen
- (3) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah, target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 80,83 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 80,83 persen
- (4) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan), target kinerja Keluaran 3 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 88,01 persen
- (5) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, indikator kinerja Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti, target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 92,2 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 92,2 persen
- (6) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, indikator kinerja Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 85,81 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 85,81 persen
- (7) Penagihan Pajak Daerah, indikator kinerja Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak, target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 97,57 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,57 persen
- (8) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan), target kinerja Keluaran 8 laporan dengan realisasi



kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 94,57 persen

- (9) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 91,69 persen

4) URUSAN KEPEGAWAIAN

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua melaksanakan urusan Kepegawaian melalui APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 50,714,241,980** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 45,993,857,308** atau **90.69 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

- **Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, target kinerja Keluaran 1 Dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,96 persen
 - (2) Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN, target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 84,87 persen
 - (3) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian, target kinerja Keluaran 1 Dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen



- (4) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN, indikator kinerja, Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (2 Lembaga), target kinerja Keluaran 1 lembaga dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,83 persen
 - (5) Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN (1 Dokumen), target kinerja Keluaran 1 Dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (6) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (1 Dokumen), target kinerja Keluaran 1 Dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,6 persen
 - (7) Pengelolaan Data Kepegawaian, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (1 Dokumen), target kinerja Keluaran 1 Dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,97 persen
- **Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pengelolaan Mutasi ASN, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah (1 Dokumen), target kinerja Keluaran 1 Dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 48,7 persen
 - (2) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, indikator kinerja Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (1 Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,82 persen
 - **Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola (1 Dokumen),



- target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 75,5 persen
- (2) Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN, indikator kinerja Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN (300 Orang), target kinerja Keluaran 300 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 94,89 persen
 - (3) Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN, indikator kinerja, Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN (1 Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,98 persen
 - (4) Pembinaan Jabatan Fungsional ASN, indikator kinerja Jumlah Fungsional ASN yang Dibina (100 Orang), target kinerja Keluaran 100 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 95,17 persen
 - (5) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional (1 Dokumen) target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 67,65 persen
- **Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai, indikator kinerja Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (80 Orang), target kinerja Keluaran 800 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,87 persen
 - (2) Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai, indikator kinerja Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (200 Orang), target kinerja Keluaran 200 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 94,56 persen



- (3) Pembinaan Disiplin ASN, indikator kinerja Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (70 Orang), target kinerja Keluaran 70 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,42 persen
- (4) Evaluasi Disiplin ASN, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (1 Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,8 persen

5) URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua melaksanakan urusan Pendidikan dan Pelatihan melalui APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 67,014,411,130** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 62,915,115,385.2** atau **93.88 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- **Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, indikator kinerja Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang), target kinerja Keluaran 120 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (2) Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan,



Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 81,38 persen

- **Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**, terdiri dari sub kegiatan

- (1) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi (Orang), target kinerja Keluaran orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 82,58 persen
- (2) Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar, indikator kinerja Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,95 persen
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga, indikator kinerja Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,17 persen
- (4) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan, indikator kinerja Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Orang), target kinerja Keluaran orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 96,9 persen
- (5) Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan



Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 82,16 persen

6) URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

- **Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan,**

terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, indikator kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,82 persen

- **Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan,** terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang AspekAspek Sosial (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen
- (2) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,97 persen



- **Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,45 persen
- **Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

7) URUSAN PENGHUBUNG

Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua pada Tahun Anggaran 2023 melalui APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 18,379,902,529** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 17,468,414,404** atau **95.04 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG

- Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan, target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,84 persen
 - (2) Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat, indikator kinerja Jumlah laporan hasil pelayanan kelembagaan aparatur dan masyarakat,



- target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 94,36 persen
- (3) Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan, target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 96,21 persen
- (4) Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya, Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan, target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,57 persen

8) URUSAN PENGELOLAAN PERBATASAN

Badan Pengelola Perbatasan Dan Kerja Sama Provinsi Papua melaksanakan urusan pengelolaan perbatasan melalui APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 24,880,301,139** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 23,735,966,996** atau **95.4 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN

- **Kegiatan Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah, Jumlah Laporan BLOM (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,03 persen
- **Kegiatan Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**, terdiri dari sub kegiatan



- (1) Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan, Jumlah Laporan Koordinasi Pembangunan Pos Lintas Batas (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 95,62 persen
 - (2) Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan, Jumlah Laporan (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 95,64 persen
 - (3) Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara, Jumlah Laporan Pembinaan Pelintas Batas (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 95,34 persen
- **Kegiatan Monitoring dan Evaluasi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah Laporan Pengawasan (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 89,77 persen

V. Penyelenggaraan Unsur Pengawas

1) INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Provinsi Papua melaksanakan urusan Pengawasan melalui APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 66,841,931,213** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 59,170,294,465** atau **88.52 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

- **Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan), target



- kinerja Keluaran 9 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,32 persen
- (2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan), target kinerja Keluaran 6 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,63 persen
 - (3) Reviu Laporan Kinerja, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 7 dokumen 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 59,66 persen
 - (4) Reviu Laporan Keuangan, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan), target kinerja Keluaran 12 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 93,32 persen
 - (5) Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Laporan), target kinerja Keluaran 2 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 82,34 persen
 - (6) Kerjasama Pengawasan Internal, indikator kinerja Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan), target kinerja Keluaran 3 kesepakatan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,11 persen
 - (7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen), target kinerja Keluaran 8 dokumen dengan realisasi kinerja 7 dokumen atau 43,75 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 82,54 persen
- **Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**, terdiri dari sub kegiatan



- (1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, indikator kinerja Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan), target kinerja Keluaran 3 laporan dengan realisasi kinerja 2 laporan atau 88,89 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 57,35 persen
- (2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan), target kinerja Keluaran 7 laporan dengan realisasi kinerja 5 laporan atau 85,71 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 58 persen

B. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

- **Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, indikator kinerja Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah), target kinerja Keluaran 20 PD dengan realisasi kinerja 17 PD atau 88 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 71,91 persen
 - (2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, indikator kinerja Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah), target kinerja Keluaran 34 PD dengan realisasi kinerja 34 PD atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 71,14 persen
 - (3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, indikator kinerja Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan), target kinerja Keluaran 8 kegiatan dengan realisasi kinerja 7 kegiatan atau 92,31 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 87,76 persen



VI. Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum

1) URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua melaksanakan urusan Kesatuan bangsa dan politik melalui APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 39,352,794,485** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 32,419,498,331** atau **82.38 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang), target kinerja Keluaran 560 orang dengan realisasi kinerja 420 orang atau 37,5 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 67,14 persen
- (2) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja 1 dokumen atau 50 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 73,83 persen



B. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

- **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**, terdiri dari sub kegiatan :

- (1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, indikator kegiatan Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (dokumen laporan), target kinerja Keluaran 5 dokumen/laporan dengan realisasi kinerja 5 dokumen/laporan atau 50 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,94 persen
- (2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, indikator kegiatan Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (dokumen), target kinerja



Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja 1 dokumen atau 50 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,53 persen

- (3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, indikator kegiatan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang), target kinerja Keluaran 450 orang dengan realisasi kinerja 450 orang atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 87,5 persen

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat**, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, indikator kegiatan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang), target kinerja Keluaran 180 orang dengan realisasi kinerja 135 orang atau 37,5 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 50,98 persen

D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA



- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari sub kegiatan :
 - (1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang), target kinerja Keluaran 160 orang dengan realisasi kinerja 120 orang atau 37,5 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 75,2 persen

E. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Ora Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang), target kinerja Keluaran 150 orang dengan realisasi kinerja 113 orang atau 37,67 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 77,37 persen

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang



Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, indikator kinerja jumlah peserta sosialisasi FGD penyusunan peta rawan konflik, FGD Mitigasi Daerah Rawan Konflik dan FGD Rapat Koordinasi Pengawasan Orang asing (orang), target kinerja Keluaran 150 orang dengan realisasi kinerja 113 orang atau 37,67 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 40,66 persen

3.3. Capaian Kinerja Keluaran

Capaian kinerja keluaran Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar maupun Non Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawas dan Unsur Pemerintahan Umum. Selain melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan yang sudah dicapai merupakan target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023. Capaian target tersebut diatas ada yang mencapai 100% dan ada yang masih dibawah dari 100%. Hal ini disebabkan oleh beberapa Permasalahan sebagai berikut :

- Masih adanya Infeksi Corona Virus Disease 2019-(COVID-19)
- Adanya Refocusing Anggaran
- Rekruturisasi Organisasi Perangkat Daerah
- Sumber Daya Manusia

3.4. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dan Target Kinerja

Pada prinsipnya pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah dicapai tersebut diatas merupakan penjabaran dari RPJMD dan Renstra OPD yang diturunkan kedalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran. Oleh karena itu OPD berkomitmen untuk melaksanakan target yang telah ditetapkan berdasarkan RENTSRA OPD dan Target kinerja Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD). Kegiatan pembangunan yang dihasilkan dalam tahun anggaran 2023 masih mencakup indikator input (masukan) dan keluaran (output) yang merupakan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaram Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD).

Pada prinsipnya kesesuaian antara kegiatan dan target merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga output kinerja yang dicapai sebagai target dari kegiatan tersebut, oleh karena itu dalam perencanaan setiap kegiatan diwajibkan untuk menetapkan target kinerja yang akan dicapai.



3.5. Kebijakan Strategi yang ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau Tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh Kepala Daerah dituangkan dalam format sebagai berikut :

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN ATAU MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.	Pengalokasian Dana Otonomi Khusus dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Papua.	Pergub Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan program dan kegiatan sumber dana otonomi khusus Tahun Anggaran 2021 secara prosentase tetap dibagi dengan ketentuan alokasi 20 % untuk bagian yang dikelola oleh Provinsi dan alokasi 80 % untuk bagian yang dikelola oleh Kabupaten/Kota. • Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pembangunan di segala bidang telah disediakan sumber-sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain Dana Otonomi Khusus.
2.	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Pejabat/Pegawai Pemerintah Provinsi dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya.	Pergub Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.	<ul style="list-style-type: none"> - memberikan pedoman kepada pejabat/pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi. - meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat/ pegawai tentang gratifikasi. - meningkatkan kepatuhan pejabat/pegawai terhadap ketentuan gratifikasi.



NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN ATAU MASALAH YANG DISELESAIKAN
3.	Pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat Lain berkaitan dengan tindak pidana korupsi, perlu mendapat perhatian dan tanggapan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.	Pergub Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Pengaduan (Whistel Blowing System) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadu yang melihat dan mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh ASN dan/ atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi kepada Sistem Pengaduan. - memberikan keterangan tanpa tekanan, bebas dari intimidasi dan pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan, dan mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Pembayaran kompensasi atas kayu dan bukan kayu.	Pergub Nomor 11 Tahun 2021 tentang Standar Kompensasi Atas Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Dipungut Pada Areal Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.	Biaya kompensasi untuk masyarakat hukum adat atas hak ulayat oleh pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada masyarakat hukum adat.
5.	Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan sebagai pedoman untuk menyusun formasi jabatan fungsional tertentu.	Pergub Nomor 13 Tahun 2021 tentang Jenis Dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional, untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan Fungsional Keahlian; dan 2. Jabatan Fungsional Keterampilan. - Jabatan Fungsional Keahlian terdiri atas jenjang : <ol style="list-style-type: none"> 1. ahli utama; 2. ahli madya; 3. ahli muda; dan 4. ahli pertama. - Jabatan Fungsional Keterampilan terdiri atas jenjang : <ol style="list-style-type: none"> 1. penyelia;



NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN ATAU MASALAH YANG DISELESAIKAN
			2. mahir; 3. terampil; dan 4. pemula.
6.	Meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi.	Pergub Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; b. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas; dan c. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi yang menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.
7.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional.	Pergub Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2023	RKPD, terdiri dari evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 19 di daerah.
8.	Program percepatan akses keuangan daerah untuk usaha mikro harus memperoleh dan mendapatkan akses permodalan melalui sumber- sumber pembiayaan, baik dari lembaga keuangan bank maupun non-bank, memerlukan jaminan sebagai salah satu persyaratan memperoleh akses permodalan.	Pergub Nomor 43 Tahun 2021 tentang Program Percepatan Akses Keuangan Daerah Bagi Usaha Mikro Di Provinsi Papua.	Peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mendukung perekonomian sangat signifikan namun di sisi lain eksistensi Usaha Mikro, kecil, dan menengah menghadapi kendala dari segi permodalan, untuk mendapatkan pembiayaan, pemasaran, manajemen,



NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN ATAU MASALAH YANG DISELESAIKAN
			sumber daya manusia dan teknologi.
9.	Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	Pergub Nomor 44 Tahun 2021 tentang Papua Satu Data Berbasis Jabatan	Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara memerlukan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat diakses secara online oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil.
10.	Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.	Pergub Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Provinsi Papua	Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.
11.	Calon siswa dan mahasiswa penerima beasiswa wajib mengikuti seleksi potensi akademik, psikotes dan kondite.	Pergub Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Standar Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Dan Mahasiswa Unggul Papua Di Dalam Dan Luar Negeri.	Guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Papua dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemerintah Provinsi Papua memberikan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan baik di dalam negeri maupun luar negeri.
	KEPUTUSAN GUBERNUR		
1.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Tim Koordinasi Peningkatan Investasi Energi Dan Sumber Daya Mineral Di Provinsi Papua.	184/2/Tahun 2021 (4 Januari 2021)	Untuk mempercepat peningkatan pendapatan di bidang sumber daya mineral.
2.	Keputusan Gubernur Papua tentang Kebijakan Penguasaan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2021.	188.4/21/Tahun 2021 (4 Januari 2021)	Untuk mempercepat penyelenggaraan pemerintahan.
3.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Majelis Dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Papua	188.4/40/Tahun 2021 (7 Januari 2021)	Penyelesaian kerugian daerah.



NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN ATAU MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Tahun Anggaran 2021.		
4.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Papua Tahun 2021.	188.4/44/Tahun 2021 (18 Januari 2021)	Kajian lingkungan hidup strategis.
5.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksana Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Provinsi Papua.	188.4/54/Tahun 2021 (22 Januari 2021)	Pembentukan kelompok kerja satuan tugas COVID-19.
6.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.	188.4/57/Tahun 2021 (25 Januari 2021)	Pengendalian gratifikasi di Provinsi Papua.
7.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.	188.4/63/Tahun 2021 (26 Januari 2021)	Kode Etik Aparatur Sipil Negara.
8.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Papua.	188.4/69/Tahun 2021 (29 Januari 2021)	Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Papua.
9.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Tim Penyusun Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033.	188.4/75/Tahun 2021 (16 Februari 2021)	Pembentukan Tim Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua.
10.	Keputusan Gubernur Papua tentang Peresmian Sdr. Yoel Itlay, SH Sebagai Pimpinan/Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Yahukimo Periode Tahun 2019-2024.	188.4/76/Tahun 2021 (16 Februari 2021)	Peresmian Pimpinan/Wakil Ketua DPRD Kab. Yalimo Periode Tahun 2019-2024.
11.	Keputusan Gubernur Papua tentang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur Kepada 20 Kabupaten Di Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021.	188.4/79/Tahun 2021 (18 Februari 2021)	Bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur.
12.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi Dan Degradasi	188.4/80/Tahun 2021 (18 Februari 2021)	Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan Dan Lahan.



NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN ATAU MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Hutan Dan Lahan Di Provinsi Papua.		
13.	Keputusan Gubernur Papua tentang Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota Penyelenggara Kartu Papua Sehat Tahun Anggaran 2021.	188.4/105/Tahun 2021 (5 Maret 2021)	Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Penyelenggara Kartu Papua Sehat.
14.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Gugus Tugas dan Sekretariat Gerakan Nasional Refolusi Mental Di Provinsi Papua Periode Tahun 2021-2024.	188.4/106/Tahun 2021 (9 Maret 2021)	Gugus Tugas dan Sekretariat Gerakan Nasional Refolusi Mental.
15.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Tim Teknis Pengkajian Kebutuhan Paska Bencana Dan Rehabilitasi Penyusunan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Paska Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi Papua Tahun 2023.	188.4/107/Tahun 2021 (10 Maret 2021)	Pengkajian Kebutuhan Paska Bencana Dan Rehabilitasi Penyusunan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Paska Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
16.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Provinsi Papua.	188.4/109/Tahun 2021 (15 Maret 2021)	Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
17.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua.	188.4/110/Tahun 2021 (15 Maret 2021)	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua.
18.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Tim Pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021.	188.4/115/Tahun 2021 (17 Maret 2021)	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
19.	Keputusan Gubernur Papua tentang Peresmian Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke Periode 2019-2024, Atas Nama Saudara Anas, ST.	155.2/134/Tahun 2021 (29 Maret 2021)	Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke Periode 2019-2024.
20.	Keputusan Gubernur Papua	155.2/135/Tahun	Penggantian Antar Waktu



NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN ATAU MASALAH YANG DISELESAIKAN
	tentang Peresmian Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen Periode 2019-2024, Atas Nama Saudara Alberti Buiney, A.Md.	2021 (29 Maret 2021)	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen Periode 2019-2024.
21.	Keputusan Gubernur Papua tentang Peresmian Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode 2019-2024, Atas Nama Saudara Solichin.	155.2/137/Tahun 2021 (29 Maret 2021)	Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode 2019-2024.
22.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Tim Pendamping Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasioanl Ke XX dan Pekan Paralympic Nasional Ke XVI Tahun 2021 Di Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021.	188.4/170/Tahun 2021 (23 April 2021)	Pendamping Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasioanl Ke XX dan Pekan Paralympic Nasional Ke XVI Tahun 2021.
23.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Unit Sapu Bersih Pungutan Liar Di Provinsi Papua.	188.4/171/Tahun 2021 (23 April 2021)	Pembentukan Unit Sapu Bersih Pungutan Liar.
24.	Keputusan Gubernur Papua tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua.	188.4/206/Tahun 2021 (9 Juni 2021)	Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan.
25.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Tahun 2021.	188.4/207/Tahun 2021 (9 Juni 2021)	Sekretariat Bersama Percepatan Pembangunan Kesejahteraan.
26.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Provinsi Papua.	188.4/208/Tahun 2021 (10 Juni 2021)	Optimalisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan.
27.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembebasan/ Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor, Sanksi Administratif	188.4/214/Tahun 2021 (17 Juni 2021)	Pembebasan/ Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor.



NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN ATAU MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pembebasan/ Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Penghapusan Tarif Progresif Kendaraan Bermotor.		
28.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengawasan Dan Pengendalian Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Pemerintah Provinsi Papua.	188.4/249/Tahun 2021 (15 Juli 2021)	Pengawasan Dan Pengendalian Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
29.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.	188.4/256/Tahun 2021 (19 Juli 2021)	Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
30	Keputusan Gubernur Papua tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Kepada Kejaksaan Tinggi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021.	188.4/268/Tahun 2021 (27 Juli 2021)	Pemberian Hibah Barang Milik Daerah.
31.	Keputusan Gubernur Papua tentang Penetapan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Pembangunan Kantor Gubernur Papua.	188.4/280/Tahun 2021 (30 Juli 2021)	Rancang Bangun Pembangunan Kantor Gubernur Papua.
32.	Keputusan Gubernur Papua tentang Penetapan Lain-Lain Penerimaan Daerah Yang Bersumber Dari Konversi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat Dan Alat-Alat Besar Akibat Putusan Lembaga Peradilan.	188.4/285/Tahun 2021 (3 Agustus 2021)	Lain-Lain Penerimaan Daerah.
33.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Tim Pendamping Dan Pengawasan Pengelolaan Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Di Provinsi Papua.	188.4/286/Tahun 2021 (3 Agustus 2021)	Pemulihan Ekonomi Nasional Di Provinsi Papua.



NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN ATAU MASALAH YANG DISELESAIKAN
34.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Tim Konsolidasi Penyelesaian Konflik Antar Masyarakat Adat Atas Tanah Di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura Provinsi Papua	188.4/310/Tahun 2021 (27 Agustus 2021)	Penyelesaian Konflik Antar Masyarakat Adat Atas Tanah Di Kampung Harapan.
35.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Papua.	188.4/312/Tahun 2021 (30 Agustus 2021)	Percepatan Akses Keuangan Daerah.
36.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2021.	188.4/313/Tahun 2021 (31 Agustus 2021)	Pengelola Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara.
37.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Kontingen Papua Peserta Pekan Olah Raga Nasional Ke XX Tahun 2020 Tahun 2021 Di Provinsi Papua.	188.4/324/Tahun 2021 (6 September 2021)	tentang Pembentukan Kontingen Papua Peserta Pekan Olah Raga Nasional Tahun 2021
38.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) Di Provinsi Papua.	188.4/326/Tahun 2021 (7 September 2021)	Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19).
39.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Sistem Adminstrasi Manunggal Satu Atap Online.	188.4/337/Tahun 2021 (15 September 2021)	Pengembangan Sistem Adminstrasi Manunggal Satu Atap Online.
40.	Keputusan Gubernur Papua tentang Penetapan 140 (Seratus Empat Puluh) Guru Kontrak Tambahan Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, Dan Pendidikan Layanan Khusus Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2021.	188.4/343/Tahun 2021 (20 September 2021)	Penetapan Guru Kontrak Tambahan Pada Jenjang Pendidikan Menengah.
41.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Yang Langsung Menangani Corona	188.4/345/Tahun 2021 (21 September 2021)	tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Yang Langsung Menangani Corona Virus Disease



NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN ATAU MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Virus Disease (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.		(COVID-19)
42.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pemberian Uang Lelah Bagi Pejabat/Petugas, Anggota Satuan Tugas, Tenaga Surveilans Dan Relawan Pencegahan Dan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Di Pemerintah Provinsi Papua.	188.4/346/Tahun 2021 (22 September 2021)	Pemberian Uang Lelah Bagi Pejabat/Petugas, Anggota Satuan Tugas, Tenaga Surveilans Dan Relawan Pencegahan Dan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).
43.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pemberian Bonus Kepada Kontigen Papua Peserta Pekan Olah Raga Nasional XX Tahun 2021 Di Provinsi Papua.	188.4/369/Tahun 2021 (11 Oktober 2021)	Pemberian Bonus Kepada Kontigen Papua Peserta Pekan Olah Raga Nasional XX Tahun 2021.
44.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Percepatan Implementasi Kebijakan Satu Peta Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit.	188.4/373/Tahun 2021 (15 Oktober 2021)	Percepatan Implementasi Kebijakan Satu Peta Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Dan Evaluasi.
45.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua.	188.4/380/Tahun 2021 (21 Oktober 2021)	Sekretariat Bersama Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua.
46.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Kontigen Papua Peserta Pekan Paralympic Nasional (Peparnas) XVI Tahun 2021 Di Provinsi Papua.	188.4/388/Tahun 2021 (27 Oktober 2021)	Kontigen Papua Peserta Pekan Paralympic Nasional (Peparnas) XVI Tahun 2021 Di Provinsi Papua.
47.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Tim Asistensi Pembangunan 5 (Lima) Gedung Kantor Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021.	188.4/400/Tahun 2021 (5 November 2021)	Tim Asistensi Pembangunan 5 (Lima) Gedung Kantor Pada Dinas Pekerjaan Umum.
48.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Tim Pendamping Pembangunan 5 (Lima) Gedung Kantor Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021.	188.4/401/Tahun 2021 (5 November 2021)	Tim Pendamping Pembangunan 5 (Lima) Gedung Kantor Pada Dinas Pekerjaan Umum.



NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN ATAU MASALAH YANG DISELESAIKAN
49.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua.	188.4/402/Tahun 2021 (5 November 2021)	Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua.
50.	Keputusan Gubernur Papua tentang Penetapan Mahasiswa Papua Penerima Beasiswa Dan Standar Biaya Pemerintah Provinsi Papua Untuk Pendidikan Tinggi Luar Negeri Tahun 2021.	188.4/408/Tahun 2021 (11 November 2021)	Penetapan Mahasiswa Papua Penerima Beasiswa Dan Standar Biaya Luar Negeri.
51.	Keputusan Gubernur Papua tentang Penetapan Mahasiswa Papua Penerima Beasiswa Dan Standar Biaya Pemerintah Provinsi Papua Untuk Pendidikan Tinggi Dalam Negeri Tahun 2021.	188.4/409/Tahun 2021 (11 November 2021)	Penetapan Mahasiswa Papua Penerima Beasiswa Dan Standar Biaya Dalam Negeri.
52.	Keputusan Gubernur Papua tentang Tambahan Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kepada Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2021.	188.4/436/Tahun 2021 (30 November 2021)	Tambahan Belanja Bantuan Keuangan.
53.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Tim Pengamanan Aset Tanah/ Lahan Milik Pemerintah Provinsi Papua.	188.4/436/Tahun 2021 (2 Desember 2021)	Pengamanan Aset Tanah/ Lahan Milik Pemerintah Provinsi Papua.
54.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pengurus Komite Olah Raga Nasional Indonesia Provinsi Papua Dan Pengurus Cabang- Cabang Olah Raga Pada Pekan Olah Raga Nasional XX Tahun 2021 Di Provinsi Papua.	188.4/438/Tahun 2021 (2 Desember 2021)	Pemberian Penghargaan Kepada Pengurus Komite Olah Raga Nasional Indonesia.
55.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pemberian Penghargaan Kepada Panitia Besar Pekan Olah Raga Nasional XX Papua, Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua, Panitia Besar Pekan Paralympic Nasional XVI Papua Dan Unsur Pemerintah Provinsi Papua Serta Para Bupati/Walikota Di Klaster	188.4/454/Tahun 2021 (2 Desember 2021)	Pemberian Penghargaan Kepada Panitia Besar Pekan Olah Raga Nasional XX Papua, Panitia Besar Pekan Paralympic Nasional XVI Papua, Unsur Pemerintah Provinsi Papua Dan Para Bupati/Walikota Di Klaster Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional XX Papua Tahun 2021.



NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN ATAU MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional XX Papua Tahun 2021.		
56.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pemberian Bonus Kepada Kontigen Papua Peserta Pekan Paralympic Nasional XVI Tahun 2021 Di Provinsi Papua.	188.4/459/Tahun 2021 (16 Desember 2021)	Pemberian Bonus Kepada Kontigen Papua Peserta Pekan Paralympic Nasional XVI Tahun 2021.
57.	Keputusan Gubernur Papua tentang Penetapan Pejabat Fungsional Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.	188.4/472/Tahun 2021 (31 Desember 2021)	Penetapan Pejabat Fungsional.
58.	Keputusan Gubernur Papua tentang Penetapan Pejabat Fungsional Pada Inspektorat Provinsi Papua.	188.4/476/Tahun 2021 (31 Desember 2021)	Penetapan Pejabat Fungsional.
59.	Keputusan Gubernur Papua tentang Penetapan Pejabat Fungsional Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Provinsi Papua.	188.4/480/Tahun 2021 (31 Desember 2021)	Penetapan Pejabat Fungsional.
60.	Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Provinsi Papua.	188.4/482/Tahun 2021 (31 Desember 2021)	Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.



BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN



BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, maka diberikan kewenangan kepada daerah untuk mendayagunakan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Papua dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tetap berpedoman pada azas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yaitu azas Desentralisasi, azas Dekonsentrasi dan azas Tugas Pembantuan.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah pusat yang menugaskan.

Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Pemerintah Pusat. Program dan kegiatan ini dibiayai oleh APBN dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam APBN. Anggaran pelaksanaan tugas pembantuan merupakan bagian dalam anggaran departemen/lembaga non departemen yang menugaskannya.

Dana Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Papua pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



A. BIDANG PERTANIAN

Dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua Tahun 2023 berasal dari Unit Eselon I Kementerian Pertanian untuk mendukung pembangunan sektor pertanian di Provinsi Papua baik kegiatan fisik maupun non fisik pertanian.

3.1. Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan

Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh daerah Provinsi Papua melalui SATKER Dinas Pertanian dan Pangan adalah sbb :

- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor; 33 Tahun 2021 Tgl. 25 Oktober 2021 Tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
- b. DIPA No.SP DIPA-018-03.4.259097/2023, Tgl. 24 November 2023;
- c. DIPA No. SP DIPA-018.04.4.259098/2023, Tgl. 18 Mei 2023;
- d. DIPA No. SP DIPA-018.05.4.259099/2023, Tgl. 26 Desember 2023;
- e. DIPA No. DIPA-018.06.4.259100/2023, Tgl. 31 Oktober 2023;
- f. DIPA No. SP. DIPA-018-08.4.259104/2023, Tgl. 14 Desember 2023.

3.2. Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan di Provinsi Papua

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dalam rangka penyelenggaraan Tugas Pembantuan di daerah sektor pertanian adalah Kementrian Pertanian Republik Indonesia melalui Unit Kerja Eselon I, yakni :

a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Dana tugas pembantuan bidang urusan sub sektor tanaman pangan untuk membiayai Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.085.002.000,- realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 4.087.057.310,- (67,17 %).

Untuk mendukung program tersebut maka beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - ✓ Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan



- ✓ Informasi Pasar Komoditas Tanaman Pangan
- ✓ Sertifikasi Produk Tanaman Pangan
- ✓ Sarana pasca panen tanaman pangan
- Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - ✓ Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan
 - ✓ Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan
 - ✓ Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan
- Program Dukungan Manajemen
 - ✓ Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan.

b. Direktorat Jenderal Hortikultura

Dana tugas pembantuan bidang urusan sub sektor hortikultura dengan alokasi dana sebesar Rp.705.000.000,- realisasi penyerapan dana sebesar Rp.701.868.500,- (99,56 %).

Program dan kegiatan yang mendukung sub sektor hortikultura antara lain:

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - ✓ Sarana pasca panen hortikultura
 - ✓ Prasarana pengolahan hortikultura
- Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - ✓ Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat
- Program Dukungan Manajemen
 - ✓ Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan

c. Direktorat Jenderal Perkebunan

Dana tugas pembantuan bidang urusan sub sektor perkebunan di Provinsi Papua sebesar Rp.11.841.777.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.11.771.295.189,- (99,40 %).

Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - ✓ Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar



- ✓ Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan
- ✓ Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan
- Program Dukungan Manajemen
 - ✓ Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

d. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dana tugas pembantuan bidang urusan sub sektor peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Papua dengan alokasi dana sebesar Rp.5.373.619.000,- realisasi penyerapan dana sebesar Rp.5.368.173.878,- (99,90 %).

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada sub sektor tersebut di atas antara lain:

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing industry
 - ✓ Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran hasil Ternak
- Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - ✓ Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
 - ✓ Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak
 - ✓ Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Program Dukungan Manajemen
 - ✓ Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Keswan

e. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Dana tugas pembantuan bidang urusan Prasarana dan Sarana Pertanian di Provinsi Papua dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.468.974.000,- realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 3.409.871.730,- (99,90 %).

Untuk mendukung prasarana dan sarana pertanian tersebut maka program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - ✓ Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian
 - ✓ Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan alat Mesin Pertanian
 - ✓ Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
 - ✓ Fasilitasi Pembiayaan Pertanian



- Program Dukungan Manajemen
 - ✓ Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

3.3. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sektor pertanian di Provinsi Papua tahun anggaran 2023 diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggarandengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

3.3.1. Target Kinerja dan Realisasi

a. Tugas Pembantuan urusan bidang tanaman pangan

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - ✓ Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Target; 1 Kegiatan, Realisasi 1 Kegiatan (100 %);
 - ✓ Informasi Pasar Komoditas Tanaman Pangan, Target; 2 Layanan, Realisasi 2 Layanan (100 %);
 - ✓ Sertifikasi Produk Tanaman Pangan, Target; 4 produk sertifikat, Realisasi; 4 produk sertifikat (100 %);
 - ✓ Sarana pasca panen tanaman pangan, Target; 11 Unit, Realisasi 11 Unit (100 %);
- Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - ✓ Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan, Target; 1 Kegiatan, Realisasi 1 Kegiatan (100 %);
 - ✓ Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan, Target; 1200 Ha, Realisasi 0 Ha (0 %); dikarenakan benih tidak tersedia di kab/kota;
 - ✓ Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, Target; 3250 Ha; Realisasi 3250 Ha atau 100 %;
- Program Dukungan Manajemen, Target; Realisasi;



- ✓ Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan, Target; 3 Dokumen, Realisasi; 3 dokumen (100 %).

b. Tugas Pembantuan urusan bidang hortikultura

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - ✓ Sarana pasca panen hortikultura, Target; 1 Unit, Realisasi; 1 unit (100 %);
 - ✓ Prasarana pengolahan hortikultura, Target; 1 Unit, Realisasi; 1 Unit (100 %);
- Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - ✓ Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, Target; 55 Ha, Realisasi; 55 Ha (100 %);
- Program Dukungan Manajemen
 - ✓ Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura, Target; 24 Layanan, Realisasi; 24 Layanan (100 %).

c. Tugas Pembantuan urusan bidang perkebunan

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - ✓ Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar, Target; 900 Ha, Realisasi; 900 Ha (100 %);
 - ✓ Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Target; 2 Kegiatan, Realisasi; 2 Kegiatan (100 %);
 - ✓ Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan, Target; 11 Ha, Realisasi; 11 Ha (100 %);
- Program Dukungan Manajemen
 - ✓ Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan, Target; 1 Dokumen, Realisasi; 1 Layanan (100 %).

d. Tugas Pembantuan urusan bidang peternakan dan kesehatan hewan

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing industry
 - ✓ Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran hasil Ternak, Target 1 Lembaga; Realisasi 1 Lembaga (100 %);



- Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - ✓ Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, Target; 11.500 layanan, Realisasi; 11.500 layanan (100 %);
 - ✓ Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak, Target; 10,000 ekor, Realisasi; 10.000 ekor (100 %);
 - ✓ Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Target; 3 Lembaga, Realisasi; 3 Lembaga (100 %);
- Program Dukungan Manajemen
 - ✓ Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Keswan, Target; 2 Layanan, Realisasi; 2 Layanan (100 %).

e. Tugas Pembantuan urusan bidang prasarana dan sarana pertanian

- Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - ✓ Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian Target; 3.86 km²bidang, km, hektar, Realisasi; 3.86 km²bidang, km, hektar. (100 %);
 - ✓ Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, Target; 1 Keg, Realisasi; 1 Keg. (100 %);
 - ✓ Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, Target; 29.014 Org, Realisasi; 29.014 Org. (100 %);
 - ✓ Fasilitasi Pembiayaan Pertanian, Target; 1 Unit, Realisasi; 1 Unit (100 %);
- Program Dukungan Manajemen
 - ✓ Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Target; 1 Dokumen, Realisasi; 1 Dokumen (100 %).

Matrik capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Pusat yang dilaksanakan SATKER Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua **(sebagaimana terlampir)**.

3.3.2. Permasalahan dan Kendala

1. Benih Padi Biofortifikasi tidak tersedia di kabupaten kota di Provinsi Papua.



2. Terbatasnya kapasitas SDM Petugas dan anggota kelompok tani dalam peningkatan nilai tambah dan daya saing industri komoditas tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan.
3. Dukungan sarana dan prasarana pertanian yang belum memadai dan merata di seluruh kelompok tani.
4. Satuan biaya kegiatan belum mengakomodir tingkat kewajaran harga berdasarkan lokasi kegiatan.
5. Penentuan Lokasi kegiatan oleh kabupaten cukup jauh/terpencil membutuhkan tambahan biaya distribusi bantuan.
6. Terbatasnya jumlah petugas penilai usaha perkebunan, dan kurangnya respon perusahaan yang dinilai dalam tindaklanjuti.

3.3.3. Saran dan Tindak Lanjut

1. Memperbanyak penangkar penangkar benih di setiap Kabupaten kota di Provinsi Papua.
2. Meningkatkan kapasitas SDM Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan dan anggota kelompok tani dalam upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri komoditas tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian yang memadai di tingkat kelompok tani sehingga mampu meningkatkan mutu hasil yang maksimal.
4. Perlu penyesuaian satuan biaya kegiatan sesuai kewajaran harga berdasarkan lokasi kegiatan.
5. Perlu perhitungan secara cermat, penentuan lokasi kegiatan oleh kabupaten/kota terutama di lokasi yang cukup jauh/terpencil guna menentukan tambahan biaya distribusi bantuan.
6. Meningkatkan jumlah petugas penilai usaha perkebunan, dan mendorong responsip perusahaan yang dinilai dalam tindaklanjuti hasil penilaian.



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023

NO	K/L-PNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TD)	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ KR O/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN/ DETIL	Pagu Dana (Rp)		Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (*)		Lokasi Kegiatan/ Penerima Manfaat	Sisa Anggaran (Rp)	Hambatan dan Solusi	
					Rp.	%	Target	Realisasi	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
SKPD PELAKSANA : DIMAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA														
L 25909 7	Kementrian/ Pertanian/ Ditjen Tanaman Pangan	DIPA No.SP DIPA -018- 03.4.259097 /2023, Tgl. 24 November 2023	018.03.E C	Prongam Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	1,293,793,000	1,269,551,310	98.13	1,293,793,000	1,269,551,310	100	5 Kabupaten	24,241,690	Alisintan terealisasi semua 3 kabupaten dan Pengolahan 2 Kabupaten	
					1,293,793,000	1,269,551,310	98.13	1,293,793,000	1,269,551,310	5 Kabupaten	24,241,690			
				018.03.H A	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	3,843,450,000	1,869,750,000	48.65	3,843,450,000	1,869,750,000	60	Provinsi	1,973,700,000	
				1761	Pengolahan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan	175,000,000	174,750,000	99.86	175,000,000	174,750,000	100	1 Kab/Kota	250,000	Penyaluran ubi Jalar ke Kabupaten Keerom sdh terealisasi
			1762	Pengolahan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	2,076,200,000	164,000,000	7.90	2,076,200,000	164,000,000	8	Provinsi	1,912,200,000	Benih Tidak tersedia di Kab/Kota	
			4579	Pengolahan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	1,592,250,000	1,531,000,000	96.15	1,592,250,000	1,531,000,000	100	6 Kab/ Kota	61,250,000	Benih Padi dan Jagung Sdh tersalur ke 6 Kab/Kota Tersalurnya Benih Jagung di (Kab. Supiori, Keerom, Sarimi, Kota Jayapura) Tersalurnya Benih Padi Kab.Sarmi, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura	
			018.03.W A	Program Dukungan Manajemen	947,759,000	947,756,000	100.00	947,759,000	947,756,000	100	Provinsi	3,000	Terealisasi	
			1766	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	947,759,000	947,756,000	100.00	947,759,000	947,756,000	100	Provinsi	-		

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023



HA	Pogram Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	585.000.000	581.868.500	99,46	55 Hektar	55,00	100,00	3.131.500	3.131.500	726.000	2.345.000	60.500	3.131.500
HA.1771	Sayuran dan Tanaman Obat	585.000.000	581.868.500	99,46	55 Hektar	55,00	100,00	3.131.500	3.131.500	726.000	2.345.000	60.500	3.131.500
1771.RA I	Sarana Pengembangan Kawasan	70.000.000	69.274.000	98,96	10 Hektar	10,00	100,00	726.000	726.000	726.000	2.345.000	60.500	3.131.500
1771.RA I.010	Kawasan Bawang Merah	480.000.000	477.655.000	99,51	40 Hektar	40,00	100,00	3.131.500	3.131.500	726.000	2.345.000	60.500	3.131.500
1771.RA I.010	Kawasan Aneka Cabai	35.000.000	34.939.500	99,83	5 Hektar	5,00	100,00	60.500	60.500	60.500	2.345.000	60.500	3.131.500
WA	Program Dukungan Manajemen	90.000.000	90.000.000	100,00	24 Layanan	24,00	100,00	60.500	60.500	60.500	2.345.000	60.500	3.131.500
WA.1774	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen	90.000.000	90.000.000	100,00	24 Layanan	24,00	100,00	60.500	60.500	60.500	2.345.000	60.500	3.131.500
	Jumlah Dana Tugas Pembantuan	705.000.000	701.868.500	99,56				3.131.500	3.131.500				3.131.500
DIPA No. SP													
Kementerian Pertanian/ Ditjen Perkebunan	DIPA- 018.05.4.259 099 /2023, Tgl. 26 Desember 2023												
018.05.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	11.675.234.000	11.604.752.189	99,44 %				70.481.811	70.481.811				70.481.811
1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	8.969.950.000	8.919.435.229	99,44 %	100,00			50.514.771	50.514.771				50.514.771
1777.RA I	Sarana Pengembangan Kawasan [Base Line]	8.969.950.000	8.919.435.229	99,44 %				50.514.771	50.514.771				50.514.771
1777.RA I.001	Kawasan Kopi	2.349.060.000	2.331.003.329	99,23 %				18.056.671	18.056.671				18.056.671
051	Perluasan Tanaman Kopi	2.289.060.000	2.271.003.329	99,21 %				18.056.671	18.056.671				18.056.671
A	Perluasan Tanaman Kopi Robusta di Kab. Keputauluan Yapen 100 Ha	2.289.060.000	2.271.003.329	99,21 %	100,00	100,00		18.056.671	18.056.671				18.056.671



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023

1777.RAI	Kawasan Kopi	2.349.060.000	2.331.003.329	99,23 %				18.056.671
.001		2.289.060.000	2.271.003.329	99,21 %				18.056.671
051	Perluasan Tanaman Kopi	2.289.060.000	2.271.003.329	99,21 %	100,00	100,00		18.056.671
A	Perluasan Tanaman Kopi Robusta di Kab. Kepulauan Yapen 100 Ha							
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	147.040.000	146.364.600	99,54 %				675.400
	Parang	30.000.000	29.859.000	99,53 %				141.000
	Sekop	25.040.000	24.864.000	99,30 %				176.000
	Chainsaw	92.000.000	91.641.600	99,61 %				358.400
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	1.885.000.000	1.867.618.729	99,08 %				17.381.271
	Benh Kopi Siap Tanam	1.525.000.000	1.512.000.000	99,15 %				13.000.000
	Bahan Pupuk Organik (1 Paket 500 Kg)	258.000.000	253.639.129	98,31 %				4.360.871
	Pohon Pelindung	102.000.000	101.979.600	99,98 %				20.400
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	257.020.000	257.020.000	100,00 %				0
	Pembuatan Pupuk Organik	100.110.000	100.110.000	100,00 %				0
	Persiapan Lahan	99.400.000	99.400.000	100,00 %				0
	Pembuatan Lubang Tanam	32.376.000	32.376.000	100,00 %				0
	Penanaman	25.134.000	25.134.000	100,00 %				0
055	Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan	60.000.000	60.000.000	100,00 %				0
A	Pengawalan dan Pendampingan Perluasan Tanaman Kopi Robusta di Provinsi	30.000.000	30.000.000	100,00 %	100,00	100,00		0
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2.650.000	2.650.000	100,00 %				0
	Honor Penanggung Jawab Kegiatan	150.000	150.000	100,00 %				0
	Honor Pelaksanaan Kegiatan	150.000	150.000	100,00 %				0
	Honor Tim/Pokja	750.000	750.000	100,00 %				0
	Pengadaan Barang/Jasa	1.600.000	1.600.000	100,00 %				0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.350.000	2.350.000	100,00 %				0



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023**

					850.000	100,00 %				0
			Administrasi, foto copy dan penggandaan dokumen	850.000						
			Penyusunan Laporan Kegiatan	500.000	100,00 %					0
			Rapat koordinasi dan money pelaksanaan kegiatan	500.000	100,00 %					0
			Pertemuan Sosialisasi Kegiatan di Kabupaten Kepulauan Yapen	500.000	100,00 %					0
		521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.500.000	100,00 %					0
		524111	ATK dan bahan komputer	1.500.000	100,00 %					0
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.500.000	100,00 %					0
			Dalam rangka koordinasi dan evaluasi kegiatan ke Pusat	15.000.000	100,00 %					0
			Dalam rangka Pengawasan dan Pendampingan dari Provinsi ke Kabupaten Kepulauan Yapen	8.500.000	100,00 %					0
		B	Pengawalan dan Pendampingan Perluasan Tanaman Kopi Arabika di Kabupaten Kepulauan Yapen	30.000.000	100,00 %			100,00		0
		521213	Belanja Honor Output Kegiatan	900.000	100,00 %					0
			Honor Penanggung Jawab Kegiatan	450.000	100,00 %					0
			Honor Pelaksana Kegiatan	450.000	100,00 %					0
		521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.300.000	100,00 %					0
			Administrasi, foto copy dan penggandaan dokumen	1.300.000	100,00 %					0
			Penyusunan Laporan Kegiatan	1.000.000	100,00 %					0
			Rapat koordinasi dan money pelaksanaan kegiatan	1.000.000	100,00 %					0
		521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.300.000	100,00 %					0
		524111	ATK dan bahan komputer	1.300.000	100,00 %					0
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.500.000	100,00 %					0



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023

						8.500.000	100,00 %									0
					Dalam rangka koordinasi kegiatan ke Provinsi	8.500.000	100,00 %									0
					Dalam rangka Pengawasan dan Pendampingan dari Kabupaten ke Lokasi	16.000.000	100,00 %									0
					1777-RAJ Kawasan Kakao	2.886.890.000	99,94 %									1.865.000
					052 Peremajaan Tanaman Kakao	2.845.025.000	99,93 %									1.865.000
					A Peremajaan Tanaman Kakao di Kabupaten Jayapura 100 Ha	2.845.025.000	99,93 %		100,00	100,00						1.865.000
					526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	110.000.000	99,82 %									201.000
					Parang	60.000.000	99,75 %									148.800
					Sekop	50.000.000	99,90 %									52.200
					526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	2.517.500.000	99,93 %									1.664.000
					Benih Kakao	2.130.000.000	100,00 %									0
					Pupuk NPK	90.000.000	99,78 %									201.000
					Pupuk Organik	297.500.000	99,51 %									1.463.000
					526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	219.390.000	100,00 %									0
					Persiapan Lahan	77.674.000	100,00 %									0
					Pembuatan Lubang Tanam	77.674.000	100,00 %									0
					Penanaman	64.042.000	100,00 %									0
					055 Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	40.000.000	100,00 %									0
					A Pengawasan dan Pendampingan Peremajaan Tanaman Kakao di Provinsi	20.000.000	100,00 %		100,00	100,00						0
					521213 Belanja Honor Output Kegiatan	2.850.000	100,00 %									0
					Honor Penanggung Jawab Kegiatan	450.000	100,00 %									0
					Honor Pelaksana Kegiatan	450.000	100,00 %									0
					Honor Tim/Pokja Pengadaan Barang/Jasa (5 Org x 1 Paket)	750.000	100,00 %									0
					Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (1 Org x 3 Paket)	1.200.000	100,00 %									0



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023

524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.000.000	16.000.000	100,00 %					0
	Dalam rangka koordinasi dan evaluasi kegiatan ke Provinsi	4.000.000	4.000.000	100,00 %					0
	Dalam rangka Pengawalan dan Pendampingan kegiatan dari Kabupaten ke Lokasi	12.000.000	12.000.000	100,00 %					0
1777.RA	Kawasan Kelapa	1.175.000.000	1.158.767.500	98,62 %					16.232.500
I.005									
051	Perluasan Tanaman Kelapa	995.000.000	986.267.500	99,12 %					8.732.500
<i>A</i>	<i>Perluasan Tanaman Kelapa di Kab. Biak Numfor 100 Ha</i>	<i>497.500.000</i>	<i>493.540.000</i>	<i>99,20 %</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>			<i>3.960.000</i>
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	425.000.000	421.040.000	99,07 %					3.960.000
	Benih Siap Tanam	330.000.000	327.800.000	99,33 %					2.200.000
	Pupuk Organik	95.000.000	93.240.000	98,15 %					1.760.000
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	72.500.000	72.500.000	100,00 %					0
	Biaya persiapan lahan dan penanaman	72.500.000	72.500.000	100,00 %					0
<i>B</i>	<i>Perluasan Tanaman Kelapa di Kab. Sarmi 100 Ha</i>	<i>497.500.000</i>	<i>492.727.500</i>	<i>99,04 %</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>			<i>4.772.500</i>
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	425.000.000	420.227.500	98,88 %					4.772.500
	Benih Siap Tanam	330.000.000	325.600.000	98,67 %					4.400.000
	Pupuk Organik	95.000.000	94.627.500	99,61 %					372.500
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	72.500.000	72.500.000	100,00 %					0
	Biaya persiapan lahan dan penanaman	72.500.000	72.500.000	100,00 %					0
055	Pengawalan dan pendampingan kegiatan	180.000.000	172.500.000	95,83 %					7.500.000
<i>A</i>	<i>Pengawalan dan Pendampingan Perluasan Tanaman Kelapa di Provinsi</i>	<i>110.000.000</i>	<i>102.500.000</i>	<i>93,18 %</i>	<i>100,00</i>	<i>95,00</i>			<i>7.500.000</i>



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023

521213	Belanja Honor Output Kegiatan	5.100.000	5.100.000	100,00 %					0
	Honor Penanggung Jawab Kegiatan	3.000.000	3.000.000	100,00 %					0
	Honor Pelaksana Kegiatan	2.100.000	2.100.000	100,00 %					0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5.400.000	5.400.000	100,00 %					0
	Administrasi, foto copy dan penggandaan dokumen	1.300.000	1.300.000	100,00 %					0
	Penyusunan Laporan Kegiatan	500.000	500.000	100,00 %					0
	Rapat koordinasi dan money pelaksanaan kegiatan	3.600.000	3.600.000	100,00 %					0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.000.000	1.000.000	100,00 %					0
	ATK dan bahan komputer	1.000.000	1.000.000	100,00 %					0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.500.000	33.500.000	100,00 %					0
	Dalam rangka koordinasi dan evaluasi dari Kabupaten ke Provinsi	8.500.000	8.500.000	100,00 %					0
	Dalam rangka Pengawasan dan Pendampingan dari Kabupaten ke Lokasi	25.000.000	25.000.000	100,00 %					0
C	Pengawasan dan Pendampingan Perluasan Tanaman Kelapa di Kab. Sarmi	25.000.000	25.000.000	100,00 %	100,00	100,00			0
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	5.100.000	5.100.000	100,00 %					0
	Honor Penanggung Jawab Kegiatan	3.000.000	3.000.000	100,00 %					0
	Honor Pelaksana Kegiatan	2.100.000	2.100.000	100,00 %					0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5.400.000	5.400.000	100,00 %					0
	Administrasi, foto copy dan penggandaan dokumen	1.300.000	1.300.000	100,00 %					0
	Penyusunan Laporan Kegiatan	500.000	500.000	100,00 %					0
	Rapat koordinasi dan money pelaksanaan kegiatan	3.600.000	3.600.000	100,00 %					0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.000.000	1.000.000	100,00 %					0
	ATK dan bahan komputer	1.000.000	1.000.000	100,00 %					0



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023

524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.500.000	13.500.000	100,00 %					0
	Dalam rangka koordinasi dan evaluasi dari Kabupaten ke Provinsi	8.500.000	8.500.000	100,00 %					0
	Dalam rangka Pengawasan dan Pendampingan dari Kabupaten ke Lokasi	5.000.000	5.000.000	100,00 %					0
1777.RA1.006	Kawasan Sagu	2.559.000.000	2.544.639.400	99,44 %					14.360.600
052	Penataan Tanaman Sagu	2.330.000.000	2.316.639.400	99,43 %					13.360.600
A	Penataan Tanaman Sagu di Kab Keerom 100 Ha	466.000.000	461.876.000	99,12 %	100,00	100,00			4.124.000
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	350.000.000	345.876.000	98,82 %					4.124.000
	Chainsaw (0,1 unit/ha)	230.000.000	229.437.000	99,76 %					563.000
	Dodos (1 unit/ha)	25.000.000	24.919.500	99,68 %					80.500
	Sekop (1 unit/ha)	30.000.000	27.750.000	92,50 %					2.250.000
	Parang(Lunit/ha)	25.000.000	24.919.500	99,68 %					80.500
	Sepatu Boat	40.000.000	38.850.000	97,13 %					1.150.000
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	116.000.000	116.000.000	100,00 %					0
	Pembuatan Blok (1 HOK/ha)	14.500.000	14.500.000	100,00 %					0
	Pembuatan Jalan Blok (4 HOK/ha)	58.000.000	58.000.000	100,00 %					0
	Penjarangan anakan (2 HOK/ha)	29.000.000	29.000.000	100,00 %					0
	Penjarangan Rumpun (1 HOK/ha)	14.500.000	14.500.000	100,00 %					0
B	Penataan Tanaman Sagu di Kab. Waropen 100 Ha	466.000.000	464.207.000	99,62 %	100,00	100,00			1.793.000
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	350.000.000	348.207.000	99,49 %					1.793.000
	Chainsaw (0,1 unit/ha)	230.000.000	229.437.000	99,76 %					563.000
	Dodos (1 unit/ha)	25.000.000	24.919.500	99,68 %					80.500
	Sekop (1 unit/ha)	30.000.000	29.526.000	98,42 %					474.000
	Parang(Lunit/ha)	25.000.000	24.919.500	99,68 %					80.500
	Sepatu Boat	40.000.000	39.405.000	98,51 %					595.000



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023**

526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah.	116.000.000	116.000.000	100,00 %					0
	Pembuatan Blok (1 HOK/ha)	14.500.000	14.500.000	100,00 %					0
	Pembuatan Jalan Blok (4 HOK/ha)	58.000.000	58.000.000	100,00 %					0
	Penjarangan anakan (2 HOK/ha)	29.000.000	29.000.000	100,00 %					0
	Penjarangan Rumpun (1 HOK/ha)	14.500.000	14.500.000	100,00 %					0
C	Penataan Tanaman Sagu di Kab. Jayapura 200 Ha	932.000.000	926.527.000	99,41 %	100,00	100,00			5.473.000
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	700.000.000	694.527.000	99,22 %					5.473.000
	Chainsaw (0,1 unit/ha)	460.000.000	459.429.000	99,88 %					571.000
	Dodos (1 unit/ha)	50.000.000	49.728.000	99,46 %					272.000
	Sekop (1 unit/ha)	60.000.000	58.830.000	98,05 %					1.170.000
	Parang(1unit/ha)	50.000.000	49.728.000	99,46 %					272.000
	Sepatu Boat	80.000.000	76.812.000	96,02 %					3.188.000
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah.	232.000.000	232.000.000	100,00 %					0
	Pembuatan Blok (1 HOK/ha)	29.000.000	29.000.000	100,00 %					0
	Pembuatan Jalan Blok (4 HOK/ha)	116.000.000	116.000.000	100,00 %					0
	Penjarangan anakan (2 HOK/ha)	58.000.000	58.000.000	100,00 %					0
	Penjarangan Rumpun (1 HOK/ha)	29.000.000	29.000.000	100,00 %					0
D	Penataan Tanaman Sagu di Kab. Kepulauan Yapen 100 Ha	466.000.000	464.029.400	99,58 %	100,00	100,00			1.970.600
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	350.000.000	348.029.400	99,44 %					1.970.600
	Chainsaw (0,1 unit/ha)	230.000.000	229.536.900	99,80 %					463.100
	Dodos (1 unit/ha)	25.000.000	24.919.500	99,68 %					80.500
	Sekop (1 unit/ha)	30.000.000	29.803.500	99,35 %					196.500
	Parang(1unit/ha)	25.000.000	24.586.500	98,35 %					413.500
	Sepatu Boat	40.000.000	39.183.000	97,96 %					817.000
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah.	116.000.000	116.000.000	100,00 %					0



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023

						32.000.000	32.000.000	100,00 %					0
				Dalam rangka koordinasi dan pengawasan kegiatan ke Kabupaten Waropen		32.000.000	32.000.000	100,00 %					0
				Dalam rangka Pengawasan dan Pendampingan dari Provinsi ke Kabupaten Jayapura		10.000.000	10.000.000	100,00 %					0
				Dalam rangka Pengawasan dan Pendampingan dari Provinsi ke Kabupaten Kepulauan Yapen		21.000.000	21.000.000	100,00 %					0
				<i>Pengawasan dan Pendampingan Penataan Tanaman Sagu di Kab. Keerom</i>		30.000.000	30.000.000	100,00 %	100,00	100,00	100,00		0
				521213 Belanja Honor Output Kegiatan		5.700.000	5.700.000	100,00 %					0
				Honor Penanggung Jawab Kegiatan		3.000.000	3.000.000	100,00 %					0
				Honor Pelaksana Kegiatan		2.700.000	2.700.000	100,00 %					0
				521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya		7.600.000	7.600.000	100,00 %					0
				Administrasi, foto copy dan pengandaan dokumen		1.000.000	1.000.000	100,00 %					0
				Penyusunan Laporan Kegiatan		1.000.000	1.000.000	100,00 %					0
				Rapat koordinasi dan movev pelaksanaan kegiatan		5.600.000	5.600.000	100,00 %					0
				521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		700.000	700.000	100,00 %					0
				ATK dan bahan komputer		700.000	700.000	100,00 %					0
				524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa		16.000.000	16.000.000	100,00 %					0
				Dalam rangka koordinasi dan evaluasi kegiatan ke Provinsi		4.000.000	4.000.000	100,00 %					0
				Dalam rangka Pengawasan dan Pendampingan kegiatan dari Kabupaten ke Lokasi		12.000.000	12.000.000	100,00 %					0
				<i>Pengawasan dan Pendampingan Penataan Tanaman Sagu di Kab. Waropen</i>		30.000.000	30.000.000	100,00 %	100,00	100,00	100,00		0
				521213 Belanja Honor Output Kegiatan		5.100.000	5.100.000	100,00 %					0



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023**

							3.000.000	3.000.000	100,00 %								0
						Honor Penanggung Jawab Kegiatan	3.000.000	3.000.000	100,00 %								0
						Honor Pelaksana Kegiatan	2.100.000	2.100.000	100,00 %								0
					521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4.400.000	4.400.000	100,00 %								0
						Administrasi, foto copy dan penggandaan dokumen	1.000.000	1.000.000	100,00 %								0
						Penyusunan Laporan Kegiatan	1.000.000	1.000.000	100,00 %								0
						Rapat koordinasi dan monev pelaksanaan kegiatan	2.400.000	2.400.000	100,00 %								0
					521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.000.000	1.000.000	100,00 %								0
						ATK dan bahan komputer	1.000.000	1.000.000	100,00 %								0
					524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.500.000	19.500.000	100,00 %								0
						Dalam rangka koordinasi dan evaluasi kegiatan ke Provinsi	7.500.000	7.500.000	100,00 %								0
						Dalam rangka Pengawalan dan Pendampingan kegiatan dari Kabupaten ke Lokasi	12.000.000	12.000.000	100,00 %								0
					<i>D</i>	<i>Pengawalan dan Pendampingan Penataan Tanaman Sagu di Kab. Jayapura</i>	<i>30.000.000</i>	<i>29.000.000</i>	<i>97,00 %</i>	<i>98,00</i>	<i>100,00</i>					<i>1.000.000</i>	
					521213	Belanja Honor Output Kegiatan	5.100.000	5.100.000	100,00 %								0
						Honor Penanggung Jawab Kegiatan	3.000.000	3.000.000	100,00 %								0
						Honor Pelaksana Kegiatan	2.100.000	2.100.000	100,00 %								0
					521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.900.000	2.900.000	100,00 %								0
						Administrasi, foto copy dan penggandaan dokumen	1.000.000	1.000.000	100,00 %								0
						Penyusunan Laporan Kegiatan	600.000	600.000	100,00 %								0
						Rapat koordinasi dan monev pelaksanaan kegiatan	1.300.000	1.300.000	100,00 %								0
					521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.000.000	0	0,00 %								1.000.000
						ATK dan bahan komputer	1.000.000	0	0,00 %								1.000.000
					524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.000.000	21.000.000	100,00 %								0



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023

						6.000.000	100,00 %							0
				Dalam rangka koordinasi dan evaluasi kegiatan ke Provinsi		6.000.000								
				Dalam rangka Pengawasan dan Pendampingan kegiatan dari Kabupaten ke Lokasi		15.000.000	100,00 %							0
				<i>Pengawasan dan Pendampingan Penataan Tanah Sagu di Kab. Kepulauan Yapen</i>		30.000.000	100,00 %	100,00	100,00					0
				Belanja Honor Output Kegiatan		5.100.000	100,00 %							0
				Honor Penanggung Jawab Kegiatan		3.000.000	100,00 %							0
				Honor Pelaksana Kegiatan		2.100.000	100,00 %							0
				Belanja Barang Non Operasional Lainnya		2.900.000	100,00 %							0
				Administrasi, foto copy dan pengandaan dokumen		1.000.000	100,00 %							0
				Penyusunan Laporan Kegiatan		600.000	100,00 %							0
				Rapat koordinasi dan monev pelaksanaan kegiatan		1.300.000	100,00 %							0
				Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		1.000.000	100,00 %							0
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa		21.000.000	100,00 %							0
				Dalam rangka koordinasi dan evaluasi kegiatan ke Provinsi		8.000.000	100,00 %							0
				Dalam rangka Pengawasan dan Pendampingan kegiatan dari Kabupaten ke Lokasi		13.000.000	100,00 %							0
				5889 Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan		2.300.970.000	99,31 %	100,00	100,00					15.793.550
				5889.AEA Koordinasi(Base Line)		165.500.000	100,00 %							0
				5889.AE A.001 Monev dan Pelaporan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan		165.500.000	100,00 %							0
				054 Fasilitas Pertemuan dan Koordinasi Penetapan Harga IBS		81.000.000	100,00 %							0

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023**



				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %	81.000.000	81.000.000		Kota Jayapura/Aparatur	0	Hambatan Keterlambatan Perusahaan :
A	521211	Fasilitasi Pertemuan dan Koordinasi Penetapan Harga TBS Belanja Bahan	30.100.000	30.100.000	100,00 %	30.100.000	30.100.000				0	0 Kelapa Sawit (PKS) dalam menyampaikan data dukungan penetapan harga TBS setiap bulan, kurang transparannya PKS dalam menyampaikan data perhitungan indeks K, Solusi : Melakukan koordinasi secara intensif kepada PKS terkait dengan penyediaan data dukung, adanya Tim Satgas dari Pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap besarnya
		Adm, fotocopy, dll	2.600.000	2.600.000	100,00 %	2.600.000	2.600.000				0	
		Konsumsi dalam rapat penetapan harga TBS	27.500.000	27.500.000	100,00 %	27.500.000	27.500.000				0	
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.900.000	2.900.000	100,00 %	2.900.000	2.900.000				0	
		ATK dan bahan komputer	2.900.000	2.900.000	100,00 %	2.900.000	2.900.000				0	
	524111	Belanja Peralatan Dinas Basis	48.000.000	48.000.000	100,00 %	48.000.000	48.000.000				0	
		Dalam rangka Monitoring dan Pengawasan Penerapan Harga Pembelian TBS ke Kab. Jayapura dan Keerom	3.000.000	3.000.000	100,00 %	3.000.000	3.000.000				0	

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023



						45.000.000	45.000.000	100,00 %					0
					Dalam rangka koordinasi dan evaluasi penetapan harga TBS								0
				055	Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Komoditas Tanaman Perkebunan	84.500.000	84.500.000	100,00 %					0
	A				Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Komoditas Perkebunan	84.500.000	84.500.000	100,00 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	0
									100,00 %				
				521211	Belanja Bahan	1.000.000	1.000.000	100,00 %					0
					Adm., fotocopy, penggandaan materi, dan dokumentasi	1.000.000	1.000.000	100,00 %					0
				521213	Belanja Honor Output Kegiatan	21.600.000	21.600.000	100,00 %					0
					Honor Petugas PIP Kegiatan	3.600.000	3.600.000	100,00 %					0
					Honor Petugas PIP Kabupaten [5 orang x 12 bulan]	18.000.000	18.000.000	100,00 %					0
				521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	12.000.000	12.000.000	100,00 %					0
					Penyusunan Buletin Informasi Pasar	4.800.000	4.800.000	100,00 %					0
					Biaya Pulsa Data Petugas PIP [6 orang x 12 bulan]	7.200.000	7.200.000	100,00 %					0
				521811	Belanja Barang Persediaan-Barang Konsumsi	1.900.000	1.900.000	100,00 %					0
					ATK dan Bahan Komputer	1.900.000	1.900.000	100,00 %					0
				524111	Belanja Perjalanan Dinas Biaya Dasar	48.000.000	48.000.000	100,00 %					0
					Dalam rangka pembinaan ke Kabupaten/Kota	4.500.000	4.500.000	100,00 %					0
					Dalam rangka Koordinasi Pembina PIP dan Petugas PIP ke Pusat	14.500.000	14.500.000	100,00 %					0
					Dalam rangka evaluasi nasional pembina PIP dan Petugas PIP ke Pusat	29.000.000	29.000.000	100,00 %					0



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023

5889.AEH	Promosi[Base Line]	65.000.000	65.000.000	100,00 %						0
5889.AEH	Promosi Produk Hasil Perkebunan	65.000.000	65.000.000	100,00 %						0
051	Fasilitasi Pengembangan Usaha Produk Perkebunan Unggulan	65.000.000	65.000.000	100,00 %						0
A	Fasilitasi Promosi dan Pengembangan Akses Pasar Produk Perkebunan Unggulan	65.000.000	65.000.000	100,00 %	1 Promosi	1 Promosi	DKI Jakarta/Publik			0
Hambatan : Kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah (Provinsi) sehingga promosi produk perkebunan tidak berjalan secara maksimal, Solusi : Mencari peluang terhadap proses penganggaran dari pemerintah daerah (Provinsi) maupun dukungan pihak										
521211	Belanja Bahan Adm, fotocopy, penggandaan materi, pelaporan	6.000.000	6.000.000	100,00 %						0
		1.000.000	1.000.000	100,00 %						0
522191	Bahan Pameran	5.000.000	5.000.000	100,00 %						0
	Belanja Jasa Lainnya	35.000.000	35.000.000	100,00 %						0
	Promosi Produk Perkebunan	35.000.000	35.000.000	100,00 %						0
524111	Belanja Pemeliharaan Dinas Bina	24.000.000	24.000.000	100,00 %						0
	Perjalanan dalam rangka pelaksanaan promosi produk perkebunan	24.000.000	24.000.000	100,00 %						0
5889.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup[Base Line]	1.187.850.000	1.173.854.752	98,82 %						13.995.248
5889.RA	Sarana Pascapanen	142.880.000	140.471.752	98,31 %						2.408.248
G.001	Tanaman Perkebunan	142.880.000	140.471.752	98,31 %						2.408.248
051	Penyediaan Sarana Pascapanen Komoditas Perkebunan	142.880.000	140.471.752	98,31 %						2.408.248



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023

				5.000.000	4.995.000	99,90 %	243 Orang					5.000
				12.500.000	12.487.500	99,90 %						12.500
F		Mesin pompa air Genset 2000 watt	Insentif Mantri Statistik Perkebunan 243 Orang	218.700.000	210.600.000	96,30 %	36 Orang	100,00 %	Jayapura (Provinsi) Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Keerom, Sarmi, Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, Waropen,		8.100.000	
	521213	Belanja Honor Output Kegiatan		218.700.000	210.600.000	96,30 %					8.100.000	
		Honor Mantri Statistik Perkebunan [243 Orang x 6 Bulan]		218.700.000	210.600.000	96,30 %					8.100.000	
G		Sosialisasi dan Workshop E-Statistik Perkebunan		201.600.000	201.600.000	100,00 %	36 Orang	100,00 %	Jayapura (Provinsi)		0	
	521211	Belanja Bahan		9.400.000	9.400.000	100,00 %					0	
		ATK, administrasi, fotocopy, penggandaan, dll		2.600.000	2.600.000	100,00 %					0	
		Perfengkapan peserta		6.800.000	6.800.000	100,00 %					0	
	521213	Belanja Honor Output Kegiatan		1.200.000	1.200.000	100,00 %					0	
		Honor Panitia		1.200.000	1.200.000	100,00 %					0	
	522151	Belanja Jasa Profesi		14.400.000	14.400.000	100,00 %					0	
		Honor Narasumber (4 org X 4 Jam)		14.400.000	14.400.000	100,00 %					0	
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		176.600.000	176.600.000	100,00 %					0	
		Transportasi Peserta Sosialisasi dan Workshop dari Kabupaten Sarmi, Mamberamo Raya, Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, Waropen PP		77.000.000	77.000.000	100,00 %					0	
		Transportasi Peserta Sosialisasi dan Workshop dari Kabupaten Jayapura dan Keerom PP		2.400.000	2.400.000	100,00 %					0	



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023

						6.400.000	6.400.000	100,00 %					0
						14.400.000	14.400.000	100,00 %					0
						26.000.000	26.000.000	100,00 %					0
						50.400.000	50.400.000	100,00 %					0
						882.620.000	880.821.698	99,80 %					1.798.302
						250.000.000	249.952.000	99,98 %					48.000
						250.000.000	249.952.000	99,98 %					48.000
						20.000.000	20.000.000	100,00 %					0
						520.000	520.000	100,00 %					0
						520.000	520.000	100,00 %					0
						1.280.000	1.280.000	100,00 %					0
						600.000	600.000	100,00 %					0
						680.000	680.000	100,00 %					0
						600.000	600.000	100,00 %					0
						600.000	600.000	100,00 %					0
						600.000	600.000	100,00 %					0



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023**

524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.000.000	14.000.000	100,00 %					0
	Perjalanan Provinsi ke Kabupaten/Lokasi atau sebaliknya dalam rangka sosialisasi, CPCL, pengawalan, pembinaan dan money	14.000.000	14.000.000	100,00 %					0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000	3.600.000	100,00 %					0
	Translok pembinaan kab ke lokasi	3.600.000	3.600.000	100,00 %					0
B	<i>Persediaan Prasarana Pasca panen Bangunan UPH Kopi di Kab Kepulauan Yapen 1 unit</i>	230.000.000	229.952.000	99,98 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	48.000	
					1 Unit	1 Unit		Kampung Numaman, Distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen/Kelompok Tani Kakupi	
522191	Belanja Jasa Lainnya	10.000.000	10.000.000	100,00 %					0
	Biaya perencanaan konstruksi	5.000.000	5.000.000	100,00 %					0
	Biaya pengawasan konstruksi	5.000.000	5.000.000	100,00 %					0
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	220.000.000	219.952.000	99,98 %					48.000
	Bangunan UPH	220.000.000	219.952.000	99,98 %					48.000
5889.RBK.001	Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	632.620.000	630.869.698	99,72 %					1.750.302
051	Persediaan Prasarana Pengolahan Komoditas Perkebunan	632.620.000	630.869.698	99,72 %					1.750.302
A	<i>Pengawalan dan Pendampingan Prasarana Pengolahan Sagu di Kab. Jayapura 1 Unit</i>	40.990.000	40.990.000	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		0
521211	Belanja Bahan	1.610.000	1.610.000	100,00 %					0
	Administrasi, fotocopy, penggandaan, dll	1.610.000	1.610.000	100,00 %					0
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1.880.000	1.880.000	100,00 %					0
	Honorarium Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan	1.200.000	1.200.000	100,00 %					0
	Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa	680.000	680.000	100,00 %					0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.500.000	1.500.000	100,00 %					0
	ATK dan Bahan komputer	1.500.000	1.500.000	100,00 %					0



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023

524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.000.000	27.000.000	100,00 %	100,00 %						0
	Perjalanan dalam rangka koordinasi ke Pusat, Bimtek di luar daerah	15.000.000	15.000.000	100,00 %	100,00 %						0
	Perjalanan Provinsi ke Kabupaten/Lokasi atau sebaliknya dalam rangka sosialisasi, CPC, pengawalan, pembinaan dan money	12.000.000	12.000.000	100,00 %	100,00 %						0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000	9.000.000	100,00 %	100,00 %						0
	Translok pembinaan kab ke lokasi	9.000.000	9.000.000	100,00 %	100,00 %						0
B	Penyelesaian Prasarana Bangunan UPH Sagu di Kab. Jayapura 1 unit	262.000.000	261.249.353	99,71 %	99,71 %	1 Unit	1 Unit	100,00	Kampung Donday, Distrik Waibu Kab. Jayapura/kelempok Tani Torambay	750.647	
522191	Belanja Jasa Lainnya	12.000.000	12.000.000	100,00 %	100,00 %						0
	Biaya perencanaan konstruksi	7.000.000	7.000.000	100,00 %	100,00 %						0
	Biaya pengawasan konstruksi	5.000.000	5.000.000	100,00 %	100,00 %						0
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	250.000.000	249.249.353	99,70 %	99,70 %					750.647	
	Prasarana bangunan UPH sagu	250.000.000	249.249.353	99,70 %	99,70 %					750.647	
C	Pengawalan dan Pendampingan Prasarana Pengolahan Sagu di Kab. Keerom	67.630.000	67.630.000	100,00 %	100,00 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	Jayapura (Provinsi), Kab. Keerom/Aparatur	0	
521211	Belanja Bahan Administrasi, fotocopy, penggandaan, dll	1.250.000	1.250.000	100,00 %	100,00 %						0
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1.880.000	1.880.000	100,00 %	100,00 %						0
	Honorarium Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan	1.200.000	1.200.000	100,00 %	100,00 %						0
	Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa	680.000	680.000	100,00 %	100,00 %						0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.500.000	1.500.000	100,00 %	100,00 %						0
	ATK dan Bahan komputer	1.500.000	1.500.000	100,00 %	100,00 %						0



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023**

524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49.000.000	49.000.000	100,00 %						0
	Perjalanan dalam rangka koordinasi ke pusat, menghadiri pertemuan Bimtek di luar daerah	30.000.000	30.000.000	100,00 %						0
	Perjalanan Provinsi ke Kabupaten/Lokasi atau sebaliknya dalam rangka sosialisasi, CPCL, pengawalan, pembinaan dan money	19.000.000	19.000.000	100,00 %						0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.000.000	14.000.000	100,00 %						0
	Translok pembinaan kab ke lokasi	14.000.000	14.000.000	100,00 %						0
D	Penyediaan Prasarana Bangunan UPH Sagu di Kab Keerom 1 unit	262.000.000	261.000.345	99,62 %	1 Unit	1 Unit	100,00	Kampung Suskun Distrik Arso Timur Kab. Keerom/Kelompok Tani Roswo		999,655
522191	Belanja Jasa Lainnya	12.000.000	12.000.000	100,00 %						0
	Biaya perencanaan konstruksi	7.000.000	7.000.000	100,00 %						0
	Biaya pengawasan konstruksi	5.000.000	5.000.000	100,00 %						0
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	250.000.000	249.000.345	99,60 %						999,655
	Prasarana bangunan UPH sagu	250.000.000	249.000.345	99,60 %						999,655
5890	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	404.314.000	400.140.510	98,97 %		99,00				4.173,490
5890.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	139.492.000	135.754.200	97,32 %						3.737,800
5890.AB.R.001	Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan	139.492.000	135.754.200	97,32 %						3.737,800
052	Rekomendasi Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan	139.492.000	135.754.200	97,32 %						3.737,800



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023**

A	Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan 3 Rekomendasi	139.492.000	135.754.200	97,32 %	99,00	3.737.800
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan	3.600.000	0	0,00 %		3.600.000
	Insentif petugas/ operator e-benh perkebunan (2 org, 12 bin)	3.600.000	0	0,00 %		3.600.000
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	892.000	892.000	100,00 %		0
	ATK dan bahan komputer	892.000	892.000	100,00 %		0
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	135.000.000	134.862.200	99,90 %		137.800
	Sertifikasi benih oleh petugas BPT di UPT/UPTD	52.500.000	52.422.200	99,85 %		77.800
	Pengawasan mutu benih oleh petugas/BPT di UPT/UPTD	52.500.000	52.440.000	99,89 %		60.000
	Konsultasi/koordinasi , menghadiri pertemuan dll	30.000.000	30.000.000	100,00 %		0
	5890.RA1 Sarana Pengembangan Kawasan[Base Line]	264.822.000	264.386.310	99,84 %		435.690
	5890.RA1 Kebun Sumber Benih .001 Tanaman Perkebunan	264.822.000	264.386.310	99,84 %		435.690
	052 Pemeliharaan Kebun Sumber Bahan Tanam	52.174.000	52.166.500	99,99 %		7.500
D	Pemeliharaan Kebun Entres Kopi Tahun 3 di Provinsi 1	52.174.000	52.166.500	99,99 %	100,00	7.500
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.386.000	26.386.000	100,00 %		0
	Perjalanan Petugas BBI Perkebunan ke Provinsi	10.000.000	10.000.000	100,00 %		0
	Perjalanan Petugas Provinsi ke lokasi	15.000.000	15.000.000	100,00 %		0
	Perjalanan Petugas BBI ke Lokasi	1.386.000	1.386.000	100,00 %		0
	526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	9.258.000	9.250.500	99,92 %		7.500
	Urea	3.000.000	2.997.000	99,90 %		3.000
	SP36	2.000.000	1.998.000	99,90 %		2.000
	KCL	2.500.000	2.497.500	99,90 %		2.500
	Herbisida	1.060.000	1.060.000	100,00 %		0
	Insektisida	698.000	698.000	100,00 %		0
	526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah.	16.530.000	16.530.000	100,00 %		0



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023

				Insentif Pemeliharaan dan Pemupukan	16.530.000	16.530.000	100,00 %				0
		053	Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul Lokal		152.648.000	152.219.810	99,72 %				428.190
	C		<i>Pemeliharaan BPT dan PIT Kelapa yang Telah ditetapkan di Kab Sarmi 5 Ha</i>		<i>56.618.000</i>	<i>56.222.060</i>	<i>99,30 %</i>		<i>100,00</i>		<i>395.940</i>
		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		15.843.000	15.843.000	100,00 %				0
			Perjalanan provinsi ke lokasi		7.843.000	7.843.000	100,00 %				0
			Perjalanan kabupaten ke lokasi		8.000.000	8.000.000	100,00 %				0
		526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda		33.525.000	33.129.060	98,82 %				395.940
			Urea		10.000.000	9.990.000	99,90 %				10.000
			SP-36		6.000.000	5.994.000	99,90 %				6.000
			KCL		16.200.000	15.824.160	97,68 %				375.840
			Herbisida		1.325.000	1.320.900	99,69 %				4.100
		526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemertintah		7.250.000	7.250.000	100,00 %				0
			Insentif Pemeliharaan dan pemupukan		7.250.000	7.250.000	100,00 %				0
	D		<i>Pemeliharaan BPT dan PIT Kelapa yang Telah ditetapkan di Kab Blak Numfor 5 Ha</i>		<i>96.030.000</i>	<i>95.997.750</i>	<i>99,97 %</i>		<i>100,00</i>		<i>32.250</i>
		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		40.560.000	40.560.000	100,00 %				0
			Perjalanan provinsi ke lokasi		25.560.000	25.560.000	100,00 %				0
			Perjalanan kabupaten ke lokasi		15.000.000	15.000.000	100,00 %				0
		526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda		33.575.000	33.542.750	99,90 %				32.250
			Urea		10.000.000	9.990.000	99,90 %				10.000
			SP-36		6.000.000	5.994.000	99,90 %				6.000
			KCL		16.250.000	16.233.750	99,90 %				16.250
			Herbisida		1.325.000	1.325.000	100,00 %				0
		526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemertintah		21.895.000	21.895.000	100,00 %				0
			Insentif Pemeliharaan dan pemupukan		21.895.000	21.895.000	100,00 %				0

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023



521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13.263.000	13.263.000	100,00 %					0
	Rapat Koordinasi Satker	4.000.000	4.000.000	100,00 %					0
	Administrasi, Foto copy dan penggandaan dokumen	3.600.000	3.600.000	100,00 %					0
	Penyusunan laporan	2.400.000	2.400.000	100,00 %					0
	Penyusunan, cetak dan jilid Laporan SAI dan SIMAK-BMN Semester I dan II	3.263.000	3.263.000	100,00 %					0
521811	Belanja Barang Persediaan	6.000.000	6.000.000	100,00 %					0
	Barang Konsumsi	3.000.000	3.000.000	100,00 %					0
	ATK dan Bahan Komputer	3.000.000	3.000.000	100,00 %					0
	ATK Penyusunan Laporan SAI dan SIMAK-BMN	25.000.000	25.000.000	100,00 %					0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.000.000	15.000.000	100,00 %					0
	Dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi ke Pusat	6.000.000	6.000.000	100,00 %					0
	Dalam rangka koordinasi penyusunan Laporan SAI dan SIMAK-BMN Semester I, Triwulan III dan Semester II ke Koordinator Wilayah (KORW)								
	Dalam rangka koordinasi administrasi ke KPPN	4.000.000	4.000.000	100,00 %					0
	Jumlah Dana Tugas Pembantuan	11.841.777.000	11.771.295.189	99,40 %	100,00				70.481.811



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023

IV. 25910 0	Kementerian/ Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	DJPA No. DJPA - 018.06.4.259 100/2023, Tgl. 31 Oktober 2023																			
			018.06.E C dan Daya Saing Industri Pengembangan 589.1 Pemasaran Hasil Ternak	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,00	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga										
			5891.QD6 Lembaga	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,00														
			5891.QDB. 001 Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,00														Tidak ada
			111 Pelayanan Informasi Harga Komoditas Peternakan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,00														
			521211 Belanja Bahan	3.265.000	3.265.000	3.265.000	100,00														
			- Konsumsi Rapat PIP di Provinsi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	20	20	20	100										
			- Pelaporan	300.000	300.000	300.000	100,00	1	1	1	100										
			- Kertas HVS	465.000	465.000	465.000	100,00	1	1	1	100										
			- Tinta printer	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00	1	1	1	100										
			524111 Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100,00														
			- Koordinasi/pembinaan PIP (kab dan kota Jayapura)	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100,00	24	24	24	100										
			524119 Belanja Perjalanan Dinas. Paket Meeting Luar Kota	9.735.000	9.735.000	9.735.000	100,00														
			- Perjalanan dalam rangka pertemuan koordinasi PIP	9.735.000	9.735.000	9.735.000	100,00	1	1	1	100										
			018.06.H A Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	4.959.098.000	4.953.654.878	4.953.654.878	99,89														
			1784 H Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Lainnya	390.000.000	389.999.259	389.999.259	100,00														741 Tidak Ada
			1784.QA H Pelayanan Publik Lainnya	390.000.000	389.999.259	389.999.259	100,00	11.500	11.500	11.500	11.500										
			1784.QA H.001 Pelayanan Kesehatan Hewan	390.000.000	389.999.259	389.999.259	100,00														



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023

				28.000.000	28.000.000	100,00	56	56	100			
		- Perjalanan lokal kegiatan penandaan ternak kab/kota										
		- Perjalanan koordinasi kegiatan penandaan dan produksi ternak ke pusat		45.000.000	45.000.000	100,00	3	3	100			
		Perjalanan Petugas Penandaan dan Pendataan Ternak										
		- Bantuan transport petugas penandaan ternak		135.000.000	135.000.000	100,00	540	540	100			
		Bantuan Hewan		3.593.298.000	3.587.910.580	99,85	2160 ekor	2160 ekor				
	1785.QEL	Optimalisasi Reproduksi		2.333.298.000	2.328.514.580	99,79	2.000 ekor	2.000 ekor				
	1785.QEL	Fasilitasi alat dan bahan		785.511.000	784.309.880	99,85						
	101	Tanpa Sub Komponen		142.356.000	141.500.000	99,40						
		Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda		142.356.000	141.500.000	99,40					Kab Jayapura, Keerom, Kota Jayapura, Blak Numfor, Waropen, dan Sarmi	
	526115	- Plastik sheet IB 50 pcs per pak		3.675.000	3.674.800	99,99	100	100	100			
		- Plastik glove IB 5 jari 100 ps per pak		9.625.000	9.625.000	100,00	100	100	100			
		- Disposable syringe 10 ml 100 pcs		17.550.000	17.550.000	100,00	100	100	100			
		- Verm O 12 bolus per botol		10.750.000	10.750.000	100,00	100	100	100			
		- Blosan TP injeksi 100 ml per botol		13.900.000	13.900.000	100,00	80	80	100			
		- Hormon capriglandin 10 ml		20.625.000	20.625.000	100,00	100	100	100			
		- Injectamin 100 MI		12.040.000	12.040.000	100,00	80	80	100			
		- Invermectin 10 MI		6.440.000	6.440.000	100,00	80	80	100			
		- Vet-Oxy SB 100 MI		5.660.000	5.660.000	100,00	80	80	100			
		- Vitol 140 100 MI		8.091.000	8.091.000	100,00	80	80	100			
		- Kontainer 35 ltr		34.000.000	33.144.200	97,48	2	2	100			
		β Tanpa Sub Komponen		643.155.000	642.809.880	99,95						
	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda		643.155.000	642.809.880	99,95						
		- Topi lapangan		3.000.000	3.000.000	100,00	60	60	100			
		- Sepatu lapangan		14.520.000	14.520.000	100,00	60	60	100			
		- Baju lapangan (kemeja dan celana panjang)		60.000.000	60.000.000	100,00	60	60	100			
		- Gusanex		12.500.000	12.500.000	100,00	50	50	100			
		- Kontainer lapangan		62.800.000	62.800.000	100,00	4	4	100			



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023

	521219	Belanja Barang Non-Operasional Lainnya	28.000.000	28.000.000	100,00								
		- Operasional kegiatan pertemuan	28.000.000	28.000.000	100,00	1	1	100					
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5.067.000	5.067.000	100,00								
		- ATK dan bahan komputer	5.067.000	5.067.000	100,00	1	1	100					
	522151	Belanja Jasa Profesi	8.000.000	8.000.000	100,00								
		- Honor narasumber kegiatan refresh petugas	8.000.000	8.000.000	100,00	4	4	100					
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	43.000.000	43.000.000	100,00								
		- Akomodasi dan konsumsi peserta refresh petugas	12.000.000	12.000.000	100,00	40	40	100					
		- Penggantian uang tiket kegiatan refresh petugas	16.000.000	16.000.000	100,00	4	4	100					
		- Uang harian peserta dalam rangka pertemuan refresh petugas	15.000.000	15.000.000	100,00	50	50	100					
		Honor Tim Teknis Kegiatan SIKOMANDAN	72.000.000	72.000.000	100,00								
	521213	Belanja Honor Outpout Kegiatan	72.000.000	72.000.000	100,00								
		- Honor Tim Teknis Provinsi (8 org x 12 bln)	33.600.000	33.600.000	100,00	96	96	100					
		- Honor Tim Teknis Kabupaten (4 kab x 2 org x 12 bulan)	33.600.000	33.600.000	100,00	96	96	100					
		- Honor pejabat pengadaan barang dan jasa	4.800.000	4.800.000	100,00	12	12	100					
		Pendampingan dan Pengawasan Keg SIKOMANDAN	164.870.000	164.870.000	100,00								
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	164.870.000	164.870.000	100,00								
		- Pendampingan pengawalan provinsi ke Kab Jayapura, Keerom, dan Kota Jayapura	16.000.000	16.000.000	100,00	32	32	100					
		- Pendampingan dan pengawalan provinsi ke Kabupaten	59.500.000	59.500.000	100,00	8	8	100					
		- Koordinasi dan konsultasi ke pusat kegiatan peningkatan produksi ternak	45.000.000	45.000.000	100,00	3	3	100					
		- Koordinasi konsultasi ke pusat kegiatan peningkatan produksi ternak * Tiket Jayapura ke Jakarta (3 org x 2 PP)	44.370.000	44.370.000	100,00								
			24.720.000	24.720.000	100,00	6	6	100					



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023

					14.000.000	14.000.000	100,00	2	2	100		
			- Perjalanan CP CL dan penyebaran ternak ke Kab. Kep. Yapen									
			- Perjalanan lokal CP CL dan penyebaran ternak ke Kab. Keerom dan Kab. Jayapura		8.500.000	8.500.000	100,00	17	17	100		
			103 Kambing Potong/ Domba		400.000.000	399.445.000	99,86					
			A Pengadaan kambing/domba		350.000.000	349.445.000	99,84					
		526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda		350.000.000	349.445.000	99,84					
			- Pengadaan kambing di Kab. Jayapura, Keerom, dan Kota Jayapura		350.000.000	349.445.000	99,84	100	100	100	2 klpk di Kab Jayapura, 1 klpk di Kab Keerom, dan 1 klpk di Kota Jayapura	
			B Operasional Pengadaan, Money dan Pelaporan		50.000.000	50.000.000	100,00					
		521211	Belanja Bahan		2.890.000	2.890.000	100,00					
			- Fotokopi dan bahan printer		2.890.000	2.890.000	100,00	1	1	100		
		521213	Belanja Honor Output Kegiatan		4.110.000	4.110.000	100,00					
			- Honor panitia pengadaan		4.110.000	4.110.000	100,00	3	3	100		
		522151	Belanja Jasa Profesi		1.000.000	1.000.000	100,00					
			- Narasumber rapat/koor dinas/sosialisasi		1.000.000	1.000.000	100,00	1	1	100		
		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		42.000.000	42.000.000	100,00					
			- Perjalanan dalam rangka survei harga, verifikasi CP CL, koordinasi dan money		29.000.000	29.000.000	100,00	58	58	100		
			- Perjalanan koordinasi konsultasi ke pusat		13.000.000	13.000.000	100,00	1	1	100		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023

	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.204.000	28.203.050	100,00						
		- Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan evaluasi pelaporan data ternak	10.704.000	10.703.050	99,99	1	1	100			
		- Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan evaluasi pelaporan data ternak ke kabupaten	13.000.000		100,00	2	2	100			
		- Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan evaluasi pelaporan data ternak ke kab/kota	4.500.000	4.500.000	100,00	9	9	100			
	B	Refreshment Pelayanan /Bata Kesmavet	45.000.000	45.000.000	100,00						
	521211	Belanja Bahan	8.000.000	8.000.000	100,00						
		- Konsumsi dan snack (30 org)	6.600.000	6.600.000	100,00	30	30	100			
		- KIT peserta	600.000	600.000	100,00	30	30	100			
		- Konsumsi rapat bidang	500.000	500.000	100,00	1	1	100			
		- Spanduk (6 M)	300.000	300.000	100,00	6	6	100			
	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1.500.000	1.500.000	100,00						
		- Moderator	1.500.000	1.500.000	100,00	2	2	100			
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7.500.000	7.500.000	100,00						
		- Paket pertemuan refreshment pelaporan data kesmavet (30 org x 1 keg)	7.500.000	7.500.000	100,00	30	30	100			
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.000.000	28.000.000	100,00						
		- Tiket perjalanan dari Jayapura ke kabupaten PP (4 org x 1 PP)	10.000.000	10.000.000	100,00	4	4	100			
		- Uang saku (4 org x 4 hr)	9.280.000	9.280.000	100,00	16	16	100			
		- Akomodasi (4 org x 3 hr)	6.000.000	6.000.000	100,00	12	12	100			
		- Transport Bandara Jayapura ke lokasi kegiatan PP (4 org x 1 PP)	2.720.000	2.720.000	100,00	4	4	100			
	1786.QJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	61.500.000	61.495.989	99,99						
	1786.QJA.001	Keamanan dan Mutu Produk Hewan	61.500.000	61.495.989	99,99	25 Produk	39 Produk			Kab Blak Numfor, Kepulauan Yapen, Jayapura, Keerom, dan	
	102	Pengawasan Keamanan Produk Hewan	61.500.000	61.495.989	99,99						
	A	Pengujian Sampel	61.500.000	61.495.989	99,99						
	521211	Belanja Bahan	21.000.000	20.995.989	99,98						
		- Pembelian Bahan Media Laboratorium	15.000.000	14.998.017	99,99	25	25	100			
		- Biaya pembelian sampel	1.500.000	1.500.000	100,00	25	39	156			

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023



	203	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Provinsi		116.120.000	116.118.000	100,00							
	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		81.120.000	81.120.000	100,00							
		- Honorarium pejabat kuasa pengguna anggaran		21.000.000	21.000.000	100,00		12	12	100			
		- Honorarium pejabat penguji tajihan penandatangan SPM		17.400.000	17.400.000	100,00		12	12	100			
		- Honorarium pejabat pembuat komitmen		14.640.000	14.640.000	100,00		12	12	100			
		- Honorarium bendahara pengeluaran		13.080.000	13.080.000	100,00		12	12	100			
		- Honor staf pengelola		9.600.000	9.600.000	100,00		24	24	100			
		- Honor petugas SAI dan SABMIN		5.400.000	5.400.000	100,00		12	12	100			
	521211	Belanja Bahan		5.000.000	5.000.000	100,00							
		- Laporan bendahara		2.000.000	2.000.000	100,00		2	2	100			
		- ATK bendahara		3.000.000	3.000.000	100,00		1	1	100			
	524111	Belanja Peralatan Dinas Biasa		30.000.000	29.998.000	99,99							
		- Koordinasi/Konsultasi Anggaran ke pusat		15.000.000	14.998.000	99,99		1	1	100			
		- Perjalanan penyelesaian aset dan lap keuangan		15.000.000	15.000.000	100,00		1	1	100			
		JUMLAH DANA TP		5.373.619.000	5.368.173.878	99,90				100			5.445.122



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023**

V. 25910 4	Kementerian/ Pertanian/ Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	DIPA No. SP. DIPA-018- 08.4.259104 /2023, Tgl. 14 Desember 2023.	018.08.H A	Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas																				
			1795	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	3.468.974.000	3.409.871.730	98,30	100	98,64	98,64	98,64	Jayawijaya, Keerom, Merauke, Mappi	59.102.270											
			1795.RBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	3.468.974.000	3.409.871.730	98,30	100	99,22	99,22			59.102.270											
			1795.RBO .002	Optimasi Lahan	615.406.000	588.226.000	95,58	100	95,61	95,61			27.180.000											
			051	Persiapan Optimasi Lahan	126.496.000	99.496.000	78,66	100	78,66	78,66		Jayawijaya, Keerom, Merauke, Mappi	27.000.000											
			052	Perbaikan Infrastruktur Optimasi Lahan	488.910.000	488.730.000	99,96	100	100,00	100,00		Jayawijaya, Keerom, Merauke, Mappi	180.000											
			1795.RBO .003	Lahan Pertanian Pangan Produktif (Food Estate)	1.366.350.000	1.336.300.000	97,80	100	100,00	100,00		Kab. Merauke	30.050.000											
			051	Pelaksanaan Konstruksi Lahan Pertanian Produktif (Food Estate)	1.290.000.000	1.260.300.000	97,70	100	100,00	100,00		Kab. Merauke	29.700.000											
			052	Pelaksanaan Pengawasan dan Operasional Kegiatan Lahan Pertanian Produktif (Food Estate)	76.350.000	76.000.000	99,54	100	100,00	100,00		Kab. Merauke	350.000											
			1796	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	185.000.000	184.700.000	99,84	100	100,00	100,00		10 Kab/Kota dan Prov (Blak, Merauke, Mimika, Nabire, Yapen, Kota Jayapura, Keerom, Boven Digoei, Waropen dan Mappi)	300.000											



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2023

					100,00	100	99,41	99,41	11 Kab/Kota (Blak, Werauke, Mimika, Nabire, Yapen, Kota Jayapura, Keerom, Boven Digoei, Waropen, Sarmi dan Supiori)	Tahun 2023 anggaran kegiatan pupuk bersubsidi sangat terbatas dan kecil (hanya Honor Tim Verval Kecamatan dan Tim input eRDKK) yg angka dan bulan d disesuaikan. Prov menyampaikan agar adanya dukungan dan dari APBD II utk mendukung operasional (pulsa, atk, perjalanan, pertemuan)
018.08.3 993	Fasilitas Pupuk dan Pestisida	116.788.000	116.788.000	100,00	100	99,41	99,41	100,00	Kab. Jayapura, Keerom dan Provinsi	Hambatan : 1. Luas areal tanaman pangan padi tidak didukung fasilitas sarana infrastruktur jaringan irigasi yg memadai yg dipersyaratkan oleh jasindo; 2. Lahan yg hendak diuruskan belum diuruskan kab/kota dalam elektronik proposal ; Solusi : 1. Lahan Pertanian yg akan diikutkan dalam program asuransi pertanian harus sudah masuk dalam aplikasi elektronik proposal ; 2. Lahan pertanian pangan padi yang akan diikutkan program asuransi harus dilingkupi dengan infrastruktur irigasi teknis; 3. Lahan pertanian pangan padi yang akan diikutkan dalam program asuransi pertanian harus luas
018.08.3 994	Fasilitas Pembiayaan Pertanian	56.070.000	56.070.000	100,00	100	100,00	100,00	100,00		
1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Jumlah Dana Tugas Pembantuan	1.129.360.000,00	1.127.787.730,00	99,86	100	100,00	100,00	1.572.270		
		3.468.974.000	3.409.871.730	98,30	100	99,22	99,22	59.102.270		



B. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

4.1 Dasar Hukum

- a. Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (DK-01).
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-032.01.3.250069/2023;
- b. Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (DK-03).
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-032.03.3.259036/2023;
- c. Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (DK-04).
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-032.04.3.259037/2023;
- d. Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (DK-05).
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-032.05.3.259038/2020;
- e. Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (DK-06).
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-032.06.3.259039/2023;
- f. Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (DK-07).
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-032.07.3.259040/2023;
- g. Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (TP-03).
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-032.03.4.259107/2023;

4.2 Instansi Pemberi Dekonsentrasi

Instansi yang memberikan tugas adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dengan rincian sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (DK-01), Sekretariat Jenderal;
2. Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (DK-03), Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
3. Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (DK-04), Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
4. Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (DK-05), Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
5. Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (DK-06), Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;

- 4.3 Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (DK-07), Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut; Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (TP-03), Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;



4.4 Program dan Kegiatan

NO	SATUAN KERJA, PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
Sumber Dana Dekonsentrasi	
I	Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (DK-01)
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan
	1 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan
	2 Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerjasama Antar Lembaga
	3 Kegiatan Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan perikanan
II	Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (DK-03)
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
	4 Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
	5 Kegiatan Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan
	6 Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Ikan
	7 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
III	Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (DK-04)
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	8 Kegiatan Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan
	9 Kegiatan Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan
	10 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
1	2
IV	Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (DK-05)
	Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	11 Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada
	12 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP
V	Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (DK-06)
	Program Peningkatan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	13 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksaaan Tugas Teknis Lainnya DJPDSKP



VI	Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (DK-07)
	Program Pengelolaan Ruang Laut
	14 Kegiatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan keanekaragaman Hayati Laut
	15 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

4.5 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 4.1
Realisasi keuangan dan Fisik Pelaksanaan Program dan Kegiatan dari 6 (enam) Satuan Kerja sebagaimana tabel berikut :

Uraian	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
		(Rp)	%	
Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (DK-01)	230.950.000	229.750.000	99,48	100
Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (DK-03)	422.651.000	422.251.000	99,91	100
Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (DK-04)	295.074.000	295.074.000	100	100
Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (DK-05)	194.222.000	193.800.000	99,78	100
Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (DK-06)	468.150.000	459.826.200	98,22	100
Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (DK-07)	148.482.000	147.982.000	99,66	100
Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (TP-03)	536.671.000	533.940.760	99,40	100
Total Belanja (Rp.)	1.585.517.000	1.495.961.000	94,35	100

4.6 Sumber dan Jumlah Anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dekonsentrasi bersumber dari Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Alokasi ANggaran per DIPA sebagai berikut :

- a. Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (DK-01).
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-032.01.3.250069/2023, dengan jumlah anggaran **Rp. 230.950.000,-;**
- b. Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (DK-03).



- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-032.03.3.259036/2023, dengan jumlah anggaran **Rp. 422.651.000,-**;
- c. Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (DK-04).
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-032.04.3.259037/2023, dengan jumlah anggaran **Rp. 295.074.000,-**;
- d. Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (DK-05).
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-032.05.3.259038/2023, dengan jumlah anggaran **Rp. 194.222.000,-**;
- e. Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (DK-06).
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-032.06.3.259039/2023, dengan jumlah anggaran **Rp. 468.150.000,-**;
- f. Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (DK-07).
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-032.07.3.259040/2023, dengan jumlah anggaran **Rp. 148.482.000,-**;
- g. Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (TP-03).
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-032.03.4.259107/2023, dengan jumlah anggaran **Rp. 536.671.000,-**;

4.7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Dekonsentrasi

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Dekonsentrasi yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, melalui Bidang-bidang Teknis yaitu :

1. Sekretariat Dinas
2. Bidang Produksi kelautan dan Perikanan
3. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Kelautan
4. Bidang Pengelolaan Ruang Laut
5. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

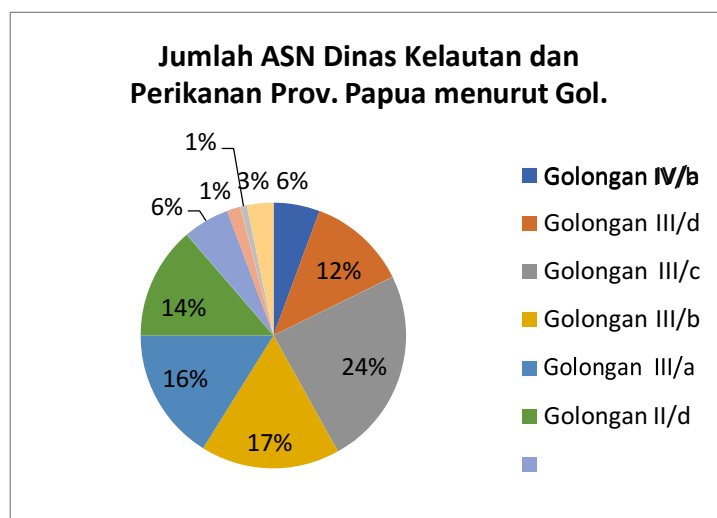
4.8 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Dukungan ketersediaan Sumberdaya Manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan.

Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

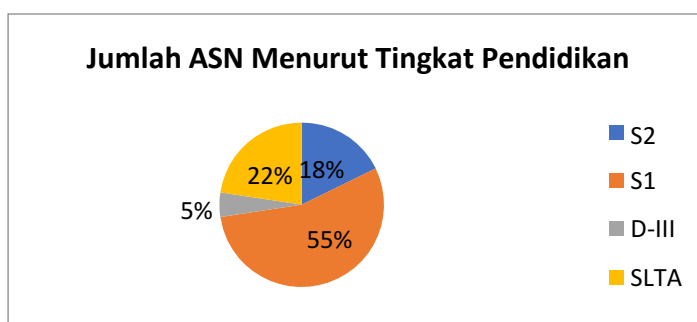
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua sebanyak 124 Orang. Aparatur Sipil Negara (ASN) Pria sebanyak 72 Orang dan Wanita sebanyak 52 Orang.

GOLONGAN	JUMLAH
Golongan IV/d	-
Golongan IV/c	-
Golongan IV/b	7 Orang
Golongan IV/a	15 Orang
Golongan III/d	30 Orang
Golongan III/c	21 Orang
Golongan III/b	20 Orang
Golongan III/a	17 Orang
Golongan II/d	7 Orang
Golongan II/c	2 Orang
Golongan II/b	1 Orang
Golongan II/a	4 Orang



Tabel 4.1. Jumlah ASN Menurut Golongan

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
S2	22 Orang
S1	68 Orang
D-III	6 Orang
SLTA	28 Orang



Tabel 4.2. Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan

4.9 Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan mencukupi dalam melaksanakan urusan Dekonsentrasi

4.10 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Pelaksanaan program dan kegiatan seringkali terlambat dilaksanakan meskipun Dokumen Isian Pagu Anggaran (DIPA) telah diserahkan, ini



dikarenakan keterlambatan Surat Keputusan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Anggaran Dekonsentrasi.

- Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Satuan Kerja yang berkompetensi masih kurang, misalnya SDM yang bersertifikat pengadaan Barang/Jasa maupun Bendahara Pengeluaran.

4.11 Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan

Tidak ada hal lain dalam pelaksanaan Urusan Dekonsentrasi yang perlu dilaporkan.



BAB V

PENUTUP



BAB V PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tetap dapat berjalan secara optimal dan keberhasilan ini merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan dari seluruh komponen pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan di Papua. Di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh perubahan keadaan yang mendasar. Berbagai permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Daerah Provinsi Papua memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Papua yang telah mendukung agenda-agenda pembangunan daerah sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini, Pemerintah Provinsi Papua memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.



Demikian penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Papua Tahun Anggaran 2023, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki dampak serta manfaat yang luas bagi segenap masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua untuk mewujudkan pembangunan Papua yang lebih baik lagi.



LAMPIRAN I

TABEL MATRIKS CAPAIAN/ REALISASI

PROGRAM/KEGIATAN/

SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2023

TABEL MATRIKS CAPAIAN/ REALISASI PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2023

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI			TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR		
						KEU		KELUARAN			
						Rp	%	(K)		%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1-01.2-23.2-24.01.1000	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Ansip Daerah		190.112.311.998				176.973.016.868	93,09			
1.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		134.150.257.649				122.343.660.517	91,2			
1.01.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.667.502.910	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan		1.666.857.985	99,96	0 Laporan	-	
1.01.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1.468.027.720	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		1.467.382.795	99,96	5 Dokumen	100	
1.01.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		99.480.000	Jumlah Dokumen Dokumen RKA-OPD yang terfasilitasi	2 Dokumen		99.480.000	100	2 Dokumen	100	
1.01.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		99.995.190	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-OPD	2 Dokumen				2 Dokumen	100	
1.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		124.157.940.934	Jumlah Laporan Dokumen yang terfasilitasi	4 Dokumen		99.995.190	100	4 Dokumen	100	
1.01.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		123.283.783.694	Jumlah Laporan Dokumen yang terfasilitasi	272 Orang/ Bulan		111.759.539.262	90,65	272 Orang/ Bulan	100	
1.01.001.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		162.547.450	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen		162.547.450	100	2 Dokumen	100	
1.01.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		230.050.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		230.050.000	100	1 Laporan	100	
1.01.001.1.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		168.050.000	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		168.050.000	100	2 Dokumen	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
1.01.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		313.509.790	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	313.509.790	100	2 Laporan	100	
1.01.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		950.000.000			940.388.127	98,99			
1.01.001.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		950.000.000	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	940.388.127	98,99	1 Dokumen	100	
1.01.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.194.314.210			1.193.144.320	99,9			
1.01.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		511.793.600	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	272 Stel	510.958.400	99,84	272 Stel	100	
1.01.001.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		294.887.275			294.586.045	99,9			
1.01.001.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		194.700.000	Tersedianya informasi data kepegawaian Dinas Pendidikan	2 Dokumen	194.666.540	99,98	2 Dokumen	100	
1.01.001.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		192.933.335	Tertindakannya monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	192.933.335	100	1 Dokumen	100	
1.01.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		-			-	-			
1.01.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.658.806.695			3.654.403.324	99,88			
1.01.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		188.800.000			188.691.709	99,94			
1.01.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		280.280.000	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	3 Pak	279.072.000	99,57	3 Pak	100	
1.01.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		297.176.695			296.875.383	99,9			
1.01.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		186.900.000			186.800.790	99,95			
1.01.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		85.200.000	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	85.200.000	100	2 Dokumen	100	
1.01.001.1.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu		518.300.000	Jumlah Tamu Pimpinan yang terfasilitasi makan dan minum	60 1.300 kali	515.675.200	99,49	60 1.300 kali	100	
1.01.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.102.150.000	Meningkatnya tamu pimpinan Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	90 90% 1 Dokumen	2.102.088.242	100	60 90% 1 Dokumen	66,67 100	
1.01.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		675.000.000			674.516.198	99,93			
1.01.001.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Papua	675.000.000	Tersedianya Gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Gedung	674.516.198	99,93	1 Gedung	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
1.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.846.692.900			1.580.654.061	85,59			
1.01.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		10.800.000	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	3 orang	10.800.000	100	3 orang	100	
1.01.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		760.000.000	Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Paket	506.761.643	66,68	3 Paket	100	
1.01.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.075.892.900	Jumlah Jasa Penyediaan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Kegiatan	1.063.092.418	98,81	1 Kegiatan	100	
1.01.002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		48.711.628.504			47.433.551.112	97,38			
1.01.002.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		13.012.132.196	Tolok ukur A	0 %	12.275.209.631	94,34	0 %	-	
1.01.002.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		3.200.000.000	Terbangunan Pagar Sekolah dan Asrama Sekolah Khusus Papua Go global	2 Unit	2.579.758.900	80,62	2 Unit	100	
1.01.002.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		1.955.916.585	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	1.955.802.940	99,99	100 Peserta Didik	100	
1.01.002.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Provinsi Papua	2.364.847.870	Terlaksananya pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	14 Guru	2.333.027.320	98,65	14 Guru	100	
1.01.002.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas		2.932.103.870	Jumlah Sekolah Menengah Khusus yang terfasilitasi	13 Lembaga	2.857.144.990	97,44	13 Lembaga	100	
1.01.002.1.01.62	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Provinsi Papua	2.559.263.871	Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	50 Guru/Orang	2.549.475.481	99,62	100 Guru/Orang	200	
1.01.002.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		9.739.703.823			9.647.203.457	99,05			
1.01.002.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		3.109.690.756	Terbangunnya sarana dan prasarana	1 Dokumen	3.086.619.556	99,26	1 Dokumen	100	
1.01.002.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		705.563.390	Terlaksananya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	50 Peserta Didik	669.966.580	94,95	50 Peserta Didik	100	
1.01.002.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		1.170.850.065	Terlaksananya Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	1 Kurikulum	1.163.160.250	99,34	1 Kurikulum	100	
1.01.002.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		3.182.048.840	Jumlah siswa yang mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	3.158.779.058	99,27	100 Peserta Didik	100	
1.01.002.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan		1.271.550.772	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Khusus yang terfasilitasi	10 Lembaga	1.268.678.013	99,77	10 Lembaga	100	
1.01.002.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		300.000.000			300.000.000	100			
1.01.002.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus		25.959.792.485			25.511.138.024	98,27			
1.01.002.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		10.498.961.060	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	11 Unit	10.155.858.314	96,73	11 Unit	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
1.01.002.1.03.47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus		910.364.180	Terlaksananya Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	1 Kurikulum	909.417.048	99,9	1 Kurikulum	100	
1.01.002.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus		1.617.536.045	Jumlah Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	7 Lembaga	1.615.159.970	99,85	7 Lembaga	100	
1.01.002.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		-			-	-			
1.01.002.1.03.59	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1.639.924.000	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1.639.662.572	99,98	1 Dokumen	100	
1.01.002.1.03.61	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		11.293.007.200	Terselenggaranya bimbingan teknis dan Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100 Orang	11.191.040.120	99,1	100 Orang	100	
1.01.003	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		1.369.287.380			1.354.897.380	98,95			
1.01.003.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		-			-	-			
1.01.003.1.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		-		12 Orang	-	-	12 Orang	100	
1.01.003.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus		1.369.287.380	Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	1 Dokumen	1.354.897.380	98,95	1 Dokumen	100	
1.01.003.1.02.06	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus		1.369.287.380	Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	1 Dokumen	1.354.897.380	98,95	1 Dokumen	100	
1.01.004	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		1.030.452.295			1.015.634.562	98,56			
1.01.004.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi		1.030.452.295			1.015.634.562	98,56			
1.01.004.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		1.030.452.295	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	45 Dokumen	1.015.634.562	98,56	45 Dokumen	100	
2.23.002	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		3.249.762.225			3.243.264.812	99,8			
2.23.002.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		2.586.635.750			2.580.484.339	99,76			
2.23.002.1.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		103.100.000	Jumlah Layanan Perpustakaan elektronik yang dikembangkan	2 perpustakaan	103.063.950	99,96	0 perpustakaan	100	
				Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dilakukan Pemeliharaan	1 1			1 1	100	
2.23.002.1.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi		1.527.122.000	Terfasilitasi pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah, Provinsi	1 Bangunan	1.526.377.539	99,95	1 Bangunan	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
2.23.002.1.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi		109.250.000	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	3 Eksemplar	109.070.000	99,84	3 Eksemplar	100	
2.23.002.1.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		176.946.025	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustakaan	176.946.025	100	30 Perpustakaan	100	
2.23.002.1.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi		98.042.725	Terselenggaranya Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	15 Orang	94.132.725	96,01	15 Orang	100	
2.23.002.1.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi		155.300.000	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan Tingkat Daerah dan Provinsi	60 Orang	154.059.200	99,2	60 Orang	100	
2.23.002.1.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		225.075.000	Terfasilitasi Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	3 Kegiatan	225.075.000	100	3 Kegiatan	100	
2.23.002.1.01.08	Pengembangan Perpustakaan Deposit		111.490.000	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	111.470.000	99,98	1 Perpustakaan	100	
2.23.002.1.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi		80.310.000	Jumlah Data dan informasi si Perpustakaan	3 dokumen	80.289.900	99,98	3 dokumen	100	
2.23.002.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi		663.126.475			662.780.473	99,95			
2.23.002.1.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		529.054.975	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	10 LOKUS	528.708.973	99,93	2 LOKUS	-	
2.23.002.1.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		134.071.500	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	2 perpustakaan	134.071.500	100	2 perpustakaan	100	
2.23.003	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN MASKAH KUNO		100.450.000			100.430.000	99,98			
2.23.003.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		100.450.000			100.430.000	99,98			
2.23.003.1.04.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		100.450.000	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	200 Eksemplar	100.430.000	99,98	200 Eksemplar	100	
2.24.002	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		246.735.850			240.735.850	97,57			
2.24.002.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi		246.735.850			240.735.850	97,57			
2.24.002.1.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		246.735.850	Terciptanya Penggunaan arsip Dinamis	1 Arsip	240.735.850	97,57	1 Arsip	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
2.24.003	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		730.114.495			723.129.735	99,04			
2.24.003.1.01	Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun		130.140.925			130.140.925	100			
2.24.003.1.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Seoulubuh Tahun)		130.140.925	Terciptanya Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan	1000 Lembar	130.140.925	100	1000 Lembar	100	
2.24.003.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota		149.972.810			149.092.250	99,41			
2.24.003.1.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi		149.972.810	Tersedianya Jumlah Arsip Kartografi/Peta yang di data dan diselamatkan	100 Lembar	149.092.250	99,41	100 Lembar	100	
2.24.003.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsifan Provinsi		450.000.760			443.896.560	98,64			
2.24.003.1.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		199.987.520	Terfasilitasnya Tenaga Fungsional Arsiparis	8 Orang	199.231.520	99,62	8 Orang	100	
2.24.003.1.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		250.013.240	Jumlah Tenaga Fungsional/Operator Aplikasi SRIKANDI	6 Orang	244.665.040	97,86	6 Orang	100	
2.24.004	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP		523.623.600			517.712.900	98,87			
2.24.004.1.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi		523.623.600			517.712.900	98,87			
2.24.004.1.01.01	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		523.623.600	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan di tingkat Provinsi/Kabupaten	21 Unit	517.712.900	98,87	21 Unit	100	
	JUMLAH		190.112.311.998			176.973.016.868	93,09			
1.02.0-00.00.01.1000	Dinas Kesehatan		107.289.932.304			93.067.056.954	86,74			
1.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		51.449.927.600			40.557.338.334	78,83			
1.02.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		44.728.537.600			34.248.072.937	76,57			
1.02.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		44.728.537.600	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan	34.248.072.937	76,57	76.57 Orang/ Bulan	76,57	
1.02.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.643.470.000			3.234.014.537	88,76			
1.02.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2.054.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 paket	1.645.583.568	80,12	80.12 paket	80,12	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR	
						KEU		KELUARAN			
						Rp	%	(K)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1.02.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		725.270.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 paket	725.148.868	99,98	99,98	99,98	99,98	
1.02.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		211.700.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 paket	211.680.085	99,99	99,99	99,99	99,99	
1.02.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		652.500.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	651.602.016	99,86	99,86	99,86	99,86	
1.02.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.727.920.000			2.727.869.325	100				
1.02.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2.727.920.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 laporan	2.727.869.325	100		94,3	94,3	
1.02.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		350.000.000			347.381.535	99,25				
1.02.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		350.000.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100 unit	347.381.535	99,25		99,25	99,25	
1.02.002	PROGRAM PENUNJANG UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		45.157.622.364			42.238.834.585	93,54				
1.02.002.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		18.011.818.766	Pengadaan bahan bahan reagensia kimia untuk menunjang pemeriksaan	0 reagensia	17.925.840.999	99,52		0 reagensia	-	
				Fasilitas pendukung kinerja pemeriksaan	0 barang				0 barang	-	
1.02.002.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		1.500.000.000	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0 unit	1.495.238.513	99,68		99,68	99,68	
				Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0 unit				99,68	99,68	
1.02.002.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit		250.000.540	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1.000	5 Unit	249.933.350	99,97		99,97	99,97	1.999,4

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
				Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	5 Unit			99,97 Unit	1.999,4	
1.02.002.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan		7.255.014.431	Pengadaan bahan kimia untuk menunjang pemeriksaan	100 Tahun	7.219.032.599	99,5	99,5 Tahun	99,5	
				Pengadaan bahan kimia untuk menunjang pemeriksaan	100 Tahun			99,5 Tahun	99,5	
1.02.002.1.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan		4.652.281.936	Jumlah Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	100 Unit	4.618.343.075	99,27	99,27 Unit	99,27	
				Jumlah Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	100 Unit			99,27 Unit	99,27	
1.02.002.1.01.20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		175.699.795	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	100 unit	175.541.795	99,91	99,91 unit	99,91	
				Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	100 unit			99,91 unit	99,91	
1.02.002.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		796.958.000	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	0 Dokumen	787.757.710	98,85	98,85 Dokumen	-	
				Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	0 Dokumen			98,85 Dokumen	-	
1.02.002.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		3.381.864.064	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0 paket	3.379.993.957	99,94	99,94 paket	-	
				Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0 paket			99,94 paket	-	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR	
						KEU		KELUARAN			
						Rp	%	(K)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1.02.002.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		21.422.474.506				19.318.022.587	90,18			
1.02.002.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		1.292.106.505	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	0 Orang	1.290.771.249	99,9	99,9	99,9 Orang	-	
1.02.002.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		5.856.202.759	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	100 Dokumen	4.655.132.046	79,49	79,49	100 Dokumen	79,49	
1.02.002.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		1.482.933.864	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	1.052.801.138	70,99	70,99	100 Dokumen	70,99	
1.02.002.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		56.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Dokumen	55.862.624	99,75	99,75	100 Dokumen	99,75	
1.02.002.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		194.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100 Dokumen	191.871.348	98,9	98,9	100 Dokumen	98,9	
1.02.002.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		612.430.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100 Dokumen	198.840.000	32,47	32,47	100 Dokumen	32,47	
1.02.002.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		495.200.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	100 Dokumen	494.494.490	99,86	99,86	100 Dokumen	99,86	
1.02.002.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		5.216.815.918	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Dokumen	5.212.419.767	99,92	99,92	100 Dokumen	99,92	
1.02.002.1.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji		29.979.785	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	100 Dokumen	29.938.346	99,86	99,86	100 Dokumen	99,86	
1.02.002.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		3.459.801.100	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 Dokumen	3.455.409.726	99,87	99,87	100 Dokumen	99,87	
1.02.002.1.02.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		302.400.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	302.400.000	100	100	100 Dokumen	-	
1.02.002.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota		1.767.904.575	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	100 Dokumen	1.729.215.810	97,81	97,81	100 Dokumen	97,81	
1.02.002.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		656.700.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	100 Dokumen	648.866.043	98,81	98,81	100 Dokumen	98,81	
1.02.002.1.03	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		681.487.547			661.052.803	97	97			
1.02.002.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		681.487.547	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100 dokumen	661.052.803	97	97	97 dokumen	97	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR	
						KEU		KELUARAN			
						Rp	%	(K)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1.02.002.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		5.041.841.545				4.333.918.196	85,96			
1.02.002.1.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit		4.817.542.000	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	0 Unit		4.110.545.096	85,32	85,32 Unit	-	
1.02.002.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		224.299.545	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	0 Unit		223.373.100	99,59	99,59 Unit	-	
1.02.003	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		8.306.372.290				8.245.703.412	99,27			
1.02.003.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		7.681.772.290				7.622.631.002	99,23			
1.02.003.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		7.681.772.290	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Easvankes)	300 Orang		7.622.631.002	99,23	99,23 Orang	33,08	
1.02.003.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		624.600.000				623.072.410	99,76			
1.02.003.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		624.600.000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	0 Orang		623.072.410	99,76	99,76 Orang	-	
1.02.004	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		452.210.330				451.758.970	99,9			
1.02.004.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		452.210.330				451.758.970	99,9			
1.02.004.1.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK		222.210.330	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	0 Sarana		221.978.440	99,9	99,9 Sarana	-	
1.02.004.1.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik		230.000.000	Jumlah Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	0 Dokumen		229.780.530	99,9	99,9 Dokumen	-	
1.02.005	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		1.923.799.720				1.573.421.653	81,79			
1.02.005.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Mitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		73.800.000				73.000.000	98,92			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
1.02.005.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Mitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		73.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Mitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	0 Dokumen	73.000.000	98,92	98,92	Dokumen	-
1.02.005.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi		1.600.000.000			1.250.619.653	78,16			
1.02.005.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		1.600.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0 Dokumen	1.250.619.653	78,16	78,16	Dokumen	-
1.02.005.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi		249.999.720			249.802.000	99,92			
1.02.005.1.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM		249.999.720	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	0 Dokumen	249.802.000	99,92	99,92	Dokumen	-
	JUMLAH		107.289.932.304			93.067.056.954	86,74			
1.02.0-00.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura		268.698.905.129			252.255.017.980	93,88			
1.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		127.561.834.500			112.880.416.981	88,49			
1.02.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		107.703.834.500			93.071.816.573	86,41			
1.02.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		107.703.834.500	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	734 Orang/ Bulan	93.071.816.573	86,41	86,41	734 Orang/ Bulan	100
1.02.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.618.500.000			1.618.020.081	99,97			
1.02.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	99.771.500	99,77	99,77	1 Paket	100
1.02.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		720.000.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	719.978.700	100	100	3 Paket	100
1.02.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		798.500.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	798.269.881	99,97	99,97	1 Laporan	100
1.02.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		16.987.520.000			16.951.173.912	99,79			
1.02.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		8.412.520.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	8.393.153.455	99,77	99,77	5 Laporan	100
1.02.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		8.575.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	8.558.020.457	99,8	99,8	2 Laporan	100

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR	
						KEU		KELUARAN			
						Rp	%	(K)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1.02.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.251.980.000				1.239.406.415	99			
1.02.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1.126.980.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Laporan	1.114.446.165	98,89	3 Laporan	100		
1.02.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		125.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Paket	124.960.250	99,97	2 Paket	100		
1.02.001.1.14	Facilitasi Keprotokolan		-			-	-	0 Laporan	-		
1.02.001.1.14.01	Facilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		-	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0 Laporan	-	-	0 Laporan	-		
1.02.002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		140.637.070.629			138.874.689.939	98,75				
1.02.002.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		138.373.070.629			136.610.954.284	98,73				
1.02.002.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		26.560.540.000	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	25.330.378.278	95,37	1 Unit	100		
1.02.002.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		2.500.000.000	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	4 Paket	2.499.332.000	99,97	4 Paket	100		
1.02.002.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		80.292.651.569	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	22 Unit	79.898.007.823	99,51	22 Unit	100		
1.02.002.1.01.12	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan		2.138.000.000	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	5 Paket	2.134.127.875	99,82	5 Paket	100		
1.02.002.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)		8.810.000.000	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	6 Paket	8.785.370.784	99,72	6 Paket	100		
1.02.002.1.01.16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit		450.000.000	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	3 Paket	449.928.145	99,98	3 Paket	100		
1.02.002.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		1.850.000.000	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	8 Paket	1.744.691.430	94,31	7 Paket	87,5		
1.02.002.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		15.771.879.060	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Kegiatan	15.769.117.949	99,98	4 Kegiatan	100		
1.02.002.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		260.000.000			259.993.091	100				

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
1.02.002.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		260.000.000			259.993.091	100			
1.02.002.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		2.004.000.000			2.003.742.564	99,99			
1.02.002.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		1.900.000.000	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinasnya	2 Kegiatan	1.899.742.564	99,99	2 Kegiatan	100	
1.02.002.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		104.000.000	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	2 Kegiatan	104.000.000	100	2 Kegiatan	100	
1.02.003	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		500.000.000			499.911.060	99,98			
1.02.003.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		500.000.000			499.911.060	99,98			
1.02.003.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		500.000.000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	20 Orang	499.911.060	99,98	20 Orang	100	
	JUMLAH		268.698.905.129			252.255.017.980	93,88			
1.02.0-00.0-00.02.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura (BLUD)		79.168.604.598			-	-			
1.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		79.168.604.598			-	-			
1.02.001.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		79.168.604.598			-	-			
1.02.001.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		79.168.604.598	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	20 Unit Kerja	-	-	0 Unit Kerja	-	
	JUMLAH		79.168.604.598			-	-			
1.02.0-00.0-00.03.0000	Rumah Sakit Jiwa		40.819.471.619			39.588.313.432	96,98			
1.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		26.078.178.599			24.849.968.192	95,29			
1.02.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		459.725.000			459.718.260	100			
1.02.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		125.000.000			125.000.000	100			
1.02.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		70.000.000			70.000.000	100			
1.02.001.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		75.000.000			75.000.000	100			
1.02.001.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		19.000.000			19.000.000	100			
1.02.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		170.725.000			170.718.260	100			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
1.02.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		18.869.719.449			17.722.841.508	93,92			
1.02.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		18.749.219.449			17.604.053.360	93,89			
1.02.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		22.500.000			22.500.000	100			
1.02.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran/SKPD		98.000.000			96.288.148	98,25			
1.02.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-			-	-			
1.02.001.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		-			-	-			
1.02.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		500.000.000			498.231.930	99,65			
1.02.001.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		500.000.000			498.231.930	99,65			
1.02.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.696.893.650			1.645.368.000	96,96			
1.02.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		200.000.000			199.972.300	99,99			
1.02.001.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		168.811.650			168.800.000	99,99			
1.02.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		345.600.000			345.595.600	100			
1.02.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		130.477.000			130.474.100	100			
1.02.001.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material		562.040.000			560.926.000	99,8			
1.02.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		289.965.000			239.600.000	82,63			
1.02.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		840.000.000			840.000.000	100			
1.02.001.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		840.000.000			840.000.000	100			
1.02.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.261.840.500			3.257.775.494	99,88			
1.02.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		36.000.000			36.000.000	100			
1.02.001.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.825.840.500			1.821.775.494	99,78			
1.02.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.400.000.000			1.400.000.000	100			
1.02.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		450.000.000			426.033.000	94,67			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
1.02.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		300.000.000			300.000.000	100			
1.02.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100.000.000			76.093.500	76,09			
1.02.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		50.000.000			49.939.500	99,88			
1.02.002	PROGRAM PEMENUJIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		10.943.793.020			10.940.845.240	99,97			
1.02.002.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		1.640.000.000			1.639.757.698	99,99			
1.02.002.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		1.290.000.000			1.289.969.000	100			
1.02.002.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)		350.000.000			349.788.698	99,94			
1.02.002.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		9.053.793.020			9.051.092.492	99,97			
1.02.002.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		697.293.020			696.776.188	99,93			
1.02.002.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1.122.500.000			1.120.520.045	99,82			
1.02.002.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		2.060.000.000			2.059.962.872	100			
1.02.002.1.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		3.000.000.000			2.999.934.479	100			
1.02.002.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		1.974.000.000			1.973.898.908	99,99			
1.02.002.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		200.000.000			200.000.000	100			
1.02.002.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		200.000.000			199.995.050	100			
1.02.002.1.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		200.000.000			199.995.050	100			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
1.02.002.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		50.000.000			50.000.000	100			
1.02.002.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		50.000.000			50.000.000	100			
1.02.003	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA		3.797.500.000			3.797.500.000	100			
1.02.003.1.01	MANAJEMEN KESEHATAN		3.797.500.000			3.797.500.000	100			
1.02.003.1.01.01	Perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		3.797.500.000			3.797.500.000	100			
1.02.003.1.01.01	Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		3.797.500.000			3.797.500.000	100			
	JUMLAH		40.819.471.619			39.588.313.432	96,98			
1-02.0-00.0-00.04.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura		126.573.025.795			114.604.799.808	90,54			
1.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		89.028.439.755			78.879.792.800	88,6			
1.02.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		77.238.439.755			67.590.463.667	87,51			
1.02.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		77.238.439.755			67.590.463.667	87,51			
1.02.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		4.700.000.000			4.370.448.753	92,99			
1.02.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.000.000.000			995.243.760	99,52			
1.02.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Perencanaan		700.000.000			696.821.904	99,55			
1.02.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3.000.000.000			2.678.383.089	89,28			
1.02.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.850.000.000			3.696.882.866	96,02			
1.02.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		200.000.000			199.718.900	99,86			
1.02.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3.650.000.000			3.497.163.966	95,81			
1.02.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.240.000.000			3.221.997.514	99,44			
1.02.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		240.000.000			239.961.424	99,98			
1.02.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		3.000.000.000			2.982.036.090	99,4			
1.02.002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		30.044.586.040			29.040.097.511	96,66			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
1.02.002.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		29.044.586.040			28.045.417.501	96,56			
1.02.002.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		4.500.000.000			4.112.803.867	91,4			
1.02.002.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		10.000.000.000			9.996.334.053	99,96			
1.02.002.1.01.16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit		4.330.000.000			4.242.944.703	97,99			
1.02.002.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		10.214.586.040			9.693.334.879	94,9			
1.02.002.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		1.000.000.000			994.680.010	99,47			
1.02.002.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		1.000.000.000			994.680.010	99,47			
1.02.003	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		7.500.000.000			6.684.909.497	89,13			
1.02.003.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKP Provinsi		7.500.000.000			6.684.909.497	89,13			
1.02.003.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		7.500.000.000			6.684.909.497	89,13			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	JUMLAH		126.573.025.795			114.604.799.808	90,54			
1-02.0-00.00.04.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura (BLUD)		96.611.351.519			-	-			
1.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		96.611.351.519			-	-			
1.02.001.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		96.611.351.519			-	-			
1.02.001.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		96.611.351.519	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	-	-	0 Unit Kerja	-	
	JUMLAH		96.611.351.519			-	-			
1-03.1-04.0-00.01.1.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		858.296.980.760			710.445.999.182	82,77			
1.03.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		69.828.391.100			64.941.382.582	93			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
1.03.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.200.000.206			1.153.333.080	96,11			
1.03.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-			-	-			
1.03.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		700.000.096			653.860.300	93,41			
1.03.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		500.000.110			499.472.780	99,89			
1.03.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		50.330.388.680			46.479.525.811	92,35			
1.03.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		49.457.188.300	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan	45.611.855.156	92,22	0 Orang/ Bulan	-	
1.03.001.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		573.200.220			572.573.550	99,89			
1.03.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		150.000.135			145.758.295	97,17			
1.03.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD		150.000.025			149.338.810	99,56			
1.03.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1.420.732.147			1.404.765.799	98,88			
1.03.001.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1.420.732.147	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	1.404.765.799	98,88	0 Laporan	-	
1.03.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		700.000.110			695.666.000	99,38			
1.03.001.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		700.000.110			695.666.000	99,38			
1.03.001.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		-			-	-			
1.03.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		11.799.249.957			10.892.968.357	92,32			
1.03.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		500.000.000			499.790.600	99,96			
1.03.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.099.999.957			1.096.665.200	99,7			
1.03.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		50.000.000			50.000.000	100			
1.03.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		200.000.000			199.999.000	100			
1.03.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		9.949.250.000			9.046.513.557	90,93			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
1.03.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		91.200.000			82.800.000	90,79			
1.03.001.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Papua	91.200.000			82.800.000	90,79			
1.03.001.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-			-	-			
1.03.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.661.740.535			3.661.740.535	99,32			
1.03.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100.000.000			100.000.000	100			
1.03.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1.035.000.000			1.017.928.535	98,35			
1.03.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2.551.820.000			2.543.812.000	99,69			
1.03.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		600.000.000			570.583.000	95,1			
1.03.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		600.000.000			570.583.000	95,1			
1.03.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-			-	-			
1.03.002	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		41.077.122.820			40.144.388.493	97,73			
1.03.002.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/kota		41.077.122.820			40.144.388.493	97,73			
1.03.002.1.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai		820.672.000			813.940.590	99,18			
1.03.002.1.01.12	Pembangunan Kanal Banjir		40.256.450.820			39.330.447.903	97,7			
1.03.002.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/kota		-			-	-			
1.03.002.1.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		-			-	-			
1.03.002.1.02.16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa		-			-	-			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
1.03.002.1.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		-			-	-			(11)
1.03.003	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		88.289.688.685			67.275.670.055	76,2			
1.03.003.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		88.289.688.685			67.275.670.055	76,2			
1.03.003.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		1.969.872.000	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	0 Dokumen	1.952.921.000	99,14	0 Dokumen	-	
1.03.003.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan		81.319.816.685	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	0 Liter/Detik	61.551.781.540	75,69	0 Liter/Detik	-	
1.03.003.1.01.09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota		5.000.000.000			3.770.967.515	75,42			
1.03.008	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		17.610.802.000			17.383.442.700	98,71			
1.03.008.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		17.610.802.000			17.383.442.700	98,71			
1.03.008.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Provinsi Papua	17.610.802.000			17.383.442.700	98,71			
1.03.010	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		619.749.520.155			501.281.192.302	80,88			
1.03.010.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		619.749.520.155			501.281.192.302	80,88			
1.03.010.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		9.737.608.000	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2 Dokumen	9.202.467.952	94,5	0 Dokumen	-	
1.03.010.1.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan		12.600.000.000			12.600.000.000	100			
1.03.010.1.01.05	Pembangunan Jalan		223.843.485.505	Panjang Jalan yang Dibangun	0 KM	178.524.050.208	79,75	0 KM	-	
1.03.010.1.01.08	Rekonstruksi Jalan		253.213.226.567	Panjang Jalan yang Dibangun Rekonstruksi Jalan	0 KM	209.177.018.596	82,61	0 KM	-	
1.03.010.1.01.09	Rehabilitasi Jalan		73.768.595.959	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0 KM	67.068.223.522	90,92	0 KM	-	
1.03.010.1.01.12	Pembangunan Jembatan		46.586.604.124	Panjang Jembatan yang Dibangun	0 M	24.709.432.023	53,04	0 M	-	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
1.03.011	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		7.850.000.000			7.774.829.085	99,04			
1.03.011.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		7.850.000.000			7.774.829.085	99,04			
1.03.011.1.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		4.450.000.000	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Melakukan Pelatihan	0 Orang	4.418.544.770	99,29	0 Orang	-	
1.03.011.1.01.05	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi		3.400.000.000	Jumlah Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	0 Dokumen	3.356.284.315	98,71	0 Dokumen	-	
1.04.003	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		400.000.000			199.630.000	49,91			
1.04.003.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		400.000.000			199.630.000	49,91			
1.04.003.1.02.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Perumagan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		200.000.000			199.630.000	99,82			
1.04.003.1.02.07	Pelaksanaan Pembangunan Perumahan/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		200.000.000			-	-			
1.04.005	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS LUMUM (PSU)		13.491.456.000			11.445.463.966	84,83			
1.04.005.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		13.491.456.000			11.445.463.966	84,83			
1.04.005.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		943.344.000			905.918.000	96,03			
1.04.005.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman		12.548.112.000	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	0 Unit Rumah	10.539.545.966	83,99	0 Unit Rumah	-	
	JUMLAH		858.296.980.760			710.445.999.182	82,77			
1-05.0-00.0-00.01.1000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah		34.329.753.918			30.565.038.884	89,03			
1.05.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Provinsi		25.804.282.800			22.058.229.627	85,48			
1.05.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		191.482.900			191.202.650	99,85			
1.05.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		98.229.760	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Laporan	98.175.000	99,94	7 Laporan	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
1.05.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		13.630.190	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13.574.000	99,59	1 Dokumen	100	
1.05.001.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		11.336.550	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11.336.550	100	1 Dokumen	100	
1.05.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		68.286.400	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	68.117.100	99,75	3 Dokumen	100	
1.05.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		16.944.202.150			16.555.569.618	97,71			
1.05.001.1.02.01	Penyediaan Gejri dan Tunjangan ASN		16.875.183.800	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang	16.486.624.618	97,7	138 Orang	100	
1.05.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		37.945.900	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	37.945.000	100	1 Laporan	100	
1.05.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		31.072.450	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	31.000.000	99,77	2 Laporan	100	
1.05.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		351.000.000			350.730.000	99,92			
1.05.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		351.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	350.730.000	99,92	6 Orang	100	
1.05.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.206.241.400			3.105.947.160	96,87			
1.05.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		7.441.400	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.400.000	99,44	2 Paket	100	
1.05.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		136.000.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	36.000.000	26,47	1 Paket	50	
1.05.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.000.000	100	12 Paket	100	
1.05.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		127.800.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	127.786.450	99,99	6 Paket	100	
1.05.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		21.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	21.000.000	100	3 Dokumen	25	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
1.05.001.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material		150.000.000	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	150.000.000	100	2 Paket	100	
1.05.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		860.000.000	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	859.905.000	99,99	2 Laporan	100	
1.05.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.892.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69 Laporan	1.891.855.710	99,99	69 Laporan	100	
1.05.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.110.000.000			-	-			
1.05.001.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		3.110.000.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	-	-	0 unit	-	
1.05.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		526.719.000			414.168.849	78,63			
1.05.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		421.099.000	Jumlah Koordinasi dan tersedia air untuk kebutuhan Kantor dan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	310.588.849	73,76	1 Tahun	100	
1.05.001.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		105.620.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	103.580.000	98,07	2 Laporan	100	
1.05.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.474.637.350			1.440.611.350	97,69			
1.05.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		529.937.350	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	40 unit	501.232.350	94,58	40 unit	100	
1.05.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		794.700.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	789.379.000	99,33	21 unit	100	
1.05.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		150.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	150.000.000	100	2 unit	100	
1.05.002	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN JUMUD		4.124.905.000			4.107.867.585	99,59			
1.05.002.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		3.120.205.000			3.112.627.685	99,76			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI			TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)	
						KEU		KELUARAN (K) (9)		
						Rp (7)	% (8)			% (10)
1.05.002.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		451.605.000	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	4 Laporan	451.605.000	100	4 Laporan	100	
1.05.002.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		298.950.000	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2 Laporan	291.736.000	97,59	2 Laporan	100	
1.05.002.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		2.093.901.300	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3 Dokumen	2.093.639.965	99,99	3 Dokumen	100	
1.05.002.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum		275.748.700	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	1 Laporan	275.646.720	99,96	1 Laporan	100	
1.05.002.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		1.004.700.000			995.239.900	99,06			
1.05.002.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		350.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Laporan	341.683.350	97,62	1 Laporan	100	
1.05.002.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		654.700.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Laporan	653.556.550	99,83	1 Laporan	100	
1.05.003	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		3.900.566.118			3.898.989.145	99,96			
1.05.003.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		1.100.000.000			1.099.917.357	99,99			
1.05.003.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)		1.100.000.000	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	40 Orang	1.099.917.357	99,99	40 Orang	100	
1.05.003.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		500.500.000			500.400.001	99,98			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
1.05.003.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		200.000.000	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	60 Orang	199.900.001	99,95	60 Orang	100	
1.05.003.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana		300.500.000	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	50 Orang	300.500.000	100	50 Orang	100	
1.05.003.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		1.000.000.000			998.982.409	99,9			
1.05.003.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana									
1.05.003.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		1.000.000.000	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi	500 Orang	998.982.409	99,9	500 Orang	100	
1.05.003.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		1.300.066.118			1.299.689.378	99,97			
1.05.003.1.04.03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kermitraan dalam Penanggulangan Bencana		218.553.350	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kermitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen	218.532.100	99,99	1 Dokumen	100	
1.05.003.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi		350.000.000	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	349.947.610	99,98	1 Laporan	100	
1.05.003.1.04.06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		200.000.000	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60 keluarga	200.000.000	100	60 keluarga	100	
1.05.003.1.04.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi		531.512.768	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang	2 Dokumen	531.209.668	99,94	2 Dokumen	100	
1.05.004	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		500.000.000			499.952.527	99,99			
1.05.004.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		500.000.000			499.952.527	99,99			
1.05.004.1.01.03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota		500.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	499.952.527	99,99	1 Laporan	100	
			34.329.753.918	JUMLAH		30.565.038.884	89,03			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
1-06-2-08.2-12.01.1000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		45.301.434.190			42.464.871.061	93,74			(11)
1.06.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		35.852.471.320			33.132.715.384	92,41			
1.06.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		243.994.115			243.988.390	100			
1.06.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		45.163.450	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	5 Dokumen	45.163.450	100	5 Dokumen	100	
1.06.001.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		45.163.450	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	5 Dokumen	45.163.450	100	5 Dokumen	100	
1.06.001.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		53.261.425	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	5 Dokumen	53.261.425	100	5 Dokumen	100	
1.06.001.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		41.695.725	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	5 Dokumen	41.690.000	99,99	5 Dokumen	100	
1.06.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		58.710.065	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	5 Dokumen	58.710.065	100	5 Dokumen	100	
1.06.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		26.778.163.900			24.173.347.607	90,27			
1.06.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		26.778.163.900	Jumlah Aparatur yang mendapatkan	201 Orang	24.173.347.607	90,27	201 Orang	100	
1.06.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		482.400.000			481.026.400	99,72			
1.06.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		242.400.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	201 Pasang	241.026.400	99,43	201 Pasang	100	
1.06.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		240.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	240.000.000	100	5 Orang	100	
1.06.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.469.094.305			2.465.533.583	99,86			
1.06.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		310.315.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	0 Paket	307.790.000	99,19	0 Paket	-	
1.06.001.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material		149.809.305	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	148.866.000	99,37	1 Paket	100	
1.06.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		252.000.000	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	252.000.000	100	1 Laporan	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
1.06.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.756.970.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44 Laporan	1.756.877.583	99,99	44 Laporan	100	
1.06.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		260.500.000			259.500.000	99,62			
1.06.001.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		260.500.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	9 Unit	259.500.000	99,62	9 Unit	100	
1.06.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.091.339.000			1.004.398.904	92,03			
1.06.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12.495.000	99,96	1 Laporan	100	
1.06.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		757.472.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	670.536.904	88,52	3 Laporan	100	
1.06.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		321.367.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	8 Laporan	321.367.000	100	8 Laporan	100	
1.06.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.526.980.000			4.504.920.500	99,51			
1.06.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		512.420.000	Jumlah Kendaraan Dinas Atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 Unit	510.150.000	99,56	9 Unit	100	
1.06.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		14.560.000	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	14.560.000	100	17 Unit	100	
1.06.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		4.000.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	3.980.210.500	99,51	4 Unit	100	
1.06.002	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		793.559.197			793.559.197	100			
1.06.002.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		793.559.197			793.559.197	100			
1.06.002.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi		131.159.747	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi Yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang	131.159.747	100	60 Orang	100	
1.06.002.1.02.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi		500.144.490	Jumlah Keluarga yang meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	30 Keluarga	500.144.490	100	30 Keluarga	100	
1.06.002.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi		162.254.960	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 Lembaga	162.254.960	100	10 Lembaga	100	
1.06.004	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		3.157.228.127			3.139.079.350	99,43			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
1.06.004.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar di dalam Panti		692.035.177			684.033.850	98,84			(11)
1.06.004.1.01.01	Penyediaan Permakaman		248.375.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakaman Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	18 Orang	245.718.000	98,93	18 Orang	100	
1.06.004.1.01.02	Penyediaan Sandang		120.000.000	Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	18 Orang	118.200.000	98,5	18 Orang	100	
1.06.004.1.01.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		100.010.177	Jumlah orang yang terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	18 Orang	97.600.000	97,59	18 Orang	100	
1.06.004.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		24.000.000	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental dan Spiritual Kewenangan Provinsi	18 Orang	24.000.000	100	18 Orang	100	
1.06.004.1.01.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari		50.000.000	Jumlah Peserta Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari hari Kewenangan Provinsi	18 Orang	50.000.000	100	18 Orang	100	
1.06.004.1.01.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar		149.650.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	18 Dokumen	148.515.850	99,24	18 Dokumen	100	
1.06.004.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar TerAntar di dalam Panti		424.916.930			424.910.000	100			
1.06.004.1.02.04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		45.216.930	Jumlah orang yang terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	17 Orang	45.210.000	99,98	17 Orang	100	
1.06.004.1.02.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerAntar di dalam Panti		379.700.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen	379.700.000	100	1 Dokumen	100	
1.06.004.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		1.690.276.020			1.681.935.500	99,51			
1.06.004.1.03.01	Penyediaan Permakaman		1.324.750.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakaman sesuai dengan Standar Gizi minimal Kewenangan Provinsi	38 Orang	1.317.012.000	99,42	38 Orang	100	
1.06.004.1.03.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		147.326.020	Jumlah orang yang terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	38 Orang	146.723.500	99,59	38 Orang	100	
1.06.004.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial		64.200.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	38 Orang	64.200.000	100	38 Orang	100	
1.06.004.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		24.000.000	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental dan Spiritual Kewenangan Provinsi	38 Orang	24.000.000	100	38 Orang	100	
1.06.004.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari		50.000.000	Jumlah Peserta Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari hari Kewenangan Provinsi	38 Orang	50.000.000	100	38 Orang	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
1.06.004.1.03.12	Pemulasaraan		80.000.000	Jumlah Pemulasaran Kewenangan Provinsi	3	80.000.000	100	3	100	
1.06.004.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti		350.000.000			348.200.000	99,49			
1.06.004.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		350.000.000	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental dan Spiritual kewenangan Provinsi	20 Orang	348.200.000	99,49	20 Orang	100	
1.06.005	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		878.607.560			876.097.560	99,71			
1.06.005.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		878.607.560			876.097.560	99,71			
1.06.005.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		375.807.560	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	30 Keluarga	374.307.560	99,6	30 Keluarga	100	
1.06.005.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota		502.800.000	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/ Kota	36 Keluarga	501.790.000	99,8	36 Keluarga	100	
1.06.006	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		1.182.886.496			1.180.886.080	99,83			
1.06.006.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		1.182.886.496			1.180.886.080	99,83			
1.06.006.1.01.01	Penyediaan Permakanan		497.334.016	Jumlah Pengungsi yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	256 Orang	495.360.000	99,6	256 Orang	100	
1.06.006.1.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		685.552.480	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan provinsi	33 Orang	685.526.080	100	33 Orang	100	
2.08.002	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		500.000.950			500.000.950	100			
2.08.002.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		200.000.950			200.000.950	100			
2.08.002.1.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi		200.000.950	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	3 OPD	200.000.950	100	3 OPD	100	
2.08.002.1.02	Pemberdayaan Perempuuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi		150.000.000			150.000.000	100			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
2.08.002.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		150.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	150.000.000	100	2 Dokumen	100	
2.08.002.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		150.000.000			150.000.000	100			
2.08.003.1.01.03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		150.000.000	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang tersedia	3 Dokumen	150.000.000	100	3 Dokumen	100	
2.08.003	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		674.540.185			585.007.185	86,73			
2.08.003.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		260.000.000			260.000.000	100			
2.08.003.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		260.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	260.000.000	100	5 Dokumen	100	
2.08.003.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		89.533.000				-			
2.08.003.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		89.533.000	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan	70 Orang		-	70 Orang	100	
2.08.003.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		325.007.185			325.007.185	100			
2.08.003.1.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi		177.157.370	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	50 Orang	177.157.370	100	50 Orang	100	
2.08.003.1.03.04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		147.849.815	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	147.849.815	100	5 Dokumen	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR		
						KEU		KELUARAN				
						Rp	%	(K)	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
2.08.004	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		125.000.000				125.000.000	100				
2.08.004.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		125.000.000				125.000.000	100				
2.08.004.1.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi		125.000.000	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang tersedia	5 Dokumen		125.000.000	100	5 Dokumen	100		
2.08.006	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		268.103.720				268.103.720	100				
2.08.006.1.01	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		124.954.530				124.954.530	100				
2.08.006.1.01.01	Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		124.954.530	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi dan Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	30 Organisasi		124.954.530	100	30 Organisasi	100		
2.08.006.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		143.149.190				143.149.190	100				
2.08.006.1.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		143.149.190	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	35 Orang		143.149.190	100	35 Orang	100		
2.08.007	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		411.907.275				408.702.275	99,22				
2.08.007.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		126.440.275				126.440.275	100				
2.08.007.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		126.440.275	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi	5 Dokumen		126.440.275	100	5 Dokumen	100		
2.08.007.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		220.705.000				217.500.000	98,55				
2.08.007.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		220.705.000	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pergaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	7 Layanan		217.500.000	98,55	7 Layanan	100		

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR		
						KEU		KELUARAN				
						Rp	%	(K)	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
2.08.007.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		64.762.000				64.762.000	100				
2.08.007.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		64.762.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	64.762.000	100	5 Dokumen	100			
2.12.002	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		295.600.000				295.600.000	100				
2.12.002.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		295.600.000				295.600.000	100				
2.12.002.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk		295.600.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	5 Laporan	295.600.000	100	5 Laporan	100			
2.12.003	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		321.300.000				321.300.000	100				
2.12.003.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil		210.500.000				210.500.000	100				
2.12.003.1.01.05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Admnduk terkait Pencatatan Sipil		210.500.000	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Admnduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	5 Dokumen	210.500.000	100	5 Dokumen	100			
2.12.003.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		110.800.000				110.800.000	100				
2.12.003.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil		110.800.000	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	5 Laporan	110.800.000	100	5 Laporan	100			
2.12.004	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		705.219.360				705.219.360	100				
2.12.004.1.01	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		216.883.515				216.883.515	100				
2.12.004.1.01.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Admnduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		216.883.515	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Admnduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 Dokumen	216.883.515	100	5 Dokumen	100			
2.12.004.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		288.561.915				288.561.915	100				

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
2.12.004.1.02.02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		288.561.915	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	5 Laporan	288.561.915	100	5 Laporan	100	
2.12.004.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		199.773.930			199.773.930	100			
2.12.004.1.03.02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		199.773.930	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data	4 Orang	199.773.930	100	4 Orang	100	
2.12.005	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		135.010.000			133.600.000	98,96			
2.12.005.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan		135.010.000			133.600.000	98,96			
2.12.005.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		135.010.000	Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	5 Dokumen	133.600.000	98,96	5 Dokumen	100	
	JUMLAH		45.301.434.190			42.464.871.061	93,74			
2-07.2-17.3-30.01.1.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja		52.652.055.105			47.513.240.667	90,24	47.513.240.667	90,24	
2.07.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		37.786.702.441			34.772.916.995	92,02			
2.07.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		37.622.689			37.572.874	99,87			
2.07.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		17.786.979	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen	10 Dokumen	17.737.164	99,72	8 Dokumen	80	
2.07.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		19.835.710	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	19.835.710	100	6 laporan	75	
2.07.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		34.348.218.160			31.387.894.977	91,38			
2.07.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		34.286.702.700	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	284 orang/bulan	31.326.379.517	91,37	284 orang/bulan	100	
2.07.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		35.935.975	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	5 Laporan	35.935.975	100	5 Laporan	100	
2.07.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		25.579.485	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semester an SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semester an	5 Laporan	25.579.485	100	5 Laporan	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
2.07.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.732.597.900			1.732.126.805	99,97			
2.07.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		17.954.700	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	250 Paket	17.938.000	99,91	250 Paket	100	
2.07.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		50.459.400	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	50.459.195	100	1 Paket	100	
2.07.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		31.983.800	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 paket	31.983.800	100	3 paket	100	
2.07.001.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material		156.000.000	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	3 paket	156.000.000	100	3 paket	100	
2.07.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		158.700.000	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	10 laporan	158.699.250	100	10 laporan	100	
2.07.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.317.500.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	1.317.046.560	99,97	15 Laporan	100	
2.07.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		236.804.500			236.721.000	99,96			
2.07.001.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		180.000.000	Jumlah unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	180.000.000	100	0 unit	-	
2.07.001.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		56.804.500	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4 unit	56.721.000	99,85	1 unit	25	
2.07.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		911.523.592			867.634.839	95,19			
2.07.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	-	-	1 laporan	100	
2.07.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		481.923.592	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang disediakan	3 laporan	445.234.839	92,39	3 laporan	100	
2.07.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		429.600.000	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	422.400.000	98,32	1 Laporan	100	
2.07.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		519.935.600			510.966.500	98,28			
2.07.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		397.655.600	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	388.883.500	97,79	5 unit	100	
2.07.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		22.280.000	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10	22.236.000	99,8	10	100	
2.07.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	99.847.000	99,85	2 unit	100	
2.07.003	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		1.499.967.950			1.496.656.450	99,78			
2.07.003.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		1.349.990.670			1.347.040.270	99,78			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
2.07.003.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		1.349.990.670	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	100 Orang	1.347.040.270	99,78	100 Orang	100	
2.07.003.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		149.977.280			149.616.180	99,76			
2.07.003.1.02.01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja		149.977.280	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	2 LPK	149.616.180	99,76	4 LPK	200	
2.07.004	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		200.394.591			198.087.561	98,85			
2.07.004.1.01	Pelayanan Antar-Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		200.394.591			198.087.561	98,85			
2.07.004.1.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja		200.394.591	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditindaklanjuti.Kompetensinya	20 Orang	198.087.561	98,85	20 Orang	100	
2.07.005	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		1.290.192.274			1.259.188.924	97,6			
2.07.005.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota		499.979.874			468.976.524	93,8			
2.07.005.1.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial		300.000.000	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLPK Online	8 Perusahaan	300.000.000	100	10 Perusahaan	125	
2.07.005.1.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		199.979.874	Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan	168.976.524	84,5	1 Laporan	100	
2.07.005.1.02	Percegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		348.780.100			348.780.100	100			
2.07.005.1.02.01	Percegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		348.780.100	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Perkara	348.780.100	100	28 Perkara	140	
2.07.005.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)		441.432.300			441.432.300	100			
2.07.005.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)		441.432.300	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	441.432.300	100	1 Surat Keputusan	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR	
						KEU		KELUARAN			
						Rp	%	(K)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
2.07.006	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		446.072.077				445.919.576	99,97			
2.07.006.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		446.072.077				445.919.576	99,97			
2.07.006.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan		200.818.952	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	50 Perusahaan		200.818.952	100	50 Perusahaan	100	
2.07.006.1.01.03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan		245.253.125	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	50 Perusahaan		245.100.624	99,94	50 Perusahaan	100	
2.17.003	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		406.504.668				385.773.918	94,9			
2.17.003.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		406.504.668				385.773.918	94,9			
2.17.003.1.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat		106.504.995	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KURM dan Masyarakat	3 Dokumen		88.554.995	83,15	3 Dokumen	100	
2.17.003.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel		299.999.673	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	50 Unit Usaha		297.218.923	99,07	6 Unit Usaha	12	
2.17.004	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		459.756.819				459.082.719	99,85			
2.17.004.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		459.756.819				459.082.719	99,85			
2.17.004.1.01.01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi		259.756.819	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	50 Unit Usaha		259.408.819	99,87	76 Unit Usaha	152	
2.17.004.1.01.02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi		200.000.000	Jumlah Koperasi yang dapat dinilai tingkat kesehatannya	50 unit usaha		199.673.900	99,84	0 unit usaha	-	
2.17.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		450.000.000				421.200.000	93,6			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI			TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)	
						KEU		KELUARAN (K) (9)		
						Rp (7)	% (8)			% (10)
2.17.005.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkerjasama bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		450.000.000			421.200.000	93,6			
2.17.005.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkerjasama serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		450.000.000	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkerjasama	100 Orang	421.200.000	93,6	100 Orang	100	
2.17.006	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		740.242.114			652.468.964	88,14			
2.17.006.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		740.242.114			652.468.964	88,14			
2.17.006.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		399.999.340	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan	5 Unit Usaha	312.226.190	78,06	7 Unit Usaha	140	
2.17.006.1.01.03	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		340.242.774	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	150 Keluarga	340.242.774	100	150 Keluarga	100	
2.17.007	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		3.837.970.016			2.878.154.753	74,99			
2.17.007.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Mitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		3.837.970.016			2.878.154.753	74,99			
2.17.007.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penguatan Kemiskinan		2.051.419.016	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penguatan Kemiskinan	130 Unit Usaha	1.393.151.053	67,91	210 Unit Usaha	161,54	
2.17.007.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan		1.786.551.000	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	518 Orang	1.485.003.700	83,12	460 Orang	88,8	
2.17.008	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		398.350.000			308.861.695	77,54			
2.17.008.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		398.350.000			308.861.695	77,54			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
2.17.008.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		298.350.000	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	90 Unit	208.875.000	70,01	50 Unit	55,56	
2.17.008.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM		100.000.000	Jumlah Penyesuaian Perkara bagi pelaku UMKM	20 unit usaha	99.986.695	99,99	30 unit usaha	150	
3.30.001			-			-	-			
3.30.001.1.01			-			-	-			
3.30.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.001.1.02			-			-	-			
3.30.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.001.1.06			-			-	-			
3.30.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.001.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.001.1.07			-			-	-			
3.30.001.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.001.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.001.1.08			-			-	-			
3.30.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Papua	-			-	-			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR		
						KEU		KELUARAN				
						Rp	%	(K)	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
3.30.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.001.1.09												
3.30.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.003	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		145.900.100				145.892.100	99,99				
3.30.003.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		145.900.100				145.892.100	99,99				
3.30.003.1.01.02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		145.900.100	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Laporan		145.892.100	99,99	1 Laporan	100		
3.30.004	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		1.153.559.120				284.389.750	24,65				
3.30.004.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		1.153.559.120				284.389.750	24,65				
3.30.004.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		299.999.120	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	1 Laporan		284.389.750	94,8	1 Laporan	100		
3.30.004.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		853.560.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan			-	0 Laporan	-		
3.30.005	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		449.968.390				448.259.730	99,62				
3.30.005.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		449.968.390				448.259.730	99,62				

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI			TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)	
						KEU		KELUARAN (K) (9)		
						Rp (7)	% (8)			% (10)
3.30.005.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		449.968.390	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	30 Pelaku Usaha	448.259.730	99,62	4 Pelaku Usaha	13,33	
3.30.006	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		1.047.656.050			1.043.183.660	99,57			
3.30.006.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		797.668.715			794.887.460	99,65			
3.30.006.1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian		399.668.915	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	5 Dokumen	399.225.200	99,89	25 Dokumen	500	
3.30.006.1.02.04	Pengembangan Layanan Kalibrasi		397.999.800	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	5 Sertifikat	395.662.260	99,41	5 Sertifikat	100	
3.30.006.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		249.987.335			248.296.200	99,32			
3.30.006.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen		249.987.335	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	1 Laporan	248.296.200	99,32	1 Laporan	100	
3.31.002	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		2.039.611.495			2.013.996.872	98,74			
3.31.002.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		-			-	-			
3.31.002.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		-			-	-			
3.31.002.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		-	Jumlah bantuan peralatan dan mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP yang di berikan	3 3 unit	-	-	5 3 unit	166,67	
3.31.002.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		-	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta orang asli papua (OAP) di provinsi	1 dokumen	-	-	0 dokumen	-	
3.31.002.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		-			-	-			
3.31.002.3.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		2.039.611.495			2.013.996.872	98,74			
3.31.002.3.01.08	Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP	Kab. Jayapura	1.535.753.165	Jumlah bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP	3 Unit	1.510.689.420	98,37	3 Unit	100	
3.31.002.3.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi	Kab. Jayapura, Kab. Keerom	259.999.928	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	259.899.928	99,96	1 Dokumen	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
3.31.002.3.01.10	Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi	Kota Jayapura	243.858.402	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi	1 Dokumen	243.407.524	99,82	1 Dokumen	100	(11)
3.31.004	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL									
3.31.004.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)									
3.31.004.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)									
3.31.004.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas									
3.32.003	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		299.207.000			299.207.000	100			
3.32.003.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		299.207.000			299.207.000	100			
3.32.003.1.01.06	Pelatihan Transmigrasi		299.207.000	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	20 Orang	299.207.000	100	20 Orang	100	
	JUMLAH		52.652.055.105			47.513.240.667	90,24			
2.09.3-27.0-00.01.1000	Dinas Pertanian dan Pangan		91.462.009.141			83.673.899.451	91,48			
2.09.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		61.479.456.200			55.045.517.349	89,53			
2.09.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		58.618.056.200			52.264.082.626	89,16			
2.09.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		58.618.056.200	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	454 Orang/ Bulan	52.264.082.626	89,16	454 Orang/ Bulan	100	
2.09.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.544.970.000			1.531.766.542	99,15			
2.09.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		128.476.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	127.683.300	99,38	12 Paket	100	
2.09.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		80.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	79.999.629	100	1 Paket	100	
2.09.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		44.444.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	250 Paket	44.443.250	100	250 Paket	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
2.09.001.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material		105.700.000	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	105.699.300	100	1 Paket	100	
2.09.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.186.350.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73 Laporan	1.173.941.063	98,95	73 Laporan	100	
2.09.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		897.700.000			830.942.503	92,56			
2.09.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		825.200.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	758.542.503	91,92	12 Laporan	100	
2.09.001.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		48.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	48.400.000	99,79	12 Laporan	100	
2.09.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		24.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24.000.000	100	12 Laporan	100	
2.09.001.1.09	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		418.730.000			418.725.678	100			
2.09.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		418.730.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	418.725.678	100	21 Unit	100	
2.09.003	PROGRAM Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		1.000.738.510			999.930.134	99,92			
2.09.003.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		1.000.738.510			999.930.134	99,92			
2.09.003.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		1.000.738.510	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	2 Laporan	999.930.134	99,92	2 Laporan	100	
2.09.005	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		1.000.000.207			993.546.100	99,35			
2.09.005.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1.000.000.207			993.546.100	99,35			
2.09.005.1.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1.000.000.207	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 Sertifikat	993.546.100	99,35	30 Sertifikat	100	
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		11.682.218.152			11.199.888.932	95,87			
3.27.002.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		615.000.000			600.716.791	97,68			
3.27.002.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		85.000.000	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	1 Laporan	83.916.000	98,72	1 Laporan	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
3.27.002.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		530.000.000	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	516.800.791	97,51	1 Dokumen	100	
3.27.002.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		7.723.676.402			7.508.848.330	97,22			
3.27.002.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih		599.943.975	Jumlah Sertifikat Benih	10000 Sertifikat	589.904.112	98,33	10000 Sertifikat	100	
3.27.002.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura		1.982.412.020	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	3 Laporan	1.890.303.161	95,35	3 Laporan	100	
3.27.002.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan		2.316.907.788	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	3 Dokumen	2.341.139.916	101,05	3 Dokumen	100	
3.27.002.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan		2.824.412.619	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	7 Laporan	2.687.501.141	95,15	7 Laporan	100	
3.27.002.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		1.995.384.000			1.813.159.300	90,87			
3.27.002.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		1.995.384.000	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Laporan	1.813.159.300	90,87	1 Laporan	100	
3.27.002.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		1.348.157.750			1.277.164.511	94,73			
3.27.002.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		1.348.157.750	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diroduksi	1 Laporan	1.277.164.511	94,73	1 Laporan	100	
3.27.003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		9.066.296.000			8.356.897.798	92,18			
3.27.003.1.01	Penataan Prasarana Pertanian		9.066.296.000			8.356.897.798	92,18			
3.27.003.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		1.070.347.000	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3 Dokumen	1.068.212.942	99,8	3 Dokumen	100	
3.27.003.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya		7.995.949.000	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	6 Unit	7.288.684.856	91,15	6 Unit	100	
3.27.004	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		614.725.000			608.450.465	98,98			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
3.27.004.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		314.725.000			308.565.450	98,04			
3.27.004.1.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		314.725.000	Jumlah wilayah yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular	9 Layanan	308.565.450	98,04	9 Layanan	100	
3.27.004.1.03	Penerapan Peryaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		300.000.000			299.885.015	99,96			
3.27.004.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		300.000.000	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	200 sampel	299.885.015	99,96	200 sampel	100	
3.27.005	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCAHA PERTANIAN		599.906.709			599.848.600	99,99			
3.27.005.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		599.906.709			599.848.600	99,99			
3.27.005.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		599.906.709	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	165 Ha	599.848.600	99,99	165 Ha	100	
3.27.006	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		124.150.000			119.150.000	95,97			
3.27.006.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		124.150.000			119.150.000	95,97			
3.27.006.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		124.150.000			119.150.000	95,97			
3.27.007	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		5.894.518.363			5.750.670.073	97,56			
3.27.007.1.01	Pengembangan Ketahanan Penyuluhan Pertanian		2.640.231.209			2.522.939.575	95,56			
3.27.007.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN		1.000.000.000	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	888.860.610	88,89	60 Orang	100	
3.27.007.1.01.02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta		1.640.231.209	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	90 Orang	1.634.078.965	99,62	90 Orang	100	
3.27.007.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		2.911.997.695			2.885.910.950	99,1			
3.27.007.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		299.997.695	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	375 Dokumen	298.435.950	99,48	375 Dokumen	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI			TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)	
						KEU		KELUARAN (K) (9)		
						Rp (7)	% (8)			% (10)
3.27.007.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani		2.612.000.000	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pembinaan	1 Kelompok	2.587.475.000	99,06	1 Kelompok	100	(11)
3.27.007.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		342.289.459			341.819.548	99,86			
3.27.007.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Kooperasi Petani		342.289.459	Jumlah Kooperasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	3 Unit	341.819.548	99,86	3 Unit	100	
	JUMLAH		91.462.009.141			83.673.899.451	91,48			
2.11.3-28.0-00.01.1.000	Dinas Ketahanan dan Lingkungan Hidup		106.000.446.527			100.096.732.116	94,43			
2.11.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		81.157.295.705			76.183.306.087	93,87			
2.11.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		200.000.000			190.840.000	95,42			
2.11.001.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		200.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	190.840.000	95,42	1 Laporan	100	
2.11.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		72.723.629.063			67.797.403.333	93,23			
2.11.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		72.723.629.063	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	722 Orang/ Bulan	67.797.403.333	93,23	722 Orang/ Bulan	100	
2.11.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.409.678.008			2.382.603.525	98,88			
2.11.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		114.616.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	113.419.800	98,96	1 Paket	100	
2.11.001.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		8.340.728	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8.338.000	99,97	1 Paket	100	
2.11.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		199.999.880	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	199.932.745	99,97	1 Paket	100	
2.11.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		80.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	80.000.000	100	1 Paket	100	
2.11.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		30.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	30.000.000	100	1 Dokumen	100	
2.11.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		140.400.000	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	140.400.000	100	1 Laporan	100	
2.11.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.836.321.400	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.810.512.980	98,59	1 Laporan	100	
2.11.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.356.822.282			3.346.011.054	99,68			
2.11.001.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1.701.539.674	Jumlah Kantor Yang dibangun	2 2 Unit	1.696.743.564	99,72	2 2 Unit	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.001.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1.655.282.608	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.649.267.490	99,64	1 Unit	100	
2.11.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.135.983.144							
2.11.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		37.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	37.500.000	100	1 Laporan	100	
2.11.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		575.033.144	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	574.742.175	99,95	1 Laporan	100	
2.11.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.523.450.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.523.450.000	100	1 Laporan	100	
2.11.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		331.183.208			330.756.000	99,87			
2.11.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		266.883.208	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	266.456.000	99,84	11 Unit	100	
2.11.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		64.300.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit	64.300.000	100	57 Unit	100	
2.11.002	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP		616.350.000			613.209.753	99,49			
2.11.002.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		140.000.000			139.014.643	99,3			
2.11.002.1.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi		140.000.000	Jumlah Dokumen	1 Laporan	139.014.643	99,3	1 Laporan	100	
2.11.002.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		476.350.000			474.195.110	99,55			
2.11.002.1.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		476.350.000	Jumlah Dokumen	1 Laporan	474.195.110	99,55	1 Laporan	100	
2.11.003	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		2.608.650.194			2.107.589.723	80,79			
2.11.003.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		2.608.650.194			2.107.589.723	80,79			
2.11.003.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		108.650.194	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	106.652.850	98,16	1 Dokumen	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR	
						KEU		KELUARAN			
						Rp	%	(K)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
2.11.003.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		2.500.000.000				2.000.936.873	80,04			
2.11.005	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		74.999.990				74.183.160	98,91			
2.11.005.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		74.999.990				74.183.160	98,91			
2.11.005.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		74.999.990	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai	1 Dokumen		74.183.160	98,91	1 Dokumen	100	
2.11.006	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		199.999.816				193.766.140	96,88			
2.11.006.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah		199.999.816				193.766.140	96,88			
2.11.006.1.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup		199.999.816	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	5 Orang		193.766.140	96,88	5 Orang	100	
2.11.008	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		1.133.627.320				1.121.457.891	98,93			
2.11.008.1.01	Penyenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		1.133.627.320				1.121.457.891	98,93			
2.11.008.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan		233.633.610	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya	5 Lembaga		233.344.291	99,88	5 Lembaga	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.008.1.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		899.993.710	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	200 Orang	888.113.600	98,68	200 Orang	100	
2.11.009	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		228.666.748			226.409.604	99,01			
2.11.009.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		228.666.748			226.409.604	99,01			
2.11.009.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		228.666.748	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 entitas	226.409.604	99,01	3 entitas	100	
2.11.010	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		100.000.000			96.601.970	96,6			
2.11.010.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		100.000.000			96.601.970	96,6			
2.11.010.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan		100.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	2 Dokumen	96.601.970	96,6	2 Dokumen	100	
2.11.011	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		237.699.642			236.116.660	99,33			
2.11.011.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		237.699.642			236.116.660	99,33			
2.11.011.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		237.699.642	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang	2 Dokumen	236.116.660	99,33	2 Dokumen	100	
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		13.004.746.250			12.788.438.294	98,34			
3.28.003.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		698.680.000			646.989.000	92,6			
3.28.003.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		698.680.000			646.989.000	92,6			
3.28.003.1.02.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		1.748.750.000			1.731.374.597	99,01			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
3.28.003.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi		449.500.000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	440.101.247	97,91	1 Dokumen	100	
3.28.003.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung		1.299.250.000	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	1.291.273.350	99,39	2 Dokumen	100	
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		7.908.260.000			7.854.678.366	99,32			
3.28.003.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		500.000.000	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	10 Ha	499.500.000	99,9	10 Ha	100	
3.28.003.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		7.408.260.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	7.355.178.366	99,28	100 Ha	100	
3.28.003.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		499.996.250			499.987.850	100			
3.28.003.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		499.996.250	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	100 Ha	499.987.850	100	100 Ha	100	
3.28.003.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		1.499.060.000			1.434.922.812	95,72			
3.28.003.1.06.04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu		1.499.060.000	Jumlah Unit Manajemen PPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-PBBPHH	1 Unit Manajemen	1.434.922.812	95,72	1 Unit Manajemen	100	
3.28.003.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m ³ /Tahun		650.000.000			620.485.669	95,46			
3.28.003.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m ³ /Tahun		650.000.000	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PPHH (kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	620.485.669	95,46	1 Dokumen	100	
3.28.004	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		5.501.942.862			5.455.652.834	99,16			
3.28.004.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		5.501.942.862			5.455.652.834	99,16			
3.28.004.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi		5.501.942.862	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	10 Ha	5.455.652.834	99,16	10 Ha	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
3.28.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		1.136.468.000			1.000.000.000	87,99			
3.28.005.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		1.136.468.000			1.000.000.000	87,99			
3.28.005.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		1.136.468.000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	1.000.000.000	87,99	4 Kelompok	100	
	JUMLAH		106.000.446.527			100.096.732.116	94,43			
2-11.3-28.0-00.01.1.001	Cabang Dinas Kehutanan Jayapura		600.000.000			593.452.206	98,91			
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		400.000.000			394.984.506	98,75			
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		400.000.000			394.984.506	98,75			
3.28.003.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		400.000.000	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	3 Ha	394.984.506	98,75	3 Ha	100	
3.28.006	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		200.000.000			198.467.700	99,23			
3.28.006.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		200.000.000			198.467.700	99,23			
3.28.006.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		200.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	30 Orang	198.467.700	99,23	30 Orang	100	
	JUMLAH		600.000.000			593.452.206	98,91			
2-11.3-28.0-00.01.1.002	Cabang Dinas Kehutanan Sarmi		600.000.000			599.723.000	99,95			
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		400.000.000			400.000.000	100			
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		400.000.000			400.000.000	100			
3.28.003.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		400.000.000	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	2 Ha	400.000.000	100	2 Ha	100	
3.28.006	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		200.000.000			199.723.000	99,86			
3.28.006.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		200.000.000			199.723.000	99,86			
3.28.006.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		200.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	35 Orang	199.723.000	99,86	35 Orang	100	
	JUMLAH		600.000.000			599.723.000	99,95			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
2-11.3-28.0-00.01.1003	Cabang Dinas Kehutanan Keerom		848.514.925			844.599.519	99,54			
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		500.000.000			497.057.709	99,41			
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		338.528.000			335.604.258	99,14			
3.28.003.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		338.528.000	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	1 Ha	335.604.258	99,14	1 Ha	100	
3.28.003.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		161.472.000			161.453.451	99,99			
3.28.003.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		161.472.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	161.453.451	99,99	1 Dokumen	100	
3.28.006	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		348.514.925			347.541.810	99,72			
3.28.006.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		348.514.925			347.541.810	99,72			
3.28.006.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		348.514.925	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	30 Orang	347.541.810	99,72	30 Orang	100	
	JUMLAH		848.514.925			844.599.519	99,54			
2-11.3-28.0-00.01.1004	Cabang Dinas Kehutanan Mamberamo Raya		600.000.000			595.797.500	99,3			
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		400.000.000			395.947.500	98,99			
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		400.000.000			395.947.500	98,99			
3.28.003.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		400.000.000	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	2 Ha	395.947.500	98,99	2 Ha	100	
3.28.006	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		200.000.000			199.850.000	99,92			
3.28.006.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		200.000.000			199.850.000	99,92			
3.28.006.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		200.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	20 Orang	199.850.000	99,92	20 Orang	100	
	JUMLAH		600.000.000			595.797.500	99,3			
2-11.3-28.0-00.01.1022	KPHP Unit XVII Waropen		700.000.000			698.895.000	99,84			
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		400.000.000			398.975.000	99,74			
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		400.000.000			398.975.000	99,74			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI			TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)	
						KEU		KELUARAN (K) (9)		
						Rp (7)	% (8)			% (10)
3.28.003.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		400.000.000	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	2 Ha	398.975.000	99,74	2 Ha	100	(11)
3.28.006	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		300.000.000			299.920.000	99,97			
3.28.006.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		300.000.000			299.920.000	99,97			
3.28.006.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		300.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	10 Orang	299.920.000	99,97	10 Orang	100	
	JUMLAH		700.000.000			698.895.000	99,84			
2-11.3-28.0-00.01.1023	KPHP Unit XXI Lintas Sarmi Mamberamo Raya		700.000.000			691.530.000	98,79			
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		400.000.000			399.810.000	99,95			
3.28.003.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kawasan Provisi		179.400.000			179.210.000	99,89			
3.28.003.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		179.400.000	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	179.210.000	99,89	1 Unit	100	
3.28.003.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		220.600.000			220.600.000	100			
3.28.003.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		220.600.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	220.600.000	100	1 Dokumen	100	
3.28.006	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		300.000.000			291.720.000	97,24			
3.28.006.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		300.000.000			291.720.000	97,24			
3.28.006.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		300.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	30 Orang	291.720.000	97,24	30 Orang	100	
	JUMLAH		700.000.000			691.530.000	98,79			
2-11.3-28.0-00.01.1024	KPHP Unit XXIII Sarmi		500.000.000			487.200.000	97,44			
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		300.000.000			287.200.000	95,73			
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		300.000.000			287.200.000	95,73			
3.28.003.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		300.000.000	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	3 Ha	287.200.000	95,73	3 Ha	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
3.28.006	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		200.000.000			200.000.000	100			
3.28.006.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		200.000.000			200.000.000	100			
3.28.006.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		200.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	30 Orang	200.000.000	100	30 Orang	100	
	JUMLAH		500.000.000			487.200.000	97,44			
2-11.3-28.0-00.01.1.025	KPHP Unit XIX Kepulauan Yapen		899.986.000			897.395.800	99,71			
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		599.995.000			598.907.400	99,82			
3.28.003.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuili pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		599.995.000			598.907.400	99,82			
3.28.003.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		599.995.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	598.907.400	99,82	1 Dokumen	100	
3.28.006	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		299.991.000			298.488.400	99,5			
3.28.006.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		299.991.000			298.488.400	99,5			
3.28.006.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		299.991.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	15 Orang	298.488.400	99,5	15 Orang	100	
	JUMLAH		899.986.000			897.395.800	99,71			
2-11.3-28.0-00.01.1.026	KPHL Unit XX Biak		999.997.989			975.392.476	97,54			
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		699.999.989			699.505.889	99,93			
3.28.003.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		168.353.889			167.859.789	99,71			
3.28.003.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		168.353.889	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbacaan	20 Unit	167.859.789	99,71	20 Unit	100	
3.28.003.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		531.646.100			531.646.100	100			
3.28.003.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung		144.996.100	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	144.996.100	100	1 Dokumen	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
3.28.003.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung		386.650.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	386.650.000	100	1 Dokumen	100	
3.28.006	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		299.998.000			275.886.587	91,96			
3.28.006.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.		299.998.000			275.886.587	91,96			
3.28.006.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		299.998.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	30 Orang	275.886.587	91,96	30 Orang	100	
	JUMLAH		999.997.989			975.392.476	97,54			
2-11.3-28.0-00.01.1027	KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura		499.925.000			498.203.100	99,66			
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		300.000.000			299.560.900	99,85			
3.28.003.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		300.000.000			299.560.900	99,85			
3.28.003.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		300.000.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	299.560.900	99,85	1 Dokumen	100	
3.28.006	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		199.925.000			198.642.200	99,36			
3.28.006.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.		199.925.000			198.642.200	99,36			
3.28.006.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		199.925.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	30 Orang	198.642.200	99,36	30 Orang	100	
	JUMLAH		499.925.000			498.203.100	99,66			
2-11.3-28.0-00.01.1028	KPHP Unit XXIX Keerom		1.099.999.793			1.089.047.764	99			
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		400.000.000			392.399.500	98,1			
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		400.000.000			392.399.500	98,1			
3.28.003.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		400.000.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	2 Ha	392.399.500	98,1	2 Ha	100	
3.28.006	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		699.999.793			696.648.264	99,52			
3.28.006.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.		699.999.793			696.648.264	99,52			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
3.28.006.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		699.999.793	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	10 Orang	696.648.264	99,52	10 Orang	100	
	JUMLAH		1.099.999.793			1.089.047.764	99			
2-11.3-28.0-00.01.1034	UPTD Kebun Raya Koya Koso		850.000.000			849.845.000	99,98			
2.11.004	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		850.000.000			849.845.000	99,98			
2.11.004.1.01	Pengelolaan Keekaragaman Hayati Provinsi		850.000.000			849.845.000	99,98			
2.11.004.1.01.03	Pengelolaan Kebun Raya		200.000.000	Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi	150 Ha	200.000.000	100	150 Ha	100	
2.11.004.1.01.05	Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati Lainnya		650.000.000	Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	600 Ha	649.845.000	99,98	600 Ha	100	
	JUMLAH		850.000.000			849.845.000	99,98			
2-11.3-28.0-00.01.1035	BPTH Papua		1.049.999.600			1.022.979.847	97,43			
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1.049.999.600			1.022.979.847	97,43			
3.28.003.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan		1.049.999.600			1.022.979.847	97,43			
3.28.003.1.09.02	Sertifikasi Sumber Benih		310.962.000	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	1 Sertifikat	309.462.000	99,52	1 Sertifikat	100	
3.28.003.1.09.03	Sertifikasi Mutu Benih		539.037.600	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	10 Sertifikat	513.517.847	95,27	10 Sertifikat	100	
3.28.003.1.09.06	Pembangunan Sumber Benih		200.000.000	Luas Sumber Benih yang Dibangun	2 Ha	200.000.000	100	2 Ha	100	
	JUMLAH		1.049.999.600			1.022.979.847	97,43			
2-11.3-28.0-00.01.1036	UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek		10.850.000.000			6.344.356.775	58,47			
2.11.004	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		10.850.000.000			6.344.356.775	58,47			
2.11.004.1.01	Pengelolaan Keekaragaman Hayati Provinsi		10.850.000.000			6.344.356.775	58,47			
2.11.004.1.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati		10.850.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	6.344.356.775	58,47	0.6 Unit	60	
	JUMLAH		10.850.000.000			6.344.356.775	58,47			
2-11.3-28.0-00.01.1037	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Papua		491.662.750			491.581.410	99,98			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI			TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN (K) (9)	
						Rp (7)	% (8)		
2.11.003	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAIR/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		491.662.750			491.581.410	99,98		
2.11.003.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		491.662.750			491.581.410	99,98		
2.11.003.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi		491.662.750	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	491.581.410	99,98	1 Dokumen	100
	JUMLAH		491.662.750			491.581.410	99,98		
2.13.0-00.0-00.01.1.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua		36.003.277.261			34.496.598.319	95,82		
2.13.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Provinsi		17.450.662.721			15.977.429.761	91,56		
2.13.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		489.270.400			489.270.400	100		
2.13.001.1.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		30.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	30.000.000	100	3 Dokumen	100
2.13.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		30.000.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000	100	1 Dokumen	100
2.13.001.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		30.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000	100	1 Dokumen	100
2.13.001.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		30.000.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000	100	1 Dokumen	100
2.13.001.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		30.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000	100	1 Dokumen	100
2.13.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		90.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	90.000.000	100	3 Laporan	100
2.13.001.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		249.270.400	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	249.270.400	100	1 Laporan	100
2.13.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11.727.762.721			10.256.439.242	87,45		
2.13.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		11.577.162.721	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1032 Orang/ Bulan	10.106.375.525	87,3	1024 Orang/ Bulan	99,22
2.13.001.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		30.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 Dokumen	29.903.975	99,68	83 Dokumen	97,65

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
2.13.001.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		30.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	29.767.234	99,22	12 Dokumen	100	
2.13.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		30.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	29.997.408	99,99	1 Laporan	100	
2.13.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester SKPD		30.600.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	18 Laporan	30.498.300	99,67	18 Laporan	100	
2.13.001.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		30.000.000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	29.896.800	99,66	1 Dokumen	100	
2.13.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		29.633.200			29.633.200	100			
2.13.001.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		29.633.200	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	29.633.200	100	1 Dokumen	100	
2.13.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.119.196.400			1.118.836.504	99,97			
2.13.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		697.500.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	7 Paket	697.425.812	99,99	7 Paket	100	
2.13.001.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		29.196.400	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	29.029.520	99,43	1 Dokumen	100	
2.13.001.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		30.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	29.993.280	99,98	12 Dokumen	100	
2.13.001.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		150.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	86 Orang	149.887.892	99,93	79 Orang	91,86	
2.13.001.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		212.500.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	212.500.000	100	35 Orang	100	
2.13.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.960.000.000			1.959.443.772	99,97			
2.13.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		35.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.688.000	99,11	1 Paket	100	
2.13.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		62.500.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	62.300.000	99,68	2 Paket	100	
2.13.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	100	1 Paket	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
2.13.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		150.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 Dokumen	150.000.000	100	100 Dokumen	100	
2.13.001.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		112.500.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	112.492.660	99,99	12 Laporan	100	
2.13.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.500.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	1.499.963.112	100	85 Laporan	100	
2.13.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		334.600.000			334.043.400	99,83			
2.13.001.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		334.600.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	334.043.400	99,83	12 Unit	100	
2.13.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		865.700.000			865.344.865	99,96			
2.13.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		183.200.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	183.200.000	100	12 Laporan	100	
2.13.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		682.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	682.144.865	99,95	12 Laporan	100	
2.13.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		924.500.000			924.418.378	99,99			
2.13.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		412.000.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	411.918.378	99,98	12 Unit	100	
2.13.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		54.500.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	54.500.000	100	20 Unit	100	
2.13.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		458.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	458.000.000	100	2 Unit	100	
2.13.004	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		2.000.000.000			1.998.935.730	99,95			
2.13.004.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		2.000.000.000			1.998.935.730	99,95			
2.13.004.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		2.000.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1.998.935.730	99,95	1 Dokumen	100	
2.13.005	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		5.453.614.700			5.453.478.815	100			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI			TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)	
						KEU		KELUARAN (K) (9)		
						Rp (7)	% (8)			% (10)
2.13.005.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		5.453.614.700			5.453.478.815	100			(11)
2.13.005.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga keMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		1.192.500.000	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga keMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1.192.500.000	100	1 Dokumen	100	
2.13.005.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		4.261.114.700	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	6 Dokumen	4.260.978.815	100	6 Dokumen	100	
2.13.006	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPIA		4.899.999.840			4.884.550.148	99,68			
2.13.006.3.01	Pengembangan Data/Informasi		1.199.999.840			1.198.732.840	99,89			
2.13.006.3.01.02	Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK		1.199.999.840	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK	1 Dokumen	1.198.732.840	99,89	1 Dokumen	100	
2.13.006.3.02	Pemberdayaan Masyarakat Kampung		3.700.000.000			3.685.817.308	99,62			
2.13.006.3.02.02	Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna		3.700.000.000	Jumlah Pengembangan Teknologi Tepat Guna	5 Laporan	3.685.817.308	99,62	5 Laporan	100	
2.13.008	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ORANG ASLI PAPIA		6.199.000.000			6.182.203.865	99,73			
2.13.008.3.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah Adat Orang Asli Papua		6.199.000.000			6.182.203.865	99,73			
2.13.008.3.01.06	Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat		2.399.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat	6 Dokumen	2.397.903.410	99,95	6 Dokumen	100	
2.13.008.3.01.11	Identifikasi Wirasaha Pemula dan Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat		3.800.000.000	Jumlah Wirasaha Pemula di 5 (Lima) Wilayah Adat yang Diidentifikasi dan Mengikuti Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung	5 Dokumen	3.784.300.455	99,59	5 Dokumen	100	
JUMLAH			36.003.277.261			34.496.598.319	95,82			
Dinas Perhubungan			52.123.816.995			40.028.012.953	76,79			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
2.15.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		28.926.373.915			21.251.681.955	73,47			
2.15.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		106.500.000			106.416.784	99,92			
2.15.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		106.500.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	106.416.784	99,92	3 Laporan	100	
2.15.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		25.485.692.615			18.370.565.908	72,08			
2.15.001.1.02.01	Penyediaan Geji dan Tunjangan ASN		25.375.692.615	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	157 Orang/ Bulan	18.260.649.608	71,96	157 Orang/ Bulan	100	
2.15.001.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		110.000.000			109.916.300	99,92			
2.15.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.770.720.300			1.447.031.527	81,72			
2.15.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		30.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.800.000	99,33	1 Paket	100	
2.15.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		624.020.300	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	420.692.255	67,42	1 Paket	100	
2.15.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		69.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	68.874.165	99,82	1 Paket	100	
2.15.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		328.000.000	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	207.965.107	63,4	2 Laporan	100	
2.15.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		719.700.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	719.700.000	100	1 Laporan	100	
2.15.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		22.500.000			12.475.000	55,44			
2.15.001.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		22.500.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	12.475.000	55,44	6 Unit	60	
2.15.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.032.750.000			857.987.134	83,08			
2.15.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		41.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	26.723.900	65,18	2 Laporan	66,67	
2.15.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		500.150.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	437.663.234	87,51	3 Laporan	100	
2.15.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		491.600.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	393.600.000	80,07	1 Laporan	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
2.15.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		508.211.000			457.205.602	89,96			
2.15.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		50.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	19.923.000	39,85	14 Unit	56	
2.15.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		458.211.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	437.282.602	95,43	9 Unit	100	
2.15.002	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN JALAN (LLAJ)		5.000.000.000			4.971.074.866	99,42			
2.15.002.1.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi		4.900.000.000			4.871.892.675	99,43			
2.15.002.1.02.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi		4.900.000.000	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	140 Unit	4.871.892.675	99,43	140 Unit	100	
2.15.002.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		100.000.000			99.182.191	99,18			
2.15.002.1.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		100.000.000	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Tersejahtera dan Terpelihara	1 Unit	99.182.191	99,18	1 Unit	100	
2.15.003	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		13.197.443.080			11.481.487.296	87			
2.15.003.1.09	Pembangunan, Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Regional		13.197.443.080			11.481.487.296	87			
2.15.003.1.09.02	Pembangunan Pelabuhan Pungutan Regional		13.197.443.080	ketersediaan pelabuhan yang memadai	1 Unit	11.481.487.296	87	1 Unit	100	
2.15.004	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN		5.000.000.000			2.323.768.836	46,48			
2.15.004.3.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi		5.000.000.000			2.323.768.836	46,48			
2.15.004.3.01.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara		5.000.000.000	Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia	3 Unit	2.323.768.836	46,48	2 Unit	66,67	
	JUMLAH		52.123.816.995			40.028.012.953	76,79			
2.16.2-21.0-00.01.1000	Dinas Komunikasi dan Informatika		23.848.485.300			22.642.059.321	94,94			
2.16.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Provinsi		13.308.185.300			12.102.229.772	90,94			
2.16.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11.005.405.300			9.801.279.959	89,06			
2.16.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		11.005.405.300	Gaji dan Tunjangan	100 Orang	9.801.279.959	89,06	80 Orang	80	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR	
						KEU		KELUARAN			
						Rp	%	(K)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
2.16.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		108.000.000				107.100.000	99,17			
2.16.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		108.000.000				107.100.000	99,17			
2.16.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.291.390.000				1.291.103.958	99,98			
2.16.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100.000.000	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Bulan		99.997.877	100	0 Bulan		
2.16.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		265.440.000				265.305.870	99,95			
2.16.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		49.950.000				49.864.000	99,83			
2.16.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		876.000.000				875.936.211	99,99			
2.16.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		31.500.000				31.457.400	99,86			
2.16.001.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		31.500.000				31.457.400	99,86			
2.16.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		556.500.000				556.250.000	99,96			
2.16.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		52.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		52.500.000	100	0 Laporan		
2.16.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		504.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan		503.750.000	99,95	0 Laporan		
2.16.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		315.390.000				315.038.455	99,89			
2.16.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		115.390.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit		115.272.554	99,9	0 Unit		
2.16.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		99.949.151	99,95	0 Unit		
2.16.001.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		99.816.750	99,82	0 Unit		
2.16.002	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		1.097.000.000				1.096.983.639	100			
2.16.002.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		1.097.000.000	ada	3		1.096.983.639	100	3		100
2.16.002.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		642.000.000	ada	3		641.983.664	100	3		100

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.16.002.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik		455.000.000	ada	3	454.999.975	100	3	100	
2.16.003	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		9.368.300.000			9.367.850.997	100			
2.16.003.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		9.368.300.000			9.367.850.997	100			
2.16.003.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		663.100.000			663.055.000	99,99			
2.16.003.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		8.705.200.000			8.704.795.997	100			
2.21.002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		75.000.000			74.994.913	99,99			
2.21.002.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		75.000.000			74.994.913	99,99			
2.21.002.1.01.01	Pencapaian Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi		75.000.000			74.994.913	99,99			
	JUMLAH		23.848.485.300			22.642.059.321	94,94			
2-18-0-00-00.01.1000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		23.356.321.522			21.639.200.497	92,65			
2.18.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		16.664.753.822			15.024.728.067	90,16			
2.18.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		148.461.900			144.664.900	97,44			
2.18.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		148.461.900	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	144.664.900	97,44	3 Dokumen	60	
2.18.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.304.595.772			7.216.554.668	86,9			
2.18.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		8.249.895.772	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan	7.162.479.068	86,82	65 Orang/ Bulan	100	
2.18.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		54.700.000	Tertindaknya penyusunan laporan akhir tahun	5 Dokumen	54.075.600	98,86	5 Dokumen	100	
2.18.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		222.600.000			196.245.000	88,16			
2.18.001.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		222.600.000	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	196.245.000	88,16	1 Dokumen	100	
2.18.001.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		2.076.900.000			1.788.980.000	86,14			
2.18.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		136.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	130.500.000	95,96	90 Paket	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
2.18.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		1.940.900.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 Orang	1.658.480.000	85,45	65 Orang	100	
2.18.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.956.145.250			2.930.199.206	99,12			
2.18.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		8.711.300	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8.633.000	99,1	5 Paket	100	
2.18.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		338.600.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	334.720.500	98,85	7 Paket	100	
2.18.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		24.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	24.000.000	100	3 Paket	25	
2.18.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		204.500.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	183.799.350	89,88	12 Paket	100	
2.18.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		10.320.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.199.590	98,83	12 Dokumen	100	
2.18.001.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material		517.513.950	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	516.389.266	99,78	1 Paket	100	
2.18.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.852.500.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	1.852.457.500	100	60 Laporan	100	
2.18.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		299.740.000			291.183.000	97,15			
2.18.001.1.07.05	Pengadaan Mebel		-			-	-			
2.18.001.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		299.740.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	291.183.000	97,15	37 Unit	100	
2.18.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.074.700.000			886.734.010	82,51			
2.18.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12.700.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12.700.000	100	1 Laporan	100	
2.18.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		362.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	177.410.500	49,01	3 Laporan	100	
2.18.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		700.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	696.623.510	99,52	2 Laporan	100	
2.18.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.581.610.900			1.570.167.283	99,28			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
2.18.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		460.810.900	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	19 Unit	460.806.286	100	19 Unit	100	
2.18.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		120.800.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	120.774.997	99,98	25 Unit	100	
2.18.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1.000.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	988.586.000	98,86	6 Unit	100	
2.18.002	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		986.983.500			975.334.230	98,82			
2.18.002.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		515.183.500			514.619.230	99,89			
2.18.002.1.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		515.183.500	Tersedianya dana yang dibutuhkan	1 Rp.515.183.500,-	514.619.230	99,89	80 Rp.515.183.500,-	8.000	
2.18.002.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi		471.800.000			460.715.000	97,65			
2.18.002.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi		471.800.000	Tersedianya Peta Potensi Investasi di Provinsi Papua	0 Buku	460.715.000	97,65	0 Buku	-	
2.18.003	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		2.966.298.600			2.945.867.500	99,31			
2.18.003.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		2.966.298.600			2.945.867.500	99,31			
2.18.003.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		620.718.600	Tersedianya Bahan/Materi Promosi yang Up to Date di Provinsi Papua berupa : Buku Peluang Investasi, Brosur PM, Profil Proyek Investasi, Peta Peluang Usaha, Peta Penyebaran Perumahan PMA, PMDN dan Video Digital Promosi PM.	2 buku, lbr	600.287.500	96,71	1 buku, lbr	50	
2.18.003.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		2.345.580.000	Terlaksananya Promosi Dalam dan Luar Negeri	5 event	2.345.580.000	100	4 event	80	
2.18.004	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		1.550.087.600			1.548.421.500	99,89			
2.18.004.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1.550.087.600			1.548.421.500	99,89			
2.18.004.1.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		760.940.000	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi	1000	759.907.500	99,86	16	1,6	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
2.18.004.1.01.02	Pemantauan Penuh komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		789.147.600	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah	17	788.514.000	99,92	4	23,53	
2.18.005	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		818.398.000			776.249.200	94,85			
2.18.005.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		818.398.000			776.249.200	94,85			
2.18.005.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		242.100.000	Tersedianya data perusahaan PMA/PMDN	0 dokumen	240.000.000	99,13	0 dokumen	-	
2.18.005.1.01.02	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		192.535.000			175.484.200	91,14			
2.18.005.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		383.763.000	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profile dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan	0 Kegiatan Usaha	360.765.000	94,01	0 Kegiatan Usaha	-	
2.18.006	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		369.800.000			368.600.000	99,68			
2.18.006.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi		369.800.000			368.600.000	99,68			
2.18.006.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		369.800.000	Tersedianya data perusahaan PMA/PMDN	0 dokumen	368.600.000	99,68	0 dokumen	-	
	JUMLAH		23.356.321.522			21.639.200.497	92,65			
2.19.0-00.0-00.01.1000	Dinas Olah Raga dan Pemuda		47.373.353.596			44.629.576.505	94,21			
2.19.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		39.038.660.396			36.655.046.260	93,89			
2.19.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		59.484.800			59.406.400	99,87			
2.19.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		34.644.800	Dokumen Yang Dihilangkan	100 Dokumen	34.644.800	100	100 Dokumen	-	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
2.19.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		24.840.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 Dokumen	24.761.600	99,68	100 Dokumen	-	
2.19.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		14.501.728.196			12.150.007.384	83,78			
2.19.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14.445.168.196	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/Bulan	12.093.489.384	83,72	100 Orang/Bulan	-	
2.19.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		19.560.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 Laporan	19.520.000	99,8	100 Laporan	-	
2.19.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		37.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100 Laporan	36.998.000	99,99	100 Laporan	-	
2.19.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		302.625.000			301.429.890	99,61			
2.19.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		-			-	-			
2.19.001.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		302.625.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	301.429.890	99,61	100 Orang	-	
2.19.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.987.072.400			1.978.831.813	99,59			
2.19.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		118.609.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	118.133.000	99,6	100 Paket	-	
2.19.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan		21.000.000			21.000.000	100			
2.19.001.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Provinsi Papua	106.463.400	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100 Paket	106.458.007	99,99	100 Paket	-	
2.19.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		300.000.000			299.751.000	99,92			
2.19.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.441.000.000			1.433.489.806	99,48			
2.19.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-			-	-			
2.19.001.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-			-	-			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR	
						KEU		KELUARAN			
						Rp	%	(K)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
2.19.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.828.750.000				1.801.583.021	98,51			
2.19.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		103.250.000	Jumlah laporan penyedia jasa komunikasi, SDA dan listrik	100 Laporan		96.058.021	93,03	100 Laporan	-	
2.19.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.725.500.000				1.705.525.000	98,84			
2.19.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		20.359.000.000				20.363.787.752	100,02			
2.19.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		339.000.000	Jumlah kendaraan perorangan dinas	100 Unit		338.999.238	100	100 Unit	-	
2.19.001.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		20.000.000.000	Jumlah aset tetap lainnya	100 Unit		20.004.808.514	100,02	100 Unit	-	
2.19.001.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		20.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibelikan/Direhabilitasi	100 Unit		19.980.000	99,9	100 Unit	-	
2.19.002	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		494.991.000				478.356.950	96,64			
2.19.002.1.01	Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kawanan Provinsi		250.000.000				233.576.460	93,43			
2.19.002.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi		-				-	-			
2.19.002.1.01.04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		250.000.000	Terlaksananya Penyelenggaraan seleksi pasukan pengibar bendera	100 peserta		233.576.460	93,43	20 peserta	-	
2.19.002.1.01.09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		-				-	-			
2.19.002.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi		244.991.000				244.780.490	99,91			
2.19.002.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi		244.991.000	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	100 Dokumen		244.780.490	99,91	100 Dokumen	-	
2.19.003	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		7.839.702.200				7.496.173.295	95,62			
2.19.003.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		249.965.000				249.965.000	100			
2.19.003.1.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi		249.965.000	Terselenggaranya event olahraga bagi para pelajar	100		249.965.000	100	100	-	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)	
						KEU		KELUARAN			
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)		
2.19.003.1.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event		-				-				
2.19.003.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		6.706.137.200				94,97				
2.19.003.1.03.01	Seleksi Atlet Daerah		-				-				
2.19.003.1.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		-				-				
2.19.003.1.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi		6.706.137.200	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	100 Kegiatan		94,97	100 Kegiatan		-	
2.19.003.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga		-				-				
2.19.003.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		883.600.000				99,29				
2.19.003.1.04.01	Standarisasi Organisasi Keolahragaan		803.600.000	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	100 Dokumen		99,22	100 Dokumen		100	
2.19.003.1.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan		-				-				
2.19.003.1.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait		-				-				
2.19.003.1.04.04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi		80.000.000	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	100 Organisasi		100	100 Organisasi		-	
	JUMLAH		47.373.353.596				94,21				
2.22.3-25.0-00.01.1000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		49.444.367.196				97,01				
2.22.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		22.668.274.550				98,7				
2.22.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		45.000.000				99,67				
2.22.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		25.000.000	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Laporan		99,8	20 Laporan		100	
2.22.001.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		20.000.000	Jumlah laporan	20 Laporan		99,5	20 Laporan		100	
2.22.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		19.955.314.550				99,22				
2.22.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		19.905.314.550	Jumlah ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua	158 Orang		99,22	158 Orang		100	
2.22.001.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		28.800.000	Jumlah orang	12 orang/bulan		100	12 orang/bulan		100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.22.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		21.200.000	Jumlah laporan	20 Laporan	21.200.000	100	20 Laporan	100	
2.22.001.1.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah		640.000.000			610.090.000	95,33			
2.22.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		480.000.000	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200 Stel	478.410.000	99,67	200 Stel	100	
2.22.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		160.000.000	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang	131.680.000	82,3	4 Orang	100	
2.22.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.501.220.000			1.497.687.795	99,76			
2.22.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		62.231.200	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit	62.231.200	100	15 Unit	100	
2.22.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		427.771.600	Jumlah Bahan Logistik Kantor (BBM, ATK)	2 Paket	427.770.911	100	2 Paket	100	
2.22.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian		35.667.200	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaian	276 Buku	35.667.200	100	276 Buku	100	
2.22.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan		200.000.000			196.470.000	98,24			
2.22.001.1.06.08	Pencapaian-Uudaraan Fasilitas Kunjungan Tamu		140.850.000	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	1450 Orang/Kali	140.850.000	100	1450 Orang/Kali	100	
2.22.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		634.700.000	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	282 Orang	634.698.484	100	282 Orang	100	
2.22.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		494.240.000			393.840.684	79,69			
2.22.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		172.240.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	8 Laporan	116.890.584	67,86	8 Laporan	100	
2.22.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		322.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	5 Laporan	276.950.100	86,01	5 Laporan	100	
2.22.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		32.500.000			27.938.000	85,96			
2.22.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		32.500.000	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan di bayarkan pajaknya (Pajak kendaraan Bermotor roda 4) Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan di bayarkan pajaknya (Pajak kendaraan Bermotor roda 2)	1 Unit 6 Unit	27.938.000	85,96	1 Unit 6 Unit	100 100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
2.22.002	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		3.000.000.000		4 Unit		98,98	4 Unit	100	
2.22.002.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		929.800.000	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan di bayarkan pajaknya (Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2)	3 Unit		98,3	3 Unit	100	
2.22.002.1.01.01	Peindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemanjau Kebudayaan		500.000.000	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan di bayarkan pajaknya (Pemeliharaan kendaraan Bermotor roda 4)	60 Orang		99,98	60 Orang	100	
2.22.002.1.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		429.800.000	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi kebudayaan	1 Paket		96,35	1 Paket	100	
2.22.002.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		1.370.200.000	Jumlah film Dokumenter			98,91			
2.22.002.1.02.01	Peindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemanjau Tradisi Budaya		500.000.000	Jumlah Peserta yang mengikuti gita bahasa	60 Orang		99,97	60 Orang	100	
2.22.002.1.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		384.000.000	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan		96,15	1 Laporan	100	
2.22.002.1.02.03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemanjau Kebudayaan		486.200.000	Jumlah Orang/ Lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemanjau kebudayaan	18 Sertifikat		100	18 Sertifikat	100	
2.22.002.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		700.000.000				100			
2.22.002.1.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		700.000.000	Jumlah Pembinaan Sumberdaya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang dibina (Cetak buku kamus Indonesia - Ansus)	300 Buah		100	300 Buah	100	
				Jumlah Pembinaan Sumberdaya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang dibina (Cetak kamus Indonesia - Lani)	300 Buah			300 Buah	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
2.22.003	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		3.712.499.789			3.703.163.048	99,75			
2.22.003.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		3.712.499.789			3.703.163.048	99,75			
2.22.003.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		2.354.779.789	Jumlah Sumber Daya Manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) Jumlah Sumber Daya Manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) Pelatihan Juri Seni)	60 Orang	2.349.559.721	99,78	60 Orang	100	
				Jumlah Sumber Daya Manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) Jumlah Sumber Daya Manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) Pelatihan Seni Lukis Bagi Sanggar Seni Remaja)	68 Orang			68 Orang	100	
2.22.003.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		1.357.720.000	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang di tingkatkan kapasitasnya (Kias Budaya Barua, Ke 1) Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang di tingkatkan kapasitasnya (Pergelaran dan pameran seni kreasi baru daerah	1 Kegiatan	1.353.603.327	99,7	1 Kegiatan	100	
								1 Kegiatan	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
2.22.004	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		2.825.713.820	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang di tingkatkan kapasitasnya (Temu Karya Taman Budaya Se - Indonesia)	1 Kegiatan			1 Kegiatan	100	
2.22.004.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi		2.825.713.820							
2.22.004.1.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah		2.825.713.820	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	5 Unit	2.744.653.647	97,13	5 Unit	100	
2.22.005	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		1.568.996.750							
2.22.005.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		450.000.000							
2.22.005.1.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		150.000.000	Jumlah Objek diduga cagar budaya yang di daftarkan	1 Objek	150.000.000	100	1 Objek	100	
2.22.005.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya		300.000.000	Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	4 Objek	296.274.290	98,76	4 Objek	100	
2.22.005.1.02.01	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		1.118.996.750							
2.22.005.1.02.02	Pengembangan Cagar Budaya		700.000.000	Jumlah objek cagar budaya yang dikembangkan	2 Objek	699.807.700	99,97	2 Objek	100	
2.22.005.1.02.04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya		418.996.750	Jumlah tenaga pelestari cagar budaya yang dibina dan ditindaklanjuti kapasitasnya	38 Orang	418.996.750	100	38 Orang	100	
2.22.006	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		5.010.000.000							
2.22.006.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi		5.010.000.000							
2.22.006.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu		577.582.930	Jumlah Koleksi Museum yang di lakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu	5 Unit/kegiatan	549.278.930	95,1	5 Unit/kegiatan	100	
2.22.006.1.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseum		1.422.417.070	Jumlah sumberdaya manusia permuseum yang ditingkatkan mutu dan kapasitasnya	110 Orang	1.411.025.758	99,2	110 Orang	100	
2.22.006.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		3.010.000.000	Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum (Pameran Keilling di Kab. Blak Nomor	1 Kegiatan	2.994.050.757	99,47	1 Kegiatan	100	
				Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum (Gelar Pasar dan Pameran Noken bagi masyarakat (Kabupaten Keerom)	1 Kegiatan			1 Kegiatan	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
				Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum (Akses Masyarakat terhadap Museum)	1 Kegiatan			1 Kegiatan	100	
				Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum (Pembinaan Sanggar Noken Di 4 Kabupaten/Kota)	1 Kegiatan			1 Kegiatan	100	
				Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum (Gelar Pasar dan Pameran Noken bagi masyarakat (Kota Jayapura)	1 Kegiatan			1 Kegiatan	100	
				Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum (Pelayanan terhadap museum (Pelatihan Merajut Noken bagi siswa sekolah (Noken Masuk Sekolah)	1 Kegiatan			1 Kegiatan	100	
				Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum (Penataan Ruang Pameran Museum Noken Papua)	1 Kegiatan			1 Kegiatan	100	
				Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum (Gelar Pasar dan Pameran Noken bagi masyarakat (Kabupaten Jayapura)	1 Kegiatan			1 Kegiatan	100	
				Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum (Gelar Pasar dan Pameran Noken bagi masyarakat (Kabupaten Sarimi)	1 Kegiatan			1 Kegiatan	100	
				Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum (Pagelaran Pasar dan Pameran Noken bagi masyarakat (Kota Jayapura)	1 Kegiatan			1 Kegiatan	100	
3.26.002	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARAWISATA		6.736.984.507				6.598.100.687			
3.26.002.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		5.000.000.000				4.912.017.854			
3.26.002.1.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi		5.000.000.000		2 Unit		4.912.017.854	98,24	2 Unit	100
				Tersedianya Lokasi Daya tarik unggulan Provinsi sesuai dengan tahapan pengembangan (Pembangunan Home Stay)	5 Unit				5 Unit	100
				Tersedianya Lokasi Daya tarik unggulan Provinsi sesuai dengan tahapan pengembangan (Pembangunan Loss Jajanan Kulliner)						

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
					12 Unit			12 Unit	100	
				Tersedianya Lokasi Daya tarik unggulan Provinsi sesuai dengan tahapan pengembangan (Pembangunan Ruang Ganti dan/Toilet)	12 Unit			12 Unit	100	
3.26.002.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		1.736.984.507			1.686.082.833	97,07			
3.26.002.1.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi		1.736.984.507	Tersedianya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (Pembangunan Guest House di desa Bhanu Muah)	2 Unit	1.686.082.833	97,07	2 Unit	100	
3.26.003	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		500.000.000			499.912.460	99,98			
3.26.003.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		500.000.000			499.912.460	99,98			
3.26.003.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		500.000.000	Tertaksananya Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	50 Orang	499.912.460	99,98	50 Orang	100	
3.26.004	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		1.331.897.780			1.319.243.115	99,05			
3.26.004.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		1.331.897.780			1.319.243.115	99,05			
3.26.004.1.01.01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		1.331.897.780	Jumlah Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif	1 Unit	1.319.243.115	99,05	1 Unit	100	
3.26.005	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		2.090.000.000			1.238.375.600	59,25			
3.26.005.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		1.298.400.000			1.225.570.600	94,39			
3.26.005.1.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		500.000.000	Jumlah Peserta yang mengikuti Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat lanjutan	48 Orang	441.900.000	88,38	48 Orang	100	
3.26.005.1.01.04	Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		798.400.000	Jumlah Orang yang mengikuti fasilitas sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	25 Kelompok	783.670.600	98,16	25 Kelompok	100	
3.26.005.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		791.600.000			12.805.000	1,62			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
3.26.005.1.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		791.600.000	Jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan, Bimbingan teknis, dan pendampingan Ekonomi Kreatif	9 Kelompok	12.805.000	1,62	0	Kelompok	-
JUMLAH			49.444.367.196			47.966.222.425	97,01			
3.25.0-00.00.01.1000	Dinas Kelautan dan Perikanan		42.843.070.797			40.468.130.478	94,46			
3.25.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		21.230.628.350			19.120.061.145	90,06			
3.25.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.316.958.700			1.315.982.468	99,93			
3.25.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		825.158.700	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	824.231.248	99,89	1	Dokumen	100
3.25.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		491.800.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	491.751.220	99,99	1	Laporan	100
3.25.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		17.403.903.400	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang	15.306.873.435	87,95	112	Orang	100
3.25.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		17.403.903.400	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/ Bulan	15.306.873.435	87,95	112	Orang/ Bulan	100
3.25.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		600.000.000			600.000.000	100			
3.25.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		600.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	600.000.000	100	1	Laporan	100
3.25.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.504.583.250			1.502.737.742	99,88			
3.25.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		15.450.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.450.000	100	1	Laporan	100
3.25.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		627.600.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	626.759.742	99,87	1	Laporan	100
3.25.001.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor		78.800.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	78.528.000	99,65	1	Laporan	100
3.25.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		782.733.250	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	782.000.000	99,91	1	Laporan	100
3.25.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		405.183.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	394.467.500	97,36	14	Unit	100

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
3.25.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan Dibayarkan Pajaknya		405.183.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	394.467.500	97,36	14 Unit	100	
3.25.002	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		2.381.028.160			2.378.110.764	99,88			
3.25.002.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mi di Luar Minyak dan Gas Bumi		1.029.678.160			1.028.126.920	99,85			
3.25.002.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		492.000.000	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	40 Ha	490.987.570	99,79	40 Ha	100	
3.25.002.1.01.04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil		537.678.160	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	15 Orang	537.139.350	99,9	15 Orang	100	
3.25.002.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil		1.351.350.000			1.349.983.844	99,9			
3.25.002.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		528.350.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	528.305.769	99,99	1 Dokumen	100	
3.25.002.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		143.000.000	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Kelompok	143.000.000	100	2 Kelompok	100	
3.25.002.1.03.03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		150.000.000	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	20 Orang	149.744.550	99,83	20 Orang	100	
3.25.002.1.03.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		530.000.000	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	4 Kelompok	528.933.525	99,8	4 Kelompok	100	
3.25.003	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		3.460.997.100			3.454.526.164	99,81			
3.25.003.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mi		2.180.100.000			2.175.959.764	99,81			
3.25.003.1.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		-			-	-			
3.25.003.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		1.741.900.000	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mi	5 Unit	1.737.759.764	99,76	5 Unit	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI			TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)	
						KEU		KELUARAN (K) (9)		
						Rp (7)	% (8)			% (10)
3.25.003.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		438.200.000	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	2 Unit	438.200.000	100	2 Unit	100	
3.25.003.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		1.280.897.100			1.278.566.400	99,82			
3.25.003.1.06.01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan		214.723.750	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	1 Pelabuhan Perikanan	213.805.600	99,57	1 Pelabuhan Perikanan	100	
3.25.003.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		562.023.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	560.680.000	99,76	1 Unit	100	
3.25.003.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		504.150.350	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	3 Layanan	504.080.800	99,99	3 Layanan	100	
3.25.004	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		6.570.381.500			6.537.290.992	99,5			
3.25.004.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		3.689.407.000			3.677.094.144	99,67			
3.25.004.1.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		39.600.000	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	39.200.000	98,99	1 Dokumen	100	
3.25.004.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		3.189.912.500	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	22 Unit	3.178.252.674	99,63	21 Unit	95,45	
3.25.004.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		239.894.500	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	239.641.470	99,89	1 Unit	100	
3.25.004.1.05.07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi		220.000.000	Jumlah Pembudidaya	10 Orang	220.000.000	100	10 Orang	100	
3.25.004.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		2.880.974.500			2.860.196.848	99,28			
3.25.004.1.06.01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		537.000.000	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	533.634.000	99,37	4 Unit	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
3.25.004.1.06.02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		2.343.974.500	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	2.326.562.848	99,26	1 Unit	100	
3.25.005	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		6.042.896.440			5.822.365.696	96,35			
3.25.005.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		6.042.896.440			5.822.365.696	96,35			
3.25.005.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil		837.611.440	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	837.560.080	99,99	1 Dokumen	100	
3.25.005.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil		326.200.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	325.516.860	99,79	1 Dokumen	100	
3.25.005.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil		96.725.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	96.725.000	100	1 Dokumen	100	
3.25.005.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		4.782.360.000	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	5 Kelompok	4.562.563.756	95,4	4 Kelompok	80	
3.25.006	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		3.157.139.247			3.155.775.717	99,96			
3.25.006.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		46.200.000			46.200.000	100			
3.25.006.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		46.200.000	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	46.200.000	100	1 Dokumen	100	
3.25.006.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		2.498.225.500			2.496.861.970	99,95			
3.25.006.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		162.000.000			162.000.000	100			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)	
						KEU		KELUARAN			
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)		
3.25.006.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing		2.336.225.500			2.334.861.970	99,94				(11)
3.25.006.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		612.713.747			612.713.747	100				
3.25.006.1.03.02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		612.713.747			612.713.747	100				
	JUMLAH		42.843.070.797			40.468.130.478	94,46				
3.29.0-00.0-00.01.1000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral		50.338.979.825			47.093.601.428	93,55				
3.29.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		31.043.332.900			28.367.792.364	91,38				
3.29.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		428.391.400			426.073.000	99,46				
3.29.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		112.331.400	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	110.481.000	98,35	1 Dokumen	100		
3.29.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		316.060.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	315.592.000	99,85	2 Dokumen	100		
3.29.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		19.329.953.000			17.010.955.270	88				
3.29.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		19.329.953.000	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	17.010.955.270	88	14 Bulan	100		
3.29.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.603.666.270			1.596.484.700	99,55				
3.29.001.1.05.08	Pemindahan Tugas ASN		340.494.500	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	23 Orang	338.739.300	99,48	23 Orang	100		
3.29.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		739.421.770	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	734.045.400	99,27	17 Orang	100		
3.29.001.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		523.750.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	523.700.000	99,99	55 Orang	100		
3.29.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.745.263.500			3.653.714.038	97,56				
3.29.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		115.978.600	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	126 Paket	115.944.258	99,97	126 Paket	100		
3.29.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		28.200.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	28.200.000	100	12 Paket	100		

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
3.29.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		90.760.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	89.783.800	98,92	12 Paket	100	
3.29.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		39.600.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	22.880.000	57,78	12 Dokumen	100	
3.29.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		239.040.000	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	238.927.000	99,95	1 Laporan	100	
3.29.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.326.884.900	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.282.610.680	98,1	1 Laporan	100	
3.29.001.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		904.800.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	875.368.300	96,75	1 Dokumen	100	
3.29.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.288.553.130			3.278.218.699	99,69			
3.29.001.1.07.05	Pengadaan Mebel		17.000.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	16.999.650	100	1 Paket	100	
3.29.001.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1.241.553.130	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	122 Unit	1.237.754.685	99,69	122 Unit	100	
3.29.001.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2.030.000.000	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	2.023.464.364	99,68	4 Unit	100	
3.29.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		245.296.000			42.636.157	17,38			
3.29.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		245.296.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42.636.157	17,38	12 Laporan	100	
3.29.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.402.209.600			2.359.710.500	98,23			
3.29.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		178.309.600	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit	144.570.000	81,08	21 Unit	100	
3.29.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		103.900.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	103.823.400	99,93	40 Unit	100	
3.29.001.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2.120.000.000	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	4 Unit	2.111.317.100	99,59	4 Unit	100	
3.29.002	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN		2.095.100.000			2.078.747.753	99,22			
3.29.002.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		1.665.250.000			1.654.927.753	99,38			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI			TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)	
						KEU		KELUARAN (K) (9)		
						Rp (7)	% (8)			% (10)
3.29.002.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		101.000.000	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	99.027.050	98,05	1 Dokumen	100	(11)
3.29.002.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		1.524.250.000	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	3 Dokumen	1.515.900.703	99,45	3 Dokumen	100	
3.29.002.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		40.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	40.000.000	100	1 Laporan	100	
3.29.002.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		429.850.000			423.820.000	98,6			
3.29.002.1.03.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah		57.850.000	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	57.750.000	99,83	1 Dokumen	100	
3.29.002.1.03.02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah		222.000.000	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	216.070.000	97,33	1 Laporan	100	
3.29.002.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah		150.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	150.000.000	100	1 Laporan	100	
3.29.003	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		652.420.000			642.270.000	98,44			
3.29.003.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		277.700.000			271.300.000	97,7			
3.29.003.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat		65.200.000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan	65.200.000	100	1 Laporan	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
3.29.003.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		212.500.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	2 Laporan	206.100.000	96,99	2 Laporan	100	(11)
3.29.003.1.06	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		99.500.000			99.500.000	100			
3.29.003.1.06.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		99.500.000	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	99.500.000	100	1 Laporan	100	
3.29.003.1.13	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		120.720.000			118.070.000	97,8			
3.29.003.1.13.03	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		120.720.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	2 Laporan	118.070.000	97,8	2 Laporan	100	
3.29.003.1.14	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPE)		83.500.000			82.900.000	99,28			
3.29.003.1.14.02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPE)		83.500.000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPE)	3 Laporan	82.900.000	99,28	3 Laporan	100	
3.29.003.1.16	Penetapan Harga Patokan Batuan		71.000.000			70.500.000	99,3			
3.29.003.1.16.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Batuan		71.000.000	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	3 Dokumen	70.500.000	99,3	3 Dokumen	100	
3.29.005	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN		-			-	-			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR	
						KEU		KELUARAN			
						Rp	%	(K)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
3.29.005.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun		-				-				
3.29.005.1.03.03	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	2 Laporan		-	0 Laporan			
3.29.005.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun			Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	2 Laporan		-	0 Laporan			
3.29.006	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		16.548.126.925				16.004.791.311	96,72			
3.29.006.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		166.900.000				166.200.000	99,58			
3.29.006.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		166.900.000	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1 Laporan		166.200.000	99,58	1 Laporan	100	
3.29.006.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan		16.381.226.925				15.838.591.311	96,69			
3.29.006.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		901.000.000	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	5 Dokumen		899.858.198	99,87	5 Dokumen	100	
3.29.006.1.06.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		916.000.000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Laporan		912.750.000	99,65	1 Laporan	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
3.29.006.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		14.509.026.925	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1201 Unit	13.970.783.113	96,29	1201 Unit	100	
3.29.006.1.06.07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		55.200.000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Laporan	55.200.000	100	1 Laporan	100	
	JUMLAH		50.338.979.825			47.093.601.428	93,55			
4.01.0-00.00.01.0000	Sekretariat Daerah		421.302.288.692			341.362.627.515	81,03			
4.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		421.302.288.692			341.362.627.515	81,03			
4.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		38.715.341.000			34.101.625.000	88,08			
4.01.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		38.715.341.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan	34.101.625.000	88,08	0 Orang/ Bulan	-	
4.01.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		22.500.000			-	-			
4.01.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		22.500.000			-	-			
4.01.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		30.272.564.150			20.510.556.595	67,75			
4.01.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		382.760.950			315.607.000	82,46			
4.01.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Percetakan		1.350.013.200			1.347.384.600	99,81			
4.01.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		3.500.040.000			3.448.640.000	98,53			
4.01.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		25.039.750.000			15.398.924.995	61,5			
4.01.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.274.620.000			7.242.895.924	99,56			
4.01.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		7.274.620.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	7.242.895.924	99,56	0 Unit	-	
4.01.001.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		17.360.562.722			-	-			
4.01.001.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1.218.096.277	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang/Bulan	-	-	0 Orang/Bulan	-	
4.01.001.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		16.142.466.445	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang/ Bulan	-	-	0 Orang/ Bulan	-	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR	
						KEU		KELUARAN			
						Rp	%	(K)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
4.01.001.1.12	Fasilitasi Kerumahanggaan Sekretariat Daerah		300.293.080.820			268.901.359.456	89,55				
4.01.001.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		300.293.080.820	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	0 Paket	268.901.359.456	89,55	0 Paket			
4.01.001.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		11.282.080.000			1.131.827.000	10,03				
4.01.001.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		11.282.080.000			1.131.827.000	10,03				
4.01.001.1.14	Fasilitasi Keprotokolan		16.081.540.000			9.474.363.540	58,91				
4.01.001.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		16.081.540.000			9.474.363.540	58,91				
	JUMLAH		421.302.288.692			341.362.627.515	81,03				
4.01.0-00.0-00.01.1000	Biro Umum dan Protokol		87.978.280.785			81.447.186.425	92,58				
4.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		63.708.280.785			57.431.692.808	90,15				
4.01.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		762.736.610			751.885.000	98,58				
4.01.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Jayapura	313.502.860	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	32 Buku	313.195.950	99,9	0 Buku			
4.01.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Jayapura	449.233.750	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Buku	438.689.050	97,65	0 Buku			
4.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		33.538.952.100			29.071.726.807	86,68				
4.01.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		32.998.952.300	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	28.534.803.717	86,47	250 Tahun	25,000		
4.01.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Jayapura	199.999.800	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	198.995.520	99,5	0 Laporan			
4.01.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Jayapura	340.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	45 Buku	337.927.570	99,39	0 Buku			
4.01.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.350.500.000			1.291.498.590	95,63				
4.01.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Jayapura	895.500.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	330 Stel	894.219.000	99,86	0 Stel			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI			TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)	
						KEU		KELUARAN (K) (9)		
						Rp (7)	% (8)			% (10)
4.01.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Jayapura	455.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	397.279.590	87,31	0 Orang	-	(11)
4.01.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		9.758.933.000			9.565.849.559	98,02			
4.01.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		50.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	49.450.500	98,9	0 Paket	-	
4.01.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura)	596.120.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	594.458.260	99,72	0 Paket	-	
4.01.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Jayapura	2.200.487.500	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.173.950.620	98,79	0 Paket	-	
4.01.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Jayapura	2.297.425.500	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	2.204.130.796	95,94	0 Paket	-	
4.01.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Jayapura	144.300.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	142.685.600	98,88	0 Dokumen	-	
4.01.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Jayapura	2.883.000.000	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	275 orang	2.862.070.220	99,27	0 orang	-	
4.01.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Jayapura	1.587.600.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Orang	1.539.103.563	96,95	0 Orang	-	
4.01.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.555.000.000			1.537.000.000	98,84			
4.01.001.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1.555.000.000			1.537.000.000	98,84			
4.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		10.733.599.300			9.519.122.875	88,69			
4.01.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		57.526.000			57.479.104	99,92			
4.01.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		10.676.073.300	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	9.461.643.771	88,62	0 Tahun	-	
4.01.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.508.560.000			5.209.135.972	94,56			
4.01.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Jayapura	400.000.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	148 Unit	74.855.000	18,71	0 Unit	-	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR		
						KEU		KELUARAN				
						Rp	%	(K)	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
4.01.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Jayapura	1.078.120.000				1.073.030.239	99,53				
4.01.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		200.040.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit		196.692.000	98,33	0 Unit		-	
4.01.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Jayapura	3.230.000.000				3.217.019.733	99,6				
4.01.001.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		600.400.000				647.539.000	107,85				
4.01.001.1.14	Fasilitasi Keprotokolan		499.999.775				485.474.005	97,09				
4.01.001.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Kota Jayapura	499.999.775				485.474.005	97,09				
4.01.007	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		24.270.000.000				24.015.493.617	98,95				
4.01.007.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		24.270.000.000				24.015.493.617	98,95				
4.01.007.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		24.270.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	6 Bulan		24.015.493.617	98,95	0 Bulan		-	
	JUMLAH		87.978.280.785				81.447.186.425	92,58				
4.01.0-00.00.01.2000	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa		32.605.495.650				31.854.209.521	97,7				
4.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		21.530.188.300				20.784.605.171	96,54				
4.01.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		209.000.000				208.991.500	100				
4.01.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		80.000.000	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		79.992.000	99,99	3 Dokumen		100	
4.01.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		69.000.000	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		68.999.500	100	1 Dokumen		100	
4.01.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		60.000.000	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		60.000.000	100	1 Laporan		100	
4.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10.519.038.300				9.773.627.422	92,91				
4.01.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		10.378.038.300	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/ Bulan		9.632.627.422	92,82	73 Orang/ Bulan		100	
4.01.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		111.000.000	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen		111.000.000	100	1 Dokumen		100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
4.01.001.1.02.08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		30.000.000	Jumlah dokumen laporan yang disusun	1 Dokumen	30.000.000	100	1 Dokumen	100	(11)
4.01.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		20.000.000							
4.01.001.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		20.000.000	Jumlah dokumen hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000	100	1 Dokumen	100	
4.01.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		400.000.000							
4.01.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		150.000.000	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yg mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 Orang	150.000.000	100	20 Orang	100	
4.01.001.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		250.000.000	Jumlah Sosialisasi	1 Kegiatan	250.000.000	100	1 Kegiatan	100	
4.01.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		6.367.150.000							
4.01.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		33.100.000	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	33.100.000	100	1 Paket	100	
4.01.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		204.000.000	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	1 Paket	204.000.000	100	1 Paket	100	
4.01.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		520.000.000	Jumlah dokumen kantor yang dicetak dan digandakan	2 Paket	520.000.000	100	2 Paket	100	
4.01.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		60.000.000	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan yang disediakan	12 Bulan	60.000.000	100	12 Bulan	100	
4.01.001.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material		1.072.000.000	Jumlah paket penyediaan ATK	1 Paket	1.072.000.000	100	1 Paket	100	
4.01.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		1.344.000.000	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	11340 Porsi	1.344.000.000	100	11340 Porsi	100	
4.01.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3.034.050.000	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	3.034.050.000	100	1 Laporan	100	
4.01.001.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100.000.000	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	99.836.250	99,84	1 Dokumen	100	
4.01.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		594.000.000							
4.01.001.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya		594.000.000	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Paket	594.000.000	100	2 Paket	100	
4.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.871.000.000							
4.01.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		321.000.000	Terlayannya pelaksanaan surat menyurat	12 Bulan	321.000.000	100	12 Bulan	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
4.01.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		75.000.000	Tersediaannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	74.999.999	100	12 Bulan	100	
4.01.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2.475.000.000	Tersediaannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	2.475.000.000	100	12 Bulan	100	
4.01.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		550.000.000			550.000.000	100			
4.01.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		400.000.000	Tersediaannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	400.000.000	100	12 Bulan	100	
4.01.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		150.000.000	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	26 Unit	150.000.000	100	26 Unit	100	
4.01.007	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		11.075.307.350			11.069.604.350	99,95			
4.01.007.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		7.657.107.350			7.657.087.350	100			
4.01.007.1.01.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa		1.252.457.350	Jumlah laporan hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1.252.457.350	100	1 Laporan	100	
4.01.007.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		5.939.000.000	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	5.938.980.000	100	1 Laporan	100	
4.01.007.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa		465.650.000	Jumlah laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	465.650.000	100	1 Laporan	100	
4.01.007.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		2.163.400.000			2.157.717.000	99,74			
4.01.007.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik		1.378.400.000	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	1.377.717.000	99,95	1 Laporan	100	
4.01.007.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		455.000.000	Jumlah laporan hasil Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	450.000.000	98,9	1 Laporan	100	
4.01.007.1.02.03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		330.000.000	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	330.000.000	100	1 Laporan	100	
4.01.007.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		1.254.800.000			1.254.800.000	100			
4.01.007.1.03.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa		504.800.000	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	504.800.000	100	1 Laporan	100	
4.01.007.1.03.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa		400.000.000	Jumlah dokumen hasil Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	400.000.000	100	1 Dokumen	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI			TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN (K) (9)	
						Rp (7)	% (8)		
4.01.007.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		350.000.000	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	350.000.000	100	1 Laporan	100
	JUMLAH		32.605.495.650			31.854.209.521	97,7		
4.01.0-00.0-00.01.3000	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus		30.207.898.610			28.543.408.029	94,49		
4.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		16.988.970.600			15.391.472.354	90,6		
4.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10.491.216.800			8.894.900.534	84,78		
4.01.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		10.491.216.800	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/ Bulan	8.894.900.534	84,78	0 Orang/ Bulan	-
4.01.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		360.000.000			360.000.000	100		
4.01.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		360.000.000			360.000.000	100		
4.01.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		4.796.145.200			4.796.053.500	100		
4.01.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		119.170.200			119.128.500	99,96		
4.01.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		2.389.950.000			2.389.900.000	100		
4.01.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.287.025.000			2.287.025.000	100		
4.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		352.382.600			352.377.320	100		
4.01.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		352.382.600			352.377.320	100		
4.01.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		989.226.000			988.141.000	99,89		
4.01.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dines atau Kendaraan Dinas Jabatan		678.466.000			678.466.000	100		
4.01.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		310.760.000			309.675.000	99,65		
4.01.002	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		950.000.167			949.980.700	100		
4.01.002.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		950.000.167			949.980.700	100		
4.01.002.1.02.04	Pengelolaan Tatakelana Pemerintahan		300.000.000			299.981.700	99,99		

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
4.01.002.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik		650.000.167			649.999.000	100			
4.01.003	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		7.268.927.843			7.218.613.915	99,31			
4.01.003.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		4.773.658.018			4.723.466.220	98,95			
4.01.003.1.01.01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan		1.200.025.010			1.200.004.520	100			
4.01.003.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum		3.172.063.008			3.121.891.700	98,42			
4.01.003.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah		401.570.000			401.570.000	100			
4.01.003.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah		2.495.269.825			2.495.147.695	100			
4.01.003.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		700.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	0 Dokumen	699.949.695	99,99	0 Dokumen	-	
4.01.003.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan		1.000.000.000			999.935.000	99,99			
4.01.003.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan		795.269.825			795.263.000	100			
4.01.009	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA		5.000.000.000			4.983.341.060	99,67			
4.01.009.3.02	Pengelolaan dan Koordinasi Otonomi Khusus		5.000.000.000			4.983.341.060	99,67			
4.01.009.3.02.01	Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus		750.000.000			749.994.900	100			
4.01.009.3.02.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus		4.250.000.000			4.233.346.160	99,61			
	JUMLAH		30.207.898.610			28.543.408.029	94,49			
4.01.0-00.00.01.4000	Biro Hukum		36.428.020.786			28.523.749.330	78,3			
4.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		18.232.908.786			13.597.090.307	74,57			
4.01.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		158.000.000			113.564.706	71,88			
4.01.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD		158.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	113.564.706	71,88	1 Dokumen	100	
4.01.001.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		-			-	-			
4.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.768.217.560			4.656.646.705	80,73			
4.01.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5.768.217.560			4.656.646.705	80,73			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
4.01.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.009.000.000			556.410.000	55,14			
4.01.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		324.000.000			323.010.000	99,69			
4.01.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		685.000.000			233.400.000	34,07			
4.01.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		8.467.159.010			6.841.881.142	80,8			
4.01.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		478.240.000			378.177.000	79,08			
4.01.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		737.537.710	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	675.605.979	91,6	0 Paket	-	
4.01.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		803.936.300	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	619.565.765	77,07	0 Paket	-	
4.01.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		60.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2000 Dokumen	21.600.000	36	0 Dokumen	-	
4.01.001.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		764.320.000			761.000.316	99,57			
4.01.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		5.623.125.000			4.385.932.082	78			
4.01.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		504.162.000			467.000.000	92,63			
4.01.001.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		504.162.000			467.000.000	92,63			
4.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.408.500.216			486.961.714	34,57			
4.01.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		904.400.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	415.486.000	45,94	0 Laporan	-	
4.01.001.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		504.100.216	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	71.475.714	14,18	0 Laporan	-	
4.01.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		917.870.000			474.626.040	51,71			
4.01.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		817.870.000			474.626.040	58,03			
4.01.001.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Barak dan Lainnya		100.000.000			-	-			
4.01.005	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		18.195.112.000			14.926.659.023	82,04			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR	
						KEU		KELUARAN			
						Rp	%	(K)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
4.01.005.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan		11.583.412.000				10.041.178.242	86,69			
4.01.005.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan		4.524.852.000				4.331.921.358	95,74			
4.01.005.1.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan		1.500.000.000	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	8 Dokumen		1.500.000.000	100	0 Dokumen	-	
4.01.005.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya		687.200.000				544.200.000	79,19			
4.01.005.1.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota		4.871.360.000				3.665.056.884	75,24			
4.01.005.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum		6.611.700.000				4.885.480.781	73,89			
4.01.005.1.02.01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum		6.611.700.000				4.885.480.781	73,89			
	JUMLAH		36.428.020.786				28.523.749.330	78,3			
4.01.0-00.00.01.5000	Biro Organisasi		28.285.805.429				23.441.353.058	82,87			
4.01.001	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		13.819.039.334				9.325.814.701	67,49			
4.01.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		28.189.100				28.018.100	99,39			
4.01.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		12.134.100	Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen		12.063.100	99,41	1 Dokumen	100	
4.01.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		16.055.000	Tersusunnya Dokumen RKA -SKPD	1 Dokumen		15.955.000	99,38	4 Dokumen	100	
4.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9.287.156.200				4.860.514.652	52,34			
4.01.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		9.266.356.200	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/Bulan		4.849.714.652	52,34	39 orang/Bulan	100	
4.01.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		10.000.000	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen		-	-	1 Dokumen	100	
4.01.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		10.800.000	Tersusunnya Laporan Keuangan/ Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan laporan Keuangan/ Bulanan/Triwulanan, Semesteran SKPD	12 Dokumen		10.800.000	100	12 Dokumen	100	
4.01.001.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		956.700.000				924.150.690	96,6			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
4.01.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		148.200.000	Tersediannya Pakaian Dinas ASN Biro Beserta Atribut Kelengkapannya	39 Stel	148.200.000	100	39 Stel	100	
4.01.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		808.500.000	ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 40 ASN	775.950.690	95,97	40 40 ASN	100	
4.01.001.1.06	Administrasi Umum Peringkat Daerah		3.082.744.034			3.077.305.373	99,82			
4.01.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		138.800.000	Tersediannya Bahan Logistik Kantor	12 12 paket	138.600.000	99,86	12 12 paket	100	
4.01.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		771.850.000	Tersediannya Barang Cetak dan Pengadaan yang di Sedialkan	15 15 Paket	771.817.424	100	15 15 Paket	100	
4.01.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan		19.800.000	Tersediannya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	1 1320 dokumen bacaan	19.800.000	100	1 1320 dokumen bacaan	100	
4.01.001.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material		211.416.484	Perundang-Undangan Tersediannya Paket Bahan/Material /ATK	1 56 jenis	211.033.386	99,82	1 56 jenis	100	
4.01.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		312.020.000	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 3 paket	312.020.000	100	1 3 paket	100	
4.01.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.620.000.000	Terselesaikan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 8 Laporan	1.615.282.013	99,71	1 8 Laporan	100	
4.01.001.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		8.857.550	Terselesaikan Dokumen Penata Usahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 59 orang			1 59 orang	100	
4.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		224.500.000		8 8 Dokumen	8.752.550	98,81	8 8 Dokumen	100	
4.01.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		18.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 2 belanja jasa	4.911.750	27,29	1 2 belanja jasa	100	
4.01.001.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		140.500.000	Selesaiannya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1 3 Laporan	139.754.500	99,47	1 3 Laporan	100	
4.01.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		66.000.000	Tersediannya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 4 Jenis			1 4 Jenis	100	
4.01.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		239.750.000	Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 1 sopir	66.000.000	100	1 1 sopir	100	
4.01.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		239.750.000	Tertib administrasi Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16 16 unit	225.159.636	93,91	16 16 unit	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR	
						KEU		KELUARAN			
						Rp	%	(K)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
4.01.002	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		14.466.766.095				14.115.538.357	97,57			
4.01.002.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		9.477.976.445				9.277.362.066	97,88			
4.01.002.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi		3.000.000.000		1 1 Dokumen	1 1 Dokumen	2.936.547.569	97,88	1 1 Dokumen	100	
				Terwujudnya OPD pemerintah Provinsi Papua					1 1 Dokumen	100	
				Terwujudnya OPD pemerintah daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran					1 1 Dokumen	100	
4.01.002.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		2.500.000.000				2.392.458.020	95,7	1 11 Kabupaten dan Kota	100	
4.01.002.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan		3.977.976.445				3.948.356.477	99,26	1 100 persen	100	
				Tersusunnya Jumlah OPD yang memiliki data Evaluasi Jabatan					1 100 persen	100	
				Tersusunnya Jumlah OPD yang memiliki data Matrix Peran Hasil					1 30 persen	100	
				Tersusunnya PERGUB Analisis Jabatan, Analisis Beban, Kompetensi Jabatan dan Peta Jabatan					1 30 persen	100	
				Tersusunnya Aplikasi Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan					1 40 persen	100	
				Tersusunnya Dokumen Data Formasi Jabatan OPD					1 100 persen	100	
				Tersusunnya Data Evaluasi Jabatan OPD					1 30 persen	100	
				Tersusunnya Data Evaluasi Jabatan OPD					1 30 persen	100	
				Tersusunnya Data Analisis Jabatan OPD					1 30 persen	100	
				Tersusunnya Data Analisis Jabatan OPD					1 30 persen	100	
				Tersusunnya Data Standar Kompetensi Jabatan OPD					1 30 persen	100	
				Pelaksanaan Analisis jabatan, Analisis beban kerja dan Evaluasi Jabatan					1 100 persen	100	
				Tersusunnya Jumlah OPD yang memiliki data Analisis Beban Kerja					1 100 persen	100	
				Tersusunnya Jumlah OPD yang memiliki data Analisis Jabatan					1 100 persen	100	
				Tersusunnya Jumlah OPD yang memiliki data Kompetensi Jabatan					1 100 persen	100	
4.01.002.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		4.988.789.650				4.838.176.291	96,98			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
4.01.002.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		726.183.600	Presentase Kab/kota yang melaksanakan Reformasi Birokrasi Predikat penilaian PMPRB Provinsi Papua Tetaksananya Reformasi Birokrasi pada SKPD Provinsi Papua	1 25% 1 Nilai "CC" 1 31 persen	683.812.200	94,17	1 25% 1 Nilai "CC" 1 31 persen	100 100 100	
4.01.002.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		1.381.401.850	Nilai Sakip Provinsi Papua	1 Nilai "B"	1.363.084.350	98,67	1 Nilai "B"	100	
4.01.002.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja		302.866.100	Pelaksanaan Budaya Kerja pada SKPD Provinsi Papua	1 20 persen	300.158.851	99,11	1 20 persen	100	
					1 1 Dokumen			1 1 Dokumen	100	
					1 10 persen			1 10 persen	100	
4.01.002.1.02.04	Pengelolaan Tataletakana Pemerintahan		1.087.818.600	Tersedianya Dokumen Peta Proses Bisnis SKPD; Teraplikasinya penggunaan Tata Naskah Dinas di SKPD Provinsi Papua	1 30 persen 1 35 SKPD	1.072.027.618	98,55	1 30 persen 1 35 SKPD	100 100	
4.01.002.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik		1.490.519.500	Pelaksanaan Pelayanan Publik dilindungi pemerintah Provinsi Papua Pelaksanaan SOP di SKPD Pelaksanaan Pelayanan Publik Terlaksananya Forum Konsultasi Pelayanan Publik pada Upp Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat oleh SKPD	1 37 persen 1 10 persen 1 37 persen 1 3 persen 1 60 persen	1.419.093.272	95,21	1 37 persen 1 10 persen 1 37 persen 1 3 persen 1 60 persen	100 100 100 100 100	
	JUMLAH		28.285.805.429			23.441.353.058	82,87			
4.02.0-00.00.01.1.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua		482.553.782.528			465.159.421.363	96,4			
4.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		155.888.376.126			144.373.482.920	92,61			
4.02.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.140.000.000			1.140.000.000	100			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
4.02.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1.140.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.140.000.000	100	1 Dokumen	100	
4.02.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		24.547.519.812			23.099.415.961	94,1			
4.02.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		13.484.199.812	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang/ Bulan	12.036.095.961	89,26	93 Orang/ Bulan	100	
4.02.001.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		10.384.200.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	10.384.200.000	100	1 Dokumen	100	
4.02.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		351.500.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	351.500.000	100	3 Laporan	100	
4.02.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		327.620.000	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	327.620.000	100	3 Laporan	100	
4.02.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		2.224.594.408			2.224.525.172	100			
4.02.001.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		2.224.594.408	Jumlah Orang Dalam Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	38 Orang	2.224.525.172	100	38 Orang	100	
4.02.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		5.131.500.000	Jumlah Paket Dalam Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	31 Paket			31 Paket	100	
4.02.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		799.500.000	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150 Orang	799.500.000	100	150 Orang	100	
4.02.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		3.008.000.000	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	108 Orang	2.960.266.526	98,41	108 Orang	100	
4.02.001.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Papua	1.324.000.000	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	1.322.801.635	99,91	100 Orang	100	
4.02.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		19.151.574.259			18.749.738.031	97,9			
4.02.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		600.054.359	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Laporan	600.054.359	100	1 Laporan	100	
4.02.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		752.000.000	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	499.390.000	66,41	1 Laporan	100	
4.02.001.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		595.000.000	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Laporan	450.000.000	75,63	1 Laporan	100	
4.02.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		8.977.019.900	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3 Laporan	8.977.019.256	100	3 Laporan	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
4.02.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1.000.000.000	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	3 Dokumen	1.000.000.000	100	3 Dokumen	100	
4.02.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan		360.000.000	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	4 Dokumen	360.000.000	100	4 Dokumen	100	
4.02.001.1.06.08	Perundang-Undangan		3.467.000.000	Perundang-Undangan	1 Laporan	3.467.000.000	100	1 Laporan	100	
4.02.001.1.06.09	Fasilitas Kunjungan Tamu		3.400.500.000	Teraksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	4 laporan	3.396.274.416	99,88	4 laporan	100	
4.02.001.1.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3.161.117.000	Teraksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.881.871.281	91,17			
4.02.001.1.07.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		561.117.000		1 Laporan	561.080.000	99,99	1 Laporan	100	
4.02.001.1.07.07	Pengadaan Mebel		2.600.000.000	Tersedianya Pengadaan Mebel	1 Laporan	2.320.791.281	89,26	1 Laporan	100	
4.02.001.1.08	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		12.997.156.392	Tersedianya Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1 Laporan	12.719.054.133	97,86			
4.02.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		800.000.000	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	800.000.000	100	1 Laporan	100	
4.02.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		3.997.560.000	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	3.719.784.985	93,05	3 Laporan	100	
4.02.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		8.199.596.392	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	8.199.269.148	100	1 Laporan	100	
4.02.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		13.093.300.000			13.042.590.148	99,61			
4.02.001.1.09.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.414.820.000	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Laporan	1.412.166.600	99,81	1 Laporan	100	
4.02.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1.613.400.000	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Laporan	1.613.399.848	100	1 Laporan	100	
4.02.001.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		700.000.000	Tersedianya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3 Laporan	670.039.000	95,72	3 Laporan	100	
4.02.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		9.365.080.000	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Laporan	9.346.984.700	99,81	3 Laporan	100	
4.02.001.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		74.441.614.255			65.433.720.033	87,9			
4.02.001.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		73.751.614.255	Tercapainya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	1 Laporan	64.753.720.033	87,8	1 Laporan	100	
4.02.001.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		-			-	-			
4.02.001.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		690.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	69 Laporan	680.000.000	98,55	69 Laporan	100	
4.02.002	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		211.186.646.402			205.674.178.443	97,39			
4.02.002.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		3.514.020.000			3.307.679.100	94,13			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
4.02.002.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		2.362.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	2.361.285.300	99,97	1 Dokumen	100	
4.02.002.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda		1.000.700.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	1 Dokumen	795.073.800	79,45	1 Dokumen	100	
4.02.002.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		151.320.000	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	151.320.000	100	1 Dokumen	100	
4.02.002.1.02.01	Pembahasan Kebijakan Anggaran		527.650.500	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran	1 Dokumen	527.650.500	100	1 Dokumen	100	
4.02.002.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS		104.250.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	104.250.000	100	1 Dokumen	100	
4.02.002.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		100.200.000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	100.200.000	100	1 Dokumen	100	
4.02.002.1.02.03	Pembahasan APBD		100.000.500	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	100.000.500	100	1 Dokumen	100	
4.02.002.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD		100.500.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	100.500.000	100	1 Dokumen	100	
4.02.002.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		122.700.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	122.700.000	100	1 Dokumen	100	
4.02.002.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		4.908.500.000			4.908.499.500	100			
4.02.002.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		780.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	780.000.000	100	12 Laporan	100	
4.02.002.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		842.400.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	842.400.000	100	12 Laporan	100	
4.02.002.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		780.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	13 Laporan	779.999.500	100	13 Laporan	100	
4.02.002.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		780.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	780.000.000	100	12 Laporan	100	
4.02.002.1.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		651.200.000	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	651.200.000	100	1 Dokumen	100	
4.02.002.1.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran		722.400.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Dokumen	722.400.000	100	12 Dokumen	100	
4.02.002.1.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		352.500.000	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	352.500.000	100	1 Dokumen	100	
4.02.002.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD		16.003.240.000			15.015.829.315	93,83			
4.02.002.1.04.02	Pendalaman Tugas DPRD		7.782.440.000	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	6.795.229.315	87,31	1 Dokumen	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
4.02.002.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan Dokumentasi Dewan		1.475.000.000	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen	1.474.800.000	99,99	1 Dokumen	100	
4.02.002.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		1.560.000.000	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	13 Orang	1.560.000.000	100	13 Orang	100	
4.02.002.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		4.882.800.000	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	30 Orang	4.882.800.000	100	30 Orang	100	
4.02.002.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		303.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5 Dokumen	303.000.000	100	5 Dokumen	100	
4.02.002.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		72.663.089.000			72.189.201.317	99,35			
4.02.002.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah		2.982.589.000	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	2.982.589.000	100	1 Laporan	100	
4.02.002.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		52.000.000	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD Yang Disusun	0 Dokumen	-	-	0 Dokumen	-	
4.02.002.1.05.03	Pelaksanaan Reses		69.628.500.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	69 Dokumen	69.206.612.317	99,39	69 Dokumen	100	
4.02.002.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		361.200.000			361.200.000	100			
4.02.002.1.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD		361.200.000	Jumlah Kode Etik Dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	361.200.000	100	1 Dokumen	100	
4.02.002.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD		113.208.946.902			109.364.118.711	96,6			
4.02.002.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		33.010.266.902	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	29.165.438.711	88,35	1 Dokumen	100	
4.02.002.1.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		4.003.400.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	4.003.400.000	100	1 Dokumen	100	
4.02.002.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		70.185.680.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 Dokumen	70.185.680.000	100	4 Dokumen	100	
4.02.002.1.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		6.009.600.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	14 Dokumen	6.009.600.000	100	14 Dokumen	100	
4.02.003	PROGRAM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPIA		115.478.760.000			115.111.760.000	99,68			
4.02.003.3.01	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		115.478.760.000			115.111.760.000	99,68			
4.02.003.3.01.01	Dialog dan Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama		64.081.360.000	Jumlah Dokumen Hasil Dialog dan Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	69 Dokumen	63.714.360.000	99,43	69 Dokumen	100	
4.02.003.3.01.02	Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus		44.390.400.000	Jumlah Dokumen Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus	69 Dokumen	44.390.400.000	100	69 Dokumen	100	
4.02.003.3.01.03	Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua		7.007.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua	12 Dokumen	7.007.000.000	100	12 Dokumen	100	
4.02.003.3.01.04	Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua	Provinsi Papua	-			-	-			
	JUMLAH		482.553.782.528			465.159.421.363	96,4			
4.02.0-00.00.02.1000	Sekretariat Majelis Rakyat Papua		54.818.851.560			53.025.964.052	96,73			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
4.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Provinsi		13.527.700.170			11.752.498.006	86,88			
4.02.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		199.840.000			199.840.000	100			
4.02.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		49.960.000			49.960.000	100			
4.02.001.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan		49.960.000			49.960.000	100			
4.02.001.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- RKA-SKPD		49.960.000			49.960.000	100			
4.02.001.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		49.960.000			49.960.000	100			
4.02.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.028.164.750			6.151.241.269	87,52			
4.02.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		7.028.164.750	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 orang	6.151.241.269	87,52	56 orang	100	
4.02.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.660.800.000			1.211.182.768	72,93			
4.02.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		500.000.000			497.925.000	99,58			
4.02.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.160.800.000			713.257.768	61,45			
4.02.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.638.895.420			4.190.233.969	90,33			
4.02.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		575.000.000	Jumlah Koordinasi dan tersedia air untuk kebutuhan Kantor dan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Tahun	220.322.489	38,32	0 Tahun	-	
4.02.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		4.063.895.420	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor	0 orang	3.969.911.480	97,69	0 orang	-	
9.02.001			-			-	-			
9.02.001.1.02			-			-	-			
9.02.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Papua	-			-	-			
9.02.001.1.08			-			-	-			
9.02.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Papua	-			-	-			
9.02.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Papua	-			-	-			
9.02.002	PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA		41.291.151.390			41.273.466.046	99,96			
9.02.002.3.02	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban		41.291.151.390			41.273.466.046	99,96			
9.02.002.3.02.01	Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota		41.291.151.390			41.273.466.046	99,96			
			54.818.851.560			53.025.964.052	96,73			
5-01.5-05.1-03.01.1000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		100.401.790.539			81.031.929.008	80,71			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
1.03.012	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		3.499.999.860			2.925.400.514	83,58			
1.03.012.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi		3.499.999.860			2.925.400.514	83,58			
1.03.012.1.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi		3.499.999.860	Jumlah RANPERDA RTRWP Papua yang mendapatkan Persetujuan Substansi dan Evaluasi serta Luas Kawasan Hutan yang diusulkan untuk dibudidayakan	2 Dokumen	2.925.400.514	83,58	2 Dokumen	100	
5.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		51.076.467.277			32.788.309.397	64,19			
5.01.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.080.875.000			1.075.334.715	99,49			
5.01.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	99.390.270	99,39	2 Dokumen	100	
5.01.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		50.000.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	49.050.000	98,1	1 Dokumen	100	
5.01.001.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		45.875.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	45.871.100	99,99	1 Dokumen	100	
5.01.001.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		50.000.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	49.900.000	99,8	1 Dokumen	100	
5.01.001.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		50.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	49.845.000	99,69	1 Dokumen	100	
5.01.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		107.500.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	107.363.000	99,87	2 Dokumen	100	
5.01.001.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		677.500.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	673.915.345	99,47	1 Dokumen	100	
5.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		40.925.383.047			22.753.104.571	55,6			
5.01.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		40.239.833.047	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 orang/bulan	22.067.745.451	54,84	180 orang/bulan	100	
5.01.001.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		155.550.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	155.464.420	99,94	1 Dokumen	100	
5.01.001.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		130.000.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	129.894.700	99,92	1 Dokumen	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI			TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)	
						KEU		KELUARAN (K)		
						Rp (7)	% (8)			% (10)
5.01.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	100.000.000	100	1 Laporan	100	(11)
5.01.001.1.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan		100.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tidak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	100.000.000	100	1 Dokumen	100	
5.01.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		100.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	100.000.000	100	1 Dokumen	100	
5.01.001.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100.000.000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	100.000.000	100	1 Dokumen	100	
5.01.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		591.506.800			581.436.402	98,3			
5.01.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		400.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	389.931.402	97,48	8 Orang	100	
5.01.001.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		191.506.800	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	191.505.000	100	100 Orang	100	
5.01.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		6.174.374.630			6.155.235.614	99,69			
5.01.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Papua	351.074.630	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	343.509.630	97,85	17 Paket	100	
5.01.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		620.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	619.941.950	99,99	1 Paket	100	
5.01.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		700.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	698.912.300	99,84	1 Paket	100	
5.01.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		1.000.000.000	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	999.735.333	99,97	1 Laporan	100	
5.01.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.755.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.753.652.281	99,95	1 Laporan	100	
5.01.001.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		748.300.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	739.484.120	98,82	1 Dokumen	100	
5.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.189.496.400			1.153.463.000	96,97			
5.01.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		73.200.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	73.200.000	100	1 Laporan	100	
5.01.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		102.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	66.000.000	64,71	1 Laporan	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.01.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.014.296.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.014.263.000	100	1 Laporan	100	
5.01.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.114.831.400			1.069.735.095	95,95			
5.01.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		114.831.400	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	113.097.000	98,49	10 Unit	100	
5.01.001.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Papua	1.000.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	956.638.095	95,66	18 Unit	100	
5.01.002	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		18.250.869.273			17.911.492.628	98,14			
5.01.002.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		7.886.636.582			7.817.430.494	99,12			
5.01.002.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		1.002.000.000	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	996.402.013	99,44	1 Dokumen	100	
5.01.002.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik		527.101.582	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	525.680.220	99,73	1 Berita Acara	100	
5.01.002.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Peringkat Daerah/Lintas Peringkat Daerah		140.800.000	Jumlah Berita Acara Forum Peringkat Daerah/Lintas Peringkat Daerah	35 Berita Acara	140.709.965	99,94	35 Berita Acara	100	
5.01.002.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		4.344.360.000	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	9 Berita Acara	4.299.234.696	98,96	9 Berita Acara	100	
5.01.002.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi		1.872.375.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPMD/RKPD)	3 Dokumen	1.855.403.600	99,09	3 Dokumen	100	
5.01.002.1.02	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		3.399.799.596			3.389.990.619	99,71			
5.01.002.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		1.537.866.566	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan)	1 Dokumen	1.529.940.142	99,48	1 Dokumen	100	
5.01.002.1.02.02	Peminaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		712.819.910	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	23 Orang	711.671.250	99,84	23 Orang	100	
5.01.002.1.02.03	Peminaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1.149.113.120	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	23 Orang	1.148.379.227	99,94	23 Orang	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
5.01.002.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		6.964.433.095			6.704.071.515	96,26			(11)
5.01.002.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi		3.394.347.040	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	3.320.835.025	97,83	4 Laporan	100	
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan			2 Laporan	100	
5.01.002.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah		499.990.000	Jumlah Dokumen Laporan	2 Dokumen	487.331.970	97,47	2 Dokumen	100	
5.01.002.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		2.570.166.055	Laporan Pemantauan dan Evaluasi	22 Dokumen	2.398.530.410	93,32	22 Dokumen	100	
5.01.002.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		499.930.000	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	497.374.110	99,49	4 Laporan	100	
5.01.003	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		24.074.454.129			23.926.398.348	99,38			
5.01.003.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		10.299.999.500			10.264.572.257	99,66			
5.01.003.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		4.500.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	4.499.969.352	100	3 Dokumen	100	
5.01.003.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		3.999.999.700	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	3.965.046.527	99,13	1 Laporan	100	
5.01.003.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		500.000.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	499.942.580	99,99	1 Laporan	100	
5.01.003.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		500.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	499.973.460	99,99	3 Dokumen	100	
5.01.003.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		299.999.800	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	299.936.390	99,98	1 Laporan	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
5.01.003.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		500.000.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRPJMMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	499.703.948	99,94	1 Laporan	100	
5.01.003.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		4.199.764.572			4.141.565.027	98,61			
5.01.003.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)		460.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	3 Dokumen	458.759.800	99,73	3 Dokumen	100	
5.01.003.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		1.074.795.607	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1.074.210.660	99,95	1 Laporan	100	
5.01.003.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan		500.000.000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	446.242.660	89,25	1 Laporan	100	
5.01.003.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		639.969.065	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRPJMMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	639.860.613	99,98	1 Laporan	100	
5.01.003.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)		425.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	3 Dokumen	424.654.090	99,92	3 Dokumen	100	
5.01.003.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		350.000.000	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	349.817.934	99,95	1 Laporan	100	
5.01.003.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		250.000.000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	248.179.990	99,27	1 Laporan	100	
5.01.003.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		499.999.900	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRPJMMD pada Bidang SDA	1 Laporan	499.839.280	99,97	1 Laporan	100	
5.01.003.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		9.574.690.057			9.520.261.064	99,43			
5.01.003.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)		804.990.675	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	3 Dokumen	804.630.060	99,96	3 Dokumen	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
5.01.003.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		1.339.996.640	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1.339.827.545	99,99	1 Laporan	100	
5.01.003.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		999.999.325	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	999.970.901	100	1 Laporan	100	
5.01.003.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		1.129.899.515	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1.129.578.581	99,97	1 Laporan	100	
5.01.003.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)		899.804.830	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	3 Dokumen	850.860.224	94,56	3 Dokumen	100	
5.01.003.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		299.999.735	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	299.272.750	99,76	1 Laporan	100	
5.01.003.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		599.999.537	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	599.725.116	99,95	1 Laporan	100	
5.01.003.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		3.499.999.800	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	3.496.395.887	99,9	1 Laporan	100	
5.05.002	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		3.500.000.000			3.480.328.121	99,44			
5.05.002.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		900.000.000			898.395.957	99,82			
5.05.002.1.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketataaksanaan		900.000.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	898.395.957	99,82	1 Laporan	100	
5.05.002.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		950.000.000			949.776.004	99,98			
5.05.002.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Provinsi Papua	250.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	249.984.840	99,99	1 Dokumen	100	
5.05.002.1.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		700.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	699.791.164	99,97	1 Dokumen	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI			TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR		
						KEU		KELUARAN			
						Rp	%			(K)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
5.05.002.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		700.000.000				682.164.590	97,45			
5.05.002.1.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		700.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen		682.164.590	97,45	1 Dokumen	100	
5.05.002.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		950.000.000				949.991.570	100			
5.05.002.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		950.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan		949.991.570	100	1 Laporan	100	
	JUMLAH		100.401.790.539				81.031.929.008	80,71			
5.02.0-00.0-00.01.1000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah		1.799.387.734.152				1.541.786.573.413	85,68			
5.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
5.02.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		93.991.378.581				68.894.219.206	73,3			
5.02.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3.611.160.000				3.238.198.020	89,67			
5.02.001.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.094.800.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1.065.607.380	97,33	1 Dokumen	100	
5.02.001.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		446.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		437.980.000	98,2	1 Dokumen	100	
5.02.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Perubahan RKA-SKPD		48.720.000	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		-	-	1 Dokumen	100	
5.02.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD		2.021.640.000	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	5 Laporan		1.734.610.640	85,8	5 Laporan	100	
5.02.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		43.766.243.100				23.384.314.657	53,43			
5.02.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		41.760.243.100	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	149 Orang/ Bulan		21.381.367.700	51,2	149 Orang/ Bulan	100	
5.02.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		687.400.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		685.555.297	99,73	1 Laporan	100	
5.02.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		1.318.600.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1.317.391.660	99,91	1 Laporan	100	
5.02.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1.249.200.000				1.133.079.767	90,7			
5.02.001.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1.249.200.000	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		1.133.079.767	90,7	2 Dokumen	100	
5.02.001.1.05	Administrasi Kepegawatan Perangkat Daerah		4.452.600.000				3.879.193.580	87,12			
5.02.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		4.452.600.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang		3.879.193.580	87,12	35 Orang	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
5.02.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		23.826.655.319			23.179.191.900	97,28			
5.02.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		427.427.100			424.020.000	99,2			
5.02.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		941.175.795	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150 Paket	936.627.720	99,52	150 Paket	100	
5.02.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		4.189.117.300	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	80025 Paket	4.187.776.801	99,97	80025 Paket	100	
5.02.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		237.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 Dokumen	236.980.000	99,99	100 Dokumen	100	
5.02.001.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		8.116.480.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8.099.876.324	99,8	1 Laporan	100	
5.02.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		6.545.400.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6.440.628.145	98,4	1 Laporan	100	
5.02.001.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		3.370.055.124	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.853.282.910	84,67	1 Dokumen	100	
5.02.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.818.000.000			1.330.000.000	47,2			
5.02.001.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2.818.000.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Boda 2)	4 Unit	1.330.000.000	47,2	4 Unit	100	
5.02.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.670.672.798			5.717.956.234	85,72			
5.02.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.929.665.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1600 Laporan	3.419.440.000	87,02	1600 Laporan	100	
5.02.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1.712.845.798	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.283.886.654	74,96	1 Laporan	100	
5.02.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.028.162.000			1.014.629.580	98,68			
5.02.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.596.847.364			7.032.285.048	92,57			
5.02.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		4.519.636.850	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	88 Unit	4.266.609.429	94,4	88 Unit	100	
5.02.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		658.520.000	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60 Unit	398.428.500	60,5	60 Unit	100	
5.02.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1.753.600.000			1.705.117.065	97,24			
5.02.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		665.090.514			662.130.054	99,55			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR		
						KEU		KELUARAN				
						Rp	%	(K)	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
5.02.002	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		1.699.563.483.571									
5.02.002.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		24.627.140.000									
5.02.002.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		3.226.000.000	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1	3.220.627.050	99,83	1	100			
5.02.002.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		3.295.400.000	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	3.285.751.350	99,71	2 Dokumen	100			
5.02.002.1.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		2.466.500.000	Jumlah Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	2.463.159.080	99,86	1 Dokumen	100			
5.02.002.1.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		1.756.000.000	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	60 Dokumen	1.753.315.000	99,85	60 Dokumen	100			
5.02.002.1.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		900.000.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Diverifikasi	60 Dokumen	898.656.000	99,85	60 Dokumen	100			
5.02.002.1.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		900.000.000	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	60 Dokumen	898.656.000	99,85	60 Dokumen	100			
5.02.002.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		4.006.800.000	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	60 Dokumen	3.366.766.610	84,03	60 Dokumen	100			
5.02.002.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD		3.911.800.000	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	60 Dokumen	3.697.590.610	94,52	60 Dokumen	100			
5.02.002.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		2.208.040.000	Jumlah Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1.536.171.380	69,57	1 Dokumen	100			
5.02.002.1.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi		1.956.600.000	Jumlah Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	0 Orang	1.628.931.184	83,25	0 Orang	-			
5.02.002.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		5.574.061.000			5.480.788.530	98,33					
5.02.002.1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota		2.413.686.000	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	9 Laporan	2.408.592.430	99,79	9 Laporan	100			
5.02.002.1.02.04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		1.538.750.000	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	9 Laporan	1.537.368.740	99,91	9 Laporan	100			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
5.02.002.1.02.12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah		1.621.625.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	9 Dokumen	1.534.827.360	94,65	9 Dokumen	100	
5.02.002.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah		14.544.457.000			13.478.847.845	92,67			
5.02.002.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		5.000.000.000			4.053.126.529	81,06			
5.02.002.1.03.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah		1.040.000.000			1.040.000.000	100			
5.02.002.1.03.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		2.441.877.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	2.431.742.950	99,58	1 Dokumen	100	
5.02.002.1.03.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		1.328.630.000	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	1.327.190.781	99,89	1 Dokumen	100	
5.02.002.1.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		900.000.000	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	820.757.216	91,2	1 Laporan	100	
5.02.002.1.03.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		771.550.000	Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	751.840.360	97,45	1 Dokumen	100	
5.02.002.1.03.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		862.400.000	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	856.200.000	99,28	1 Dokumen	100	
5.02.002.1.03.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		2.200.000.000			2.197.990.009	99,91			
5.02.002.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		8.371.370.000			8.317.455.596	99,36			
5.02.002.1.04.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		700.000.000	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	697.700.000	99,67	1 Dokumen	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
5.02.002.1.04.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		700.000.000	Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	676.885.070	96,7	3 Laporan	100	
5.02.002.1.04.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		2.908.670.000	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Laporan	2.899.234.840	99,68	3 Laporan	100	
5.02.002.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi		2.987.800.000	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	5 Dokumen	2.973.785.686	99,53	5 Dokumen	100	
5.02.002.1.04.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		1.074.900.000	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5 Dokumen	1.069.850.000	99,53	5 Dokumen	100	
5.02.002.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1.636.550.255.571			1.407.995.646.039	86,03			
5.02.002.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		1.636.550.255.571	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1.407.995.646.039	86,03	1 Laporan	100	
5.02.002.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		9.896.200.000			9.264.765.816	93,62			
5.02.002.1.06.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi		9.896.200.000	Jumlah Orang yang Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	1 Orang	9.264.765.816	93,62	1 Orang	100	
5.02.003	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		5.832.872.000			5.605.226.117	96,1			
5.02.003.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah		5.832.872.000			5.605.226.117	96,1			
5.02.003.1.01.01	Penyusunan Standar Harga		600.100.000	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	580.702.000	96,77	1 Dokumen	100	
5.02.003.1.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		1.266.800.000	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	1.205.088.806	95,13	2 Dokumen	100	
5.02.003.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah		587.792.000	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	569.388.940	96,87	1 Laporan	100	
5.02.003.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		1.694.200.000	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1.666.379.510	98,36	1 Dokumen	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI			TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)	
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)		% (10)
5.02.003.1.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		1.683.980.000	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1.583.666.861	94,04	1 Dokumen	100	(11)
JUMLAH			1.799.387.734.152			1.541.786.573.413	85,68			
5.02.0.00.00.02.1000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah		99.525.196.305			84.603.547.138	85,01			
5.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		83.988.852.405			70.389.717.420	83,81			
5.02.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		365.650.000			346.383.200	94,73			
5.02.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		270.250.000		1 Dokumen	262.223.200	97,03	1 Dokumen	100	
5.02.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Provinsi Papua	95.400.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	84.160.000	88,22	1 Dokumen	100	
5.02.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		43.572.834.522			34.007.966.351	78,05			
5.02.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		43.572.834.522	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168 Orang/Bulan	34.007.966.351	78,05	168 Orang/Bulan	100	
5.02.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		499.200.000			432.000.000	86,54			
5.02.001.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		499.200.000	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	432.000.000	86,54	11 Dokumen	91,67	
5.02.001.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		3.454.576.040			2.925.472.462	84,68			
5.02.001.1.05.08	Pemindahan Tugas ASN		210.300.000	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	8 Orang	64.233.050	30,54	4 Orang	50	
5.02.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		3.244.276.040	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	91 Orang	2.861.239.412	88,19	80 Orang	87,91	
5.02.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		10.884.251.906			10.468.109.934	96,18			
5.02.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		130.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	114.355.512	87,97	10 Paket	90,91	
5.02.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		709.842.500	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	699.910.500	98,6	1 Paket	100	
5.02.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1.057.519.106	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 Paket	993.095.230	93,91	1 Paket	100	
5.02.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		971.190.300	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	9 Paket	800.204.735	82,39	9 Paket	100	
5.02.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		16.200.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.000.000	61,73	1 Dokumen	100	
5.02.001.1.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu		450.000.000			370.026.952	82,23			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI			TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)	
						KEU		KELUARAN (K) (9)		
						Rp (7)	% (8)			% (10)
5.02.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		7.549.500.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	7.480.517.005	99,09	1 Laporan	100	(11)
5.02.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		14.150.822.000			12.389.810.913	87,56			
5.02.001.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		216.000.000	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit	215.200.000	99,63	10 Unit	100	
5.02.001.1.07.05	Pengadaan Mebel		216.000.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	212.916.315	98,57	40 Unit	100	
5.02.001.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		13.718.822.000	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	11.961.694.598	87,19	2 Unit	100	
5.02.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.611.777.437			6.030.015.440	91,2			
5.02.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.315.640.511	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.044.408.409	91,82	1 Laporan	100	
5.02.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1.493.108.608	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1.335.435.849	89,44	3 Laporan	100	
5.02.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.803.028.318	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.650.171.182	91,52	1 Laporan	100	
5.02.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.449.740.500			3.789.959.120	85,17			
5.02.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		2.007.895.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	1.790.730.581	89,18	23 Unit	92	
5.02.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		595.050.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	474.519.289	79,74	6 Unit	100	
5.02.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		727.795.500	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	143 Unit	414.242.773	56,92	72 Unit	50,35	
5.02.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1.119.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	1.110.466.477	99,24	3 Unit	100	
5.02.004	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		15.536.343.900			14.213.829.718	91,49			
5.02.004.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		15.536.343.900			14.213.829.718	91,49			
5.02.004.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		2.257.860.000	Jumlah laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	9 Laporan	2.174.647.387	96,31	9 Laporan	100	
5.02.004.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		341.150.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	338.683.400	99,28	2 Laporan	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI			TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)	
						KEU		KELUARAN (K) (9)		
						Rp (7)	% (8)			% (10)
5.02.004.1.01.05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		843.875.000			682.090.200	80,83			
5.02.004.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		3.688.395.000	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	3.246.317.164	88,01	3 Laporan	100	
5.02.004.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		4.227.757.600			3.897.914.866	92,2			
5.02.004.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Belanjaan Pajak Daerah		817.334.400			701.354.903	85,81			
5.02.004.1.01.10	Pengalihan Pajak Daerah		796.120.000			775.530.100	97,41			
5.02.004.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		1.616.261.900	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	8 Laporan	1.528.440.178	94,57	8 Laporan	100	
5.02.004.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		947.590.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	868.851.520	91,69	1 Laporan	100	
	JUMLAH		99.525.196.305			84.603.547.138	85,01			
5.03.0-00.0-00.01.1000	Badan Kepegawaian Daerah		50.714.241.980			45.993.857.308	90,69			
5.03.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		29.317.396.931			28.052.991.657	95,69			
5.03.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		801.868.831			797.603.565	99,47			
5.03.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		95.590.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 1 Dokumen	95.590.000	100	1 1 Dokumen	100	
5.03.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		84.269.981	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 1 Dokumen	84.269.981	100	1 1 Dokumen	100	
5.03.001.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		90.629.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 1 Dokumen	90.629.000	100	1 1 Dokumen	100	
5.03.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		80.769.950	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 1 Laporan	80.769.950	100	1 1 Laporan	100	
5.03.001.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		450.609.900	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 1 Laporan	446.344.634	99,05	1 1 Laporan	100	
5.03.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		15.444.032.020			14.580.629.577	94,41			
5.03.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14.729.119.540	Jumlah pegawai BKD Provinsi Papua Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	1 108 Orang/Bulan	13.899.571.223	94,37	1 108 Orang/Bulan	100	
5.03.001.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		562.327.295	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 1 Dokumen	557.281.079	99,1	1 1 Dokumen	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
5.03.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		77.477.275	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 1 Laporan	77.477.275	100	1 1 Laporan	100	
5.03.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		75.107.910	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 1 Laporan	46.300.000	61,64	1 1 Laporan	100	
5.03.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Peringkat Daerah		26.761.340			26.761.340	100			
5.03.001.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		26.761.340	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 1 Laporan	26.761.340	100	1 1 Laporan	100	
5.03.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3.903.504.478			3.867.316.558	99,07			
5.03.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		585.200.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 4 Paket	572.066.250	97,76	1 4 Paket	100	
5.03.001.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1.507.747.063	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 1 Dokumen	1.501.095.481	99,56	1 1 Dokumen	100	
5.03.001.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		225.637.025	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 1 Dokumen	221.721.314	98,26	1 1 Dokumen	100	
5.03.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		1.022.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 24 Orang	1.014.794.800	99,3	1 24 Orang	100	
5.03.001.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		336.449.380	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 100 Orang	335.541.876	99,73	1 100 Orang	100	
5.03.001.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		226.471.010	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 100 Orang	222.096.837	98,07	1 100 Orang	100	
5.03.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		6.256.758.690			6.048.478.274	96,67			
5.03.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		160.761.160	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disiapkan	1 2 Paket	159.389.850	99,15	1 2 Paket	100	
5.03.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3.507.453.755	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disiapkan	1 1 Paket	3.449.558.000	98,35	1 1 Paket	100	
5.03.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		134.138.775	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disiapkan	1 8 Paket	99.930.000	74,5	1 8 Paket	100	
5.03.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		1.051.880.000	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 1 Laporan	1.017.730.000	96,75	1 1 Laporan	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
5.03.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.402.525.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 1 Laporan	1.321.870.424	94,25	1 1 Laporan	100	
5.03.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		347.944.000			330.500.000	94,99			
5.03.001.1.07.05	Pengadaan Mebel		347.944.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 1 Paket	330.500.000	94,99	1 1 Paket	100	
5.03.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.532.127.572			1.465.368.963	95,64			
5.03.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		39.055.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 1 Laporan	-	-	1 1 Laporan	100	
5.03.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		455.657.516	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 12 Laporan	429.019.863	94,15	1 12 Laporan	100	
5.03.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.037.415.056	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 1 Laporan	1.036.349.100	99,9	1 1 Laporan	100	
5.03.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.004.400.000			936.333.380	93,22			
5.03.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		244.400.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 15 Unit	183.786.480	75,2	1 15 Unit	100	
5.03.001.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		760.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 22 Unit	752.546.900	99,02	1 22 Unit	100	
5.03.002	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		21.396.845.049			17.940.865.651	83,85			
5.03.002.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kenepegawaian ASN		4.613.252.594			4.415.287.271	95,71			
5.03.002.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		2.184.222.840	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 1 Dokumen	2.183.433.557	99,96	1 1 Dokumen	100	
5.03.002.1.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN		1.267.046.590	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 1 Laporan	1.075.385.644	84,87	1 1 Laporan	100	
5.03.002.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		301.340.400	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 1 Dokumen	301.282.830	99,98	1 1 Dokumen	100	
5.03.002.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		198.587.964	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 2 Lembaga	194.283.610	97,83	1 2 Lembaga	100	
5.03.002.1.01.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN		194.484.800	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 1 Dokumen	194.484.000	100	1 1 Dokumen	100	
5.03.002.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		273.974.400	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 1 Dokumen	272.874.400	99,6	1 1 Dokumen	100	
5.03.002.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian		193.595.600	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 1 Dokumen	193.543.230	99,97	1 1 Dokumen	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR	
						KEU		KELUARAN			
						Rp	%	(K)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
5.03.002.1.02	Mutasi dan Promosi ASN		2.972.231.131				2.143.812.333	72,13			
5.03.002.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN		1.610.136.871	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 1 Dokumen		784.158.543	48,7	1 1 Dokumen	100	
5.03.002.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		1.362.094.260	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 1 Laporan		1.359.653.790	99,82	1 1 Laporan	100	
5.03.002.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN		10.440.082.104				8.028.905.873	76,9			
5.03.002.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		7.184.361.870	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 1 Dokumen		5.438.533.471	75,7	1 1 Dokumen	100	
5.03.002.1.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN		745.447.434	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	0 300 Orang		707.353.615	94,89	0 300 Orang	-	
5.03.002.1.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		276.366.400	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 1 Laporan		273.552.490	98,98	1 1 Laporan	100	
5.03.002.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		357.194.140	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	1 100 Orang		339.953.695	95,17	1 100 Orang	100	
5.03.002.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		1.876.712.260	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	0 1 Dokumen		1.269.512.602	67,65	0 1 Dokumen	-	
5.03.002.1.04	Pemilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		3.371.279.220				3.352.860.174	99,45			
5.03.002.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		2.484.549.520	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1 80 Orang		2.481.293.040	99,87	1 80 Orang	100	
5.03.002.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai		232.361.440	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1 200 Orang		219.725.590	94,56	1 200 Orang	100	
5.03.002.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN		314.905.185	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1 70 Orang		313.074.190	99,42	1 70 Orang	100	
5.03.002.1.04.10	Evaluasi Disiplin ASN		339.463.075	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 1 Laporan		338.767.354	99,8	1 1 Laporan	100	
	JUMLAH		50.714.241.980				45.993.857.308	90,69			
5-04-0-00-00.01.1000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		67.014.411.130				62.915.115.385	93,88			
5.04.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		21.421.037.700				18.911.949.297	88,29			
5.04.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		337.400.000				327.400.000	97,04			
5.04.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		337.400.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		327.400.000	97,04	4 Dokumen	100	
5.04.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		14.135.088.200				12.164.810.706	86,06			
5.04.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		13.178.838.200	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan		11.657.810.706	88,46	0 Orang/ Bulan	-	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
5.04.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		531.250.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	332.000.000	62,49	1 Laporan	100	(11)
5.04.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		425.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	175.000.000	41,18	3 Laporan	100	
5.04.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		600.000.000			599.145.000	99,86			
5.04.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Papua	300.000.000			299.145.000	99,72			
5.04.001.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		300.000.000	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	300.000.000	100	1 Dokumen	100	
5.04.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.690.550.000			2.388.104.476	88,76			
5.04.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.600.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.600.000	100	1 Paket	100	
5.04.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Papua	700.000.000			678.543.000	96,93			
5.04.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		40.300.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.300.000	100	1 Paket	100	
5.04.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.944.650.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.663.661.476	85,55	1 Laporan	100	
5.04.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.193.900.000			2.037.382.000	92,87			
5.04.001.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2.193.900.000	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.037.382.000	92,87	1 Unit	100	
5.04.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.314.099.500			1.245.590.115	94,79			
5.04.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		844.099.500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	775.590.115	91,88	3 Laporan	100	
5.04.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		470.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	470.000.000	100	1 Laporan	100	
5.04.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		150.000.000			149.517.000	99,68			
5.04.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		150.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	149.517.000	99,68	0 Unit	-	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR		
						KEU		KELUARAN				
						Rp	(7)	%	(8)		(K)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
5.04.002	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		45.593.373.430									
5.04.002.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis		9.412.818.590									
5.04.002.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		7.812.818.590	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	120 Orang			120 Orang	100			
5.04.002.1.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		1.600.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	1 Dokumen			1 Dokumen	100			
5.04.002.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		36.180.554.840									
5.04.002.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		1.433.900.000	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	0 Orang			0 Orang	-			
5.04.002.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		1.500.000.000	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	0 Laporan			0 Laporan	-			
5.04.002.1.02.05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga		5.051.222.940	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	0 Dokumen			0 Dokumen	-			
5.04.002.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		27.695.431.900	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	0 Orang			0 Orang	-			
5.04.002.1.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		500.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	0 Dokumen			0 Dokumen	-			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR	
						KEU		KELUARAN			
						Rp	%	(K)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
5.06.0-00.0-00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama		24.880.301.139				23.735.966.996	95,4			
5.06.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		13.417.244.234				12.748.608.325	95,02			
5.06.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		149.468.710				149.467.310	100			
5.06.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		56.015.200	Jumlah Laporan RENJA	1 Dokumen		56.015.200	100	1 Dokumen	100	
5.06.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		23.557.600	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen		23.557.600	100	1 Dokumen	100	
5.06.001.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		16.728.800	Jumlah Dokumen Perubahan	1 Dokumen		16.728.000	100	1 Dokumen	100	
5.06.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		13.757.600	Jumlah Laporan Kinerja SKPD	1 Laporan		13.757.000	100	1 Laporan	100	
5.06.001.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		39.409.510	Jumlah Laporan TP2K	1 Laporan		39.409.510	100	1 Laporan	100	
5.06.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.524.359.434				6.041.759.327	92,6			
5.06.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		6.477.244.234	Jumlah Pembayaran Gaji	12 bulan		5.994.644.127	92,55	12 bulan	100	
5.06.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		23.557.600	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan		23.557.600	100	1 Laporan	100	
5.06.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		23.557.600	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan	1 Laporan		23.557.600	100	1 Laporan	100	
5.06.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		346.097.200				345.338.200	99,78			
5.06.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		93.000.000	Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia	120 Stel		92.241.000	99,18	120 Stel	100	
5.06.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		100.000.000	Jumlah Pegawai Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang		100.000.000	100	0 orang	-	
5.06.001.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		153.097.200	Jumlah Laporan	1 Laporan		153.097.200	100	1 Laporan	100	
5.06.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		4.494.790.830				4.314.230.582	95,98			
5.06.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		74.130.430	Jumlah Komponen	10 Jenis		74.130.430	100	10 Jenis	100	
5.06.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor		5.710.500	Jumlah Penyediaan Perengkapan	1 paket		-	-	0 paket	-	
5.06.001.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		225.966.137	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	30 Jenis		224.164.500	99,2	30 Jenis	100	
5.06.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		268.307.456	Jumlah Bahan Logistik	30 Jenis		266.183.621	99,21	30 Jenis	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
5.06.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		90.993.750	Jumlah Barang Cetak	30 Jenis	90.925.900	99,93	30 Jenis	100	
5.06.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		88.200.000	Jumlah Bahan Bacaan	7200 Eksemplar	88.200.000	100	7200 Eksemplar	100	
5.06.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		1.042.000.000	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.041.960.000	100	1 Laporan	100	
5.06.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.647.006.157	Jumlah Laporan Rapat	1 Laporan	2.476.189.731	93,55	1 Laporan	100	
5.06.001.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		52.476.400	Jumlah Laporan PPID	1 Laporan	52.476.400	100	1 Laporan	100	
5.06.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		544.763.842			542.845.500	99,65			
5.06.001.1.07.05	Pengadaan Mebel		289.738.600	Jumlah Pengadaan	41 unit	289.488.000	99,91	41 unit	100	
5.06.001.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		255.025.242	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	21 unit	253.357.500	99,35	21 unit	100	
5.06.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		410.650.000			410.639.237	100			
5.06.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		17.450.000	Jumlah Surat	500 Eksemplar	17.450.000	100	500 Eksemplar	100	
5.06.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		135.200.000	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	135.189.237	99,99	12 Bulan	100	
5.06.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		258.000.000	Jumlah Jasa	84 Orang	258.000.000	100	84 Orang	100	
5.06.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		947.114.218			944.328.169	99,71			
5.06.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		607.457.000	Jumlah Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang yang Dipelihara	16 Unit	606.264.000	99,8	16 Unit	100	
5.06.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		112.440.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 paket	112.440.000	100	40 paket	100	
5.06.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		227.217.218	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	3 unit	225.624.169	99,3	3 unit	100	
5.06.002	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN		11.463.056.905	Jumlah Pos Lintas Batas yang terpelihara	1 unit			1 unit	100	
5.06.002.1.01	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama		3.799.999.786			10.987.358.671	95,85			
						3.725.302.859	98,03			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
5.06.002.1.01.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah		3.799.999.786	Jumlah Laporan BLOM	1 Laporan	3.725.302.859	98,03	1 Laporan	100	
5.06.002.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan		6.663.057.119			6.364.348.912	95,52			
5.06.002.1.02.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan		1.472.352.219	Jumlah Laporan Koordinasi Pembangunan Pos Lintas Batas	1 Laporan	1.407.906.567	95,62	1 Laporan	100	
5.06.002.1.02.02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan		2.595.352.450	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	1 Laporan	2.482.094.930	95,64	1 Laporan	100	
5.06.002.1.02.03	Fasilitas Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara		2.595.352.450	Jumlah Laporan Pembinaan Pelintas Batas	1 Laporan	2.474.347.415	95,34	1 Laporan	100	
5.06.002.1.03	Monitoring dan Evaluasi		1.000.000.000			897.706.900	89,77			
5.06.002.1.03.03	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1.000.000.000	Jumlah Laporan Pengawasan	1 Laporan	897.706.900	89,77	1 Laporan	100	
			24.880.301.139			23.735.966.996	95,4			
5.07.0-00.0-00.01.0000	Badan Penghubung Daerah		18.379.902.529			17.468.414.404	95,04			
5.07.001	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		15.933.502.529			15.073.825.089	94,6			
5.07.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah		170.000.000			170.000.000	100			
5.07.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		35.000.000			35.000.000	100			
5.07.001.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		35.000.000			35.000.000	100			
5.07.001.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		35.000.000			35.000.000	100			
5.07.001.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		35.000.000			35.000.000	100			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
5.07.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		15.000.000			15.000.000	100			
5.07.001.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15.000.000			15.000.000	100			
5.07.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.836.469.529			3.302.489.541	86,08			
5.07.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.761.469.529			3.227.489.541	85,8			
5.07.001.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		15.000.000			15.000.000	100			
5.07.001.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		15.000.000			15.000.000	100			
5.07.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		15.000.000			15.000.000	100			
5.07.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		15.000.000			15.000.000	100			
5.07.001.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		15.000.000			15.000.000	100			
5.07.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		15.000.000			14.642.000	97,61			
5.07.001.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		15.000.000			14.642.000	97,61			
5.07.001.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		-			-	-			
5.07.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.288.450.000			1.261.215.017	97,89			
5.07.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		406.500.000			406.432.050	99,98			
5.07.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		881.950.000			854.782.967	96,92			
5.07.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		5.850.145.000			5.845.974.351	99,93			
5.07.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		170.000.000			169.686.500	99,82			
5.07.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		412.500.000			412.391.781	99,97			
5.07.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1.470.860.000			1.469.394.523	99,9			
5.07.001.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material		214.785.000			214.252.750	99,75			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
5.07.001.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		1.082.000.000			1.081.537.049	99,96			
5.07.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.500.000.000			2.498.711.748	99,95			
5.07.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.119.720.000			1.088.635.275	97,22			
5.07.001.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Papua	1.119.720.000			1.088.635.275	97,22			
5.07.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.213.938.000			1.015.585.193	83,66			
5.07.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		42.350.000			25.268.500	59,67			
5.07.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		330.288.000			152.216.693	46,09			
5.07.001.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		32.500.000			32.500.000	100			
5.07.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		808.800.000			805.600.000	99,6			
5.07.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.319.780.000			2.255.503.712	97,23			
5.07.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		506.880.000			502.587.593	99,15			
5.07.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		405.600.000			352.112.225	86,81			
5.07.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		432.300.000			426.787.350	98,72			
5.07.001.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		575.000.000			574.747.050	99,96			
5.07.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		400.000.000			399.269.494	99,82			
5.07.001.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		-			-	-			
5.07.001.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		-			-	-			
5.07.001.1.13	Facilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		-			-	-			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR	
						KEU		KELUARAN			
						Rp	%	(K)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
5.07.001.1.13.01	Penyiapan Materi Pimpinan		-				-				
5.07.001.1.13.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Provinsi Papua	-				-				
5.07.001.1.14	Fasilitas Keprotokolan		120.000.000				99,82				
5.07.001.1.14.01	Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		120.000.000				99,82				
5.07.002	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		2.446.400.000				97,88				
5.07.002.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		2.446.400.000				97,88				
5.07.002.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat		222.400.000				98,84				
5.07.002.1.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat		452.500.000				94,36				
5.07.002.1.01.03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya		479.750.000				96,21				
5.07.002.1.01.04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya		1.291.750.000				99,57				
	JUMLAH		18.379.902.529				95,04				
6.01.0-00.00.01.1000	Inspektorat		66.841.931.213				88,52				
6.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		31.194.833.213				92,22				
6.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		19.341.931.213				91,74				
6.01.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		19.341.931.213		92 Orang/ Bulan		91,74	92 Orang/ Bulan	100		
6.01.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4.820.000.000		1 Paket		96,23	1 Paket	100		
6.01.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		276.000.000		1 Paket		96,67	1 Paket	100		
6.01.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		4.544.000.000		92 Orang		96,21	92 Orang	100		
6.01.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		4.135.406.600				99,02				
6.01.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		536.550.000		21 Paket		97,91	21 Paket	100		
6.01.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		502.400.000		1 Paket		100	1 Paket	100		
6.01.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		586.066.600		2 Paket		99,64	2 Paket	100		

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.01.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		42.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	38.650.000	92,02	2 Dokumen	100	
6.01.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		521.640.000	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	521.247.326	99,92	1 Laporan	100	
6.01.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.946.750.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.923.267.240	98,79	1 Laporan	100	
6.01.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.052.700.000			1.052.550.000	99,99			
6.01.001.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1.052.700.000	Unit	6 6	1.052.550.000	99,99	6 6	100	
6.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.175.515.400			639.797.608	54,43			
6.01.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		10.725.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.664.960	99,44	1 Laporan	100	
6.01.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		203.990.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	136.052.648	66,7	1 Laporan	100	
6.01.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		960.800.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	493.080.000	51,32	3 Laporan	75	
6.01.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		669.280.000			597.764.755	89,31			
6.01.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		98.500.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	84.878.022	86,17	9 Unit	100	
6.01.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		440.880.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	382.986.733	86,87	30 Unit	100	
6.01.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		129.900.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	129.900.000	100	2 Unit	100	
6.01.002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		24.068.468.000			20.969.857.177	87,13			
6.01.002.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		20.381.818.000			18.834.487.367	92,41			
6.01.002.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		5.707.850.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	9 Laporan	5.554.982.250	97,32	9 Laporan	100	
6.01.002.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		3.403.450.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6 Laporan	3.390.712.419	99,63	6 Laporan	100	
6.01.002.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja		88.750.000	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	52.950.000	59,66	1 Laporan	100	
6.01.002.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan		4.343.650.000	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	12 Laporan	4.053.377.354	93,32	12 Laporan	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.01.002.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota		1.495.450.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	2 Laporan	1.231.414.694	82,34	2 Laporan	100	
6.01.002.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal		969.040.000	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	941.010.520	97,11	3 Kesepakatan	100	
6.01.002.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP		4.373.628.000	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	8 Dokumen	3.610.040.130	82,54	7 Dokumen	87,5	
6.01.002.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		3.686.650.000			2.135.369.810	57,92			
6.01.002.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		465.600.000	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3 Laporan	267.035.000	57,35	2 Laporan	66,67	
6.01.002.1.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		3.221.050.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	7 Laporan	1.868.334.810	58	5 Laporan	71,43	
6.01.003	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		11.578.630.000			9.432.288.131	81,46			
6.01.003.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		446.500.000			-	-			
6.01.003.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		446.500.000	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	-	-	0 Rekomendasi	-	
6.01.003.1.02	Pendampingan dan Asistensi		11.132.130.000			9.432.288.131	84,73			
6.01.003.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		1.277.130.000	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	20 Perangkat Daerah	918.414.393	71,91	17 Perangkat Daerah	85	
6.01.003.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		809.980.000	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	34 Perangkat Daerah	576.185.500	71,14	34 Perangkat Daerah	100	
6.01.003.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		9.045.020.000	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8 Kegiatan	7.937.688.238	87,76	7 Kegiatan	87,5	
6.01.003.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		-	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	0 Perangkat Daerah	-	-	0 Perangkat Daerah	-	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	34 Perangkat Daerah			0 Perangkat Daerah	-	
			66.841.931.213			59.170.294.465			88,52	
				JUMLAH						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR		
						KEU		KELUARAN				
						Rp	%	(K)	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
8-01-0-00-00.01-0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		39.352.794.485				32.419.498.331	82,38				
8.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		15.836.901.700				13.102.856.209	82,74				
8.01.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		104.947.109				90.952.000	86,66				
8.01.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		34.100.255	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		33.270.000	97,57	1 Dokumen	100		
8.01.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		31.757.444	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		30.487.000	96	2 Dokumen	100		
8.01.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		39.089.410	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		27.195.000	69,57	2 Laporan	100		
8.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.867.767.508				5.990.315.428	87,22				
8.01.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		6.844.741.700	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/ Bulan		5.967.293.620	87,18	48 Orang/ Bulan	92,31		
8.01.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		23.025.808	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		23.021.808	99,98	2 Laporan	100		
8.01.001.1.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah		2.500.780.465				1.653.637.854	66,12				
8.01.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		227.500.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	56 Paket		227.500.000	100	56 Paket	100		
8.01.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		120.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		-	-	0 Orang	-		
8.01.001.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		440.751.095	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		413.408.384	93,8	95 Orang	95		
8.01.001.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		1.712.529.370	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang		1.012.729.470	59,14	125 Orang	83,33		
8.01.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		5.187.408.618				4.912.244.166	94,7				
8.01.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		15.926.900	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	115 Buah		15.800.500	99,21	115 Buah	100		
8.01.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		374.000.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Unit		364.080.000	97,35	16 Unit	100		
8.01.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		257.870.350	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Jenis		257.862.403	100	20 Jenis	100		

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI			TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)	
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)		% (10)
8.01.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		307.200.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	500 Buku	307.200.000	100	500 Buku	100	(11)
8.01.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		132.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Tabloid	132.000.000	100	2 Tabloid	100	
8.01.001.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material		59.511.368	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Jenis	56.981.900	95,75	20 Jenis	100	
8.01.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		360.000.000	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100 Laporan	360.000.000	100	100 Laporan	100	
8.01.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3.650.900.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	3.388.319.363	92,81	78 Laporan	97,5	
8.01.001.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		30.000.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	30.000.000	100	1 Dokumen	100	
8.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		271.020.000			140.410.000	51,81			
8.01.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		17.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Surat	15.750.000	92,65	1000 Surat	100	
8.01.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		129.120.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	-	-	0 Laporan	-	
8.01.001.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		124.900.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	124.660.000	99,81	1 Laporan	100	
8.01.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		904.978.000			315.296.761	34,84			
8.01.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		904.978.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	315.296.761	34,84	12 Unit	85,71	
8.01.002	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		2.190.353.610			1.543.229.772	70,46			
8.01.002.1.01	Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		2.190.353.610			1.543.229.772	70,46			
8.01.002.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1.104.347.080	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	560 Orang	741.406.810	67,14	420 Orang	75	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
8.01.002.1.01.06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		1.086.006.530	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Dokumen	801.822.962	73,83	1 Dokumen	100	
8.01.003	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		16.902.184.399			14.944.313.153	88,42			
8.01.003.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		16.902.184.399			14.944.313.153	88,42			
8.01.003.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		999.950.444	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang	5 dokumen laporan	999.307.000	99,94	5 dokumen laporan	100	
8.01.003.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		299.536.530	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 dokumen	292.129.500	97,53	1 dokumen	100	

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
8.01.003.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		15.602.697.425	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	450 Orang	13.652.876.653	87,5	450 Orang	100	
8.01.004	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		781.455.498			398.377.342	50,98			
8.01.004.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		781.455.498			398.377.342	50,98			
8.01.004.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		781.455.498	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, dan Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	180 Orang	398.377.342	50,98	135 Orang	75	
8.01.005	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		1.287.396.694			968.167.425	75,2			
8.01.005.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		1.287.396.694			968.167.425	75,2			
8.01.005.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		1.287.396.694	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	160 Orang	968.167.425	75,2	120 Orang	75	
8.01.006	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		2.354.502.584			1.462.554.430	62,12			
8.01.006.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		2.354.502.584			1.462.554.430	62,12			

KODE (1)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	PAGU DPA (4)	TOLOK UKUR KELUARAN (5)	TARGET KINERJA KELUARAN (6)	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR (11)
						KEU		KELUARAN		
						Rp (7)	% (8)	(K) (9)	% (10)	
8.01.006.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		1.376.159.545	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Ora Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 Orang	1.064.764.050	77,37	113 Orang	75,33	
8.01.006.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		978.343.039	Jumlah peserta sosialisasi FGD penyusunan peta rawan konflik, FGD Mitigasi Daerah Rawan Konflik dan FGD Rapat Koordinasi Pengawasan Orang asing	150 orang	397.790.380	40,66	113 orang	75,33	
	JUMLAH		39.352.794.485			32.419.498.331	82,38			